



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 44
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 144);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 147);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor Nomor 152);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
36. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 12);
37. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Agustus 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA SEMARANG NOMOR 44 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Situasi geopolitik global dari awal tahun 2022 yang dinamis, ikut berpengaruh terhadap situasi dan dinamika pembangunan nasional dan daerah. Setelah mulai pulih dari pandemi Covid-19, dunia kembali menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, yang wujud nyatanya adalah munculnya ketidakpastian akan ketersediaan dan harga komoditas pangan global. Ketegangan yang terjadi akibat perang yang berkepanjangan berimbas bagi dunia termasuk Indonesia, mulai dari sektor pangan, energi, hingga inflasi. Dengan adanya dinamika tersebut, serta dengan adanya perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan termasuk di Kota Semarang. Dalam konteks perencanaan pembangunan, hal ini juga menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penyesuaian terhadap permasalahan serta isu-isu strategis terkini.

Pemerintah Kota Semarang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RPJMD yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan RKPD Tahun 2023 melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pada tahun 2023 perlu disusun perubahan terhadap RKPD tahun 2023 sebagai akibat dari dinamika perekonomian dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian baik dalam pendapatan maupun belanja daerah pada tahun berjalan. Selain itu, perubahan RKPD juga perlu dilakukan untuk menyikapi perkembangan isu dan permasalahan aktual yang muncul di tahun 2023. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian hasil sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 juga menjadi dasar untuk penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023. Implikasi yang ditimbulkan dari perubahan tersebut adalah diperlukannya penyesuaian terhadap target pendapatan serta pagu indikatif. Di samping itu, penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2023 juga perlu dilakukan. Perubahan dokumen RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

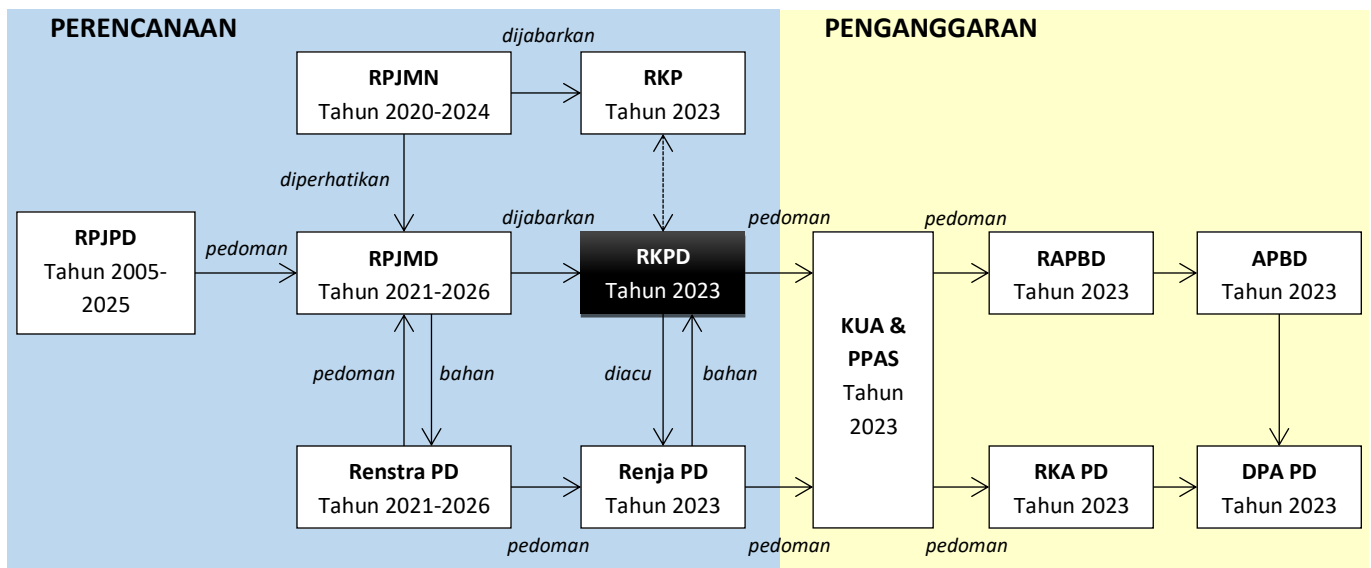
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
26. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
27. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 12).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam proses pembangunan diperlukan suatu pedoman guna memastikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pedoman yang digunakan menurut jangka waktunya dibagi atas dokumen jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang atau RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang dalam penyusunannya juga memperhatikan RPJMN. Selanjutnya, RPJMD menjadi bahan penyusunan Renstra PD yang kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja PD. RPJMD sendiri dijabarkan ke dalam RKPD yang disusun secara simultan dengan penyusunan Renja PD. RKPD dan Renja PD beserta perubahannya kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS yang digunakan sebagai acuan untuk RAPBD sampai dengan disahkan menjadi APBD. Untuk lebih jelasnya, hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD Tahun 2023

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2023 merupakan hal penting untuk dipastikan pelaksanaannya. Selain itu, dalam rangka menjaga keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi serta dalam rangka penyesuaian kebijakan terhadap kondisi dan isu strategis terkini dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, diperlukan adanya penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 bertujuan untuk mengakomodir perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan penyesuaian arah kebijakan berdasarkan evaluasi hasil capaian pembangunan triwulan II untuk menjadi pedoman kepada seluruh *stakeholders* pembangunan daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah di sisa tahun 2023, memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Perubahan Tahun 2023. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan program-program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang di Tahun 2023;
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2023;
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023; dan
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kota Semarang 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD, yang terdiri dari: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Dokumen RKPD.
- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2023**
Memuat Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua dengan tetap memperhatikan dokumen RPJMD.
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat penjelasan tentang capaian kondisi ekonomi tahun 2022 dan perkiraan capaian sampai dengan akhir tahun 2023, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah Kota Semarang yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- BAB VI PENUTUP**









BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023








Perubahan RKPD dilakukan salah satunya dengan melihat hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Pada Perubahan RKPD Tahu 2023 ini, dilakukan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, Indikator Kinerja Daerah, serta Indikator Kinerja Program. Hasil dari evaluasi capaian sampai dengan triwulan II menjadi dasar dilaksanakannya perubahan RKPD Tahun 2023, dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang serta penanganan isu dan masalah aktual yang muncul selama triwulan 2 tahun 2023.

2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama



Indikator Kinerja Utama menggambarkan kinerja Kepala Daerah yang termuat dalam dokumen perencanaan strategis yang diyakini mampu menjawab permasalahan dan isu di daerah, dan memberi daya ungkit terhadap perwujudan visi dan misi pembangunan. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Semarang kondisi sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Semarang
Kondisi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD
			Target (Induk)	Realisasi s.d Triwulan II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	83,60-84,00	84,08	100%		Koord Bappeda (Capaian 2022)
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	Persen	55,17	80,52	100%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,3 - 8,6	7,6	100%		Koord Dinas Tenaga Kerja (Capaian 2022)
4	Angka Kemiskinan	Persen	4,04-4,24	4,25	99,76%		Koord Bappeda (Capaian 2022)
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Nilai	5,6-6,1	5,73	100%		Koord Bappeda (Capaian 2022)
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH)	Juta Rupiah	103,54	137,12	100%		Koord Bappeda (Capaian 2022)
7	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059 juta Rp)	3,802 % (13.950.164 juta Rp)	54,31%		Koord DPMPSTSP
8	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	Persen	6	-1,41	0 %		Koord Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Indeks Demokrasi	Nilai	72,4	95,35	100%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD
			Target (Induk)	Realisasi s.d Triwulan II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(Capaian 2022)
10	Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	95,70	95,93	100%		Koord DP3A (Capaian 2022)
11	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persen	10,52	5,40	100%		Satpol, 16 Kec
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	67,01	51,32	76,59%		DLH (Capaian 2022)
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	Nilai Indeks	78,49	75,32	95,97%		Koord Bappeda
14	Persentase Kawasan Banjir dan Rob terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	3,32	3,48	95,18%		Koord DPU (Capaian 2022)
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	74,00	72,68	98,22%		Koord Setda (Capaian 2022)
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	88	88,63	100%		Koord Setda (Capaian 2022)
17	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%		Koord Inspektorat (Capaian 2022)

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023  : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Dari sebanyak 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Semarang yang dijadikan ukuran keberhasilan, sampai dengan triwulan 2 terdapat 10 indikator atau sebesar 58,8% yang telah mencapai target tahun 2023, dimana delapan indikator diantaranya masih menggunakan data kinerja tahun 2022 (karena pengukuran dan publikasinya dilakukan satu kali setiap tahun dan publikasi hasilnya pada periode tahun setelahnya). Sedangkan 6 indikator lainnya mempunyai predikat Akan Tercapai atau mempunyai tingkat pencapaian kinerja dalam rentang 40% sampai dengan 99,99% dari target tahun 2023, karena memang evaluasi ini masih dalam proses pencapaiannya (On Going evaluasi).

Secara umum pencapaian IKU termasuk dalam kategori baik, namun demikian masih terdapat satu indikator yang mempunyai predikat perlu upaya keras, yaitu terkait persentase peningkatan kunjungan wisata. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 jumlah kunjungan wisata sejumlah 2.444.086 orang yang terdiri dari 2.440.965 dari wisatawan nusantara dan sebanyak 3.121 berasal dari wisatawan mancanegara. Jika dibandingkan jumlah kunjungan wisata pada triwulan 2 tahun 2022 dengan kunjungan wisata pada triwulan 2 tahun 2023, terjadi pertumbuhan negatif sebesar 1,41%. Secara keseluruhan kunjungan wisata tahun 2022 sebesar 5.343.151 kunjungan, yang terdiri dari 5.338.233 kunjungan dari wisatawan nusantara











dan 4.918 kunjungan dari wisatawan mancanegara. Untuk itu perlu kiranya menjadikan sektor kepariwisataan menjadi sektor andalan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pemulihan ekonomi daerah pasca covid-19, diantaranya melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, meningkatkan pemasaran paket wisata, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya .

2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah di Kota Semarang. Adapun kinerja sampai dengan kondisi triwulan II tahun 2023 pada indikator kinerja daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Kondisi Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab	
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,35	0,10	100,00%		Bappeda	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1	5,73	93,93%		Bappeda (Capaian 2022)	
3	Laju inflasi	%	2,5 ±1	2,95	82,00%		Bappeda	
4	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,77	29,75	100,00%		Dinperdag/ Bappeda (Capaian 2022)	
5	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,70	28,85	100,00%		Dinperin/ Bappeda (Capaian 2022)	
	Fokus Kesejahteraan Sosial							
6	Indeks Pembangunan Manusia	nilai indeks	83,60-84,00	84,08	100,00%		Bappeda (Capaian 2022)	
	a	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp/thn	15.800	16.047	100,00%		Bappeda (Capaian 2022)
	b	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,49	77,69	100,00%		Dinkes (Capaian 2022)
	c	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,59	10,80	100,00%		Disdik (Capaian 2022)
	d	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,58	15,54	99,74%		Disdik (Capaian 2022)
7	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24	4,25	94,80%		Dinsos/ Bappeda	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
							(Capaian 2022)
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6	7,60	100,00%		Disnaker/ Bappeda (Capaian 2022)
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,96	99,96	100,00%		Disdik
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
10	Tingkat kearifan budaya lokal	%	55,17	80,52	100,00%		Disbudpar
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Layanan Urusan Wajib						
	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1.01	Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	89,53	89,53%		Disdik
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)						
	a Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	103,45	100,00%		Disdik
	b Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	95,59	95,59%		Disdik
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	84,12	84,12%		Disdik
4	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	57,14	72,80	100,00%		Disdik
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	51,43	56,75	100,00%		Disdik
6	Angka Partisipasi Kasar						
	a PAUD (3-6 tahun)	%	81,70	58,03	71,03%		Disdik
	b SD/MI	%	100	103,71	100,00%		Disdik
	c SLTP/MTs	%	100	98,95	98,95%		Disdik
7	Angka Partisipasi Murni						

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab	
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
	a	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	90,41	100,00%		Disdik
	b	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80	73,11	91,39%		Disdik
8		Angka Putus Sekolah						
	a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	100,00%		Disdik
	b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,03	0,01	100,00%		Disdik
9		Angka Kelulusan						
	a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	97,22	97,22%		Disdik
	b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,9	100,00	100,00%		Disdik
10		Angka Melanjutkan (AM)						
	a	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	95,05	95,05%		Disdik
11		Fasilitas Pendidikan						
	a	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	96	65,00	67,71%		Disdik
	b	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,2	80,00	80,65%		Disdik
12		Rasio Guru / Murid perkelas Rata-rata						
	a	Rasio guru / murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18	01:18	100,00%		Disdik
	b	Rasio guru / murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32	01:20:32	100,00%		Disdik
	c	Rasio guru / murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	01:17	01:17	100,00%		Disdik
	d	Rasio guru / murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30	01:17:30	100,00%		Disdik
13		Guru berkualifikasi S1/D-IV						
	a	Jenjang PAUD	%	98,4	81,33	82,65%		Disdik
	b	Jenjang SD/MI	%	99	93,33	94,27%		Disdik
	c	Jenjang SMP/MTs	%	100	88,57	88,57%		Disdik
1.02		Kesehatan						
	1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,37	0,32	86,49%		Dinkes
	2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	90,60	90,63	100,00%		Dinkes
	3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100	43,92	43,92%		Dinkes
	4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100	42,84	42,84%		Dinkes
	5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100	43,18	43,18%		Dinkes
	6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100	59,97	59,97%		Dinkes

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	100	53,76	53,76%		Dinkes
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	100	56,33	56,33%		Dinkes
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	100	67,48	67,48%		Dinkes
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	100	50,64	50,64%		Dinkes
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100	64,13	64,13%		Dinkes
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100	62,79	62,79%		Dinkes
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	100	51,86	51,86%		Dinkes
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	100	47,01	47,01%		Dinkes
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	(per 100.000 kelahiran hidup)	71,33	67,25	100,00%		Dinkes
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,07	5,60	100,00%		Dinkes
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/100,000 pddk	6,90	6,50	100,00%		Dinkes
18	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	%	77	97,30	100,00%		RSWN
19	Nilai Kinerja BLUD Sehat	%	A+	87,50	92,11%		RSWN
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	%	96,17	93,74	97,47%		Disperkim
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	99,17	97,25	98,06%		Disperkim
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	83,00	81,00	97,59%		DPU
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 8 jiwa)	%	100	98,95	98,95%		Disperkim
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air	%	90,86	98,94	100,00%		Disperkim

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
	limbah domestik) layak dan aman (SPM)						
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	93,50	92,52	98,95%		DPU
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	62,1	36,40	58,62%		Distaru
8	Persentase luas sawah beririgasi	%	43	43,00	100,00%		DPU
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	36,14	19,62	54,29%		Distaru
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	52	76,62	52,65%		Disperkim
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	27	26,18	96,96%		DLH
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100 (13 Unit)	8,00	61,54%		Disperkim
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100 (84 Unit)	39,29% (33 unit)	39,29%		Disperkim
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	48 (48% x 431,54 Ha = 207,144 Ha)	23,38	48,71%		Disperkim
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	1.000	1.122	100,00%		Disperkim
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100 (10 perumahan)	100 (25 perumahan)	100,00%		Disperkim
6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/1000 penduduk	18,49/1000	40,05	100,00%		Disperkim
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100	50,00	50,00%		Satpol PP
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	66	64,00	96,97%		Satpol PP
3	Indeks Resiko Bencana	%	111	50,00	45,05%		BPBD
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	50,00	50,00%		BPBD
5	Persentase warga Negara yang meperoleh layanan pencegahan dan	%	100	50,00	50,00%		BPBD

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
	kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)						
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	50,00	50,00%		BPBD
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	100	100,00	100,00%		Dinas Damkar
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	88,31	87,06	98,58%		Dinas Damkar
1.06	Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100	100,00	100,00%		Dinsos/ Bappeda
	a Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100,00	100,00%		Dinsos
	b Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100,00	100,00%		Dinsos
	c Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan	%	100	100,00	100,00%		Dinsos
	d Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100,00	100,00%		Dinsos
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100,00	100,00%		Dinsos
	a Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100,00	100,00%		Dinsos
	b Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan sosial	%	100	100,00	100,00%		Dinsos
	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
2.07	Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	65	80,95	100,00%		Disnaker
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	56 (150 kasus)	75,00	100,00%		Disnaker
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,65	59,38	100,00%		DP3A

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,012	0,01	83,33%		DP3A
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	14,24	12,42	87,22%		DP3A
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100,00	100,00%		DP3A
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	95,70	73,93	77,25%		DP3A
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	64,58	70,59	100,00%		DP3A
7	Rasio KDRT	%	0,025	0,01	100,00%		DP3A
8	Persentase LPM aktif	%	100	100,00	100,00%		DP3A
2.09	Pangan						
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	254,32	367,51	100,00%		D, Ketahanan Pangan
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	4	3,40	100,00%		D, Ketahanan Pangan
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89	91,20	100,00%		D, Ketahanan Pangan
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	81,5	87,31	100,00%		D, Ketahanan Pangan
2.10	Pertanahan						
1	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	58	12,79	22,05%		Distaru
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	60	11,08	18,47%		Distaru
2.11	Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,01	51,32	76,59%		DLH
a	Peningkatan Indeks Kualitas Air	poin	52,43	33,76	64,39%		DLH
b	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	poin	95,60	77,38	80,94%		DLH
c	Peningkatan Indeks Kualitas lahan	poin	56,50	33,28	58,90%		DLH
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota						
a	Persentase pengurangan timbulan sampah	%	27	26,18	96,96%		DLH
b	Persentase penanganan timbulan sampah	%	72	72,88	100,00%		DLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	85,60	75,00	87,62%		DLH

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	71,00	64,72	91,15%		Dispendukca pil
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,20	98,08	100,00%		Dispendukca pil
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	%	100	100,00	100,00%		Dispendukca pil
4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	100	100	100,00%		Dispendukca pil
5	Perekaman KTP elektronik	%	99,40	98,13	98,72%		Dispendukca pil
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase LPM aktif	%	100	100	100,00%		DP3A
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	Rasio	2,00	1,75	100,00%		Disdalduk KB
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,56	8,49	100,00%		Disdalduk KB
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,14	77,20	100,00%		Disdalduk KB
2.15	Perhubungan						
1	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	14.554.892	6.306.174	43,32%		Dishub
2	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	3	3,00	100,00%		Dishub
3	Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah	1.970	1.075	54,57%		Dishub
2.16	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100,00	100,00%		Diskominfo
2	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100,00	100,00%		Diskominfo
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	75,33	79,77	100,00%		Diskominfo
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung	%	100	80,00	80,00%		Diskominfo

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
	smart city sesuai dengan Masterplan						
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	100	100,00	100,00%		Diskominfo
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase koperasi aktif	%	76,50	76,70	100,00%		Diskop UM
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	13	17,11	100,00%		Diskop UM
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	54	37,33	69,13%		Diskop UM
2.18	Penanaman Modal						
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	492	373,00	75,81%		DPM PTSP
2	Persentase peningkatan investasi	%	7	3,802 %	54,31%		DPM PTSP
3	Nilai investasi	Rp (dln juta)	25.684.059	13.950.164	54,31%		DPM PTSP
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	38	38,00	100,00%		Dispora
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,95	0,95	100,00%		Dispora
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,04	0,04	100,00%		Dispora
2.20	Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100,00	100,00%		Diskominfo
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100	50,00	50,00%		Diskominfo
2.21	Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	88,06	88,06%		Diskominfo
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	75	86,84	100,00%		Diskominfo
2.22	Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	77,85	77,78	99,91%		Disbudpar

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	435	400	91,95%		Disbudpar
3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461	461	100,00%		Disbudpar
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	10	10	100,00%		Disbudpar
5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	32,5	50,00	100,00%		Disbudpar
2.23	Perpustakaan						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	47	67	100,00%		D. Arsip dan Perpustakaan
2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	28	42,60	100,00%		D, Arsip dan Perpustakaan
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	59	59,80	100,00%		D. Arsip dan Perpustakaan
2.24	Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	79	79,02	100,00%		D. Arsip dan Perpustakaan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	58	58,05	100,00%		D. Arsip dan Perpustakaan
3	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	149.500	74.400	49,77%		D. Arsip dan Perpustakaan
	Layanan Urusan Pilihan						
3.01	Pariwisata						
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	6 (3.883.073)	3,77 (2.440.965)	62,83%		Disbudpar
2	Tingkat hunian akomodasi	%	41,24	56,41	100,00%		Disbudpar
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	19	9,52	50,11%		Disbudpar
3.02	Pertanian						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/ tahun	6,38	6,94	100,00%		D. Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5	-88,32	100,00%		D. Pertanian
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	Kelurahan	132	177	100,00%		D. Pertanian

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab	
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
	4	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	Kawasan	5	4,00	80,00%		D. Pertanian
3.03		Perdagangan						
	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	45	20,00	44,44%		D. Perdagangan
	2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	81,0	33,08	40,84%		D. Perdagangan
	3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	64	32,00	50,00%		D. Perdagangan
	4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90	90,00	100,00%		D. Perdagangan
3.04		Perindustrian						
	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	0,50	0,20	40,00%		D. Perindustrian
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	50,00	50,00%		D. Perindustrian
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	10	5	50,00%		D. Perindustrian
	4	Sentra produk unggulan (kawasan - Logam)	Sentra	1	1,00	100,00%		D. Perindustrian
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	12,5	3,50	28,00%		D. Perindustrian
3.05		Kelautan dan Perikanan						
	1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: Perikanan Dalam Angka)	Ton	6.901,85	3.450,93	50,00%		D.Perikanan
	2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita /thn	40,18	40,18	100,00%		D.Perikanan
	3	Produksi Ikan Olahan	Ton/ tahun	17.557	8778,50	50,00%		D.Perikanan
	4	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/ tahun	3.055,90	1.527,95	50,00%		D.Perikanan
	5	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/ tahun	3.845,95	1.922,98	50,00%		D.Perikanan
		Fungsi Penunjang						

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab	
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
4.01			Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan					
	1		Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2,00	100,00%	 Bappeda
	2		Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2	1,00	50,00%	 Bappeda
	3		Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100	100,00	100,00%	 Bappeda
	4		Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100	100,00	100,00%	 Bappeda
	5		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	0,00	0,00%	 Bappeda
	6		Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	35,29	90,2	100,00%	 Bappeda
	7		Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	64	60,79	94,98	 Bappeda
4.02			Keuangan					
	1		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57	61,04	100,00%	 Bapenda
	2		Persentase Silpa terhadap APBD	%	1,22	6,02	0%	 BPKAD (Capaian 2022)
4.03			Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
	1		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	83,00	83,84	100,00%	 BKPP (Capaian 2022)
	2		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	239,43	137,89	57,59%	 BKPP
	3		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	19,19	19,19	100,00%	 BKPP
	4		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	53,00	53,00%	 BKPP
	5		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,18	2,18	52,15%	 BKPP
	6		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	85	56,00	65,88%	 BKPP
4.04			SEKRETARIAT DAERAH					
	1		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	74,00	72,68	98,22%	 Badan Organisasi (Capaian 2022)
	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	88,00	88,63	100,00%	 Badan Organisasi (Capaian 2022)
	3		Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai / Predikat	>74/BB	70,35	95,07%	 Badan Kerjasama dan Otda

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						(Capaian 2022)
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,46/ST	3,44	99,41%		Badan Kerjasama dan Otda (Capaian 2022)
4.05	SEKRETARIAT DPRD						
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	50,00	50,00%		Sekretariat DPRD
4.06	INSPEKTORAT DAERAH						
1	Indeks Penerapan Managemen Resiko	Indeks	2	2,82	100,00%		Inspektorat (Capaian 2022)
2	Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	Leveling	3,04	3,01	99,01%		Inspektorat (Capaian 2022)
3	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini	WTP	WTP	100,00%		Inspektorat (Capaian 2022)
4	Kapabilitas APIP	Leveling	3	3,00	100,00%		Inspektorat (Capaian 2022)
4.07	Kecamatan						
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	92,84	91,67	98,74%		16 Kecamatan
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	88,52	56,00	63,26%		16 Kecamatan
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	92	49,50	53,80%		16 Kecamatan
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	98	52,50	53,57%		16 Kecamatan
4.08	Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Indeks Demokrasi	Indeks	72,40	95,35	100,00%		Badan Kesbangpol (Capaian 2022)
2	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	73,50	82,13	100,00%		Badan Kesbangpol (Capaian 2022)
C	ASPEK DAYA SAING						
1	Kemampuan Ekonomi Daerah						
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	103,54	137,12	100,00%		Bappeda (Capaian 2022)
2	Nilai Ekspor	US\$	3.403.172.949,10	712.692.947,57	20,94%		Disperdag (mei 2023)

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	SATUAN	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
2	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur						
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,5818	0,58	99,69%	▶	Dishub (Capaian 2022)
2	Penataan Wilayah						
	a Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	45,05	44,82	99,49%	▶	Distaru
	b Kesesuaian tata ruang	%	100	98,90	98,90%	▶	Distaru
3	Fasilitasi Iklim Berinvestasi						
1	Ketentraman dan Ketertiban						
	a Angka Kriminalitas	kejadian	1290	618	100,00%	●	Satpol PP
	b Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52	5,40	100,00%	●	Satpol dan Kecamatan
2	Kemudahan Perijinan						
	a Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis)	%	95,50	95,13	99,61%	▶	DPM PTSP
4	Sumber Daya Manusia						
1	Kualitas Tenaga Kerja						
	a Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,10	69,41	99,10%	▶	Disnaker (Capaian 2022)
	b Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	77	74,94	97,32%	▶	Disnaker
	c Rasio Ketergantungan Penduduk	%	41,05	42,20	97,20%	▶	Disdukcapil

Keterangan:

● : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

▶ : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

▼ : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Dari 217 Indikator Kinerja Daerah yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang, sampai dengan kondisi triwulan II tahun 2023, terdapat 103 indikator (sebesar 47,47%) telah mencapai predikat kinerja Tercapai ($X \geq 100\%$ dari target RKPD Tahun 2023), sebanyak 107 indikator (sebesar 49,31%) mempunyai predikat Akan Tercapai ($100\% > X \geq 40\%$ dari target tahun 2023), dan sebanyak 7 Indikator (sebesar 3,23%) dalam kategori Perlu Upaya Keras ($X < 40\%$ dari target 2023).

Adapun evaluasi dari indikator dengan predikat kinerja perlu upaya keras dan hal lainnya yang memerlukan perhatian, sehingga pemenuhan target tahun 2023 bisa tercapai, sebagai berikut:

- a. Kinerja terkait indikator penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil kelitbangan dan indikator persentase Silpa terhadap APBD, dari hasil evaluasi sampai dengan triwulan 2 masih menunjukkan progres sebesar 0%. Untuk pemanfaatan hasil kelitbangan sebanyak 13 kajian saat ini masih dalam tahap pembahasan laporan, sehingga sesuai jadwal kegiatan baru pada triwulan III dan IV akan dilaksanakan tahapan

sosialisasi, publikasi sekaligus implementasi hasil penelitian tersebut dalam dokumen perencanaan. Sedangkan untuk indikator rasio Silpa terhadap APBD, meskipun capaian tersebut merupakan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, namun demikian mestinya pada semester satu dapat dilakukan optimalisasi serapan belanja daerah secara efektif dan efisien, dan menjamin bahwa program/kegiatan yang dilakukan adalah program/kegiatan prioritas yang benar-benar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah dan dapat terlaksana dengan baik;

- b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, merupakan salah satu Indikator SPM bidang Perumahan Rakyat, dari hasil evaluasi sampai dengan triwulan 2 masih mempunyai capaian sebesar 39,29%. Hal ini agar menjadikan prioritas dan perhatian bahwa pemenuhan SPM dalam berbagai bidang sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sudah memperhitungkan tidak saja dalam pemenuhan capaian dari penerima layanan saja, namun juga telah mensyaratkan pemenuhan mutu layanan sesuai dengan bidang layanannya. Diharapkan dengan peningkatan mutu layanan sesuai dengan standar layanan yang ada, Capaian SPM bisa mencapai predikat Tuntas Paripurna;
- c. Untuk mendukung pemenuhan kinerja daerah dalam rangka penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dan tersedianya tanah untuk berbagai keperluan pembangunan, perlu lebih dipersiapkan, direncanakan dan di koordinasikan secara optimal, sehingga pada tingkat pelaksanaannya tidak terkendala dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. Indikator yang memerlukan percepatan dalam pencapaian kinerja diantaranya: pemantauan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah, agar waktu yang tersisa dapat dilakukan percepatan dalam pencapaian target kinerja yang ada;
- e. Perlu intervensi kebijakan yang mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, sehingga akan lebih meningkatkan kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD, meningkatkan nilai ekspor non migas daerah ke negara sasaran, dan kebijakan yang pro terhadap investasi, yang semua itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah; dan
- f. Merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease pada hewan ternak, dimana mulai bulan April sd Juni selama tahun 2022 di Kota Semarang terdata sebanyak 1.042 kasus PMK yang merupakan salah satu penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan telah ditetapkan sebagai status keadaan tertentu darurat PMK dengan SK Kepala BNPB No. 47 tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 masih menjadi isue untuk dua tahun setelah kejadian.

Dan sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2023, tercatat sebanyak 202 kasus PMK dan LSD menyerang ternak di wilayah Kota Semarang sehingga berhasil menurunkan kejadian penyakit pada hewan ternak sebesar 88,32 % dari kondisi tahun sebelumnya. Untuk itu hal ini harus

mendapat perhatian agar tidak merugikan peternak yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan tidak terlepas dari pencapaian kinerja pada tingkat program dan pengaruh dari eksternal, baik akibat kebijakan pemerintah ditingkat atasnya, kontribusi hasil pembangunan yang berasal dari non pemerintah dan stakeholder pembangunan lainnya. Pengukuran kinerja ini merupakan evaluasi on going terhadap 186 indikator program diluar program penunjang, dimana hasil sampai dengan triwulan 2 ini akan dibandingkan terhadap target tahun 2023, dan selanjutnya dilakukan pengelompokan pencapaian kinerjanya dalam tiga kategori, yaitu : “Tercapai”, dimaknai bahwa indikator tersebut telah mencapai target kinerja tahun 2023 ($X \geq 100\%$), “Akan Tercapai”, dimaknai bahwa indikator kinerja tersebut diprediksi akan dapat mencapai target kinerja pada akhir tahun ($100 > X \geq 40\%$), dan “Perlu Upaya Keras” dimaknai bahwa indikator tersebut perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin menghambat pelaksanaannya, kemudian dilakukan percepatan pencapaian kinerja mendasarkan pada rencana tindak lanjut yang disusun.



Berikut evaluasi atas pencapaian indikator program berdasarkan pada bidang urusan, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam sisa waktu pada periode pembangunan tahun 2023.








2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan


Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang Pendidikan, diantaranya pendampingan BOP/BOS sekolah swasta, beasiswa miskin, serta beasiswa miskin berprestasi mulai jenjang pendidikan SD/MI hingga jenjang perguruan tinggi. Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:


Tabel 2.3.1.01
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Urusan Pendidikan


No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	URUSAN PENDIDIKAN							
1	Program Pengelolaan pendidikan	APK SD/MI	%	111,71	103,71	92,84%		Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs	%	115,62	98,95	85,58%		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		APK PAUD 5-6 tahun	%	85,87	116,76	100,00%		
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	Lembaga	8,00	5,00	62,50%		
2	Program pengembangan Kurikulum	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Pendidikan
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100,00	50,00	50,00%		
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	%	89,50	90,02	100,00%		Dinas Pendidikan
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Pendidikan
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin	%	100,00	50,00	50,00%		

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

 : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023







 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan pendidikan sampai dengan triwulan II tergolong baik, hal ini ditunjukkan dari 9 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 2 diantaranya telah tercapai, dan 7 lainnya akan dapat tercapai pada sisa triwulan yang ada. Namun demikian agar pencapaian SPM bidang pendidikan tetap menjadi prioritas sebagai wujud komitmen Kepala Daerah, baik dari aspek pemenuhan penerima layanan maupun kualitas layanan sesuai ketentuan yang berlaku.




2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Percepatan penanggulangan stunting yang terintegrasi di Kota Semarang dilakukan diantaranya melalui: Pelangi Nusantara yang didalamnya terdapat kegiatan Wisata Edukasi Gizi, Duta Kesehatan, Kebun Gizi, Penyusunan dan Pembuatan Menu Balita dan Ibu Hamil. Dan berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 21,30% pada tahun 2021 menjadi sebesar 10,40% pada tahun 2022 (SSGI-2022). Selain itu untuk pelayanan kesehatan sesuai SPM, sampai dengan triwulan II terdapat layanan kesehatan TB dan HIV yang masih memerlukan perhatian, mengingat mobilitas pasien terduga, kesadaran memeriksakan diri dan penyimpangan seks yang makin menggejala. Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.3.1.02
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun
2023 pada Urusan Kesehatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	URUSAN KESEHATAN							
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	%	100,00	89,39	89,39%		Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	%	100,00	16,00	16,00%		RSUD KRMT WONGSONEGORO
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	100,00	14,67	14,67%		
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	%	96,00	45,00	46,88%		Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Kesehatan

Keterangan:

-  : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023
-  : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023
-  : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik, hal ini ditunjukkan dari 6 indikator keberhasilan terdapat sebanyak 4 indikator kinerja dengan predikat akan tercapai, dan 2 indikator dengan predikat kinerja perlu upaya keras, yaitu indikator yang terkait dengan pemenuhan peralatan kesehatan dan sarpras pelayanan Rumah Sakit. Hal ini disebabkan belum semua kebutuhan pengadaan alat kesehatan yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tersedia melalui e-katalog, selain itu untuk pembangunan ruang gedung layanan juga masih dalam proses pengerjaan.

Sejalan dengan prioritas nasional, penanganan stunting menjadi prioritas utama dari Pemerintah Kota Semarang di tahun 2023 untuk ditangani karena masih terdapat kasus stunting di Kota Semarang.

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur serta penanganan rob dan banjir. Untuk pelaksanaan infrastruktur bidang jalan, sesuai Keputusan Wali Kota

Semarang Nomor 621 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di Wilayah Kota Semarang, ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 839.901 meter. Dari total panjang jalan tersebut yang dalam keadaan mantap adalah sebesar 759,42 km atau sebesar 90,42% (keadaan baik sebesar 381,72 km dan keadaan sedang sebesar 377,70 km) sedangkan sisanya sebesar 9,58% dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat . Disisi lain penanganan rob dan banjir menjadi tugas bagi Pemerintah Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Pada tahun 2022 persentase wilayah yang mengalami banjir dan rob terhadap keseluruhan wilayah Kota Semarang sebesar 3,48%, yang meliputi jalan, permukiman, tambak, dan sawah .

Masih belum maksimalnya capaian layanan pada pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum (98,95%) berkaitan dengan belum terbangunnya IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan, hal ini berpengaruh pada kualitas air sungai. Dengan optimalisasi SPAM Semarang Barat dan PDAM Kota Semarang, serta pembangunan sumur air tanah di 11 lokasi yang tersebar pada Kecamatan Gunungpati, Tembalang, Ngaliyan, Mijen, Candisari, Tugu dan Pedurungan, diharapkan penyediaan kebutuhan pokok air minum masyarakat Kota Semarang akan terpenuhi.












Terkait program nasional KOTAKU, mendasarkan SK Wali Kota Semarang No. 050/275/2021 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang terdapat sebesar 431,54 ha pada 45 kelurahan di 13 Kecamatan yang ditargetkan akan terselesaikan hingga tahun 2026. Target penanganan permukiman kumuh pada tahun 2023 sebesar 48% atau seluas 207,14 Ha dari luas seluruh permukiman kumuh sesuai SK. Dan sampai dengan triwulan II tahun 2023 luas lingkungan permukiman kumuh yang tertangani menjadi seluas 100,80 Ha atau sebesar 23,36% luas permukiman kumuh.

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.



Tabel 2.3.1.03


Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	%	97,86	97,86	100,00%		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	%	69,69	98,95	100,00%		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	90,86	98,94	100,00%		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	65,00	64,00	98,46%		Dinas Pekerjaan Umum
5	Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	48,00	23,36	48,67%		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Penataan Ruang
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase reklame berizin	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Penataan Ruang
		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	%	100,00	75,00	75,00%		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	%	74,50	74,13	99,50%		Dinas Pekerjaan Umum
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	%	100,00	40,00	40,00%		Dinas Penataan Ruang
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	%	100,00	74,13	99,50%		Dinas Penataan Ruang

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023  : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan triwulan II tergolong baik, hal ini ditunjukkan dari 12 indikator keberhasilan yang ada, 3 indikator telah dapat memenuhi target, dan 9 indikator lainnya dengan predikat akan tercapai pada akhir tahun 2023. Indikator dengan capaian paling rendah adalah persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani yang baru tercapai 23,36% dari target 48 %, namun demikian

sampai dengan triwulan 2 ini secara unit RTLH yang mendapatkan peningkatan kualitas, dari target 1000 unit rumah tidak layak huni yang telah ditangani sebanyak 1.122 unit, baik dari APBD (139 unit), APBD provinsi (18 unit) dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 965 unit.




Permasalahan banjir yang terjadi di awal tahun 2023 menunjukkan bahwa upaya pengendalian banjir dan rob masih harus menjadi prioritas untuk ditangani di tahun 2023. Karena sifat penanganannya yang membutuhkan solusi yang tuntas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, sinergitas dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pemerintah pusat menjadi hal yang harus terus diupayakan. Masih belum optimalnya kondisi jalan di lingkungan permukiman maupun jalan kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, juga tetap menjadi prioritas di tahun 2023.


2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2022 sebesar 44,36% , kondisi ini masih sama sampai dengan triwulan II tahun 2023 dan telah melampaui target tahun 2023 sebesar 44,31 %. Selain itu kinerja pelayanan dasar di Bidang Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman, sampai dengan triwulan II tahun 2023 diukur dari persentase rumah layak huni mencapai 98,38% dari total jumlah rumah keseluruhan. Dengan peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum, diharapkan kondisi perumahan di Kota Semarang akan semakin layak dan sehat sebagai hunian.


Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.


Tabel 2.3.1.04
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	99,15	98,38	99,22%		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	%	100,00	75,00	75,00%		Dinas Perumahan dan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Utilitas Umum (PSU)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	44,31	44,36	100,00%		Kawasan Permukiman

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023  : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan triwulan II tergolong baik, hal ini ditunjukkan dari 4 indikator keberhasilan yang ada, terdapat satu indikator telah dapat mencapai target tahunan, dan 3 indikator lainnya dengan predikat akan tercapai, hal ini disebabkan dalam pembangunan sarpras permukiman masih dalam proses pelaksanaan, sesuai dengan jadwal kegiatan yang sebagian diantaranya terdapat pada triwulan 3 dan 4.


2.3.1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terkait tingkat waktu tanggap (*response time*/15 menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2022 sebesar 90,13%, dan jika dibandingkan dengan capaian triwulan 2 tahun 2023 sedikit menurun menjadi sebesar 87,06% dari pelayanan yang diberikan, untuk itu perlu pelibatan stakeholder dan masyarakat dalam hal Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran untuk bersinergi mencapai pelayanan sesuai *response time* 15 menit. Beberapa indikator SPM lain yang menjadi ukuran keberhasilan juga belum mencapai 100%, karena masih terdapat sisa waktu yang memungkinkan perubahan capaian penerima layanan maupun dari sisi kualitas mutu layanannya.

Kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.3.1.05

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	10,00	5,00	50,00%		Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	%	13,00	0,00	0,00%	▼	BPBD
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	%	100,00	100,00	100,00%	●	Dinas Pemadam Kebakaran
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	%	100,00	40,00	40,00%	▶	
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	%	100,00	41,30	41,30%	▶	
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100,00	0,00	0,00%	▼	
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100,00	54,54	54,54%	▶	

Keterangan:

- : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023 ▶ : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023
▼ : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sampai dengan triwulan II tergolong cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dari 7 indikator keberhasilan yang ada, terdapat sebanyak 1 indikator kinerja dengan status tercapai, 4 indikator yang berstatus akan tercapai dan 2 indikator yang berstatus perlu upaya keras, yaitu indikator peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran karena menunggu jadwal pelaksanaan kegiatan pada triwulan III dan atau triwulan IV.


2.3.1.6. Urusan Sosial


Pembangunan pada urusan sosial ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang penanganannya bersifat multi dimensional. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kota Semarang menurut data BPS sebesar 4,25% . Disisi lain mendasarkan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagai data awal jumlah kemiskinan ekstrem di Kota Semarang sebanyak 21.863 KK (102.394 individu) yang tersebar pada 7 kelurahan, yaitu: Kelurahan Muktiharjo, Tandang, Tanjungmas, Bandarharjo, Kemijen, Rejosari, dan Muktiharjo Kidul. Dan setelah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi data, jumlah tersebut menurun menjadi sebanyak 518 KK (2.446 Individu), dan ditargetkan menjadi 0 pada tahun 2024 dengan melibatkan lintas sector dan juga korporasi untuk mendapatkan CSR

Disisi lain dengan terbitnya UU No.13 tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI No.10 tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin; Permensos RI No.28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan Instruksi Pemerintah Pusat bahwa Semua Pemda untuk melaksanakan Validasi dan Verifikasi terhadap BDT Tahun 2015 dilingkupnya masing-masing. Maka sejak tahun 2017 Kota Semarang melakukan validasi dan verifikasi terhadap data BDT Kota Semarang dan kemudian selanjutnya menggunakannya sebagai data tunggal dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Karena isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan, menyebabkan beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level, dan di Kota Semarang telah terlaksana program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMASKOT, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya.

Kinerja penyelenggaraan urusan sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.3.1.06
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Urusan Sosial

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	URUSAN SOSIAL							
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan	%	78,00	75,00	96,15%		Dinas Sosial

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sosial (PSKS) yang difasilitasi						
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00%		Dinas Sosial
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	99,81	100,00	100,00%		Dinas Sosial
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	%	69,85	92,39	100,00%		Dinas Sosial
5	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	%	100,00	91,00	91,00%		Dinas Sosial

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan sosial sampai dengan triwulan II tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dari 5 indikator kinerja yang dijadikan ukuran keberhasilan, sampai dengan triwulan II terdapat 3 indikator yang telah mencapai target tahun 2023, dan sebanyak 2 indikator akan dapat mencapai target pada akhir tahun mengingat tingkat capaian kedua indikator tersebut diatas 90 %

Beberapa permasalahan yang berpotensi mengganggu pencapaian kinerja pada urusan sosial diantaranya: belum mencukupinya SDM pekerja sosial profesional yang ada dibanding dengan PMKS terlantar penerima layanan rehabilitasi sosial, selain itu juga sarana dan prasarana Rumah Tampung Among Jiwo yang *overload* (over kapasitas) dalam menampung warga terlantar, serta belum memiliki posko tetap dukungan baik untuk kebencanaan alam maupun sosial.

Sejalan dengan prioritas dan target dari Pemerintah Pusat, penanganan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada Perubahan RKPD Tahun 2023, agar target 0% di tahun 2024 dapat tercapai.

2.3.2. Urusan Dasar Non Pelayanan Dasar





2.3.2.7. Urusan Tenaga Kerja

Sasaran utama pembangunan urusan tenaga kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara


pada menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 (rilis terakhir oleh BPS) sebesar 7,6% atau sebesar 81.736 penganggur dari Angkatan kerja sebanyak 1.075.827 orang. Angka ini lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah (5,95%) maupun nasional (6,49%). Diduga kebutuhan tenaga kerja di Kota Semarang, kurang diminati oleh pencaker Kota Semarang sehingga justru diisi oleh tenaga kerja dari luar wilayah.


Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.


Tabel 2.3.2.7
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada
Urusan Tenaga Kerja

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B	URUSAN DASAR BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR							
7	URUSAN TENAGA KERJA							
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	65,00	80,95	100,00%		Dinas Tenaga Kerja
2	Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	77,00	74,94	97,32%		Dinas Tenaga Kerja
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	66,00	78,05	100,00%		Dinas Tenaga Kerja
4	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	5,30	8,70	100,00%		Dinas Tenaga Kerja

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

 : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan tenaga kerja sampai dengan triwulan II tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dari 4 indikator keberhasilan yang dijadikan ukuran, terdapat 3 indikator kinerja diantaranya dengan predikat tercapai, sedangkan sebanyak 1 indikator lainnya dengan predikat akan tercapai yaitu indikator persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, yang memang secara jadwal kegiatan pelatihan kerja harus menyesuaikan dengan pentahapan penyaluran dana transfer (APBN dan DBHCHT). Selain itu perlunya mengimbangi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan peningkatan kesempatan kerja. Sehingga investasi dengan pelibatan tenaga kerja lokal menyebabkan jumlah pengangguran terbuka menurun

2.3.2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak






Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap penanganan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal ini terlihat dari


jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani sebesar 100%. Rasio KDRT menandakan adanya peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT semakin terbuka dan bangkit untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan. Dan capaian rasio KDRT sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebesar 0,01 dan angka ini masih angka sementara.

Untuk kesetaraan gender semakin menunjukkan peningkatan perbaikan terlihat meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta dengan perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Selain itu pemerintah juga serius dalam memperhatikan kepentingan/ kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat terlihat dari sudah cukup banyaknya forum- forum anak yang terbentuk di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Semarang, juga mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak dengan kategori yang meningkat dari Kategori Madya menjadi Kategori Nindya.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.08
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	100,00	58,11	58,11%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Poin	14,24	12,42	100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	%	100,00	68,75	68,75%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	100,00	42,02	42,02%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0,01	0,01	100,00%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik, ditunjukkan dari 6 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan, 2 indikator telah tercapai, dan 4 indikator lainnya mempunyai predikat akan tercapai pada akhir periode.

2.3.2.9. Urusan Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu. Selain itu juga adanya komitmen dan upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan di lokus daerah rentan rawan pangan yang semakin intens, diantaranya pelatihan olahan pangan dan pelatihan pemanfaatan pekarangan dengan tanaman hidroponik. Sehingga diharapkan seluruh kelurahan di Kota Semarang secara bertahap menuju kategori minimal cukup tahan pangan. Disisi lain juga semakin digalakkan peningkatan pemahaman pentingnya konsumsi pangan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, disamping pemantauan ketersediaan dan keamanan pangan.

Inovasi pada penyelenggaraan urusan pangan dalam rangkaantisipasi inflasi dampak kenaikan bahan bakar di Kota Semarang diantaranya dengan melaksanakan pasar pangan murah dan aman melalui program Pak Rahman yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan seperti Bulog, Indoguna, BUMP, *Fresh Mart*, Pengusaha Sayur, UMKM Pangan Lokal. Dan upaya ini secara efektif cukup mampu menahan inflasi dari sisi pemutusan rantai pemasokan penawaran barang pangan.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.09
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada
Urusan Pangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	URUSAN PANGAN							
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	%	100,00	90,00	90,00%		Dinas Ketahanan Pangan
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi / Kapita	Kkal/Kapita	3.057	3.056	99,97%		Dinas Ketahanan Pangan
		Presentase Cakupan Distribusi	%	100,00	50,00	50,00%		
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	%	100,00	50,00	50,00%		
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4,00	3,40	100,00%		Dinas Ketahanan Pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	81,50	87,31	100,00%		Dinas Ketahanan Pangan

Keterangan:

: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023 : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pangan sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik, ditunjukkan dari 6 indikator sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 2 indikator kinerja telah tercapai, dan 4 lainnya dalam predikat akan tercapai, yang pencapaian target kinerja dapat terpenuhi pada akhir triwulan 4 sesuai dengan penjadwalan yang ada.

2.3.2.10. Urusan Pertanahan








Salah satu wujud penyelenggaraan Urusan Pertanahan, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan program prioritas nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi layanan pertanahan, dimana target

nasional pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar dan diharapkan sampai pada penerbitan sertifikat elektronik untuk menghindari pemalsuan dari oknum mafia tanah yang meresahkan. PTSL merupakan program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah sepenuhnya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukum serta perlindungan hukumnya pada hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang telah bersinergi dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam Integrasi Pemetaan, sehingga nantinya akan terbentuk basis data pertanahan yang *valid* dan *up to date* dalam optimalisasi administrasi pertanahan maupun dalam penyusunan kebijakan.


Kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.


Tabel 2.3.2.10
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Pertanahan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	URUSAN PERTANAHAN							
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	%	100,00	76,13	76,13%		Dinas Penataan Ruang
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100,00	30,00	30,00%		Dinas Penataan Ruang
3	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100,00	40,00	40,00%		Dinas Penataan Ruang
4	Program Penetapan Tanah Ulayat	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	%	100,00	30,00	30,00%		Dinas Penataan Ruang
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	%	100,00	98,82	98,82%		Dinas Penataan Ruang
6	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	terkelolanya izin membuka tanah	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Penataan Ruang
7	Program Pernetagunaan Tanah	Terselesaikannya penatagunaan tanah	%	100,00	40,00	40,00%		Dinas Penataan Ruang

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

 : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023



Pencapaian kinerja program pada urusan pertanahan sampai dengan triwulan II tergolong kurang baik, ditunjukkan dari 7 indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan, belum terdapat indikator yang telah mencapai target, terdapat sebanyak 5 indikator kinerja dengan predikat akan tercapai, dan 2 indikator lainnya dengan predikat perlu upaya keras, yaitu : terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dan terselesaikannya penetapan tanah ulayat. Penetapan Tanah ulayat tidak akan diselenggarakan pada tahun-tahun selanjutnya, karena dari hasil kajian dan konsultasi dengan kementerian ATR/BPN tidak kompatibel dengan kondisi Kota Semarang yang tidak mempunyai tanah bersama masyarakat adat.








2.3.2.11. Urusan Lingkungan Hidup






Indikator kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah indeks kualitas lingkungan hidup, yang menjadi salah satu indikator tujuan pembangunan strategis Pemerintah Kota Semarang di dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan setiap tahun, guna mengetahui seberapa jauh kondisi dan status kualitas lingkungan hidup suatu kota dari segi kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan di Kota Semarang. Dan capaian pada tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Lahan mengalami penurunan, berturut-turut sebesar 51,32 untuk IKLH, 33,76 untuk IKA, dan 33,28 untuk IKL. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder peduli lingkungan.

Kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.3.2.11
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Lingkungan Hidup

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penerapan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Lingkungan Hidup

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	59,00	78,37	100,00%		
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	87,00	74,09	85,16%		
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Hektar	20,00	15,63	78,15%		
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	%	2,00	5,90	100,00%		
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	%	56,00	54,70	97,68%		Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	85,40	86,28	100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100,00	50,00	50,00%		
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	50,00	48,00	96,00%		Dinas Lingkungan Hidup

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	%	11,50	16,91	100,00%		Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Lingkungan Hidup
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	91,00	90,70	99,67%		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	27,00	26,18	96,96%		
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	72,00	72,88	100,00%		

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan lingkungan hidup sampai dengan triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 16 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan, terdapat sebanyak 5 indikator kinerja dengan predikat tercapai, sedangkan 11 indikator lainnya akan tercapai sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup diantaranya : menurunnya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan, kurangnya sarana prasarana pengangkutan sampah dan alat berat khususnya di TPA Jatibarang serta Kapasitas zona buang TPA Jatibarang. Sehingga perlu pemantauan kualitas air dengan menggunakan sistem monitoring kualitas air secara online dan real time menggunakan onlimo serta memperketat pengawasan dan pelaporan Usaha Skala Kecil (USK). Selain itu untuk meningkatkan luasan tutupan lahan, perlu upaya masif melalui penghijauan, pembangunan taman kota dan hutan kota. Dan untuk mengurangi timbunan khususnya sampah domestik, perlu penguatan pengelolaan sampah.

2.3.2.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP-el, maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2022 adalah 96,93% atau 1.233.741 orang, dari jumlah wajib KTP-el sejumlah 1.272.828 orang. Sedangkan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 98,13% sedangkan sebesar 1,87% lainnya adalah penduduk yang belum memiliki KTP-el yaitu penduduk yang melakukan mutasi, wajib KTP belum rekam termasuk wajib KTP-el pemula yang belum rekam data.

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.12
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-el	%	99,40	98,13	98,72%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	71,00	64,72	91,15%		
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	97,20	98,08	100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100,00	100,00	100,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	50,00	50,00%		
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 6 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan 2 indikator kinerjanya mempunyai predikat tercapai, sedangkan 4 indikator lainnya masih dalam predikat akan tercapai pada akhir tahun 2023

Persentase capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2022 sebesar 60,87%, meningkat pada triwulan 2 tahun 2023 menjadi sebesar 64,72%. Terdapat 35,28% belum ber KIA karena terjadi peningkatan jumlah anak usia wajib KIA dari tahun sebelumnya, disisi lain terdapat anak yang memiliki KIA yang sudah berusia diatas 17 tahun, sehingga sudah tidak diperhitungkan dalam kepemilikan KIA.



2.3.2.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Kinerja pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak termasuk di dalamnya swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.


Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat kegiatan fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja.


Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:


Tabel 2.3.2.13
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Program Administrasi Pemerintahan dan Desa	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	%	100,00	50,00	50,00%		DP3A
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	100,00	50,00	50,00%		DP3A

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

 : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan sampai dengan triwulan II tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja dengan predikat kinerja akan tercapai, karena kegiatan intervensi sesuai dengan jadwal kegiatan yang direncanakan memiliki periode selama satu tahun anggaran.




2.3.2.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pembangunan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat diantaranya melalui 3 indikator utama, yaitu : Cakupan PUS umur istri <20 th sebesar 0,58%; Cakupan PUS *unmet need* sebesar 10,89%, dan Cakupan peserta KB aktif sebesar 76,08% pada tahun 2022.

Dan jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023, indikator Cakupan PUS umur istri <20 tahun mempunyai realisasi kinerja sebesar 0,39% ; Cakupan PUS *unmet need* sebesar 8,49 %, dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif sebesar 69,07%, terlihat secara trend kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022.


Kinerja penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:


Tabel 2.3.2.14
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 th	%	0,50	0,39	100,00%		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,00	1,75	100,00%		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	%	60,12	69,07	100,00%		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

 : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II tergolong sangat baik, ditunjukkan dari 3 indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan, seluruhnya mempunyai predikat tercapai. Meskipun demikian terdapat

kinerja lain yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO), yang disebabkan diantaranya kegagalan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan kurang optimalnya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya semasa pandemi.





2.3.2.15. Urusan Perhubungan


Kinerja Urusan Perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi yang berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Beberapa ruas jalan mengalami peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas masih menjadi isu yang harus segera dipecahkan. Indikator jumlah titik/ruas rawan macet yang pada tahun 2021 terdapat 4 lokasi (Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, Siliwangi dan Jl. Elang) karena adanya bangkitan-bangkitan perjalanan baru di lokasi tersebut, berupa perumahan/permukiman baru, tempat pendidikan dan pusat ekonomi. Namun demikian pada tahun 2022 dan masih sama keadaannya pada triwulan 2 tahun 2023, titik kemacetan menurun menjadi pada 3 titik /ruas jalan, yaitu Jalan Brigjend Sudiarto, Jalan Setiabudi dan Jalan Siliwangi.

Kinerja lain yang berhasil direalisasikan atas pelayanan BRT adalah pengoperasian 8 koridor BRT dan 4 *feeder* sehingga seluruhnya berjumlah 12 koridor. Dalam hal pelayanan parkir tepi jalan umum, pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan penertiban terhadap keberadaan parkir *on street* yang mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengoptimalkan potensi sektor perparkiran yang belum tertangani. Indikator Parkir *On Street* baru mencapai 79,75% , disisi lain peningkatan ruas jalan yang digunakan untuk parkir *on street* berdampak pada kemacetan arus lalu lintas dilokasi sekitar.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.15
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Perhubungan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	URUSAN PERHUBUNGAN							
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	64,22	67,71	100,00%		Dinas Perhubungan
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	%	88,00	79,75	90,63%		Dinas Perhubungan
		Jumlah trayek BRT	trayek	13,00	12,00	92,31%		Dinas Perhubungan
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	%	33,00	20,42	100 %		Dinas Perhubungan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	rasio	6,81	5,48	78,29%		Dinas Perhubungan

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan perhubungan sampai dengan triwulan II tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja, terdapat 2 indikator dengan predikat tercapai, dan 3 indikator lainnya dengan status akan tercapai.



2.3.2.16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan, diantaranya SDK (Semarang Digital Kreatif) yang memfasilitasi masyarakat Kota Semarang agar tertarik dan menjadikan digital kreatif sebagai salah satu fokus kewirausahaan, dan komunitas yang bergabung dan aktif semakin meningkat; Terbangunnya fasilitas publik baru *Co-Working Space* di Gedung Olahraga Tri Lomba Juang; *Free Wifi* pada tempat publik; Aktivasi jaringan Internet kelurahan, Internet CCTV RT se-Kota Semarang; dan telah berfungsinya Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik; Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang dan terlaksananya Evaluasi *Smart City* Kota Semarang.

Kinerja pengelolaan e Gov salah satunya dapat ditunjukkan dengan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana pada tahun 2022 capaian Indeks SPBE Kota Semarang sebesar 3,38 (Baik). Belum optimalnya pencapaian ini disebabkan dari aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek Audit TIK, masih jauh dari standar ideal (terrealisasi 2,64 dari skala 5). Sedangkan dari domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE menunjukkan skor diatas 3. Dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diharapkan dapat mengungkit Indeks SPBE Kota Semarang mendatang.

Kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.16
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	%	100,00	100,00	100,00%		Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terselenggaranya pengelolaan <i>E-Government</i>	%	100,00	100,00	100,00%		Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan triwulan II tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja dengan status telah tercapai .

2.3.2.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada triwulan II tahun 2022, kinerja yang dicapai pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah berhasil mencapai persentase koperasi sehat sebesar 15,63% , meningkat menjadi sebesar 23,29 % pada triwulan 2 tahun 2023. Kondisi ini kinerja penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.17
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	%	3,00	0,00	0,00%		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	50,00	36,92	73,84%		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase koperasi sehat	%	31,00	23,29	75,13%		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	10,00	48,77	100,00%		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	%	1,00	1,20	100,00%		
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	%	26,00	30,28	100,00%		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	3,00	3,24	100,00%		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	Program Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	20,00	31,05	100,00%		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Keterangan:

: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 8 indikator sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 5 indikator kinerja dengan predikat tercapai, 2 indikator memiliki predikat akan tercapai, dan 1 indikator dengan predikat perlu upaya keras, yaitu: Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini disebabkan terbitnya Surat Edaran No 3 Tahun 2023 dari KemenkopUKM tentang Moratorium Pelaksanaan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Sehingga semua penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam perlu menyesuaikan dengan ketentuan baru tersebut.

2.3.2.18. Urusan Penanaman Modal

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2023 kondisi sampai dengan triwulan II sebagai berikut : nilai investasi sebesar Rp. 13.950.164 juta atau sebesar 54,31 % dari target tahun 2023 yang sebesar Rp. 25.684.059 juta dengan jumlah PMA sebanyak 32 perusahaan dan 524 PMDN investor.


Untuk menunjang pelayanan publik terkait perijinan, pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Semarang sebagaimana Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Implementasi Program Gerakan Indonesia Melayani. Selain itu juga telah terbit Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan berusaha dan non berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai upaya penambahan wewenang penerbitan perijinzn di DPMPSTSP Kota Semarang untuk menyesuaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diantaranya masih perlunya penyempurnaan dan sosialisasi aplikasi OSS RBA yang perlu diawali dengan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

Kinerja penyelenggaraan pada urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.18
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Penanaman Modal

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	URUSAN PENANAMAN MODAL							
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	Penanam Modal	3691,00	2.535,00	68,68%		Penanaman Modal dan PTSP
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	492,00	626,00	100,00%		Penanaman Modal dan PTSP
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Ijin Terbit sesuai SP	%	95,00	95,13	100,00%		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Nilai	2,00	1,00	50,00%		Penanaman Modal dan PTSP

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	%	96,00	50,00	52,08%		Penanaman Modal dan PTSP

Keterangan:

-  : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023  : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023
 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023





Pencapaian kinerja program pada urusan penanaman modal sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik, ditunjukkan dari 5 indikator sebagai ukuran keberhasilan, 2 indikator kinerja dengan predikat tercapai dan 3 indikator lainnya dengan predikat akan tercapai, yaitu Rasio Daya Serap Tenaga Kerja, Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal dan Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi.

2.3.2.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk meningkatkan kinerja dibidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan beberapa upaya, diantaranya kemitraan dengan dunia usaha, Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*), Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah, Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.19
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah	35,00	30,00	85,71%		Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet prestasi	Jumlah	1.197	1.466	100,00%		Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	Lapangan	5,00	5,00	100,00%		
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	Kegiatan	47,00	47,00	100,00%		Dinas Pemuda dan Olahraga

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik, ditunjukkan dari 4 indikator sebagai ukuran keberhasilan, 3 diantaranya telah tercapai, dan 1 indikator lainnya akan tercapai, yaitu: Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif, yang baru mencapai 85,71 persen. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan kapasitas SDM kepemudaan terhadap organisasi kepemudaan yang dinilai tidak aktif.

2.3.2.20. Urusan Statistika


Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada Urusan Statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan tersebut menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II, penyelenggaraan urusan Statistik dapat mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral sebesar 100 %.

Dasar pelaksanaan pengembangan Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang dan Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Kota Semarang adalah Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi dukungan terhadap pencapaian sasaran, diantaranya: Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang

Terintegrasi, Membangun Metadata Statistik Sektor, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor, Pengembangan Infrastruktur, Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah.

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.20
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Urusan Statistik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	URUSAN STATISTIK							
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor	%	100,00	100,00	100,00%		Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023


Pencapaian kinerja program pada Urusan Statistik sampai dengan triwulan II tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja telah mencapai target tahunannya.

2.3.2.21. Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi, serta *software* yang terpasang pada server agar melindungi data dan informasi pemerintahan dari gangguan eksternal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Persandian, khususnya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan: Kegiatan Launching Semarang Kota CSIRT dan Terbentuknya Tim CISRT Tingkat Kota Semarang, Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi, dan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang.


Kinerja penyelenggaraan urusan persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.21
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Persandian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	URUSAN PERSANDIAN							
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00%		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023  : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023




Pencapaian kinerja program pada urusan persandian sampai dengan triwulan II tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan status tercapai yaitu indikator terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah.

2.3.2.22. Urusan Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator , diantaranya yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya yang menampilkan seni budaya tradisional.


Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.22
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Kebudayaan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	URUSAN KEBUDAYAAN							
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	%	20,00	73,73	100,00%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	%	20,00	27,76	100,00%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	%	77,85	77,78	99,91%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023  : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah adalah semakin menurunnya minat masyarakat dalam mengapresiasi atraksi seni budaya, untuk itu perlu menumbuhkan minat generasi muda dengan melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif, melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya. Selain itu juga masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang ditunjukkan dengan beberapa kasus pengrusakan, pencurian maupun perilaku terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang menimbulkan hilangnya autentisitas nilai. Pencapaian kinerja program pada Urusan Kebudayaan sampai dengan triwulan II tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator 2 diantaranya dalam kategori tercapai, dan masih terdapat 1 indikator yang akan tercapai pada akhir periode, yaitu Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya.


2.3.2.23. Urusan Perpustakaan


Kinerja pada urusan perpustakaan dapat ditunjukkan oleh Nilai Tingkat Gemar Membaca Kota Semarang yakni di angka 67%. Adapun angka tersebut masuk dalam kategori Tinggi dengan interval sebagai berikut: 0-20 (Sangat rendah); 20,01-40 (Rendah); 40,01-60 (Sedang); 60,01-80 (Tinggi); 80,01-100 (Sangat Tinggi). Indikator selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Semarang tahun 2022 sebesar 59,8. Terdapat tujuh unsur pembangunan Literasi Masyarakat yakni Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat, Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar, Keterlibatan Masyarakat, dan Anggota Perpustakaan. Dan indikator lainnya rasio Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota di mana jumlah minimal Pustakawan adalah 1 dibanding 75.000 penduduk. Untuk mendukung Indikator tersebut didukung oleh program strategis. Adapun kinerja indikator program dalam penyelenggaraan Urusan Perpustakaan sebagai berikut:


Tabel 2.3.2.23
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Perpustakaan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	URUSAN PERPUSTAKAAN							
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1,00	0,93	93,00%		Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	%	100,00	100,00	100,00%		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

 : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023




Pencapaian kinerja program pada Urusan perpustakaan sampai dengan triwulan II tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja, masih terdapat satu indikator yaitu: Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk mencapai 93% dari yang ditargetkan. Dan indikator kinerja akan meningkat jika terdapat penambahan tenaga perpustakaan yang bersertifikasi sesuai kualifikasi.

2.3.2.24. Urusan Kearsipan


Untuk menunjang *e-government* di bidang pengelolaan arsip daerah, indikator keberhasilan yang ingin diwujudkan adalah Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban daerah; Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat; dan Arsip yang terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi. Tentunya pelibatan teknologi informasi atau digitalisasi arsip mutlak diperlukan dalam pembangunan di bidang kearsipan.


Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:


Tabel 2.3.2.24
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Kearsipan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	URUSAN KEARSIPAN							
1	Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	100,00	100,00	100,00%		Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip musnah	%	100,00	100,00	100,00%		Dinas Arsip dan Perpustakaan
3	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	%	60,00	80,00	100,00%		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 50\%$ Target Th. 2023

 : Akan Tercapai, $50\% > X \geq 25\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 25\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan kearsipan sampai dengan triwulan II tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, semuanya mempunyai predikat tercapai meski baru pada triwulan II.

2.3.3. Urusan Pilihan



2.3.3.25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Pada urusan kelautan dan perikanan menunjukkan keberhasilan terlihat dari indikator kinerja peningkatan konsumsi ikan per kapita dimana realisasi pada tahun tahun 2022 sebesar 40,25 kg/kapita/th dari target sebesar 40,18 kg/kapita/tahun, sedangkan data sampai dengan kondisi triwulan II tahun 2023 belum dapat diukur kinerjanya, karena penghitungannya dilakukan setiap akhir periode.

Meski sudah menunjukkan peningkatan namun masih rendahnya produksi budidaya ikan disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengetahuan masyarakat terhadap budidaya ikan, belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang dan masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan, untuk tingkat kota. Karena tingkat kesadaran dan tingkat daya beli ikan yang belum optimal serta belum memiliki TPI yang representatif, sehingga nelayan hanya sedikit yang melelangkan ikan di TPI. Selain itu, ditemukan juga dua kasus pelanggaran peraturan perikanan yaitu penggunaan formalin pada pengolahan ikan asin yang penjualannya dilakukan pada Pasar tradisional.


Kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:


Tabel 2.3.3.25
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II	URUSAN PILIHAN							
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	3.005,90	1.530,18	50,91%		Dinas Perikanan
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	3.845,95	1.922,18	49,98%		Dinas Perikanan
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	kasus	4,00	2,00	100,00%		Dinas Perikanan
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi ikan olahan	ton	17.557,29	8.779,10	50,00%		Dinas Perikanan

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

 : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan kelautan dan perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2023 tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari keempat indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, satu indikator telah tercapai, dan tiga indikator lainnya mempunyai predikat akan tercapai. Selain itu juga perlunya pengawasan produk olahan berbahan ikan, untuk menjaga mutu dan kesehatan pangan.

2.3.3.26. Urusan Pariwisata




Kinerja pelayanan Urusan Kepariwisata secara umum meningkat pasca pandemi covid-19. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang membaik, destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat. Kondisi ini terlihat dari jumlah kunjungan wisata pada tahun 2022 sebanyak 5.343.151 wisatawan, meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 2.663.761 wisatawan. Dan jika dibandingkan terhadap kondisi triwulan II tahun 2023 jumlah kunjungan wisata sebesar 2.444.086 wisatawan, yang terdiri dari 2.440.965 wisatawan nusantara dan sebanyak 3.121 wisatawan mancanegara, jumlah ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada triwulan II tahun 2022 yang tercatat sebanyak 2.479.001, sehingga secara pertumbuhan terjadi pertumbuhan negatif sebesar 1,41%.

Dari tahun ke tahun, jumlah kunjungan pariwisata ini didominasi oleh wisatawan nusantara, meskipun wisatawan mancanegrapun juga mengalami kenaikan. Dukungan peningkatan jumlah penerbangan dari Kota Semarang dan ke luar negeri, juga izin berlabuhnya kapal pesiar di Tanjungmas, atraksi seni budaya lokal oleh pelaku seni dengan menyajikan kuliner khas Kota Semarang, serta promosi paket wisata Kota Semarang dengan daerah lain sebagai tujuan wisata yang digemari wisatawan mancanegara perlu digalakkan kembali untuk meningkatkan kunjungan wisata dari mancanegara.

Untuk meningkatkan sektor kepariwisataan sangat diperlukan inovasi dalam peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti *leaflet*, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan *website* serta melalui media sosial, selain juga pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya, dan yang lebih utama adalah peningkatan daya tarik destinasi pariwisata itu sendiri.


Kinerja penyelenggaraan Urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:


Tabel 2.3.3.26
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada
Urusan Pariwisata

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	URUSAN PARIWISATA							
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	%	70,00	65,00	92,86%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

 : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada urusan pariwisata sampai dengan triwulan II tahun 2022 tergolong baik. Dari sebanyak 3 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, seluruhnya mempunyai predikat akan tercapai, karena pengukuran kinerjanya dilakukan sepanjang periode tahun 2023.

2.3.3.27. Urusan Pertanian

Salah satu ukuran kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian pangan utama (padi dan jagung), dimana mencapai 6,96 ton/ha/tahun pada tahun 2022, dan sedikit menurun pada triwulan II di tahun 2023 yang menjadi sebesar 6,94 ton/ha/tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena jika dari luas lahan pertanian saja sudah mengalami penurunan karena alih fungsi dari lahan pertanian menjadi fungsi lainnya, maka untuk meningkatkan produksi pertanian perlu dilakukan peningkatan produktivitas pertanian untuk mengurangi ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan lokal dari daerah lain.

Di bidang peternakan kinerja di tahun 2022 berhasil meningkatkan produksi hasil peternakan mencapai 39.690,27 ton yang mengindikasikan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi covid-19 dimana permintaan daging meningkat sehingga mendorong peningkatan pemotongan sapi, ayam, maupun babi. Namun disisi lain terjadi peningkatan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang menyebabkan penurunan produksi peternakan pada tahun 2022. Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular mengalami peningkatan tajam dari tahun 2021 berhasil menurun

sebesar 44,49% , namun kemudian meningkat tajam menjadi sebesar 7.108 % pada tahun 2022 karena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan LSD yang dinyatakan sebagai KLB , dan diperkirakan masih menjadi kewaspadaan selama 2 tahun setelah kejadian. Tercatat terjadi sebanyak 202 kasus PMK dan LSD mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2023, sehingga kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada triwulan II tahun 2023 menunjukkan kinerja positif yaitu berhasil mengalami penurunan sebesar 88,33% dari tahun 2022 .

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.3.27
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Urusan Pertanian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	URUSAN PERTANIAN							
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi hasil peternakan	Ton	35.922,00	18.989,52	52,86%		Dinas Pertanian
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton	50.647,76	29.508,39	58,26%		Dinas Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian per ha per tahun	Ton	6,38	6,94	100,00%		Dinas Pertanian
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5,00	-88,33	100,00%		Dinas Pertanian
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	%	75,00	100,00	100,00%		Dinas Pertanian
5	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	Kelompok	28,00	27,00	96,43%		Dinas Pertanian

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 50\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $50\% > X \geq 25\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 25\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2023 tergolong cukup baik. Dari 6 indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, sebanyak 3 indikator mempunyai

predikat tercapai dan 3 indikator lainnya akan tercapai, yaitu produksi hasil peternakan, jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama. Meski demikian masih perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan LSD pada hewan ternak yang merupakan salah satu Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Selain itu, permasalahan secara umum yang dihadapi diantaranya terkait kualitas kelembagaan petani yang masih rendah dan tingkat partisipasi anggota kelompok tani juga relatif sangat rendah dimana pada sebagian besar kelompok tani hanya beberapa anggota saja yang aktif.

2.3.3.28. Urusan Perdagangan

Sebagai kota dengan perekonomiannya yang bertumpu pada Sektor Perdagangan dan jasa, tentunya kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Pada tahun 2022 Nilai Ekspor Kota Semarang mengalami peningkatan menjadi sebesar US\$ 1.334.629.083, namun capaiannya hanya sebesar 40,78% dari target US\$ 3.272.281.681. Sedangkan nilai ekspor non migas kondisi sampai dengan triwulan II (mei) 2023, sebesar US\$ 665.685.976,86 atau sebesar 41,53% dari target yang diharapkan. Kondisi ini kemungkinan masih dipengaruhi krisis akibat terjadinya perang Rusia dengan Ukraina yang berdampak pada harga minyak dunia, dan menyebabkan inflasi di beberapa negara Eropa, dimana beberapa negara sasaran ekspor dari Kota Semarang juga mengalami kontraksi secara ekonomi. Selain itu juga dampak pandemi yang masih dirasakan sehingga adanya pembatasan dari negara tujuan untuk menekan impor dari negara eksportir Indonesia, mengingat barang harus menjalani karantina yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan turunnya permintaan barang dari Indonesia.

Kinerja lain pada tahun 2023 sampai dengan kondisi triwulan II , adalah berhasil memenuhi target persentase alat UTTP bertera, dari yang ditargetkan sebesar 76% terealisasi 33,08%, atau tingkat capaian terhadap target sebesar 43,53% mengingat baru terlaksana pada separuh periode. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai, antara lain karena kegiatan untuk melindungi konsumen dilakukan melalui pengawasan kemetrologian dan pelayanan tera serta tera ulang yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal. Selain itu juga perlunya pembatasan ijin pendirian pasar modern, yang dikhawatirkan jika dilakukan tidak selektif akan mematikan potensi pasar tradisional yang ada sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat banyak.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.3.28
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Perdagangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	URUSAN PERDAGANGAN							
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	%	100,00	50,00	50,00%		Dinas Perdagangan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	pasar	22,00	19,00	86,36%		Dinas Perdagangan
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	3,99	8,27	0		Dinas Perdagangan
4	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas	U\$	1.615.736.908	665.685.976,86	41,20%		Dinas Perdagangan
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	76,00	33,08	43,53%		Dinas Perdagangan
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	%	30,00	10,00	33,33%		Dinas Perdagangan

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 50\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $50\% > X \geq 25\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 25\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Perdagangan sampai dengan triwulan II tahun 2023 tergolong kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari sebanyak 6 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, terdapat 4 indikator yang berstatus akan tercapai, dan 2 indikator lainnya dengan status perlu upaya keras yaitu prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi karena menunggu jadwal pameran dari penyelenggara dan persentase koefisien variasi harga antar waktu yang minus kinerja terhadap target tahun 2023. Hal ini disebangkan oleh naiknya harga cabai rawit, cabai merah dan bawang merah sebagai 3 komoditas dengan koefisien variasi harga tertinggi menjelang hari raya idul fitri dan idul adha. Selain itu juga belum dilakukannya rehabilitasi 2 pasar tradisional setiap tahunnya, menunggu jadwal kegiatan.

2.3.3.29. Urusan Perindustrian





Pembangunan Urusan Industri diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang mendorong para pelaku IKM untuk registrasi di SIINas agar terpantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, tersedianya data industri yang memadai sehingga menghasilkan kebijakan industri yang tepat. Selain itu juga terjadi Pertambahan jumlah sentra IKM menjadi sebanyak 21 sentra IKM dan pada bulan Mei 2023 telah dilakukan sosialisasi dan akan terbentuk sentra IKM pada triwulan III.




Kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.3.29

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Urusan Perindustrian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	URUSAN PERINDUSTRIAN							
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	%	88,00	86,00	97,73%		Dinas Perindustrian
		Persentase Pertambahan IKM	%	0,50	0,77	100,00%		Dinas Perindustrian
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	%	4,00	2,50	62,50%		Dinas Perindustrian
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Data Informasi Industri	%	0,50	0,65	100,00%		Dinas Perindustrian

Keterangan:

-  : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023
-  : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023
-  : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Perindustrian sampai dengan triwulan II tahun 2023 tergolong cukup baik. Dari 4 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 2 indikator dengan predikat telah tercapai, dan 2 indikator yang akan tercapai, yaitu persentase pertambahan jumlah sentra IKM dan persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif.








2.3.4 Unsur Pendukung




2.3.4.1. Sekretariat Daerah

Kinerja Unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinatif Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah diantaranya dapat ditunjukkan dengan hasil evaluasi dalam koordinasi Sekretariat Daerah selama tahun 2022, diantaranya: Predikat BB (Sangat Baik) SAKIP sebesar 70,35, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 72,68, Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD) sebesar 3,4395 (ST) dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,63. Untuk triwulan II tahun 2023 belum bisa dilakukan pengukuran kinerja, sehingga capaiannya masih sama dengan capaian tahun 2022.

Kinerja penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.4.01
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
III	UNSUR PENDUKUNG							
1	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran OPD	%	100,00	25,00	25,00%		Bagian Rumah Tangga
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	OPD	41,00	41,00	100,00%		Bagian Organisasi
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	%	100,00	50,00	50,00%		Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Pelayanan Publik	%	90,00	35,75	39,72%		Bagian Organisasi
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Kegiatan	9,00	5,00	55,56%		Bagian Kesra
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	%	40,00	20,00	50,00%		Bagian Otda dan Kerjasama
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	%	100,00	50,00	50,00%		Bagian Tapem

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	Dokumen	1,00	1,00	100,00%		Bagian Administrasi Pemb
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	%	100,00	50,00	50,00%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	%	100,00	50,00	50,00%		Bagian Perekonomian dan SDA

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 50\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $50\% > X \geq 25\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 25\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Unsur Pendukung Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023 tergolong kurang baik, hal ini terlihat dari sebanyak 10 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 2 indikator mempunyai predikat tercapai, 6 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras, yaitu Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran OPD dan Indeks Pelayanan Publik. Masih rendahnya capaian ini karena Survei Kepuasan Masyarakat yang secara jadwal kegiatannya dilaksanakan pada triwulan III atau IV.

2.3.4.2. Sekretariat DPRD

Fungsi pembentukan Sekretariat DPRD diantaranya untuk memfasilitasi kebutuhan Anggota DPRD baik secara administrasi maupun keuangan, fasilitas kesehatan dan kebutuhan persidangan untuk meningkatkan produktivitas kinerja DPRD dalam menciptakan produk-produk hukum bagi Kota Semarang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD menjalankan 3 (tiga) fungsi yang harus dilaksanakan dalam menunjang program Pemerintah Daerah.

Tiga fungsi yang diemban oleh Anggota DPRD adalah:

a. Fungsi Pembentukan Perda

Menjalankan fungsi pembentukan Perda, bertugas menciptakan produk-produk hukum yang akan dijadikan pedoman semua peraturan yang berlaku di Kota Semarang. Produk hukum yang dihasilkan berasal dari usulan Pemerintah Kota Semarang atau berasal dari inisiatif internal Anggota DPRD. Dimana suatu produk

hukum akan sangat bermanfaat bila implementasinya dirasakan masyarakat luas, atas pemenuhan kepentingan masyarakat dan perlindungan atas hak-haknya.

b. Fungsi Anggaran

DPRD mempunyai hak juga untuk mengajukan anggaran, biaya yang akan digunakan sebagai sarana penunjang untuk melaksanakan tugasnya. Dalam menyusun produk hukum tentunya diperlukan rapat koordinasi, kaji banding dengan daerah lain, konsultasi dengan Pemerintah Pusat, dan lain-lain. Anggaran biaya tersebut diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang.

c. Fungsi Pengawasan

Merupakan salah satu fungsi dalam mengawasi pelaksanaan jalannya roda pemerintahan. Pengawasan akan membuat jalannya roda pemerintahan berada pada jalur yang benar dan aman dari permasalahan hukum, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan sehat. Pengawasan ini dapat berupa masukan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah sebagai pertimbangan dalam menentukan arah dan kebijakan.

Kinerja penyelenggaraan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.4.02
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	SEKRETARIAT DPRD							
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	Raperda	16,00	1,00	6,25%		Sekretariat DPRD

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 50\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Masih perlu upaya keras dalam pemenuhan target raperda yang disetujui sampai dengan triwulan 2 ini. Secara eksisting baru terdapat 1 raperda yang telah disetujui yaitu : Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Jadwal pembahasan, kelengkapan berkas dan kesiapan OPD pengusul raperda sangat menentukan kelancaran dalam pembahasan raperda.

Saat ini sudah berproses 7 raperda yang terbagi dari 3 lanjutan usulan raperda 2022 dan 4 usulan raperda tahun 2023 antara lain:

1. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 28 Juli 2022
2. Raperda tentang Biaya Layanan Pengolahan Sampah di TPA Jatibarang

3. Raperda tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Raperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
5. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
6. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.3.5. Unsur Penunjang



2.3.5.1. Perencanaan


Dalam penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja utama yang harus dipenuhi.

Kinerja di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ditandai dengan kembali memperoleh Penghargaan sebagai Kota Terbaik I Penghargaan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dari Gubernur Jawa Tengah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan meraih Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Dan terkait penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2024, pada tahun 2023 ini dilakukan beberapa agenda sebagai tahapan terkait dengan penyusunan perencanaan jangka panjang dan menengah, disamping perencanaan strategis sektoral dan perencanaan tahunan sebagaimana biasa.

Kinerja penyelenggaraan dalam unsur penunjang perencanaan ditunjukkan capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.5.1
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Unsur Penunjang Perencanaan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PERENCANAAN							
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	%	100,00	99,83	99,83%		Bappeda
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	99,01	99,01%		Bappeda

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100,00	96,81	96,81%		Bappeda
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	99,10	99,10%		Bappeda

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program Unsur Penunjang Perencanaan sampai dengan triwulan II tahun 2023 tergolong baik. Hal ini terlihat dari keempat indikator yang menjadi ukuran semuanya berstatus akan tercapai, karena hasil akhir dari kinerja yang ada, harus menunggu sampai dengan akhir periode karena menyangkut keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan atau dokumen pelaksanaan (periode Induk dan Perubahan), serta menunggu capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai agregatnya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain terdapat penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dalam RKPD terhadap hasil pemutakhiran nomenklatur yang beberapa kali dilakukan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga indikator kinerja kurang terjaga konsistensinya, serta penyeragaman indikator dan satuan pada level sub kegiatan yang harus diintegrasikan pada dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah.

2.3.5.2. Keuangan

Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah) pada tahun 2022 sebesar 52,03 % meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar 49,4%. Dan kondisi sampai dengan triwulan II tahun 2023 indikator ini belum dapat diukur kinerjanya menunggu sampai tahun anggaran berakhir. Namun demikian pencapaian kemandirian keuangan ini didukung oleh pencapaian kinerja indikator dilevel program, diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah, pengelolaan dan penatausahaan keuangan, pemanfaatan aset daerah dan optimalisasi penggunaan dana transfer sesuai pedoman yang mengatur.

Kinerja lain terkait SILPA APBD mencapai 6,02% atau sebesar Rp319.157.987.567,00. SILPA APBD Kota Semarang pada tahun 2022, dimana sumbangan terbesar karena Penundaan Penyertaan Modal pada BUMD (Penyertaan Modal pada PT BPS sebesar Rp2.000.000.000,00 dan PT

Taman Satwa sebesar Rp20.000.000.000,00), sedangkan sisanya disumbangkan efisiensi belanja dan tidak tercapainya target belanja secara keseluruhan OPD di Kota Semarang.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Fungsi Keuangan adalah dampak pandemi yang masih berimbas di berbagai sektor, dinamika regulasi yang cepat dan kompleks yang munculnya ditengah penganggaran berjalan namun menuntut penyesuaian dalam dokumen anggaran tanpa mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu juga terkait optimalisasi pencatatan dan pemanfaatan aset milik daerah untuk mendukung pembangunan.


Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.5.2
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Unsur Penunjang Keuangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	KEUANGAN							
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	1,22	NA	NA	NA	BPKAD
		Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	%	100,00	40,55	40,55%		BPKAD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	%	80,48	35,00	43,49%		BPKAD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10,00	23,80	100,00%		BAPENDA

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023  : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Unsur Keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2023 tergolong cukup baik, terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan terdapat 1 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 2 indikator dengan predikat akan tercapai, yaitu persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer dan persentase legalitas aset, namun demikian terdapat 1 indikator yang belum dapat diketahui nilainya yaitu persentase SILPA terhadap APBD, hal ini disebabkan perhitungan SILPA yang final menunggu sampai dengan akhir tahun anggaran.







2.3.5.3. Kepegawaian


Kinerja Pada tahun 2022 telah disusun Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengembangan karier yang dilaksanakan sesuai prinsip profesionalisme yaitu dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang Pangkat yang ditetapkan serta syarat objektif lainnya.

Dan untuk menyederhanakan pelayanan, sampai dengan saat ini telah tersusun pengembangan aplikasi: e-disiplin, e-cuti, e-kenaikan pangkat, e-fungsional, e-kinerja dan e-TPP.


Kinerja penyelenggaraan pada unsur penunjang kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:


Tabel 2.3.5.3
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Unsur Penunjang Kepegawaian


No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	KEPEGAWAIAN							
1	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	239,43	137,89	57,69%		BKPP
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	%	100,00	58,00	58,00%		BKPP
		Prosentase akurasi data kepegawaian	%	99,00	48,00	48,48%		BKPP
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	%	99,00	50,00	50,51%		BKPP
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	%	81,00	47,00	58,02%		BKPP
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	19,19	19,19	100,00%		BKPP

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	53,00	53,00%		BKPP

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

 : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023


Pencapaian kinerja program pada Unsur Kepegawaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 tergolong baik. Dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, terdapat satu indikator memiliki predikat kinerja telah tercapai, dan 6 indikator lainnya mempunyai kategori akan tercapai.

2.3.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja pada unsur penunjang Pendidikan dan Pelatihan dapat ditunjukkan dengan diraihnya pencapaian, yaitu Sertifikasi ISO 9001: 2015 sistem manajemen mutu pada penyelenggaraan Diklat serta Sarana dan Prasarana Pengelola Diklat (berlaku selama 3 tahun).


Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:


Tabel 2.3.5.4
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	%	40,00	40,00	100,00%		BKPP

Keterangan:

 : Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023

 : Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023

 : Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Unsur Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan triwulan II tahun 2022 tergolong sangat baik dikarenakan 1 indikator yang menjadi ukuran memiliki status telah tercapai, yaitu Persentase ASN yang

telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya


2.3.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan di Bidang Penelitian dan Pengembangan diarahkan pada penyelenggaraan riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Semarang. Pada tahun 2023 dilakukan kajian sebanyak 13 judul kajian sebagai berikut:

1. Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kota Semarang;
2. Strategi Pemberdayaan perpustakaan kelurahan dan kecamatan dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat ;
3. Strategi Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan atas pembangunan infrastruktur;
4. Efektivitas penanganan pengangguran dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Semarang;
5. Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pemberdayaan Perempuan dan anak di Kota Semarang;
6. Strategi Pemanfaatan Aset Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
7. Strategi Optimalisasi Retribusi Sektor Perdagangan Kota Semarang;
8. Strategi pengelolaan parkir Kota Semarang;
9. Kelayakan Ekonomi Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo Kota Semarang;
10. Pemetaan Potensi Pemasangan Pipa Resapan Horizontal Sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Semarang;
11. Evaluasi Implementasi Pemasangan Pipa Resapan Horizontal di Wilayah Kota Semarang;
12. Upaya Pengendalian Banjir di Kawasan Meteseh, Tembalang, dan Sekitarnya;
13. Desain Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo Kota Semarang.

Ketiga belas kajian tersebut sampai dengan triwulan II dalam proses penyusunan Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara. Secara teknokratis kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.5.5
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan	%	100,00	0,00	0,00%		Bappeda

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pembangunan daerah						

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 tergolong sangat rendah dikarenakan dari 1 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, mempunyai predikat kinerja perlu upaya keras, yaitu persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan publikasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan baru dapat diimplementasikan pada triwulan III dan IV.

2.3.6. Unsur Pengawas



2.3.6.1. Inspektorat Daerah

Capaian dalam penyelenggaraan Unsur Pengawas termasuk dalam kategori memuaskan. Hal ini terlihat dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, Kota Semarang memperoleh 7 (tujuh) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Rata-rata penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK. Selain itu juga Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mencapai 3,01 (terdefinisi) yang artinya Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Dinamika Regulasi juga menuntut tugas dan tanggungjawab APIP menjadi lebih berat, yaitu sebagai auditor, reviuer, evaluator, pemantauan, dan melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya. Level kapabilitas APIP menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Semakin tinggi levelnya maka semakin baik kapabilitasnya APIP. Capaian kapabilitas APIP Kota Semarang Tahun 2022 telah sepenuhnya berada pada level 3 (integrated).

Kinerja penyelenggaraan inspektorat daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.6.1
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Unsur Pengawas

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	INSPEKTORAT DAERAH							
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	leveling	3,00	3,00	100,00%		Inspektorat
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,04	3,01	99,01%		Inspektorat

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Unsur Penunjang Pengawas sampai dengan triwulan II tahun 2023 tergolong baik, ditandai dengan 1 indikator yang menjadi ukuran telah mencapai target, dan indikator Nilai Maturitas SPIP juga memiliki capaian diatas 99%.

Permasalahan yang berpotensi muncul adalah ketidaktercapaian target Maturitas SPIP karena terdapat perubahan baseline penilaian Nilai Maturitas SPIP terintegrasi sesuai LHP oleh BPKP No.LAP.821/PW II/3.2/2021 tanggal 13 Desember 2021 dengan Maturitas pada level 2,64, sedangkan hasil penilaian sebelumnya mendasarkan Laporan Hasil Penilaian BPKP pada tahun 2019, bahwa Pemerintah Kota Semarang pada Level 3, sehingga kemudian target yang ditetapkan pada RPJMD mengacu pada penilaian yang lama.

2.3.7. Unsur Kewilayahan





2.3.7.1. Kecamatan

Unsur Penunjang Kewilayahan diselenggarakan oleh 16 Kecamatan se-Kota Semarang. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Unsur Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilannya diantaranya: Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi; Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Persentase Penurunan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan Persentase Jumlah Ormas, Organisasi Keagamaan dan Organisasi




Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wasbang dan Ketahanan Nasional.

Kinerja penyelenggaraan 16 kecamatan dihitung sebagai agregat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.7.1
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Unsur Kewilayahan Kecamatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	16 KECAMATAN							
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	92,00	87,00	94,57%		16 Kecamatan
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	98,00	50,00	51,02%		16 Kecamatan
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	15,00	15,00	100,00%		16 Kecamatan
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	73,56	46,00	50,00%		16 Kecamatan

Keterangan:

-  : Tercapai $X \geq 50\%$ Target Th. 2023  : Akan Tercapai, $50\% > X \geq 25\%$ Target Th. 2023
 : Perlu Upaya Keras $X < 25\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Unsur Kewilayahan sampai dengan triwulan II tahun 2023 tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 4 Indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, terdapat 1 indikator dengan kategori telah tercapai, dan 3 sisanya dengan kategori akan tercapai. Adapun indikator yang akan tercapai yaitu persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE), Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang secara penjadwalan kegiatan dilaksanakan sepanjang periode tahun 2023.

2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum




2.3.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diantaranya : Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; Penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan; Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia , pemerataan, keadilan, keistimewaan , kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2022 kinerja pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan melalui Indeks Demokrasi sebesar 95,35, Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) sebesar 82,13, Indeks Pengamalan Pancasila sebesar 3,2, Indeks Ormas sebesar 63,81, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 80,04. Kondisi ini masih sama dengan capaian triwulan 2 tahun 2023 karena pengukuran kinerja atas indikator dimaksud dilakukan sekali dalam satu tahun pada akhir periode.

Kinerja penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.8.1
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
pada Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pengamalan Pancasila	Indeks	2,10	3,20	100,00%		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Kebebasan Sipil	%	64,00	98,20	100,00%		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	57,00	63,81	100,00%		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	indeks kerukunan umat beragama	Indeks	70,50	80,04	100,00%		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudhankam	%	82,00	81,00	98,78%		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Keterangan:



: Tercapai $X \geq 100\%$ Target Th. 2023



: Akan Tercapai, $100\% > X \geq 40\%$ Target Th. 2023



: Perlu Upaya Keras $X < 40\%$ Target Th. 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan triwulan II tergolong baik, hal ini ditunjukkan dari 5 Indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator yang termasuk ke kategori tercapai, dan hanya terdapat satu indikator dengan kategori akan tercapai. Perlu kiranya dukungan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, utamanya menjelang Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024 juga diwujudkan dengan dukungan pendanaan kepada penyelenggara Pemilu yang terkait.

Secara keseluruhan, jumlah indikator kinerja program non penunjang dalam mendukung pencapaian Kinerja Utama dan Kinerja Daerah tahun 2023 sebanyak 186 indikator. Sampai dengan triwulan 2, pencapaian terhadap target tahun 2023 adalah sebagai berikut, sebanyak 65 indikator atau sebesar 34,95% telah dapat mencapai target atau terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Terdapat 110 indikator atau sebesar 59,14% sedang berproses dan akan mencapai target pada akhir periode 2023. Hal ini dimungkinkan karena ini merupakan evaluasi on going dengan rentang capaian diantara 100% sampai dengan 40% dari target tahun 2023, karena terdapat beberapa indikator program yang pengukuran kinerjanya yang harus menunggu pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai (akhir periode). Sedangkan sebanyak 11 indikator (sebesar 5,91%) masih dalam predikat Perlu Upaya Keras, diantaranya disebabkan, karena menunggu jadwal kegiatan yang telah direncanakan, menyesuaikan pentahapan pencairan keuangan bagi kegiatan yang dibiayai oleh dana transfer, terkendala dengan proses pengadaan dan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khususnya pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Berat lainnya, Pengajuan raperda yang belum didukung kesiapan materi dari OPD pengusul Raperda dan adanya perubahan perundang-undangan dari tingkat pusat, terdapat program yang setelah dilakukan kajian dan dilakukan

pembahasan dengan instansi vertical direkomendasikan bahwa program penetapan tanah ulayat tidak relevan jika dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kota Semarang, sehingga tidak akan dilanjutkan penyelenggaraan program/kegiatan dan subkegiatan terkait.

Masih terdapat waktu untuk melakukan identifikasi potensi masalah sekaligus konsolidasi dengan pengampu program dan atau kegiatan yang mempunyai kategori perlu upaya keras, sehingga semua program pada akhir periode nantinya dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan, dan secara berjenjang akan berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, IKD dan IKU yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta pembangunan daerah secara integral.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Kondisi perekonomian nasional pada semester I tahun 2023 menunjukkan angka positif meskipun masih dibayang – bayangi kekhawatiran terhadap ketidakstabilan perekonomian global akibat ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian di dunia. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2023 melaju di angka 5,03% (y-on-y) dengan pertumbuhan produksi tertinggi diperoleh dari sektor transportasi dan pergudangan sebesar 15,93 persen. Pada Triwulan-II 2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih belum menemui jalan yang mudah mengingat bahwa penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara global berpengaruh terhadap penurunan nilai IHSG di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada menurunnya permintaan impor komoditi Indonesia yang otomatis mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,04% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan capaian Triwulan-I 2023 Nasional. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai angka 17,45%, kemudian disusul oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,58%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu sebesar 5,63 persen.

Selain difokuskan pada keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi dan mengontrol harga komoditas, arah kebijakan perekonomian Kota Semarang di tahun 2023 harus tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021 – 2026. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di akhir tahun 2023 ditargetkan mencapai 5,60 - 6,10%. Sejalan dengan prioritas APBN di tahun 2023, maka pembangunan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2023 diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan peningkatan potensi ekonomi lokal sebagai menjaga kestabilan ekonomi dan pengendalian inflasi di kota Semarang, dengan penekanan pada penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan. Secara ringkas, beberapa capaian dan target indikator ekonomi pada perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Pada Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Indikator	Realisasi				Target Kota Semarang	
		2019	2020	2021	2022	RKPD 2023	Perubahan RKPD 2023
1	LPE (%)	6,81	(1,85)	5,16	5,73	5,60 - 6,10	5,60 - 6,10
2	Inflasi (%)	2,93	1,49	1,49	4,99	2,5 ±1	2,5 ±1
3	Nilai Investasi PMA dan PMDN (juta rupiah)	33.658.609	18.209.772	22.538.063	24.662.877	25.684.059	25.684.059

No	Indikator	Realisasi				Target Kota Semarang	
		2019	2020	2021	2022	RKPD 2023	Perubahan RKPD 2023
4	TPT (%)	4,54	9,57	9,54	7,60	8,60 - 8,30	8,60 - 8,30
5	Kemiskinan (%)	3,98	4,34	4,56	4,25	4,24 - 4,04	4,24 - 4,04

3.2. PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2.1. PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Dengan telah berubahnya status pandemi Covid-19 menjadi endemi, serta dengan kondisi ekonomi yang terus tumbuh positif, pendapatan daerah Kota Semarang diperkirakan akan terus meningkat. Dibandingkan dengan APBD Induk TA 2023, pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan dari Rp. 4.828.502.867.632 menjadi Rp. 5.422.218.266.576 atau naik sebesar Rp. 593.715.398.944 (12,30%).

Pada pos Pendapatan Asli Daerah, hampir semua jenis pajak daerah mengalami penurunan target pendapatan, hanya 3 jenis pajak yang mengalami kenaikan yaitu Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak BPHTB. Perubahan target pendapatan di tahun 2023 dilakukan secara terukur dengan memperhatikan realisasi Pajak Daerah sampai dengan triwulan 2 tahun 2023. Untuk Retribusi Daerah, target yang ditetapkan pada Perubahan RKPD 2023 diharapkan dapat terpenuhi, dengan beberapa dinas yang ditargetkan mengalami kenaikan seperti Dinas Lingkungan Hidup yang diperkirakan naik sebesar Rp. 3.952.000.000 (15,17%), BKPP sebesar Rp. 22.400.000 (44,80%), Disperkim sebesar Rp. 746.211.400 (17,17%), serta beberapa OPD yang diperkirakan mengalami penurunan seperti Dinas Kesehatan yang turun hingga mencapai 100% atau sebesar Rp. 1.452.000.000 dikarenakan perpindahan pos dari Retribusi ke Lain-lain PAD yang sah, Dinas Pendidikan yang turun sebesar Rp. 55.382.309 (7,59%) dikarenakan menyesuaikan dengan potensi retribusi di lapangan.

Selanjutnya, pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdapat kenaikan target pendapatan yaitu pada deviden Bank Jateng yang naik sebesar Rp 3.659.208.960 (9,15%), sedangkan lainnya tetap. Pada pos lain-lain PAD yang sah, perubahan target terjadi karena adanya kenaikan target pendapatan pada Dinas Kesehatan. Hal tersebut membuat target pendapatan pada pos Lain-lain PAD yang Sah secara umum mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.452.000.000 (0,32%).

Pada pos Pendapatan Transfer, sebagian besar kenaikan pada Perubahan RKPD 2023 disebabkan karena memasukkan Pendapatan Transfer yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi yang saat APBD TA 2023 ditetapkan, informasi alokasi pendapatan transfer tersebut belum diterima. Jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2023, Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp. 575.211.588.500 (29,31%) yang terdiri dari peningkatan pendapatan transfer pemerintah pusat pada dana Bagi hasil sebesar Rp. 5.913.497.000 (3,62%), Penurunan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 554.666.564 (-0,05%) dikarenakan alokasi yang ditransfer ke Daerah

adalah setelah dikurangi SiLPA yang ada di Kasda, dan Dana Alokasi Khusus yang naik sebesar 100% atau sebesar Rp. 504.235.587.064 dikarenakan pada APBD Induk 2023 belum dipasang karena belum ada informasi resmi dari Kementerian Keuangan saat APBD TA 2023 ditetapkan. Sedangkan pada Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 65.617.171.000 (11,27%) yang berasal dari peningkatan Pendapatan Bagi Hasil sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 973/13 tahun 2023 tanggal 9 Maret 2023 sebesar Rp. 28.774.171.000 (4,94%) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 36.843.000.000 (100%) dimana pada APBD Induk belum diproyeksikan. Secara lengkap, rincian perbandingan pendapatan pada RKPD 2023, APBD TA 2023 dan Perubahan RKPD 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2023
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.865.712.538.632	2.865.712.538.632	2.884.216.349.076	18.503.810.444	18.503.810.444
<i>Pajak Daerah</i>	<i>2.190.083.500.000</i>	<i>2.190.083.500.000</i>	<i>2.200.262.872.393</i>	<i>10.179.372.393</i>	<i>10.179.372.393</i>
<i>Retribusi Daerah</i>	<i>149.306.250.120</i>	<i>149.306.250.120</i>	<i>152.519.479.211</i>	<i>3.213.229.091</i>	<i>3.213.229.091</i>
<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan</i>	<i>73.297.199.962</i>	<i>73.297.199.962</i>	<i>76.956.408.922</i>	<i>3.659.208.960</i>	<i>3.659.208.960</i>
<i>Lain - lain PAD yang Sah</i>	<i>453.025.588.550</i>	<i>453.025.588.550</i>	<i>454.477.588.550</i>	<i>1.452.000.000</i>	<i>1.452.000.000</i>
2. Pendapatan Transfer	2.112.909.930.280	1.962.790.329.000	2.538.001.917.500	425.091.987.220	575.211.588.500
2a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.498.896.930.280	1.380.790.329.000	1.890.384.746.500	391.487.816.220	509.594.417.500
2a. 1. Dana Perimbangan	1.453.549.344.280	1.371.841.248.000	1.881.435.665.500	427.886.321.220	509.594.417.500
<i>Dana Bagi Hasil</i>	<i>161.119.315.910</i>	<i>163.351.474.000</i>	<i>169.264.971.000</i>	<i>8.145.655.090</i>	<i>5.913.497.000</i>
<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>1.292.430.028.370</i>	<i>1.208.489.774.000</i>	<i>1.207.935.107.436</i>	<i>(84.494.920.934)</i>	<i>(554.666.564)</i>
<i>Dana Alokasi Khusus</i>	-	-	<i>504.235.587.064</i>	<i>504.235.587.064</i>	<i>504.235.587.064</i>
<i>DAK Fisik</i>	-	-	<i>74.791.056.523</i>	<i>74.791.056.523</i>	<i>74.791.056.523</i>
<i>DAK Non Fisik</i>	-	-	<i>429.444.530.541</i>	<i>429.444.530.541</i>	<i>429.444.530.541</i>
2a. 2. Dana Insentif Daerah	45.347.586.000	8.949.081.000	8.949.081.000	(36.398.505.000)	-
<i>Dana Insentif Daerah</i>	<i>45.347.586.000</i>	<i>8.949.081.000</i>	<i>8.949.081.000</i>	<i>(36.398.505.000)</i>	-
2b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	614.013.000.000	582.000.000.000	647.617.171.000	33.604.171.000	65.617.171.000
<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	<i>614.013.000.000</i>	<i>582.000.000.000</i>	<i>610.774.171.000</i>	<i>(3.238.829.000)</i>	<i>28.774.171.000</i>
<i>Bantuan Keuangan</i>	-	-	<i>36.843.000.000</i>	<i>36.843.000.000</i>	<i>36.843.000.000</i>
3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang	-	-	-	-	-

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2023
<i>Hibah</i>	-	-	-	-	-
<i>Dana Darurat</i>	-	-	-	-	-
<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan UU</i>	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	4.978.622.468.912	4.828.502.867.632	5.422.218.266.576	443.595.797.664	593.715.398.944

3.2.2. PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Komposisi belanja daerah tidak lepas dari penyesuaian terhadap pendapatan daerah dan penyesuaian terhadap kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Penyesuaian terhadap belanja daerah APBD TA 2023 memperhatikan perkembangan belanja sampai dengan semester 1 tahun 2023.

Penyesuaian belanja daerah ini diupayakan masih berpedoman pada arahan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan prioritas dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Belanja Daerah pada perubahan RKPD tahun 2023 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan umum belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2023 adalah:

- Penyesuaian pagu belanja daerah pada perubahan tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi belanja pada Triwulan I tahun 2023 serta kegiatan yang tidak dapat terlaksana di tahun 2023.
- Belanja daerah diprioritaskan dan diselaraskan dengan prioritas nasional untuk penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan pangan
- Belanja daerah diarahkan pada penyelesaian isu dan masalah yang muncul di tahun 2023, terutama yang terkait dengan permasalahan banjir dan rob.
- Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut, termasuk dengan memperhatikan Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang harus dianggarkan kembali atau yang harus disesuaikan dengan realisasi alokasi yang tersalur dari Pusat.
- Penyesuaian pagu belanja daerah pada perubahan tahun 2023 dilakukan terhadap belanja operasional seperti efisiensi terhadap belanja alat tulis kantor (ATK), belanja konsumsi rapat, dan belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target indikator pembangunan
- Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

- Belanja di perubahan tahun 2023 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:
 - a. Pencapaian target RPJMD dan RKPD tahun 2023
 - b. Prioritas Kota, yang terdiri dari penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, penanganan inflasi serta pengendalian banjir dan rob
 - c. Program-program *dedicated* yang telah ditetapkan.
 - d. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019.

Secara umum jika dibandingkan dengan APBD TA 2023, pada Perubahan RKPD Tahun 2023 komposisi Belanja Daerah bertambah sebesar Rp. 672.863.878.837 atau 13,50%. Dengan uraian Belanja Operasi dialokasikan Rp. 4.447.878.765.988 atau naik 13,12%. Belanja Modal sebesar Rp. 1.178.513.975.201 atau naik 20,02%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 30.292.619.650 atau turun 56,63% dari APBD TA 2023.

Jika dibandingkan dengan APBD TA 2023, penyesuaian Belanja Operasi terdapat pada:

1. Belanja Pegawai mengalami peningkatan dari Rp. 1.629.553.033.842 menjadi sebesar Rp. 1.770.021.057.912 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 140.468.024.070 yang disebabkan karena pada APBD Induk TA 2023 belum mengalokasikan Anggaran TPG dan Tamsil yang bersumber dari DAK Non Fisik.
Belanja Gaji dan Tunjangan juga sudah memperhitungkan kebutuhan PPPK yang diangkat pada tahun 2023 sebanyak 1.091 pegawai, Optimalisasi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Formasi Tahun 2022 yang diangkat pada akhir tahun 2023 sebanyak 106 pegawai dan rencana pengangkatan CPNS menjadi PNS pada bulan Oktober 2023 sebanyak 1.153 pegawai. Belanja Gaji dan Tunjangan juga sudah memperhitungkan pemberian TPP 13 dan TPP THR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 pasal 6 ayat (2) mengamanatkan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas pemberian tambahan penghasilan paling banyak 50%.
2. Belanja Barang dan Jasa yang pada APBD 2023 dialokasikan Rp. 2.184.824.451.158, pada perubahan RKPD 2023 naik menjadi Rp 2.450.733.400.891 yang diantaranya dialokasikan dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem dan dalam upaya menuju *zero stunting*.
3. Belanja Hibah naik dari Rp. 110.017.617.000 menjadi sebesar Rp. 219.495.007.185 yang didalamnya termasuk Hibah ke KPU dan Bawaslu untuk memenuhi penyediaan 40% pembiayaan Pilpres/Pilkada sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 perihal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.
4. Belanja Bantuan Sosial tetap sebesar Rp. 7.629.300.000.

Untuk Belanja Modal, jika dibandingkan dengan APBD TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 196.556.808.289 menjadi Rp. 1.178.513.975.201 pada perubahan RKPD 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah turun sebesar Rp. 1.215.338.223 menjadi Rp. 37.588.634.577 yang diantaranya untuk pengadaan lahan di Jalan Sleko dan Kawasan Tambak Lorok untuk mendukung penanganan banjir dan rob;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. 186.425.587.930, yang diantaranya digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, serta alat berat untuk penanganan banjir dan rob;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp. 54.496.819.973, diantaranya untuk rehab bangunan SD dan SMP, rehab kelurahan dan kecamatan;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 55.549.715.736, diantaranya untuk rehab jalan lingkungan permukiman;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.413.300.639; dan
6. Belanja Modal Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp. 119.637.820.

Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga (BTT), terdapat penurunan sebesar Rp. 39.547.293.440 (56,63%) dari APBD Induk 2023, sehingga alokasi BTT pada Perubahan RKPD tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 30.292.619.650. Penurunan BTT ini karena sudah digeserkan ke OPD untuk belanja mendesak dan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara lengkap, rincian perbandingan belanja pada Perubahan RKPD 2023, APBD TA 2023 dan Perubahan RKPD 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rencana Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2023
Belanja Operasi	3.875.562.290.331	3.932.024.402.000	4.447.878.765.988	572.316.475.657	515.854.363.988
Belanja Pegawai	1.632.083.703.167	1.629.553.033.842	1.770.021.057.912	137.937.354.745	140.468.024.070
Belanja Barang dan Jasa	2.125.831.670.164	2.184.824.451.158	2.450.733.400.891	324.901.730.727	265.908.949.733
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	110.017.617.000	110.017.617.000	219.495.007.185	109.477.390.185	109.477.390.185
Belanja Bantuan Sosial	7.629.300.000	7.629.300.000	7.629.300.000	-	-
Belanja Modal	925.588.178.581	981.957.166.912	1.178.513.975.201	252.925.796.620	196.556.808.289
Belanja Modal Tanah	11.040.500.000	38.803.972.800	37.588.634.577	26.548.134.577	(1.215.338.223)

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2023
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.094.514.151	137.024.522.897	323.450.110.827	190.355.596.676	186.425.587.930
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.655.420.902	356.771.811.988	302.274.992.015	(38.380.428.887)	(54.496.819.973)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	435.529.365.072	443.856.041.286	499.405.757.022	63.876.391.950	55.549.715.736
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.225.943.906	5.339.589.831	15.752.890.470	10.526.946.564	10.413.300.639
Belanja Modal Aset Lainnya	42.434.550	161.228.110	41.590.290	(844.260)	(119.637.820)
Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000	69.839.913.090	30.292.619.650	(24.707.380.350)	(39.547.293.440)
Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000	69.839.913.090	30.292.619.650	(24.707.380.350)	(39.547.293.440)
Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	4.856.150.468.912	4.983.821.482.002	5.656.685.360.839	800.534.891.927	672.863.878.837

Berdasarkan uraian pendapatan dan belanja tersebut, maka secara ringkas alokasi keduanya dalam Perubahan RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Rencana Pendapatan dan Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2023
PENDAPATAN DAERAH					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.865.712.538.632	2.865.712.538.632	2.884.216.349.076	18.503.810.444	18.503.810.444
Pendapatan Transfer	2.112.909.930.280	1.962.790.329.000	2.538.001.917.500	425.091.987.220	575.211.588.500
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	4.978.622.468.912	4.828.502.867.632	5.422.218.266.576	443.595.797.664	593.715.398.944
BELANJA DAERAH					
Belanja Operasi	3.875.562.290.331	3.932.024.402.000	4.447.878.765.988	572.316.475.657	515.854.363.988
Belanja Modal	925.588.178.581	981.957.166.912	1.178.513.975.201	252.925.796.620	196.556.808.289
Belanja Tidak Terduga	55.000.000.000	69.839.913.090	30.292.619.650	(24.707.380.350)	(39.547.293.440)
Belanja Transfer	-	-	-	-	-

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2023
Jumlah Belanja Daerah	4.856.150.468.912	4.983.821.482.002	5.656.685.360.839	800.534.891.927	672.863.878.837
Surplus / (Defisit) Belanja Daerah	122.472.000.000	(155.318.614.370)	(234.467.094.263)	(356.939.094.263)	(79.148.479.893)

Dari penjelasan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Perubahan RKPD 2023 diperkirakan akan terdapat defisit sebesar Rp. 234.467.094.263 karena rencana pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah. Untuk menutup defisit tersebut, Pemerintah Kota Semarang menggunakan instrumen pembiayaan daerah agar struktur pendapatan dan belanja daerah menjadi ideal dan seimbang.

3.2.3. PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan Kota Semarang pada Perubahan RKPD Tahun 2023 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah SiLPA tersebut tercatat sebesar Rp. 318.939.094.263. Jika dibandingkan dengan RKPD induk, angka tersebut berselisih sebesar Rp. 318.939.094.263 karena pada RKPD induk tidak terpasang SiLPA. Jika dibandingkan dengan APBD TA 2023, SiLPA pada perubahan RKPD 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 48.148.479.893. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan RKPD 2023 jika dibandingkan dengan RKPD Induk 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 38.000.000.000 akibat rasionalisasi penyertaan modal pada PT. BPS sebesar Rp. 14.000.000.000, PT. Taman Satwa sebesar Rp. 20.000.000.000, dan rasionalisasi pemberian pinjaman daerah atau dana bergulir sebesar Rp. 4.000.000.000. Jika dibandingkan dengan APBD Induk tahun 2023, Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 31.000.000.000. Secara lengkap, rencana pembiayaan pada perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rencana Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2023
PEMBIAYAAN DAERAH					
Penerimaan Pembiayaan					
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun	-	270.790.614.370	318.939.094.263	318.939.094.263	48.148.479.893

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2023
Anggaran sebelumnya (SiLPA)					
Pencairan Dana Cadangan					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	270.790.614.370	318.939.094.263	318.939.094.263	48.148.479.893
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal Daerah	118.472.000.000	111.472.000.000	84.472.000.000	(34.000.000.000)	(27.000.000.000)
Penyertaan Modal PDAM	48.972.000.000	48.972.000.000	48.972.000.000	-	-
Penyertaan Modal Perusda Percetakan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Bank Pasar	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
Penyertaan Modal Perusda BPR / BKK	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Perusda RPH & BHP	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Bank Bank Jateng	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	-	-
Penyertaan Modal PT. BPS (holding company)	18.000.000.000	11.000.000.000	4.000.000.000	(14.000.000.000)	(7.000.000.000)
Penyertaan Modal PT.	25.000.000.000	25.000.000.000	5.000.000.000	(20.000.000.000)	(20.000.000.000)

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2023	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2023
Taman Satwa					
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	-	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	122.472.000.000	115.472.000.000	84.472.000.000	(38.000.000.000)	(31.000.000.000)
PEMBIAYAAN NETTO	(122.472.000.000)	155.318.614.370	234.467.094.263	356.939.094.263	79.148.479.893

Berdasarkan uraian Pembiayaan Daerah di atas, maka Pemerintah Kota Semarang mengalami surplus pembiayaan sebesar Rp. 234.467.094.263 pada perubahan RKPD Tahun 2023. Surplus pembiayaan ini selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah pada perubahan RKPD 2023 sebesar Rp. 234.467.094.263, sehingga kondisi pada perubahan RKPD 2023 adalah anggaran berimbang.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam sistem perencanaan pembangunan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kota Semarang, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 beserta perubahannya harus sesuai dengan agenda pembangunan pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, terutama pelaksanaannya pada tahun kedua. RKPD Kota Semarang tahun 2023 beserta perubahannya juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 beserta program strategis nasional yang ditetapkan, serta program kebijakan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Selain memperhatikan visi dan misi pembangunan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, Isu Strategis dan permasalahan aktual yang muncul, dan prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional, penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Semarang juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kesesuaian dengan dokumen perencanaan, urgensi penanganan isu, dan kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan Sumber Daya Manusia yang unggul, produktif dan berdaya saing dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

- Misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
- Misi 2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
- Misi 3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota

Misi 5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta untuk menjamin keselarasan pembangunan, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023 beserta indikator dan targetnya. Perlu diketahui bahwa meskipun terdapat penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023, namun tidak dilakukan penyesuaian terhadap target indikator tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini karena penyesuaian belanja dilakukan terhadap belanja operasional yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target pembangunan. Sebagai contoh, terdapat efisiensi terhadap belanja pegawai karena pada perubahan RKPD tahun 2023 digunakan perhitungan yang lebih rinci. Selain itu, dilakukan pula efisiensi pada belanja alat tulis kantor (ATK), belanja konsumsi rapat, serta belanja perjalanan dinas. Tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator dan targetnya di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023	
MISI 1: MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL				
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83,60 – 84,00 poin	83,60 – 84,00 poin	
	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	55,17 %	55,17 %	
	Sasaran: 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,58 poin	15,58 poin
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,59 tahun	10,59 tahun
		Angka Harapan Hidup	77,49 tahun	77,49 tahun
	2. Meningkatkan kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	55,17 %	55,17 %
2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,30 – 8,60 %	8,30 – 8,60 %	
		Angka Kemiskinan	4,04 – 4,24 %	4,04 – 4,24 %
	3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	92,84 %	92,84 %
		4. Meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,10 %
	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi		77,00 %	77,00 %

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023
	5. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	15,50 – 15,80 %	15,50 – 15,80 %
	6. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	99,81 %	99,81 %
MISI 2: MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA				
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60 – 6,10 %	5,60 – 6,10 %
	Sasaran:			
	7. Meningkatkan produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	3.403.172.949,10 US\$	3.403.172.949,10 US\$
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	6,00 %	6,00 %
	8. Meningkatkan nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	7 % (Rp. 25.684.059 Juta)	7 % (Rp. 25.684.059 Juta)
		PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	103,54 Juta Rupiah	103,54 Juta Rupiah
		Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	28,77 %	28,77 %
		Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	28,70 %	28,70 %
MISI 3: MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN				
4.	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Demokrasi	72,40	72,40
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,70	95,70
		Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	10,52 %	10,52 %
	Sasaran:			
	9. Meningkatkan internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	73,50	73,50
	10. Meningkatkan akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,10	75,10

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023
	11. Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1.290 kejadian	1.290 kejadian
MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG KEMAJUAN KOTA				
5.	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,01 %	67,01 %
		Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	78,49	78,49
	12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	52,43	52,43
		Indeks Kualitas Udara	95,60	95,60
		Penurunan Emisi CO2	155.619,35 Ton CO2e	155.619,35 Ton CO2e
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani	72 %	72 %
		Persentase ruang terbuka hijau	45,05 %	45,05 %
	13. Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	68 %	68 %
		Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	74 %	74 %
		Persentase kawasan banjir dan rob	3,32 %	3,32 %
	14. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	97,50 %	97,50 %
		Persentase rumah layak huni	99,15 %	99,15 %
	15. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	85 %	85 %
	16. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	111	111
	17. Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	0,5818	0,5818
		Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	3	3
	MISI 5: MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA			

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET RKPD 2023	TARGET PERUBAHAN RKPD 2023
6.	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab	Indeks Reformasi Birokrasi	74,00	74,00
	Sasaran: 18. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	>74/BB	>74/BB
		Opini BPK	WTP	WTP
	19. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	83,00	83,00
		Indeks SPBE	4,2	4,2
		Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	>3,46/ST	>3,46/ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	88,00

Sementara itu, ukuran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Semarang. Lebih lanjut, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Semarang. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2023 beserta perubahannya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60 - 84,00	83,60 - 84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,30 – 8,60	8,30 – 8,60
4	Angka Kemiskinan	%	4,04 – 4,24	4,04 – 4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60 – 6,10	5,60 – 6,10
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)	7 (25.684.059)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,4	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,70	95,70
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,01	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84,5	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	74,00	74,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (Secara administrasi kependudukan)	%	0,35	0,35
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60 – 6,10	5,60 – 6,10
3	Laju inflasi	%	2,5 ±1	2,5 ±1
4	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,77	28,77
5	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,70	28,70
	Fokus Kesejahteraan Sosial			
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai indeks	83,60 - 84,00	83,60 - 84,00
a.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp. /tahun	15.800	15.800
b.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,49	77,49
c.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,59	10,59
d.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,58	15,58
7	Angka Kemiskinan	%	4,04 – 4,24	4,04 – 4,24
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 – 8,6	8,3 – 8,6
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,96	99,96
	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga			
10	Tingkat kearifan budaya lokal	%	55,17	55,17
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)			
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	57,14	57,14
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	51,43	51,43
6	Angka Partisipasi Kasar			
	a. PAUD (3-6 tahun)	%	81,70	81,70
	b. SD/MI	%	100	100
	c. SLTP/MTs	%	100	100
7	Angka Partisipasi Murni:			
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	90
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80	80
8	Angka Putus Sekolah:			
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,03	0,03
9	Angka Kelulusan:			
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,9	99,9
10	Angka Melanjutkan (AM):			
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100
11	Fasilitas Pendidikan:			
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	96	96
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,2	99,2
12	Rasio Guru/Murid per kelas Rata-rata			
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18	1:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32	1:20:32
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:17	1:17
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30	1:17:30
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			
	a. Jenjang PAUD	%	98,4	98,4
	b. Jenjang SD/MI	%	99	99
	c. Jenjang SMP/MTs	%	100	100
I.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,37	0,37
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	90,60	90,60
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	100	100
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	100	100
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100	100
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	100	100
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	100	100
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	(per 100.000 kelahiran hidup)	71,33	71,33
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,07	6,07
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	6,90	6,90
18	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	%	77	77
19	Nilai Kinerja BLUD Sehat	%	A+	A+
I.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	%	96,17	96,17
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	99,17	99,17
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	83,00	83,00
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 8 jiwa)	%	100	100
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	90,86	90,86
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	93,50	93,50
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	62,1	62,1
8	Persentase luas sawah beririgasi	%	43	43
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	36,14	36,14
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	52	52

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	27	27
I.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100 (30 Unit)	100 (30 Unit)
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100 (84 Unit)	100 (84 Unit)
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	48 (48% x 431,54 Ha = 207,144 Ha)	48 (48% x 431,54 Ha = 207,144 Ha)
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	1.000	1.000
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100 (10perumhn)	100 (10perumhn)
6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/ 1000 penduduk	18,49	18,49
I.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	66	66
3	Indeks Resiko Bencana	%	111	111
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100
5	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	100	100
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	88,31	88,31
I.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100	100
	a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
	b. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
	c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
	d. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
	a. Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100
	b. Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan sosial	%	100	100
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	65	65
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	56 (150 kasus)	56 (150 kasus)
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,65	7,65
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,012	0,012
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	14,24	14,24
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74,69	74,69
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	64,58	64,58
7	Rasio KDRT	Rasio	0,025	0,025
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	254,318	254,318
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	4	4
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89	89
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	81,5	81,5
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	58	58
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	60	60
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,01	67,01
	a. Peningkatan Indeks Kualitas Air	poin	52,43	52,43
	b. Peningkatan Indeks Kualitas Udara	poin	95,60	95,60
	c. Peningkatan Indeks Kualitas lahan	poin	56,50	56,50
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:			
	a. Persentase pengurangan timbulan sampah	%	27	27
	b. Persentase penanganan timbulan sampah	%	72	72
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	85,60	85,60
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	71,00	71,00
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,20	97,20

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	%	100	100
4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	100	100
5	Perekaman KTP elektronik	%	99,40	99,40
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase LPM aktif	%	100	100
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	Rasio	2,00	2,00
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,56	8,56
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,14	77,14
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	14.554.892	14.554.892
2	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	3	3
3	Kepemilikan KIR angkutan umum	jumlah	1970	1970
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	75,33	75,33
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100	100
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	100	100
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	Persentase koperasi aktif	%	76,50	76,50
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	13	13
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	54	54
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	492	492
2	Persentase peningkatan investasi	%	7	7
3	Nilai investasi	Rp (dlm juta)	25.684.059	25.684.059
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	38	38
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,95	0,95
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,04	0,04
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100	100
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	75	75
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
1	Terlestariannya Cagar Budaya	%	77,85	77,85
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	435	435
3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461	461
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	10	10
5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	32,5	32,5
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	47	47
2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	28	28
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	59	59
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	79	79
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	58	58
3	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	149.500	149.500
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: Perikanan Dalam Angka)	Ton	6.901,85	6.901,85
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita /thn	40,18	40,18

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
3	Produksi Ikan Olahan	Ton/ Tahun	17.557	17.557
4	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/ tahun	3.055,90	3.055,90
5	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/ tahun	3.845,95	3.845,95
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	6 (3.883.073)	6 (3.883.073)
2	Tingkat hunian akomodasi	%	41,24	41,24
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	19	19
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/ta hun	6,38	6,38
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5	5
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	Kelurahan	132	132
4	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	Kawasan	5	5
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	45	45
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	81,0	81,0
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	64	64
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90	90
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	0,50	0,50
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100%	100%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	10%	10%
4	Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	Sentra	1	1
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	12,50%	12,50%
4	UNSUR PENDUKUNG			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	74,00	74,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	88,00	88,00
3	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predikat	>74/BB	>74/BB
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,46/ST	>3,46/ST

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
4.02	SEKRETARIAT DPRD			
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100
5	UNSUR PENUNJANG			
5.01.	PERENCANAAN			
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100	100
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100	100
5.02	KEUANGAN			
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57	54,57
2	Persentase Silpa terhadap APBD	%	1,22	1,22
5.03	KEPEGAWAIAN			
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	83,00	83,00
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	239,43	239,43
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	19,19	19,19
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,18	4,18
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	85	85
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100,00	100,00
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	35,29	35,29
3	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	64	64
6	UNSUR PENGAWAS			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			
1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	2	2
2	Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	Leveling	3,04	3,04
3	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini	WTP	WTP
4	Kapabilitas APIP	Leveling	3	3
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN			
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	92,84	92,84
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan di tingkat kewilayahan	%	88,52	88,52

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2023	Target P-RKPD 2023
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	92	92
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	98	98
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Indeks Demokrasi	Indeks	72,40	72,40
2	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	73,50	73,50
C.	ASPEK DAYA SAING			
1.	Kemampuan Ekonomi Daerah			
1	PDRB per kapita berlaku	juta Rp	103,54	103,54
2	Nilai Ekspor	US\$	3.403.172.949,10	3.403.172.949,10
2.	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur			
2.1	Aksesibilitas Daerah			
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5818	0,5818
2.2	Penataan Wilayah			
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	45,05	45,05
2.	Kesesuaian tata ruang	%	100	100
3.	Fasilitasi Iklim Berinvestasi			
3.1	Ketentraman dan Ketertiban			
1	Angka Kriminalitas	kejadian	1290	1290
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52	10,52
3.2	Kemudahan Perizinan			
1	Prosedur izin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perizinan dari semula 52 jenis)	%	95,50	95,50
4.	Sumber Daya Manusia			
4.1	Kualitas Tenaga Kerja			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,10	70,10
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	77	77
4.2	Rasio Ketergantungan Penduduk (Dt. Disdukcapil)	%	41,05	41,05

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Meminimalkan kendala terkait regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arahan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%

2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023

Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah disusun dalam rangka pencapaian Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*” sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tema Pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 adalah “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”. Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, yang difokuskan pada:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan
 - 2) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu
 - 4) Peningkatan ketahanan pangan
 - 5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah serta koperasi
 - 6) Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup
 - 7) Peningkatan nilai penanaman modal
 - 8) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang
 - 9) Peningkatan daya dukung dan daya tampung
 - 10) Peningkatan ketahanan bencana
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE), yang difokuskan pada:
 - 11) Penyediaan *basic life access*
 - 12) Penguatan *sustainable livelihood*
 - 13) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
 - 14) Pengurangan pengangguran
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, yang difokuskan pada:
 - 15) Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun serta pemenuhan Standar Pemenuhan Minimal (SPM) bidang pendidikan
 - 16) Penguatan pembangunan kesehatan paripurna

- 17) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
 - 18) Pembangunan kependudukan
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, yang difokuskan pada:
- 19) Pemantapan kualitas pelayanan publik
 - 20) Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
 - 21) Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur
 - 22) Penguatan kondusivitas wilayah
 - 23) Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

4.2.3. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan di Kota Semarang. Masukan-masukan dari DPRD Kota Semarang untuk pembangunan di tahun 2023 dan telaahnya dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4
Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang

No	Pokok Pikiran DPRD	Telaah
1	<p>Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan nilai ekonomi usaha dan koperasi; b. Peningkatan nilai investasi; c. Peningkatan sektor pariwisata unggulan; d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa; e. Pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular. 	<p>Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi. Di tahun 2023, Pemerintah Kota Semarang akan melakukan upaya-upaya untuk mendorong hal tersebut melalui penguatan usaha mikro dan koperasi, peningkatan nilai investasi, peningkatan sektor pariwisata, termasuk pengembangan ekonomi sirkular dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung ekonomi di Kota Semarang.</p>
2	<p>Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin; b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin; c. Peningkatan upaya perlindungan sosial; d. Pengembangan kampung tematik produktif; 	<p>Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, upaya-upaya juga perlu dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang sempat meningkat selama pandemi Covid-19. Hal tersebut akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan perlindungan sosial, pengembangan kampung tematik produktif, serta penguatan kualitas calon</p>

No	Pokok Pikiran DPRD	Telaah
	<ul style="list-style-type: none"> e. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja; f. Perluasan kesempatan kerja. 	<p>tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.</p>
3	<p>Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi; b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan <i>accessible</i>; c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan. 	<p>Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor kunci kemajuan suatu kota. Dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, maka pembangunan daerah secara lebih luas akan semakin mudah dilakukan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengarusutamaan gender, serta upaya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang.</p>
4	<p>Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan infrastruktur strategis perkotaan; b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah; c. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman; d. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; e. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir; f. Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana. 	<p>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan merupakan hal mendasar yang dibutuhkan oleh tiap daerah, terutama kota-kota besar. Hal ini karena infrastruktur tidak hanya berperan sebagai penunjang utama kegiatan perekonomian, namun juga sebagai penyedia kebutuhan dasar dimana masyarakat tinggal dan melakukan aktivitas sosial lainnya. Oleh karenanya, pemenuhan infrastruktur strategis perkotaan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir dan penguatan ketahanan bencana juga merupakan hal fundamental yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Semarang.</p>
5	<p>Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan; c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi; d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 	<p>Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari perwujudan <i>good governance</i> atau tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan perkembangan zaman yang kian cepat, maka pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sifat dinamis, efektif, efisien, dan tentunya inovatif dalam menyelenggarakan fungsinya. Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kapasitas fiskal daerah, perluasan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, penguatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta</p>

No	Pokok Pikiran DPRD	Telaah
		penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, perkiraan capaian di tahun 2022 serta isu-isu strategis di tahun 2023.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah “Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.

- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.

- 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.

- 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.

- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2023, program dan kegiatan dicermati kembali dengan melakukan efisiensi terhadap belanja operasional OPD yang bisa dirasionalisasi, antara lain pada belanja perjalanan dinas, belanja Alat Tulis Kantor, dan belanja Makan dan Minum. Pencermatan juga dilakukan terhadap pekerjaan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023. Hasil rasionalisasi kemudian digunakan untuk menunjang pelaksanaan prioritas tahun 2023 yang terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, serta pengendalian banjir dan rob. Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2023 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 4.5. Sedangkan persandingan antara sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan daerah perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dengan prioritas pusat dan provinsi tersaji pada tabel 4.6. Pada tabel 4.7 disajikan persandingan keterkaitan isu strategis, prioritas daerah dengan prioritas provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional tahun 2023.

Tabel 4. 5
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2023

URAIAN	LPE	IPM	KEMISKINAN	TPT
Kota Semarang	5,60 - 6,10 %	83,60 – 84,00	4,04 – 4,24%	8,30 – 8,60 %
Prov. Jateng	5,00 – 5,60%	72,75	9,51 – 9,29 %	5,63 – 4,80%
Nasional	5,30 – 5,90%	73,29 – 73,35	7,50 – 8,50 %	5,30 – 6,00 %

Tabel 4. 6

Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023					
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,58 Tahun	P3	<p>a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan. 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi. 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP. 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan. 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi. 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat. 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah. <p>b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan <i>accessible</i>, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan <i>stunting</i> secara terintegrasi. 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan. 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan. 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama. 	Prioritas Nasional 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,59 Tahun				
		Angka Harapan Hidup	77,49 Tahun				
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	55,17%				Prioritas Nasional 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	92,84%				Prioritas Provinsi 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing
4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,10%				
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	77,00%				

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023			PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023		
			<p>5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.</p> <p>c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan. 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia. <p>d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas layanan KB. 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas. <p>e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan. 2) Peningkatan prestasi olahraga. 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM. 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial. 	

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023			
5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	15,50 - 15,80%	P2	<p>a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin. 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin. 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. <p>b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin. 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). <p>c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan. 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS. <p>d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif. 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif. <p>e. Pengembangan kesatuan sistem <i>demand and supply set</i> tenaga kerja, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	99,81%		

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023				
				<ul style="list-style-type: none"> 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja. 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja. 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja. 		
7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$ 3.403.172.949,10	P1	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya: <ul style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor. 2) Pengembangan kewirausahaan baru. 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi. b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan promosi investasi. 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan. c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing. 2) Pengembangan wisata MICE. d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya: <ul style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa. 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi. 	Prioritas Nasional 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	6,00%			
8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	7% (25.684.059 juta rupiah)			<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Provinsi 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
		PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	103,54 juta rupiah			
		Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	28,77%			
		Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	28,70%			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023			
				3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan. 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor. e. Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>), melalui upaya-upaya: 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular. 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan. 3) Penguatan ketahanan pangan.	
9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	73,50	P3 a. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan. 2) Peningkatan prestasi olahraga. 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM. 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.	Prioritas Nasional 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Prioritas Provinsi 3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing
10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,10	P3 a. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.	Prioritas Nasional 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Prioritas Provinsi 3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023				
					3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.	Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing
11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1.290 kejadian	P3	Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya, melalui upaya-upaya: 1) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial	Prioritas Nasional 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Prioritas Provinsi 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	52,43	P4	a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya: 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga. 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya. 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.	Prioritas Nasional 5. Memperkuat Infrastruktur mendukung pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar Prioritas Nasional 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
		Indeks Kualitas Udara	95,60			
		Penurunan Emisi CO2	155.619,35 Ton CO2e			
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani	72%			
		Persentase ruang terbuka hijau	45,05%			
13	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	68%		b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:	Prioritas Provinsi 1. Pemantapan
		Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	74%			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023			
		Persentase kawasan banjir dan rob	3,32%		
14	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	97,50%	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota. 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi. 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel. 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang. 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon. <p>c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman. 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh. 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak. 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum. <p>d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan. 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik. 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan. 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. 	pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
		Persentase rumah layak huni	99,15%		
15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	85%		
16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	111		
17	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	0,5818		
		Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	3 titik/ruas		

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023				
				e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Konservasi sumber daya air. 2) Pendayagunaan sumber daya air. 3) Pengendalian daya rusak air. f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana. 		
18	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Opini BPK	>74/BB WTP	P5	a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah. 2) Optimalisasi barang milik daerah. b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. 2) Pengembangan alternatif pembiayaan. 3) Optimalisasi BUMD. c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik. 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung <i>decision making system</i>. 	Prioritas Nasional 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Prioritas Provinsi 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah
19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN Indeks SPBE Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD) Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00 4,2 >3,46/ST 88,00			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023			PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023		
			<p>4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.</p> <p>d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. 3) Penguatan Manajemen Risiko. 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. <p>e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.</p>	

Tabel 4. 7

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional Tahun 2023

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jateng		Prioritas Daerah Kota Semarang	
Kemiskinan	PN.2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PD.2	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)	PD.2	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	PN.3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PD.3	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing	PD.3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif
	PN.4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan				
Kesenjangan wilayah; Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian Sumber Daya; Kedaulatan pangan dan energi	PN.5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	PD.1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	PD.4	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar
	PN.6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim				
Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha	PN.1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan			PD.1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan
Tata kelola pemerintahan	PN.7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PD.4	Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	PD.5	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif

Selain melaksanakan prioritas seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang di tahun 2023 mendukung terlaksananya Perpres Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Dukungan tersebut dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kota Semarang. Untuk kegiatan yang bersumber dari sumber lain di luar APBD Kota Semarang serta merupakan kewenangan dan kewajiban dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau pihak lain, Pemerintah Kota Semarang terus menerus mendorong agar terdapat percepatan realisasinya.

Tabel 4. 8
Perencanaan Pembangunan Mendukung Perpres No. 79 Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi	Sumber Dana	Progres
1	Pembangunan Technopark	75 Milyar	APBN	- KAJIAN (2018) - MASTERPLAN (2019) - ROADMAP (2020) - DED (2020) - AMDAL DAN ANDALALIN (2021)
2	Pembangunan Jembatan Srandol - Sekaran	200 Milyar	APBN	- FS (2007) - LARAP (2007) - DED (2008) - UKL UPL (2016) - PEMBEBASAN LAHAN (2021)
3	Pembangunan Fly Over Jalan Setiabudi	200 Milyar	APBN	- FS (2010) - DED (2017)
4	Pembangunan Fly Over Madukoro	200 Milyar	APBN	- DED (2017) - UKL UPL (2020) - ANDALALIN (2020) - LARAP (2020)
5	Normalisasi Sungai Bringin	100 Milyar	APBN	- MASTERPLAN (2007) - REVIEW DED (2017) - LARAP (APBP-P 2020) - LAHAN KURANG 6 BIDANG (2019 - 2020) - PEMBEBASAN LAHAN TAMBAHAN (2021-2022) - PEMBANGUNAN FISIK (2020 - 2023)
6	Pembangunan Rusun Pekerja	25 Milyar	APBN	- PROPOSAL, DED (2018 DARI PUSAT) - LAHAN ASET PEMKOT (Telah dibangun 1 TB)
7	Pembangunan Underground Simpang Lima	850 Milyar	KPBU	- FS (2017) - MASTERPLAN (2018) - AMDAL (2020) - DED (2021) - LARAP (2021)
8	Pembangunan BRT Dedicated Lane	600 Milyar	KPBU	- STUDI PENDAHULUAN (2017) - FS dibantu PT.SMI (2019-2020) - Kementerian Perhubungan RI telah mengirim surat ke Bappenas terkait Usulan <i>Green Book</i> 2023 Sektor Transportasi dengan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi	Sumber Dana	Progres
				kegiatan (<i>National Mass Transit Project Implementation</i>) Metropolitan Semarang - Kelengkapan <i>Readiness Criteria</i> Dokumen <i>Updating</i> Dokumen <i>Feassibility Study</i> telah selesai disusun oleh PT. Mitra Pembangunan Jaya dan telah diupload sebagai data dukung kegiatan
9	Pengembangan LRT Perkotaan	14,760 Milyar	KPBU	- FS (2017) - KAJIAN TOD (2018) - STUDI PENDAHULUAN KPBU (2018) - OBC (2019) dibantu oleh Dirjen Perkeretaapian
10	Pembangunan Outer Ringroad (<i>Harbour Toll</i>) Semarang – Kendal	15,000 Milyar	KPBU	- FS (2019) oleh Pemrakarsa - Telah keluar Rekomendasi terkait trase <i>Harbour Toll</i> dari KKP - Peningkatan kapasitas SDM terkait rencana LVC

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2023

Dengan memperhatikan realisasi kinerja dan keuangan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023, serta adanya kebijakan terkait dengan dana transfer tahun 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian pada kerangka pendanaan tahun 2023 meliputi:

- a. Pendapatan daerah dalam RKPD Tahun 2023 sebesar 2.865 Triliun rupiah, pada APBD tahun 2023 sebesar 2.865 Triliun rupiah, dan pada perubahan RKPD tahun 2023 disesuaikan menjadi sebesar 2.884 Triliun rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 18.5 Milyar rupiah terhadap RKPD Tahun 2023;
- b. Proyeksi belanja daerah dalam RKPD tahun 2023 adalah sebesar 4.865 Triliun rupiah, pada APBD tahun 2023 menjadi sebesar 4.983 Triliun rupiah dan pada rencana perubahan RKPD tahun 2023 menjadi sebesar 5.656 Triliun rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 800 Milyar rupiah terhadap RKPD tahun 2023;
- c. Proyeksi pembiayaan netto daerah dalam RKPD tahun 2023 adalah sebesar -122 Milyar rupiah, pada APBD tahun 2023 sebesar 155 Milyar rupiah, dan pada perubahan RKPD tahun 2023 menjadi sebesar 234 Milyar rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 356 Milyar rupiah terhadap RKPD tahun 2023.

Proyeksi kerangka pendanaan pada perubahan RKPD tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023

URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.865.712.538.632	2.865.712.538.632	2.884.216.349.076
1 Pajak Daerah	2.190.083.500.000	2.190.083.500.000	2.200.262.872.393
2 Retribusi Daerah	149.306.250.120	149.306.250.120	152.519.479.211
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	73.297.199.962	73.297.199.962	76.956.408.922
4 Lain - lain PAD yang Sah	453.025.588.550	453.025.588.550	454.477.588.550
PENDAPATAN TRANSFER	2.112.909.930.280	1.962.790.329.000	2.538.001.917.500
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.498.896.930.280	1.380.790.329.000	1.890.384.746.500
a Dana Perimbangan	1.453.549.344.280	1.371.841.248.000	1.881.435.665.500
b Dana Insentif Daerah	45.347.586.000	8.949.081.000	8.949.081.000
2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	614.013.000.000	582.000.000.000	647.617.171.000
a Pendapatan Bagi Hasil	614.013.000.000	582.000.000.000	610.774.171.000
b Bantuan Keuangan	-	-	36.843.000.000
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	3.875.562.290.331	3.932.024.402.000	4.447.878.765.988
1 Belanja Pegawai	1.632.083.703.167	1.629.553.033.842	1.770.021.057.912
2 Belanja Barang dan Jasa	2.125.831.670.164	2.184.824.451.158	2.450.733.400.891
3 Belanja Bunga	-	-	-

URAIAN	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
4 Belanja Subsidi	-	-	
5 Belanja Hibah	110.017.617.000	110.017.617.000	219.495.007.185
6 Belanja Bantuan Sosial	7.629.300.000	7.629.300.000	7.629.300.000
BELANJA MODAL	925.588.178.581	981.957.166.912	1.178.513.975.201
BELANJA TIDAK TERDUGA	55.000.000.000	69.839.913.090	30.292.619.650
JUMLAH BELANJA	4.856.150.468.912	4.983.821.482.002	5.656.685.360.839
SURPLUS/DEFISIT	122.472.000.000	(155.318.614.370)	(234.467.094.263)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	-	270.790.614.370	318.939.094.263
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
1 Pembentukan Dana Cadangan			
2 Penyertaan Modal Daerah	118.472.000.000	111.472.000.000	84.472.000.000
3 Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

5.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan di tahun 2023 disusun dalam rangka mencapai target pembangunan Kota Semarang. Program-program pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Semarang Tahun 2023 disusun berdasarkan nomenklatur dan kodefikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung, 5 (lima) unsur penunjang, 1 (satu) unsur pengawas, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.2.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pembangunan unit sekolah baru satuan pendidikan dasar, penambahan ruang kelas belajar mengajar pendidikan dasar, peningkatan sarana dan prasarana belajar mengajar, peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) satuan pendidikan daerah baik negeri/swasta dan peningkatan lembaga kursus dan pelatihan rujukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan sebanyak 8 lembaga; (2) APK PAUD 5-6 tahun sebesar 85,87%; (3) APK SMP/MTs sebesar 115,62%; dan (4) APK SD/MI sebesar 111,71%.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada peningkatan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF sebesar 100%; dan (2) Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar sebesar 100%.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan kauntitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/kesetaraan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV sebesar 89,50%.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada upaya pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin sebesar 100%; dan (2) Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin sebesar 100%.

5.2.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan penyediaan layanan kesehatan rujukan dan pengelolaan pelayanan kesehatan puskesmas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) persentase layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai standar sebesar 100%; (2) pemenuhan peralatan kesehatan rujukan Rumah Sakit sebesar 100%; dan (3) pengembangan sarana prasarana Rumah Sakit sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada upaya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 100%.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pengawasan perijinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar sebesar 96%.

- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini diarahkan pada peningkatan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebesar 100%.

5.2.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini diarahkan pada rehabilitasi dan pembangunan embung, pembangunan dan pemeliharaan polder/kolam retensi, operasi, dan pemeliharaan pompa banjir, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pembangunan sumur air tanah untuk air baku.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob sebesar 97,86%; (2) persentase rumah tangga terlayani air minum layak sebesar 69,69%.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada pembangunan jaringan Sistem Perpipaan Air Mimin (SPAM) di Kawasan Perdesaan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase rumah tangga terlayani SPAM sebesar 100%.
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah, operasi, dan pemeliharaan system pengelolaan air limbah domestik dan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana Instalasi Pengelololaan Limbah Terpadu (IPLT).
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 90,86%.
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diarahkan pada revitalisasi saluran drainase di kawasan Perkotaan (Kawasan Kota Lama), penyediaan sarana sistem drainase Perkotaan dan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sebesar 65%.

- e. Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diarahkan pada upaya pengendalian bangunan sesuai dengan fungsi bangunan, gembangunan gedung fasilitas publik serta pemeliharaan gedung cagar budaya.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase tertatanya bangunan gedung sebesar 100%.
- f. Program Pengembangan Permukiman
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan kawasan permukiman.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani sebesar 48%.
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada pengendalian dan penataan reklame, dan Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana rumah susun.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) persentase reklame yang berizin sebesar 100%; dan (2) persentase pemanfaatan hunian yang tertata sebesar 100%.
- h. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada Pembangunan Semarang *Outer Ring Road* dan Semarang *Middle Ring Road* serta operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 74,50%.
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini diarahkan pada pelatihan tenaga terampil konstruksi, fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan sebesar 100%.
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase dokumen perencanaan tata ruang yang disusun sebesar 100%.

5.2.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lokasi rawan bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan sebesar 100%.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase rumah layak huni sebesar 99,15%.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), pengelolaan sarana, dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum perumahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase perumahan yang terfasilitasi PSU sebesar 100%; dan (2) persentase RTH sebesar 44,31%.

5.2.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamongpraaja dan peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase penurunan pelanggaran Perda sebesar 10%.

- b. Program Penanggulangan Bencana
Program ini diarahkan pada prasarana pendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana daerah.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana sebesar 13%.
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini diarahkan pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, operasi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, serta peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase pelayanan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia sebesar 100%; (2) persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 100%; (3) persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran sebesar 100%; (4) persentase terselenggaranya kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar 100%; dan (5) persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sebesar 100%.

5.2.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial
Program ini diarahkan pada peningkatan peningkatan penanganan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), peningkatan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial, dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentasi cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi sebesar 78,00%.
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pekerja migran bermasalah sosial yang ditangani sebesar 100%.

- c. Program Rehabilitasi Sosial
Program ini diarahkan pada penyediaan permakanaan, sandang dan alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi, pemberian akses layanan Pendidikan dan kesehatan dasar, dan bimbingan fisik, mental spiritual dan social bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani sebesar 99,81%.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial sebesar 69,85%.
- e. Program Penanganan Bencana
Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan perlindungan sosial bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana alam dan sosial, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani sebesar 100%.

5.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.2.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan tenaga kerja baik secara makro maupun mikro.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase program/kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja sebesar 65%.
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada Peningkatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi, penyediaan sarana pelatihan kerja, pembinaan Lembaga pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada perusahaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebesar 77%.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan antar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, peningkatan pelayanan disabilitas ketenagakerjaan dan peningkatan pelatihan bagi wirausaha baru, *Job Fair*/Bursa Kerja dan peningkatan pelayanan informasi Pasar Kerja.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 66%.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebesar 5,30%.

5.2.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, dan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar 100%.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 14,00 poin.

- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan GK dan Gak anak, dan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi sebesar 100%.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam suatu kelembagaan data.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak sebesar 100%.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada peningkatan jejaring kemitraan lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan pemenuhan hak anak sebesar 100%.
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase anak korban kekerasan yang ditangani sebesar 0,01%.

5.2.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan wilayah layanan kemandirian pangan sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan, peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) ketersediaan energi/kapita sebesar 3057 Kkal/kapita/tahun; (2) persentase cakupan distribusi pangan sebesar 100%; dan (3) persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang sebesar 100%.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada ketersediaan peta ketahanan dan kerentanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu presentase daerah rentan rawan pangan sebesar 4%.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan keamanan pangan segar dan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebesar 81,50%.

5.2.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada penyelesaian permasalahan sengketa tanah garapan di Kota Semarang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselesaikannya sengketa tanah garapan di Kota Semarang sebesar 100%.

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada upaya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sebesar 100%.

- c. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Program ini diarahkan pada penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebesar 100%.
- d. Program Pengelolaan Tanah Kosong
Program ini diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian pemanfaatan tanah kosong. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong sebesar 100%.

5.2.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terlaksananya penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 100%.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada peningkatan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, peningkatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebesar 100%; (2) persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara sebesar 59%; (3) persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sebesar 87%; (4) cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air sebesar 20 Ha; dan (5) persentase perubahan emisi CO₂/emisi gas rumah kaca sebesar 2%.

- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program ini diarahkan pada pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan pengelolaan taman keanekaragamahayati (Kehati) di Kota Semarang sebesar 100%.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Program ini peningkatan kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpangan sementara limbah B3.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3 sebesar 56%.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diarahkan pada pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebesar 85,40%; dan (2) persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 100%.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebesar 50%.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada pemberian apresiasi masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan sebesar 11,5%.

- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPPLH).
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebesar 100%.
- i. Program Pengelolaan Persampahan
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, dan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA sebesar 91%; (2) persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 27%; dan (3) persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 72%.

5.2.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk
Program ini diarahkan pada peningkatan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, penyelenggaraan pendaftaran penduduk, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase perekaman KTP-Elektronik sebesar 99,40%; dan (2) persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA sebesar 71%.
- b. Program Pencatatan Sipil
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pencatatan sipil, penyelenggaraan pencatatan sipil dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 97,20%.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini diarahkan pada pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebesar 100%; dan (2) persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 100%.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada penyediaan data dan informasi kependudukan untuk kebutuhan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase pengelolaan profil kependudukan daerah sebesar 100%.

5.2.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah kelurahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase kelurahan yang menerapkan sistem informasi sebesar 100%.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu cakupan pemberdayaan lembaga masyarakat sebesar 100%.

5.2.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada Peningkatan kuantitas penduduk melalui penguatan kerjasama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur Pendidikan formal/non formal dan penyediaan dan pengembangan materi Pendidikan kependudukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) umur istri < 20 Tahun sebesar 0,50%.

- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini diarahkan pada peningkatan advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB, dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan angka kelahiran total (TFR) sebesar 2%.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program ini diarahkan pada peningkatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan anggota bina keluarga aktif sebesar 60,12%.

5.2.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program ini diarahkan pada Penyediaan perlengkapan jalan, peningkatan pengelolaan terminal penumpang tipe C, Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan angkutan umum orang dan/atau barang, dan Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan fasilitas parkir.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota sebesar 64,22%; (2) rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk sebesar 7,00 (dalam rasio); (3) jumlah trayek BRT sebanyak 13 trayek; (4) persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum sebesar 33%; dan (5) persentase pengelolaan Parkir on The Street sebesar 88%.

5.2.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan media komunikasi publik, peningkatan pelayanan informasi publik, dan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat sebesar 100%.
- b. Program Aplikasi Informatika
Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai penunjang pelayanan publik dan pemerintahan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselenggaranya pengelolaan *E-Government* sebesar 100%.

5.2.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Program ini diarahkan pada peningkatan fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, dan peningkatan fasilitasi pengajuan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam sebesar 3%.
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program ini diarahkan pada peningkatan kepatuhan koperasi pada peraturan perundang-undangan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi sebesar 50%.
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase Koperasi sehat sebesar 31%.

- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 10%; dan (2) persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi pelatihan sebesar 1%.
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase koperasi yang meningkat omsetnya sebesar 26%.
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan usaha, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran serta para pemangku kepentingan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan sebesar 3%.
- g. Program Pengembangan UMKM
Program ini diarahkan pada pengembaggan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya sebesar 20%.

5.2.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan dalam perizinan berinvestasi, dan penyediaan data informasi potensi peluang investasi di Kota Semarang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah penanam modal yang mendapat fasilitasi investasi sebanyak 3.691 penanam modal.

- b. Program Promosi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan promosi investasi baik melalui media cetak maupun elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA) sebanyak 492 investor.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase izin terbit sesuai SP sebesar 95%.
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu besaran rasio daya serap tenaga kerja dengan nilai 2,00.
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada peningkatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal sebesar 96%.

5.2.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumberdaya kepemudaan yang berdaya saing, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah organisasi kepemudaan yang aktif sebanyak 35 organisasi kepemudaan.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program ini diarahkan pada peningkatan pembinaan olahraga dan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, pengembangan olahraga berprestasi dan olahraga rekreasi, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) jumlah atlet prestasi sebanyak 1197 atlet; dan (2)

jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun sebanyak 5 lapangan;

- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah pembinaan pembentukan karakter bagi anggota pramuka Kota Semarang sebanyak 47 kegiatan.

5.2.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program ini diarahkan pada peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral sebesar 100%.

5.2.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Program ini diarahkan pada peningkatan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselenggaranya keamanan informasi Pemerintahan Daerah sebesar 100%.

5.2.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan apresiasi terhadap kegiatan budaya dan pelaku seni budaya.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase apresiasi kelompok/sanggar terhadap kegiatan seni budaya sebesar 20%.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Program ini diarahkan pada pembinaan kelompok/sanggar dan peningkatan tata kelola lembaga seni budaya tradisional.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase apresiasi kelompok/sanggar terhadap pengembangan seni budaya tradisional sebesar 20%.

- c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program ini diarahkan pada peningkatan pelestarian dan perlindungan cagar budaya.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar budaya sebesar 77,85%.

5.2.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan
Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan, pengembangan layanan perpustakaan elektronik, penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan, pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, dan gerakan budaya gemar membaca.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk sebesar 1,00.
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program ini diarahkan pada peningkatan pelestarian naskah kuni milik daerah; dan pengembangan koleksi budaya etnis.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan sebesar 100%.

5.2.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip
Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis, dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik sebesar 100%.
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program ini diarahkan pada perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana, dan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase jumlah arsip musnah sebesar 100%.

- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip
Program ini diarahkan peningkatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sebesar 60%.

5.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

5.2.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini diarahkan pada peningkatan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 3.055,90 ton.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudi daya ikan tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan dan peningkatan prasarana pembudidaya ikan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 3.845,95 ton.
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan usaha perikanan tangkap.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan sebanyak 4 kasus.
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program ini diarahkan pada pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasaran skala mikro dan kecil, dan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah produksi ikan olahan sebanyak 17.557,29 ton.

5.2.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan daya tarik wisata, dan pengelolaan destinasi pariwisata.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar 100%.

- b. Program Pemasaran Pariwisata
Program ini diarahkan pada penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media, fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata dan peningkatan kerjasama kemirataan pariwisata.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase daya tarik wisata yang dipasarkan sebesar 100%.
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program ini diarahkan pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase SDM Pariwisata sebesar 70%.

5.2.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini diarahkan pada penyediaan sarana pertanian, peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman, dan peningkatan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) produksi hasil peternakan sebesar 35.922,00 ton; dan (2) jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebesar 50.647,76 ton.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini diarahkan pada pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah produktivitas pertanian per ha per tahun sebesar 6,38 ton/ha.
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dan pengawanan peredaran hewan dan produk hewan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar -5%.

- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini diarahkan pada peningkatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terkait serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan sebesar 75%.

- e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian, dan penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyuluh pertanian.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama sebesar 28 kelompok tani.

5.2.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pengurusan izin pedagang pasar, PKL, tanda daftar gudang dan Surat Tanda Pendaftaran Wiralaba (STPW).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu sebesar 100%.

- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif sebanyak 22 pasar.

- c. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase koefisien variasi harga antar waktu sebesar 3,99%.

- d. Program Pengembangan Ekspor
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah nilai ekspor non migas sebesar US\$ 1.615.736.908.00.
- e. Program Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan dan pembinaan metrologi legal.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 76%.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program ini diarahkan pada peningkatan promosi dan pemasaran penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi sebesar 30%.

5.2.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini diarahkan pada pembangunan sumberdaya dan sarana prasarana industri, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan industri.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase pertambahan jumlah Sentra IKM sebesar 88%; (2) persentase pertambahan IKM sebesar 0,50%.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif sebesar 4%.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini diarahkan pada penyediaan data dan informasi industri.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase tersedianya data informasi industri sebesar 0,5%.

5.2.4. Unsur Pendukung

5.2.4.1. Sekretariat Daerah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan, peningkatan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan, peningkatan komunikasi dan publikasi kegiatan KDH, dan peningkatan kerjasama daerah dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Semarang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah sebesar 100%; (2) Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan sebanyak 9 kegiatan; (3) Persentase Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah sebesar 40%; (4) Persentase Indeks Pelayanan Publik sebesar 118%.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD, peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah sebesar 100%; (2) Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD sebanyak 1 dokumen; (3) Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa sebesar 100%.

5.2.4.2. Sekretariat DPRD

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas tugas dan fungsi DPRD.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah Raperda yang disetujui DPRD sebanyak 16 dokumen.

5.2.5. Unsur Penunjang

5.2.5.1. Perencanaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan peningkatan pengendalian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunna daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase capaian kinerja perencanaan tataran Kota sebesar 100%.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase capaian kinerja perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 100%; (2) persentase capaian kinerja perencanaan bidang perekonomian sumber daya alam sebesar 100%; (3) persentase capaian kinerja perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan sebesar 100%.

5.2.5.2. Keuangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan penganggaran penyusunan APBD, Peningkatan penatausahaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD, dan peningkatan kualitas pelaporan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase SILPA Terhadap APBD sebesar 1,22%; dan (2) presentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer sebesar 100%.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan penatausahaan barang milik daerah, dan peningkatan pelaporan barang milik daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase legalitas aset sebesar 80,48%.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan optimalisasi penggalan potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 10%.

5.2.5.3. Kepegawaian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan pengembangan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian daerah, peningkatan tertib administrasi kepegawaian, dan Peningkatan dan penegakan disiplin pegawai.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 239,43%; (2) persentase keterisian jabatan JPT pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi sebesar 100%; (3) persentase akurasi data kepegawaian sebesar 99%; (4) persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin sebesar 99%; (5) persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik sebesar 81%; (6) rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 19,19%; dan (7) rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 100%.

5.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis ASN, dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional) seminar, kursus, dan sejenisnya sebesar 40%.

5.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, dan pengembangan inovasi dan teknologi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebesar 100%.

5.2.6. Unsur Pengawas

5.2.6.1. Inspektorat Daerah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan internal dan peningkatan penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada level 3.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu nilai maturitas SPIP pada nilai 3,04.

5.2.7. Unsur Kewilayahan

5.2.7.1. Kecamatan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) sebesar 92,00%.

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan rata-rata sebesar 98,00%.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum sebesar 15,00%.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional rata-rata sebesar 92,00%.

5.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

5.2.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan pada peningkatan pemantapan pelaksanaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu besaran indeks pengamalan pancasila sebesar 2,10.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Program ini diarahkan pada peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai-partai politik, pemilihan umum/pemilihan KDH serta pemantauan situasi politik di daerah.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu besaran angka indeks kebebasan sipil sebesar 64.

- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaa dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu besaran indeks kinerja ormas sebesar 57.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program ini diarahkan peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu besaran indeks kerukunan umat beragama sebesar 70,50.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini diarahkan pada peningkatan pemantapan kewasdaan dini, kesejasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, dan penanganan konflik di daerah.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan IPOLEKSOSBUDHANKAM sebesar 82%.

Untuk mencapai target indikator program-program pada setiap urusan pemerintahan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum, setiap Perangkat Daerah melaksanakan Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat mendukung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator:

- 1) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan sebesar 100%;
- 2) persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN sebesar 100%;
- 3) persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sebesar 100%; dan
- 4) persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD sebesar 100%.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Per Bidang Urusan
Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	766.297.863.750	766.861.197.083	1.166.469.097.291	DISDIK
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	803.300.383.675	803.663.723.347	984.797.794.050	DINKES DAN RSWN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	651.721.931.497	700.234.431.497	722.834.872.394	DPU, DISTARU, DAN DISPERKIM
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	121.390.503.272	165.903.003.272	164.493.512.563	DISPERKIM
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	86.532.049.208	87.350.377.208	83.572.059.001	SATPOL PP, DAMKAR, DAN BPBD
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	30.437.981.436	30.801.314.769	34.912.253.286	DINSOS
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	17.194.306.543	17.594.306.539	18.068.525.696	DISNAKER
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.959.747.594	17.853.426.684	20.235.224.677	DP3A
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	13.119.150.139	14.852.150.139	16.128.345.325	DISHANPAN
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	24.190.801.010	24.315.801.010	24.453.615.101	DISTARU
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	131.731.704.358	132.531.704.358	152.935.139.133	DLH
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23.443.105.241	23.443.105.241	25.196.059.463	DISPENDUKCAPIL

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.171.709.265	1.186.848.175	1.781.406.145	DP3A
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.905.166.724	20.268.499.724	34.075.380.449	DISDALDUK KB
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	310.781.289.003	314.081.289.003	322.247.350.698	DISHUB
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	52.032.065.060	54.214.665.060	54.366.346.171	DISKOMINFO
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	24.702.036.168	25.435.036.168	31.686.684.236	DINKOPUKM
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	27.449.125.396	25.887.865.756	23.710.676.542	DPMPSTP
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	53.729.871.113	54.693.204.446	78.250.372.463	DISPORA
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	626.003.608	626.003.608	578.210.608	DISKOMINFO
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	690.921.720	690.921.720	730.921.720	DISKOMINFO
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	37.441.903.119	37.645.984.739	39.575.904.807	DISBUDPAR
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	13.668.032.092	14.316.065.367	14.384.598.464	ARPUSDA
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	916.464.790	1.131.764.515	1.130.668.875	ARPUSDA
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.361.104.449	14.487.151.049	13.981.906.090	PERIKANAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	17.909.344.331	17.988.523.304	22.834.786.154	DISBUDPAR
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.198.237.245	32.948.237.245	41.341.021.445	DISPERTAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	68.644.999.286	73.415.499.286	65.261.365.983	DISDAG

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	14.917.740.261	15.450.740.261	24.833.805.989	DISPERIN
30	SEKRETARIAT DAERAH	198.962.303.560	207.282.104.340	216.609.460.588	SEKRETARIAT DAERAH
31	SEKRETARIAT DPRD	129.984.475.359	111.905.273.587	112.634.147.228	SEKRETARIAT DPRD
32	PERENCANAAN	24.955.986.010	24.955.986.010	23.071.711.033	BAPPEDA
33	KEUANGAN	264.981.229.984	280.190.143.074	242.895.214.408	BPKAD DAN BAPENDA
34	KEPEGAWAIAN	26.694.710.466	26.694.710.466	28.766.902.449	BKPP
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.605.345.000	8.605.345.000	7.785.134.560	BKPP
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.047.450.000	2.047.450.000	2.246.290.000	BAPPEDA
37	INSPEKTORAT DAERAH	27.889.644.124	27.889.644.124	26.994.738.434	INSPEKTORAT
38	KECAMATAN	742.431.900.180	751.510.101.952	751.108.454.400	16 KECAMATAN
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51.131.882.876	52.867.882.876	59.705.402.920	KESBANGPOL
JUMLAH		4.856.150.468.912	4.983.821.482.002	5.656.685.360.839	

TABEL 5.3
PAGU INDIKATIF RENCANA PROGRAM
PERUBAHAN RKPd KOTA SEMARANG TAHUN 2023

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN					766.297.863.750	766.861.197.083	5.656.685.360.839
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	602.296.806.719	602.575.206.719	757.107.166.318
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115.62 %	115.62 %	115.62 %	92.137.657.887	92.706.591.220	336.976.328.876
		APK PAUD 5-6 tahun	85.87 %	85.87 %	85.87 %			
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	8.00 lembaga	8.00 lembaga	8.00 lembaga			
		APK SD/MI	111.71 %	111.71 %	111.71 %			
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.244.670.000	603.670.000	603.670.000
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.50 %	89.50 %	89.50 %	69.977.129.144	70.334.129.144	71.389.632.097
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100.00 %	100.00 %	100.00 %	641.600.000	641.600.000	392.300.000
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN				378.133.220.647	378.496.560.319		
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100.00 persentase	100.00 persentase	100.00 persentase	290.422.072.563	289.271.714.331	291.166.249.644
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran OPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00 persentase	100.00 persentase	100.00 persentase	87.061.576.884	88.575.474.788	169.792.543.323
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	293.921.200	293.921.200	1.485.198.133
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96.00 persen	96.00 persen	96.00 persen	250.000.000	250.000.000	580.319.892
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	105.650.000	105.450.000	2.925.652.565	

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD KRMT WONGSONEGORO					425.167.163.028	425.167.163.028	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	372.026.217.101	372.026.217.101	390.068.561.234
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100.00 %	100.00 %	100.00 %	53.140.945.927	53.140.945.927	128.779.269.259
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM					345.163.444.958	369.563.444.958	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU	100.00 %	100.00 %	100.00 %	34.091.162.250	35.341.162.250	38.142.874.866
		Persentase kinerja adminstrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97.86 %	97.86 %	97.86 %	28.471.938.141	30.921.938.141	275.738.008.502
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65.00 %	65.00 %	65.00 %	68.545.911.137	74.145.911.137	95.507.131.101
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.50 %	74.50 %	74.50 %	214.054.433.430	229.154.433.430	32.158.595.524
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG					209.865.760.048	224.665.760.048	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kualitas SDM	100.00 %	100.00 %	100.00 %	23.797.761.708	23.867.232.694	24.862.842.491
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	144.774.095.314	159.104.870.889	75.639.063.117
		Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4.900.000.000	4.900.000.000	3.357.808.798
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.257.746.036	1.357.746.036	2.110.015.912
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10.945.355.980	11.120.109.419	9.568.636.670
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	781.158.501	804.751.409	1.005.043.509
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	6.637.818.927	6.486.473.136	6.558.241.476
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 %	100.00 %	100.00 %	778.617.566	819.831.424	779.477.394
	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100.00 %	100.00 %	100.00 %			

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 %	100.00 %	100.00 %	15.497.917.035	15.650.947.322	15.654.997.322
	2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	313.621.984	313.621.984	313.621.984
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	181.666.997	240.175.735	142.233.416
1.04.1.03.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					242.274.030.773	296.224.030.773	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	46.447.853.524	46.447.853.524	54.692.286.425
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	69.69 %	69.69 %	69.69 %	290.462.481	890.462.481	2.375.762.481
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100.00 %	100.00 %	100.00 %			5.928.381.000
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90.86 %	90.86 %	90.86 %	976.028.762	976.028.762	6.036.211.941
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	48.00 %	48.00 %	48.00 %	112.749.649.507	121.587.149.507	143.262.686.535
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100.00 %	100.00 %	100.00 %	6.867.386.751	6.867.386.751	8.146.853.456
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	4.260.207.921	4.260.207.921	4.249.185.839
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99.15 %	99.15 %	99.15 %	9.624.631.895	11.762.131.895	12.545.495.052
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 %	100.00 %	100.00 %	61.057.809.932	103.432.809.932	93.006.545.247
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.31 %	44.31 %	44.31 %			
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)					35.833.852.469	35.833.852.469	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100.00 %	100.00 %	100.00 %	20.849.105.932	20.879.926.524	20.098.335.392
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol pp	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00 %	10.00 %	10.00 %	14.984.746.537	14.953.925.945	18.146.932.728

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN					35.778.351.681	36.233.346.681	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	21.553.426.484	21.608.959.900	14.361.702.443
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00 Persentase	100.00 Persentase	100.00 Persentase	14.224.925.197	14.624.386.781	14.834.741.248
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00 Persentase	100.00 Persentase	100.00 Persentase			
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00 persentase	100.00 persentase	100.00 persentase			
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					14.919.845.058	15.283.178.058	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	8.932.447.919	9.052.822.978	9.642.676.760
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13.00 %	13.00 %	13.00 %	5.987.397.139	6.230.355.080	6.487.670.430
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL					30.437.981.436	30.801.314.769	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10.715.209.966	10.796.621.178	10.730.976.564
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78.00 %	78.00 %	78.00 %	7.197.369.600	7.335.838.813	7.358.499.936

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100.00 %	100.00 %	100.00 %	54.023.060	54.023.060	45.413.532
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.81 %	99.81 %	99.81 %	6.629.844.930	6.706.511.596	9.434.013.628
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	69.85 %	69.85 %	69.85 %	4.743.785.480	4.799.530.946	6.337.803.540
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.097.748.400	1.108.789.176	1.005.546.086
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA					17.194.306.543	17.594.306.539	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12.906.866.543	12.906.866.543	12.482.942.275
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	65.00 %	65.00 %	65.00 %	162.400.000	162.400.000	51.531.000
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	77.00 %	77.00 %	77.00 %	2.555.760.000	2.688.760.000	3.950.677.750
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	66.00 %	66.00 %	66.00 %	824.980.000	1.091.979.996	919.074.671
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.30 %	5.30 %	5.30 %	744.300.000	744.300.000	664.300.000
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					19.131.456.859	19.040.274.859	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100.00 %	100.00 %	100.00 %	11.006.449.751	10.695.075.129	10.807.671.243
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.195.240.137	1.255.239.817	1.188.188.288
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14.00 Poin	14.00 Poin	14.00 Poin	2.372.584.298	2.392.849.258	2.130.227.624
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.952.860.000	2.046.855.000	1.885.339.165
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100.00 %	100.00 %	100.00 %	303.613.140	303.613.140	318.495.190
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100.00 %	100.00 %	100.00 %	575.654.060	639.054.060	3.473.094.597
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.01 %	0.01 %	0.01 %	553.346.208	520.740.280	432.208.570

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	252.226.040	252.226.040	78.056.220
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	919.483.225	934.622.135	1.703.349.925
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN					13.119.150.139	14.852.150.139	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	9.343.029.582	9.639.911.628	9.751.527.422
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	286.932.432	69.238.860	67.405.877
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3057.00 Kkal / Kapita / Tahun	3057.00 Kkal / Kapita / Tahun	3057.00 Kkal / Kapita / Tahun	2.704.743.880	3.172.137.852	4.458.550.527
		Presentase Cakupan Distribusi	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	4.00 %	4.00 %	4.00 %	109.195.275	196.732.830	170.902.680
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	81.50 %	81.50 %	81.50 %	675.248.970	1.774.128.969	1.679.958.819
2.11.1.03.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					131.731.704.358	132.531.704.358	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	39.441.858.878	39.797.579.422	48.841.775.943
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00 %	100.00 %	100.00 %	615.559.024	647.559.024	621.333.732
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 %	100.00 %	100.00 %	6.224.340.968	6.065.101.395	7.822.918.808
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59.00 %	59.00 %	59.00 %			
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87.00 %	87.00 %	87.00 %			
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20.00 Ha	20.00 Ha	20.00 Ha			

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00 %	2.00 %	2.00 %			
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100.00 %	100.00 %	100.00 %	866.083.646	866.083.646	854.294.162
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	56.00 %	56.00 %	56.00 %	363.971.800	399.971.800	380.196.509
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.40 %	85.40 %	85.40 %	691.927.835	723.917.837	706.029.187
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50.00 %	50.00 %	50.00 %	3.274.815.000	3.524.807.924	3.468.481.920
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11.50 %	11.50 %	11.50 %	291.129.200	291.129.200	581.176.175
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00 %	100.00 %	100.00 %	125.108.000	128.807.617	128.807.617
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.00 %	91.00 %	91.00 %	79.836.910.007	80.086.746.493	89.530.125.080
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	27.00 %	27.00 %	27.00 %			
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	72.00 %	72.00 %	72.00 %			
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					23.443.105.241	23.443.105.241	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	20.590.417.355	19.745.760.075	21.899.376.617
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.40 %	99.40 %	99.40 %	1.824.495.957	2.723.063.237	2.398.197.397
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71.00 %	71.00 %	71.00 %			
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.20 %	97.20 %	97.20 %	560.206.429	506.296.429	482.224.949

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100.00 %	100.00 %	100.00 %	346.827.620	346.827.620	297.352.620
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	121.157.880	121.157.880	118.907.880
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					19.905.166.724	20.268.499.724	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pealporan kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10.864.594.775	10.688.790.774	10.421.787.021
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase kinerjajrad administrasi dan pelaopran keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	684.178.460	808.499.460	1.115.571.020
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2.00 %	2.00 %	2.00 %	7.470.351.779	7.784.853.780	13.280.811.626
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.12 %	60.12 %	60.12 %	886.041.710	986.355.710	9.257.210.782
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN					310.781.289.003	314.081.289.003	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	69.699.407.770	71.076.995.812	75.208.083.695
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana DIInas Perhubungan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	64.22 %	64.22 %	64.22 %	241.081.881.233	243.004.293.191	247.039.267.003
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	88.00 persen	88.00 persen	88.00 persen			
		Jml trayek BRT	13.00 trayek	13.00 trayek	13.00 trayek			
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33.00 persen	33.00 persen	33.00 persen			
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7.00 rasio	7.00 rasio	7.00 rasio			
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					53.348.990.388	55.531.590.388	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100.00 %	100.00 %	100.00 %	14.969.402.643	14.593.651.900	15.305.552.307
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	5.604.524.500	5.992.717.012	6.391.580.562

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100.00 %	100.00 %	100.00 %	31.458.137.917	33.628.296.148	32.669.213.302
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00 %	100.00 %	100.00 %	626.003.608	626.003.608	578.210.608
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	690.921.720	690.921.720	730.921.720
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO					24.702.036.168	25.435.036.168	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	12.711.962.479	12.636.263.149	11.627.610.355
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00 Persen	3.00 Persen	3.00 Persen	214.521.290	214.521.290	214.521.290
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	554.915.380	554.915.380	423.919.290
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	31.00 Persen	31.00 Persen	31.00 Persen	366.205.089	366.205.089	366.205.089
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00 Persen	10.00 Persen	10.00 Persen	335.896.070	378.117.270	569.033.650
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00 Persen	1.00 Persen	1.00 Persen			
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	26.00 Persen	26.00 Persen	26.00 Persen	2.762.566.380	2.932.435.960	2.540.277.614
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00 persen	3.00 persen	3.00 persen	3.792.070.650	4.388.692.350	3.723.800.110
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00 %	20.00 %	20.00 %	3.963.898.830	3.963.885.680	12.221.316.838
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					27.449.125.396	25.887.865.756	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17.929.478.619	17.607.521.116	15.501.133.195
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3691.00 Penanam Modal	3691.00 Penanam Modal	3691.00 Penanam Modal	1.899.328.702	1.677.125.085	1.665.446.626
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492.00 Investor	492.00 Investor	492.00 Investor	2.547.128.842	1.972.815.361	1.830.917.151
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.00 %	95.00 %	95.00 %	3.732.587.965	3.375.109.445	3.300.692.269
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2.00 nilai	2.00 nilai	2.00 nilai	380.076.270	294.769.751	561.960.573

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96.00 %	96.00 %	96.00 %	960.524.998	960.524.998	850.526.728
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					53.729.871.113	54.693.204.446	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 %	100.00 %	100.00 %	15.720.160.262	15.659.955.922	15.554.086.480
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	35.00 Organisasi Kpemudaan	35.00 Organisasi Kpemudaan	35.00 Organisasi Kpemudaan	2.074.999.392	2.438.332.545	3.002.514.973
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	1197.00 jumlah	1197.00 jumlah	1197.00 jumlah	33.934.711.459	34.594.915.979	57.693.771.010
		Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00 Lapangan	5.00 Lapangan	5.00 Lapangan			
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	47.00 Kegiatan	47.00 Kegiatan	47.00 Kegiatan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					55.351.247.450	55.634.508.043	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	18.343.454.309	18.171.381.449	19.162.311.517
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20.00 %	20.00 %	20.00 %	10.463.354.290	11.802.538.770	12.493.445.020
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20.00 %	20.00 %	20.00 %	4.277.064.520	4.277.064.520	4.670.839.520
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77.85 %	77.85 %	77.85 %	3.395.000.000	3.395.000.000	3.249.308.750
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum yang sesuai standar	100.00 %	100.00 %	0.00	963.030.000	0	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00 %	100.00 %	100.00 %	13.500.000.000	13.500.000.000	17.557.409.883
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3.498.424.331	3.394.269.971	3.551.914.696
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	70.00 %	70.00 %	70.00 %	910.920.000	1.094.253.333	1.725.461.575
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH					14.584.496.882	15.447.829.882	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12.271.694.222	12.557.705.242	12.419.619.344
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00 rasio	1.00 rasio	1.00 rasio	1.307.921.937	1.653.644.405	1.725.868.020
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindungnya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	88.415.933	104.715.720	239.111.100
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	576.490.990	647.457.417	655.140.167
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	311.108.160	433.441.458	446.413.068
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60.00 %	60.00 %	60.00 %	28.865.640	50.865.640	29.115.640
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN					14.361.104.449	14.487.151.049	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	8.082.164.449	7.660.211.049	7.375.575.427
		Peningkatan Kapasitas SDM	30.00 Orang	30.00 Orang	30.00 Orang			
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3055.90 Ton	3055.90 Ton	3055.90 Ton	1.643.400.000	1.933.400.000	1.861.238.900
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3845.95 Ton	3845.95 Ton	3845.95 Ton	2.956.852.885	3.206.852.885	3.134.691.285
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	4.00 Kasus	4.00 Kasus	4.00 Kasus	283.192.355	333.192.355	333.192.355
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi ikan olahan	17557.29 Ton	17557.29 Ton	17557.29 Ton	1.395.494.760	1.353.494.760	1.277.208.123
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN					32.198.237.245	32.948.237.245	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	19.666.743.843	19.666.743.843	18.873.765.910
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	produksi hasil peternakan Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	35922.00 ton 50647.76 ton	35922.00 ton 50647.76 ton	35922.00 ton 50647.76 ton	5.918.669.202	6.418.669.202	8.211.623.526
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38 ton/ha	6.38 ton/ha	6.38 ton/ha	5.181.664.800	5.256.664.800	8.205.305.740
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 %	-5.00 %	-5.00 %	494.652.000	494.652.000	774.177.000
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75.00 %	75.00 %	75.00 %	187.400.000	237.400.000	236.350.000
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	28.00 kelompok	28.00 kelompok	28.00 kelompok	749.107.400	874.107.400	5.039.799.269

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN					68.644.999.286	73.415.499.286	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	37.783.834.286	37.143.389.786	34.944.738.998
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %	126.338.000	259.908.200	185.470.000
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	22.00 pasar	22.00 pasar	22.00 pasar	28.444.442.000	30.235.456.800	24.516.651.885
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.99 %	3.99 %	3.99 %	187.709.000	3.191.351.100	3.061.600.000
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1615736908.00 US\$	1615736908.00 US\$	1615736908.00 US\$	590.552.000	631.145.000	710.727.000
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76.00 %	76.00 %	76.00 %	804.852.000	1.127.846.200	1.082.495.900	
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30.00 %	30.00 %	30.00 %	707.272.000	826.402.200	759.682.200	
3.31.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN					14.917.740.261	15.450.740.261	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100.00 %	100.00 %	100.00 %	9.700.420.771	9.898.770.651	9.015.181.604
		Persentase tersedianyan Sarana Dam Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	88.00 %	88.00 %	88.00 %	4.652.019.490	4.986.669.610	15.309.238.898
		Persentase Pertambahan IKM	0.50 %	0.50 %	0.50 %			
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00 %	4.00 %	4.00 %	176.460.000	176.460.000	176.460.000
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	0.50 %	0.50 %	388.840.000	388.840.000	332.925.487	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH					198.962.303.560	207.282.104.340	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	147.320.402.183	148.036.815.823	151.460.039.909
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	41.00 OPD	41.00 OPD	41.00 OPD			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		peningkatan kemampuan ASN Bagian TU	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	40.00 persen	40.00 persen	40.00 persen			
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	118.00 persen	118.00 persen	118.00 persen	47.104.561.945	53.617.072.945	58.335.546.500
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 Kegiatan	9.00 Kegiatan	9.00 Kegiatan			
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	40.00 persen	40.00 persen	40.00 persen			
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	4.537.339.432	5.628.215.572	6.813.874.179
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen			
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD					129.984.475.359	111.905.273.587	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	66.842.330.639	68.155.589.159	68.884.462.800
		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	16.00 dokumen	16.00 dokumen	16.00 dokumen	63.142.144.720	43.749.684.428	43.749.684.428

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					27.003.436.010	27.003.436.010	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100.00 %	100.00 %	100.00 %	14.844.128.510	14.693.846.010	11.947.976.033
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.317.020.000	2.331.830.000	2.631.830.000
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00 %	100.00 %	100.00 %	7.794.837.500	7.930.310.000	8.491.905.000
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.047.450.000	2.047.450.000	2.246.290.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					167.934.451.827	182.974.364.917	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.298.487.866	100.298.487.866	107.822.716.481
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	1.22 %	1.22 %	1.22 %	63.203.258.455	78.193.171.545	36.972.635.980
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	80.48 %	80.48 %	80.48 %	4.432.705.506	4.482.705.506	4.536.608.902
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH					97.046.778.157	97.215.778.157	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %	68.712.604.400	69.005.235.595	67.503.129.256
		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	10.00 %	10.00 %	28.334.173.757	28.210.542.562	26.060.123.789

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					35.300.055.466	35.300.055.466	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	17.020.709.175	16.945.709.175	19.007.677.157
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen	239.43 Persen	239.43 Persen	9.674.001.291	9.749.001.291	9.759.225.292
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen	99.00 Persen	99.00 Persen			
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen	99.00 Persen	99.00 Persen			
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen	81.00 Persen	81.00 Persen			
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen	19.19 Persen	19.19 Persen			
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen	40.00 Persen	40.00 Persen	8.605.345.000	8.605.345.000	7.785.134.560
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT					27.889.644.124	27.889.644.124	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	19.914.295.601	19.917.755.021	19.612.914.971
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 leveling	3.00 leveling	3.00 leveling	2.949.636.853	2.949.036.853	2.712.407.863
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.04 nilai	3.04 nilai	3.04 nilai	5.025.711.670	5.022.852.250	4.669.415.600

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN					38.419.238.041	38.937.363.041	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	11.867.439.941	11.834.162.341	13.071.413.734
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	2.543.940.100	2.700.142.700	2.671.187.770
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	98.00 persen	98.00 persen	23.836.928.000	24.232.128.000	22.908.250.637
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen	87.930.000	87.930.000	87.930.000	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	83.000.000	83.000.000	83.000.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SEMARANG UTARA					42.868.026.091	43.386.151.091	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	11.852.170.431	11.868.927.777	12.409.995.159
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	3.066.793.880	3.236.179.394	3.243.093.735
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 Persen	98.00 Persen	98.00 Persen	27.873.761.780	28.180.922.492	26.942.631.547
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 Persen	15.00 Persen	15.00 Persen	5.550.000	5.550.000	20.550.000	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 Persen	92.00 Persen	92.00 Persen	69.750.000	94.571.428	94.571.428	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SEMARANG BARAT					61.368.563.101	61.886.688.101	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	17.473.800.181	17.348.111.010	19.173.914.585
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	92.00 Persen	92.00 Persen	4.079.931.398	4.198.056.398	4.200.423.998
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 Persen	98.00 Persen	98.00 Persen	39.716.555.539	40.242.244.710	39.133.504.602	

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 Persen	15.00 Persen	15.00 Persen	14.232.061	14.232.061	14.232.061
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 Persen	92.00 Persen	92.00 Persen	84.043.922	84.043.922	84.043.922
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR					41.634.104.531	41.752.229.531	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	13.045.351.032	13.047.708.832	13.665.883.313
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	3.080.253.499	3.196.020.699	3.096.047.599
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 persen	98.00 persen	98.00 persen	25.385.200.000	25.385.200.000	24.496.026.278
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen	35.000.000	35.000.000	65.000.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	88.300.000	88.300.000	88.300.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH					51.222.538.734	51.740.663.734	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	17.949.597.007	17.966.175.217	20.901.204.538
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	3.597.428.550	3.697.342.300	3.694.902.300
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	92.00 Persen	92.00 Persen	92.00 Persen	29.570.558.177	29.972.191.217	28.564.684.740
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.00 Persen	12.00 Persen	12.00 Persen	22.500.000	22.500.000	22.500.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.00 persen	30.00 persen	30.00 persen	82.455.000	82.455.000	82.455.000

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNGPATI					54.152.779.933	54.870.904.933	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	18.014.841.495	18.003.100.195	19.969.728.115
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	3.753.773.720	4.271.112.220	4.283.018.616
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 Persen	98.00 Persen	98.00 Persen	32.259.967.518	32.259.967.518	30.651.844.366
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen	48.522.200	48.975.000	48.975.000	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 Persen	92.00 Persen	92.00 Persen	75.675.000	287.750.000	280.550.000	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TUGU					26.580.288.045	26.942.513.931	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	9.756.263.069	9.762.600.148	10.468.050.106
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	2.087.256.917	2.205.381.917	2.129.075.020
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	98.00 persen	98.00 persen	14.641.600.509	14.879.364.316	14.025.145.742
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen	22.500.000	22.500.000	22.500.000	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	72.667.550	72.667.550	72.667.550	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MIJEN					53.460.064.934	53.578.189.934	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	20.610.986.734	20.610.986.734	21.124.563.333
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	92.00 Persen	92.00 Persen	3.542.321.200	3.660.446.200	3.617.107.640
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 Persen	98.00 Persen	98.00 Persen	29.165.235.000	29.165.235.000	27.819.187.526	

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 Persen	15.00 Persen	15.00 Persen	50.830.000	50.830.000	50.830.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 Persen	92.00 Persen	92.00 Persen	90.692.000	90.692.000	90.692.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN GENUK					53.551.718.618	54.669.843.618	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	17.198.708.085	17.230.375.785	18.647.499.909
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	3.292.260.490	4.394.540.790	4.275.592.867
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 persen	98.00 persen	98.00 persen	32.883.632.793	32.867.809.793	31.315.041.184
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen	68.535.710	68.535.710	64.035.710
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	108.581.540	108.581.540	108.581.540
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR					33.350.181.442	33.468.306.442	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	12.017.216.442	12.085.141.442	13.419.611.025
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94.00 %	94.00 %	94.00 %	2.741.415.000	2.928.290.000	2.892.185.303
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97.00 %	97.00 %	97.00 %	18.434.750.000	18.294.950.000	17.275.721.906
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 %	15.00 %	15.00 %	79.800.000	80.650.000	80.650.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85.00 %	85.00 %	85.00 %	77.000.000	79.275.000	79.275.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG					59.760.618.417	60.678.743.417	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	15.063.278.417	14.996.385.417	15.963.407.827

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
	KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91.00 persen	91.00 persen	91.00 persen	2.931.990.000	3.901.808.000	3.901.565.892
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 persen	98.00 persen	98.00 persen	41.619.350.000	41.638.550.000	39.555.486.678
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen	50.000.000	49.000.000	49.000.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70.00 persen	70.00 persen	70.00 persen	96.000.000	93.000.000	93.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN CANDISARI					33.204.494.580	33.322.619.580	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	10.736.158.454	10.702.542.873	11.251.255.410
		Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	2.00 angka	2.00 angka	2.00 angka	2.698.777.036	2.840.602.557	2.785.920.643
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	92.00 Persen	92.00 Persen			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	19.614.220.590	19.624.135.650	18.847.011.560
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen	80.000.000	80.000.000	41.681.154
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.00 angka	5.00 angka	5.00 angka	75.338.500	75.338.500	74.800.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK					50.326.189.483	50.644.314.483	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	15.381.159.149	15.355.061.967	17.072.743.501
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	2.782.930.570	2.921.752.746	2.892.181.466
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 persen	98.00 persen	98.00 persen	32.075.320.000	32.175.320.003	30.580.586.462

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen	16.200.000	21.600.000	16.200.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	70.579.764	170.579.767	166.000.003
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN					49.668.402.192	51.530.628.078	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	14.070.992.192	14.494.744.192	15.833.470.667
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	92.00 Persen	92.00 Persen	2.686.896.000	2.841.269.000	2.845.301.691
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	98.00 persen	98.00 persen	32.754.762.000	34.038.862.886	32.221.989.361
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen	63.283.000	63.283.000	59.683.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen			
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	92.469.000	92.469.000	86.169.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN GAYAMSARI					32.213.546.228	32.531.671.228	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	11.062.570.154	11.012.184.252	12.353.148.452
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	2.028.424.226	2.166.176.896	2.154.086.066
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00 Persentase	98.00 Persentase	98.00 Persentase	19.026.951.848	19.257.710.080	18.421.296.318
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 Persen	15.00 Persen	15.00 Persen	18.850.000	18.850.000	25.504.640
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	76.750.000	76.750.000	76.750.000

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	RKPD P	RKPD	APBD	RKPD P
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN					60.651.145.810	61.569.270.810	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	80.00 %	80.00 %	80.00 %	17.238.254.610	17.209.331.934	19.099.386.581
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	2.959.987.338	3.922.205.594	3.818.190.840
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	98.00 persen	98.00 persen	40.337.923.512	40.338.273.512	39.159.943.364
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen	64.000.000	48.479.420	18.000.000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	50.980.350	50.980.350	16.817.420
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					51.131.882.876	52.867.882.876	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	6.194.066.876	6.087.093.876	5.880.814.920
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.00 Indeks	2.00 Indeks	2.00 Indeks	1.091.118.000	1.523.554.000	1.450.131.000
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	64.00 angka indeks	64.00 angka indeks	64.00 angka indeks	36.517.196.000	36.895.513.000	44.063.237.000
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	57.00 indeks	57.00 indeks	57.00 indeks	1.673.762.000	1.717.684.000	1.769.410.000
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	71.00 indeks	71.00 indeks	71.00 indeks	3.143.816.000	3.674.620.000	3.520.747.000
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	82.00 prosentase	82.00 prosentase	82.00 prosentase	2.511.924.000	2.969.418.000	3.021.063.000
JUMLAH						4.856.150.468.912	4.983.821.482.002	5.656.685.360.839

TABEL 5.4
Matrik Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Perubahan RKPd Kota Semarang Tahun 2023

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN								766.297.863.750	766.861.197.083	1.166.469.097.291	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								164.001.057.031	164.285.990.364	409.361.930.973	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115,62%	APK SMP/MTs	115,62%	115,62%	115,62%		92.137.657.887	92.706.591.220	336.976.328.876	
		APK PAUD 5-6 tahun	85,87%	APK PAUD 5-6 tahun	85,87%	85,87%	85,87%					
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	8 lembaga	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	8 lembaga	8 lembaga	8 lembaga					
		APK SD/MI	111,71%	APK SD/MI	111,71%	111,71%	111,71%					
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100,00%	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100,00%	100,00%	100,00%		30.568.500.000	32.816.600.000	170.086.026.840	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	19 Ruang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	19 Ruang	19 Ruang	19 Ruang		2.184.417.000	2.184.417.000	2.173.917.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit		613.000.000	613.000.000	1.259.377.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	32 Ruang	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	144 Ruang	144 Ruang	144 Ruang		7.332.144.000	7.332.144.000	5.747.364.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4 Ruang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang		200.000.000	200.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2 Ruang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang		200.439.000	400.439.000	485.749.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	13 Unit		1.050.000.000	3.150.000.000	2.836.900.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	13 Unit	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	12 Paket	12 Paket	100 Paket		920.000.000	920.000.000	20.112.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	48 Unit	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16 Paket	16 Paket	16 Paket		500.000.000	500.000.000	3.009.839.840	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	5.555 set	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5.555 Unit	-	-		600.000.000	-	-	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	8.688 Siswa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13.415 Peserta Didik	13.415 Peserta Didik	13.415 Peserta Didik		14.051.300.000	14.006.300.000	13.996.300.000	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	4.727 Siswa									DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	327 set	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	16 Paket	16 Paket	16 Paket		100.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	28.665 Siswa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan		295.300.000	768.400.000	768.400.000	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	49.714 Siswa									DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Evaluasi dan Kajian	24 Dokumen	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan		430.000.000	430.000.000	613.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	42 lomba	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5.000 Peserta Didik	5.000 Peserta Didik	5.000 Peserta Didik		596.800.000	696.800.000	826.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.600 Orang	1.600 Orang	1.600 Orang		319.000.000	319.000.000	293.080.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi sekolah	2 Kegiatan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan		941.500.000	941.500.000	750.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	88.951 Siswa	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	-	502 Satuan Pendidikan		-	-	116.638.200.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	3 Kegiatan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	502 Orang	502 Orang	502 Orang		234.600.000	254.600.000	274.600.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,00%	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,00%	100,00%	100,00%		49.108.040.000	47.245.540.000	121.581.724.506	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 unit	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit		20.000.000.000	10.601.862.137	10.601.862.137	DINAS PENDIDIKAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	32 Ruang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	34 Ruang	34 Ruang	34 Ruang	11.405.000.000	17.673.137.863	15.605.823.748	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Ruang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	3 Ruang	-	-	217.881.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Ruang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	1.655.240.000	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah pengadaan sarpras	5 Unit								DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	96 Ruang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	97 Ruang	-	-	240.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	2 Ruang	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	2 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 Ruang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	4 Unit	550.000.000	1.448.000.000	1.681.669.829	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	4 Paket	300.000.000	338.064.000	338.064.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	7 Paket	7 Paket	449.640.000	661.576.000	4.237.026.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	1.120 set	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	46 Paket	-	-	225.000.000	-	-	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	5.329 Siswa	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5.333 Peserta Didik	5.333 Peserta Didik	5.333 Peserta Didik	13.209.300.000	13.334.300.000	13.327.384.756	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	4.670 Siswa								DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Sekolah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	-	-	250.000.000	-	-	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 Kegiatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	224 Peserta Didik	224 Peserta Didik	224 Peserta Didik	897.700.000	1.217.200.000	1.158.678.630	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	10 Dokumen	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	500.000.000	600.000.000	990.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	14 Lomba	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2.240 Peserta Didik	2.240 Peserta Didik	2.240 Peserta Didik	596.000.000	646.000.000	825.569.278	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900 Orang	900 Orang	900 Orang	197.600.000	197.600.000	169.727.720	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi Sekolah	2 Kegiatan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	190 Satuan Pendidikan	190 Satuan Pendidikan	190 Satuan Pendidikan	148.200.000	148.200.000	86.042.560	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Menengah Pertama	33.615 Siswa	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	-	190 Satuan Pendidikan	-	-	70.124.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	190 Orang	190 Orang	179.600.000	179.600.000	172.254.848	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100,00%	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100,00%	100,00%	100,00%	11.150.240.000	11.314.173.333	39.274.499.643	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3 Unit	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	6.150.000.000	6.150.000.000	5.659.012.500	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	300.000.000	300.000.000	717.441.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	6 Unit	6 Unit	295.000.000	295.000.000	295.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	4 Unit	280.000.000	280.000.000	280.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	2 Unit	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	205.000.000	205.000.000	1.013.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	14 Sekolah	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	245.000.000	245.000.000	444.975.840	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pemenuhan SPM PAUD	860 Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	11 Paket	-	-	100.000.000	-	-	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	1.795 Siswa	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.795 Peserta Didik	1.795 Peserta Didik	1.795 Peserta Didik	2.548.040.000	2.548.040.000	2.548.040.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	14 Sekolah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	39.569 Peserta Didik	39.569 Peserta Didik	39.569 Peserta Didik	333.200.000	597.133.333	597.133.333	DINAS PENDIDIKAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen Evaluasi dan Kajian	12 Dokumen	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	150.000.000	150.000.000	378.096.970	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	5 Orang	5 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kegiatan monitoring, Pendampingan akreditasi dan lomba	3 Kegiatan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	194.000.000	194.000.000	194.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	49.205 Siswa	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	-	1.259 Satuan Pendidikan	-	-	26.797.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100,00%	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100,00%	100,00%	100,00%	1.310.877.887	1.330.277.887	6.034.077.887	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	-	700.000.000	700.000.000	-	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	199 Siswa	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	3 Kegiatan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3.450 Peserta Didik	3.450 Peserta Didik	3.450 Peserta Didik	61.400.000	61.400.000	61.400.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	1 Satpen	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	91.877.887	91.877.887	91.877.887	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	3 Kegiatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3.450 Peserta Didik	3.450 Peserta Didik	3.450 Peserta Didik	166.600.000	186.000.000	186.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang	50 Orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	3.515 siswa	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	-	84 Satuan Pendidikan	-	-	5.403.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100,00%	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100,00%	100,00%	100,00%	1.244.670.000	603.670.000	603.670.000	
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100,00%	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100,00%	100,00%	100,00%				
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100,00%	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100,00%	100,00%	100,00%	841.000.000	200.000.000	200.000.000	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2 Kegiatan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	197.600.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2 Kegiatan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	147.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2 Kegiatan	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	63.606 Buku	63.606 Buku	63.606 Buku	200.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2 Kegiatan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	50 Orang	296.400.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100,00%	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100,00%	100,00%	100,00%	403.670.000	403.670.000	403.670.000	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	183.200.000	183.200.000	183.200.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5 Kegiatan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	70.470.000	70.470.000	70.470.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	10.550 Buku	10.550 Buku	10.550 Buku	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89,50%	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89,50%	89,50%	89,50%	69.977.129.144	70.334.129.144	71.389.632.097	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,00%	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,00%	100,00%	100,00%	69.977.129.144	70.334.129.144	71.389.632.097	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5.387 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	66.629.129.144	66.629.129.144	67.684.632.097	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah non ASN Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.395 Orang 2 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	3.348.000.000	3.705.000.000	3.705.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100,00%	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100,00%	100,00%	100,00%	641.600.000	641.600.000	392.300.000	
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100,00%	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100,00%	100,00%	100,00%				
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100,00%	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	278.600.000	278.600.000	101.700.000	
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	4 Sekolah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	133.200.000	133.200.000	101.700.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	1 Sekolah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	145.400.000	145.400.000	-	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100,00%	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	363.000.000	363.000.000	290.600.000	
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	290 Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	142.000.000	142.000.000	197.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	200 Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	93.600.000	93.600.000	93.600.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Workshop yang terlaksana	4 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	-	127.400.000	127.400.000	-	DINAS PENDIDIKAN
X.XX	NON URUSAN							602.296.806.719	602.575.206.719	757.107.166.318	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	602.296.806.719	602.575.206.719	757.107.166.318	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan	100,00%	Dokumen Pelaporan	100,00%	100,00%	100,00%	78.000.000	78.000.000	74.000.000	
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	17 dok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	1 dok	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan Capaian	12 dok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	3 dok	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	10.000.000	10.000.000	6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	580.695.284.805	580.695.284.805	731.023.747.072	
		Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.429 Orang/bulan	6.429 Orang/bulan	6.429 Orang/bulan	575.428.004.405	575.428.004.405	725.857.314.832	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100,00%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.239.880.400	5.239.880.400	5.139.032.240	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semester	2 dok	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	17.400.000	17.400.000	17.400.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100,00%	Pelaporan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	44.000.000	44.000.000	505.520.000	
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	2 dok	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	44.000.000	44.000.000	505.520.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100,00%	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	2.343.560.000	2.529.133.812	4.332.578.421	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	100,00%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	200.000.000	200.000.000	160.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	100,00%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	250.000.000	285.891.628	249.201.628	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	100,00%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	250.000.000	250.000.000	2.151.763.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	100,00%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	300.000.000	300.000.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	125.568.000	125.568.000	100.568.000	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	500 Orang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	892.992.000	1.014.320.000	1.067.403.915	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100,00%	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	325.000.000	353.354.184	303.641.878	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	300.000.000	353.622.191	433.350.106	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	100,00%	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	300.000.000	353.622.191	433.350.106	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	16.957.115.427	16.957.115.427	18.226.330.326	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	16.099.825.427	16.099.825.427	17.418.912.336	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	857.290.000	857.290.000	807.417.990	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	1.878.846.487	1.918.050.484	2.511.640.393	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	194.863.630	194.863.630	194.863.630	DINAS PENDIDIKAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	124 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 Unit	125 Unit	125 Unit	903.982.857	903.982.857	903.982.857	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	400.000.000	401.356.077	831.356.077	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100,00%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	300.000.000	337.847.920	461.437.829	DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100,00%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit	16 Unit	80.000.000	80.000.000	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN							378.133.220.647	378.496.560.319	465.949.963.557	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							87.711.148.084	89.224.845.988	174.783.713.913	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	87.061.576.884	88.575.474.788	169.792.543.323	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	16.426.489.770	20.678.594.236	45.580.931.033	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	jumlah pembangunan puskesmas	-	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	-	-	359.750.000	-	-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit		-	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	-	1 Unit	-	-	2.314.612.226	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	jumlah pustu menjadi puskesmas induk	1 unit	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	2 Unit	4.300.000.000	4.300.000.000	12.310.081.194	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlah puskesmas yang direhabilitasi	1 unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	6 Unit	8 Unit	640.250.000	1.400.000.000	2.729.350.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah sarana prasarana puskesmas	15 paket	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	3.239.849.020	3.239.849.020	4.900.024.490	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	1 paket	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	17 Unit	-	-	1.467.966.690	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah ketersediaan alkes dan alat penunjang medis di fasyankes	1 paket	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	4.686.640.750	4.026.860.216	9.947.345.321	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	32,00 persentase	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	32 Paket	3.200.000.000	7.711.885.000	6.952.459.112	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah item bahan habis pakai dan BMHP	75 unit	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	-	-	75 Paket	-	-	4.959.092.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100,00 persentase	terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	62.049.744.094	58.233.145.312	114.508.813.930	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00 persentase	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.388 Orang	24.388 Orang	24.388 Orang	105.130.000	38.530.000	3.136.914.000	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	-	180 Orang				PUSKESMAS PONCOL
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148 Orang	-	148 Orang				PUSKESMAS MIROTO
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.412 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.412 Orang	-	24.388 Orang				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	517 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	517 Orang	-	517 Orang				PUSKESMAS BULU LOR
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	689 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	689 Orang	-	689 Orang				PUSKESMAS HALMAHERA
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	278 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	278 Orang	-	262 Orang				PUSKESMAS BUGANGAN
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	355 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	355 Orang	-	355 Orang				PUSKESMAS KARANGDORO
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	398 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	398 Orang	-	398 Orang				PUSKESMAS PANDANARAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255 Orang	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	-	592 Orang				PUSKESMAS KARANGAYU
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	398 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	398 Orang	-	398 Orang				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	515 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	515 Orang	-	515 Orang				PUSKESMAS MANYARAN
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288 Orang	-	288 Orang				PUSKESMAS KROBOKAN
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	449 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	449 Orang	-	449 Orang				PUSKESMAS NGENEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.079 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.079 Orang	-	1.079 Orang				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	679 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	679 Orang	-	648 Orang				PUSKESMAS CANDILAMA
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	352 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	352 Orang	-	352 Orang				PUSKESMAS KAGOK
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	941 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	941 Orang	-	740 Orang				PUSKESMAS PEGANDAN
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	776 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	776 Orang	-	766 Orang				PUSKESMAS GENUK
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.616 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.616 Orang	-	1.616 Orang				PUSKESMAS BANGETAYU
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.477 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.477 Orang	-	1.477 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.253 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.253 Orang	-	1.253 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.726 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.726 Orang	-	1.726 Orang				PUSKESMAS KEDUNGUNDU
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	633 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	633 Orang	-	24.388 Orang				PUSKESMAS ROWOSARI
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	497 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	497 Orang	-	497 Orang				PUSKESMAS NGESREP
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	-	647 Orang				PUSKESMAS PADANGSARI
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	647 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	647 Orang	-	365 Orang				PUSKESMAS SRONDOL
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	535 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	535 Orang	-	535 Orang				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	878 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	878 Orang	-	878 Orang				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	206 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	206 Orang	-	206 Orang				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.138 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.138 Orang	-	1.138 Orang				PUSKESMAS MIJEN
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	579 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	579 Orang	-	634 Orang				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	519 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	602 Orang	-	519 Orang				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.138 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.138 Orang	-	1.138 Orang				PUSKESMAS NGALIYAN
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	355 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	355 Orang	-	355 Orang				PUSKESMAS MANGKANG
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251 Orang	-	251 Orang				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	-	600 Orang				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00 persentase	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.023 Orang	23.023 Orang	23.023 Orang	162.495.000	96.790.000	93.951.520	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	177 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	177 Orang	-	-				PUSKESMAS PONCOL
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155 Orang	-	-				PUSKESMAS MIROTO
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.398 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.398 Orang	-	-				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang	-	-				PUSKESMAS BULU LOR
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang	-	-				PUSKESMAS HALMAHERA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPDEM 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	276 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	276 Orang	-	-					PUSKESMAS BUGANGAN
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	339 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	339 Orang	-	-					PUSKESMAS KARANGDORO
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282 Orang	-	-					PUSKESMAS PANDANARAN
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216 Orang	-	-					PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	375 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	375 Orang	-	-					PUSKESMAS KARANGAYU
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	393 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	393 Orang	-	-					PUSKESMAS LEBDOSARI
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	499 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	499 Orang	-	-					PUSKESMAS MANYARAN
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	277 Orang	-	-					PUSKESMAS KROBOKAN
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	-	-					PUSKESMAS NGENEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	892 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	892 Orang	-	-					PUSKESMAS GAYAMSARI
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	578 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	578 Orang	-	-					PUSKESMAS CANDILAMA
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	324 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	324 Orang	-	-					PUSKESMAS KAGOK
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	938 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	938 Orang	-	-					PUSKESMAS PEGANDAN
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	751 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	751 Orang	-	-					PUSKESMAS GENUK
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.466 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.466 Orang	-	-					PUSKESMAS BANGETAYU
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.298 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.298 Orang	-	-					PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.243 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.243 Orang	-	-					PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.711 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.711 Orang	-	-					PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang	-	-					PUSKESMAS ROWOSARI
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	491 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	491 Orang	-	-					PUSKESMAS NGESREP
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289 Orang	-	-					PUSKESMAS PADANGSARI
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632 Orang	-	-					PUSKESMAS SRONDOL
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	512 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	512 Orang	-	-					PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	872 Orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	872 Orang	-	-					PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203 Orang	-	-					PUSKESMAS KARANGMALANG
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.134 orang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.134 Orang	-	-					PUSKESMAS MIJEN
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00 persentase	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22.453 Orang	22.453 Orang	22.453 Orang	96.945.000	96.945.000	93.212.750		DINAS KESEHATAN
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	171 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	171 Orang	-	-					PUSKESMAS PONCOL
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.387 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.387 Orang	-	-					PUSKESMAS BANDARHARJO
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	516 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	516 Orang	-	-					PUSKESMAS BULU LOR
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268 Orang	-	-					PUSKESMAS BUGANGAN
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	-	-					PUSKESMAS KARANGDORO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	365 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	365 Orang	-	-				PUSKESMAS KARANGAYU
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	389 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	389 Orang	-	-				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	-	-				PUSKESMAS MANYARAN
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	269 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	269 Orang	-	-				PUSKESMAS KROBOKAN
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	562 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	562 Orang	-	-				PUSKESMAS CANDILAMA
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	954 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	954 Orang	-	-				PUSKESMAS PEGANDAN
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	730 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	730 Orang	-	-				PUSKESMAS GENUK
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.424 Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.424 Orang	-	-				PUSKESMAS BANGETAYU
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.295 Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.295 Orang	-	-				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.713 Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.713 Orang	-	-				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	485 Orang	-	-				PUSKESMAS ROWOSARI
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	470 Orang	-	-				PUSKESMAS NGSREP
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268 Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268 Orang	-	-				PUSKESMAS PADANGSARI
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	614 Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	614 Orang	-	-				PUSKESMAS SRONDOL
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754 Orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	754 Orang	-	-				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191 Orang	-	-				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.146 orang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.146 Orang	-	-				PUSKESMAS MIJEN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100.828 Orang	100.828 Orang	100.828 Orang	120.430.000	47.850.000	763.702.500	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.251 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.251 Orang	-	1.251 Orang				PUSKESMAS PONCOL
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	520 Orang	-	520 Orang				PUSKESMAS MIROTO
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.658 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.658 Orang	-	100.828 Orang				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.309 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.309 Orang	-	2.309 Orang				PUSKESMAS BULU LOR
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	990 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	990 Orang	-	990 Orang				PUSKESMAS HALMAHERA
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	906 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	906 Orang	-	745 Orang				PUSKESMAS BUGANGAN
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.462 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.462 Orang	-	1.462 Orang				PUSKESMAS KARANGDORO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.531 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.531 Orang	-	1.362 Orang				PUSKESMAS PANDAMARAN
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.025 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.025 Orang	-	626 Orang				PUSKESMAS KARANGAYU
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.805 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.805 Orang	-	1.805 Orang				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.357 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.357 Orang	-	2.357 Orang				PUSKESMAS MANYARAN
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.138 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.138 Orang	-	1.138 Orang				PUSKESMAS KROBOKAN
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.606 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.606 Orang	-	1.606 Orang				PUSKESMAS NEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.078 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.078 Orang	-	4.078 Orang				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.539 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.539 Orang	-	2.380 Orang				PUSKESMAS CANDILAMA
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.902 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.902 Orang	-	1.902 Orang				PUSKESMAS KAGOK
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.642 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.642 Orang	-	2.232 Orang				PUSKESMAS PEGANDAN
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.864 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.864 Orang	-	2.864 Orang				PUSKESMAS GENUK
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.606 Orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.606 Orang	-	6.606 Orang				PUSKESMAS BANGETAYU
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	-	136 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.803 Orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.803 Orang	-	4.803 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.535 Orang	-	9.535 Orang				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.656 Orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.656 Orang	-	100.828 Orang				PUSKESMAS ROWOSARI
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.580 Orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.580 Orang	-	2.580 Orang				PUSKESMAS NGESREP
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.222 Orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.222 Orang	-	2.400 Orang				PUSKESMAS PADANGSARI
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.742 Orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.742 Orang	-	1.188 Orang				PUSKESMAS SRONDOL
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48 Orang	-	48 Orang				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.882 Orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.882 Orang	-	3.882 Orang				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.007 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.007 Orang	-	1.007 Orang				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.584 orang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.584 Orang	-	4.584 Orang				PUSKESMAS MIJEN
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.095 Orang	-	2.187 Orang				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.521 Orang	-	1.747 Orang				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.584 Orang	-	4.584 Orang				PUSKESMAS NGALIYAN
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	666 Orang	-	666 Orang				PUSKESMAS MANGKRANG
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.223 Orang	-	1.223 Orang				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.500 Orang	-	2.500 Orang				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227.547 Orang	227.547 Orang	227.547 Orang	40.000.000	40.000.000	1.084.941.885	DINAS KESEHATAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8 Orang	-	8 Orang				PUSKESMAS PONCOL
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	720 Orang	-	720 Orang				PUSKESMAS MIROTO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227.547 Orang	-	227.547 Orang				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.930 Orang	-	5.930 Orang				PUSKESMAS BULU LOR
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.505 Orang	-	3.505 Orang				PUSKESMAS HALMAHERA
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.376 Orang	-	1.887 Orang				PUSKESMAS BUGANGAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.898 Orang	-	3.898 Orang				PUSKESMAS KARANGDORO
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.631 Orang	-	2.631 Orang				PUSKESMAS PANDANARAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.543 Orang	-	152 Orang				PUSKESMAS KARANGYAYU
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.820 Orang	-	6.820 Orang				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.723 Orang	-	3.723 Orang				PUSKESMAS MANYARAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.291 Orang	-	1.291 Orang				PUSKESMAS KROBOKAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.270 Orang	-	1.270 Orang				PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.262 Orang	-	8.262 Orang				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.454 Orang	-	6.454 Orang				PUSKESMAS CANDILAMA
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.470 Orang	-	3.470 Orang				PUSKESMAS KAGOK
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.816 Orang	-	8.562 Orang				PUSKESMAS PEGANDAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.986 Orang	-	6.986 Orang				PUSKESMAS GENUK
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.704 Orang	-	5.704 Orang				PUSKESMAS BANGETAYU
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.419 Orang	-	12.419 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.444 Orang	-	4.195 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.492 Orang	-	3.492 Orang				PUSKESMAS KEDUNGMONDU
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227.547 Orang	-	227.547 Orang				PUSKESMAS ROWOSARI
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.374 Orang	-	3.374 Orang				PUSKESMAS NGESREP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.010 Orang	-	7.006 Orang				PUSKESMAS PADANGSARI
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.006 Orang	-	4.339 Orang				PUSKESMAS SRONDOL
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.099 Orang	-	10.099 Orang				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.921 Orang	-	16.921 Orang				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.899 Orang	-	3.963 Orang				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.100 Orang	-	16.100 Orang				PUSKESMAS MIJEN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36 Orang	-	36 Orang				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.828 Orang	-	3.828 Orang				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.100 Orang	-	16.100 Orang				PUSKESMAS NGALIAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.396 Orang	-	3.396 Orang				PUSKESMAS MANGKANG
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.439 Orang	-	2.439 Orang				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.000 Orang	-	2.000 Orang				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.125.431 Orang	1.125.431 Orang	1.125.431 Orang	100.000.000	65.000.000	568.301.892	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	101 Orang	-	101 Unit				PUSKESMAS PONCOL
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	-	100 Orang				PUSKESMAS MIROTO
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.454 Orang	-	14.454 Orang				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46 Orang	-	46 Orang				PUSKESMAS HALMAHERA
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.874 Orang	-	874 Orang				PUSKESMAS BUGANGAN
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84 Orang	-	84 Orang				PUSKESMAS KARANGDORO
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.135 Orang	-	4.135 Orang				PUSKESMAS PANDANARAN
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.702 Orang	-	8.702 Orang				PUSKESMAS KARANGAYU
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.237 Orang	-	11.237 Orang				PUSKESMAS LEBDOSARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.271 Orang	-	10.271 Orang				PUSKESMAS MANYARAN
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.836 Orang	-	10.836 Orang				PUSKESMAS KROBOKAN
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.539 Orang	-	9.539 Orang				PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48.814 Orang	-	48.814 Orang				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35.661 Orang	-	35.661 Orang				PUSKESMAS CANDILAMA
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	-	100 Orang				PUSKESMAS KAGOK
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38.900 Orang	-	38.900 Orang				PUSKESMAS PEGANDAN
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29.020 Orang	-	29.020 Orang				PUSKESMAS GENUK
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.247.006 Orang	-	5.247.006 Orang				PUSKESMAS BANGETAYU
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.324 Orang	-	21.324 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.495 Orang	-	23.495 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.450 Orang	-	1.450 Orang				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	380 Orang	-	380 Orang				PUSKESMAS ROWOSARI
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.931 Orang	-	10.931 Orang				PUSKESMAS NGESREP
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.000 Orang	-	3.000 Orang				PUSKESMAS PADANGSARI
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.662 Orang	-	18.662 Orang				PUSKESMAS SRONDOL
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	145 Orang	-	145 Orang				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	-	130 Orang				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.785 Orang	-	8.460 Orang				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43.621 Orang	-	43.621 Orang				PUSKESMAS MIJEN
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.786 Orang	-	4.272 Orang				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150.000 Orang	-	150.000 Orang				PUSKESMAS NGALIYAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.984 Orang	-	1.984 Orang				PUSKESMAS MANGKANG
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.418 Orang	-	11.418 Orang				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	-	250 Orang				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	152 Orang	152 Orang	35.000.000	35.000.000	606.388.177	DINAS KESEHATAN
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.627 Orang	-	3.627 Orang				PUSKESMAS PONCOL
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	-	125 Orang				PUSKESMAS MIROTO
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.801 Orang	-	4.801 Orang				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.396 Orang	-	7.396 Orang				PUSKESMAS BULU LOR
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	242 Orang	-	242 Orang				PUSKESMAS HALMAHERA
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	-	450 Orang				PUSKESMAS BUGANGAN
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.720 Orang	-	2.720 Orang				PUSKESMAS KARANGDORO
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.000 Orang	-	3.000 Orang				PUSKESMAS PANDANARAN
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	189 Orang	-	189 Orang				PUSKESMAS KARANGAYU
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	424 Orang	-	424 Orang				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.000 Orang	-	4.000 Orang				PUSKESMAS MANYARAN
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.162 Orang	-	11.162 Orang				PUSKESMAS KROBOKAN
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.341 Orang	-	2.341 Orang				PUSKESMAS NGEMLAK SIMONGAN
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.367 Orang	-	6.367 Orang				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156 Orang	-	156 Orang				PUSKESMAS CANDILAMA
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	-	100 Orang				PUSKESMAS KAGOK
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.916 Orang	-	6.916 Orang				PUSKESMAS PEGANDAN
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.790 Orang	-	3.790 Orang				PUSKESMAS GENUK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.340 Orang	-	5.340 Orang				PUSKESMAS BANGETAYU
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.212 Orang	-	11.212 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.100 Orang	-	8.100 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.895 Orang	-	1.895 Orang				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	-	150 Orang				PUSKESMAS ROWOSARI
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.096 Orang	-	3.096 Orang				PUSKESMAS NGESREP
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.000 Orang	-	7.000 Orang				PUSKESMAS PADANGSARI
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.823 Orang	-	3.823 Orang				PUSKESMAS SRONDOL
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	-	100 Orang				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.144 Orang	-	1.144 Orang				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.697 Orang	-	1.697 Orang				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.200 Orang	-	3.200 Orang				PUSKESMAS MIJEN
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	438 Orang	-	438 Orang				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.900 Orang	-	3.900 Orang				PUSKESMAS NGALIYAN
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.178 Orang	-	1.178 Orang				PUSKESMAS MANGKANG
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.790 Orang	-	1.790 Orang				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	750 Orang	-	750 Orang				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290.912 Orang	290.912 Orang	290.912 Orang	100.000.000	65.000.000	58.925.918	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40.623 Orang	40.623 Orang	40.623 Orang	100.000.000	65.000.000	1.887.629.333	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4.203 Orang	4.203 Orang	4.203 Orang	100.000.000	65.000.000	195.946.863	DINAS KESEHATAN
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	113 Orang	-	113 Orang				PUSKESMAS PONCOL
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	120 Orang	-	120 Orang				PUSKESMAS MIROTO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4.203 Orang	-	4.203 Orang				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	-				PUSKESMAS BULU LOR
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	146 Orang	-	146 Orang				PUSKESMAS HALMAHERA
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	127 Orang	-	127 Orang				PUSKESMAS BUGANGAN
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	-	48 Orang				PUSKESMAS KARANGDORO
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	129 Orang	-	129 Orang				PUSKESMAS PANDANARAN
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	133 Orang	-	56 Orang				PUSKESMAS KARANGAYU
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	110 Orang	-	110 Orang				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	-	48 Orang				PUSKESMAS MANYARAN
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	124 Orang	-	124 Orang				PUSKESMAS KROBOKAN
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	136 Orang	-	136 Orang				PUSKESMAS NEMPLAK SIMONGAN
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	127 Orang	-	127 Orang				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	-	31 Orang				PUSKESMAS CANDILAMA
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	-	112 Orang				PUSKESMAS KAGOK
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	148 Orang	-	148 Orang				PUSKESMAS PEGANDAN
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118 Orang	-	118 Orang				PUSKESMAS GENUK
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	-	128 Orang				PUSKESMAS BANGETAYU
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	111 Orang	-	111 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	142 Orang	-	142 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	112 Orang	-	48 Orang				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4.203 Orang	-	4.203 Orang				PUSKESMAS ROWOSARI
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	126 Orang	-	126 Orang				PUSKESMAS NGESREP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	142 Orang	-	4 Orang				PUSKESMAS PADANGSARI
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang	-	72 Orang				PUSKESMAS SRONDOL
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	-	128 Orang				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	132 Orang	-	32 Orang				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	151 Orang	-	151 Orang				PUSKESMAS MIJEN
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	138 Orang	-	112 Orang				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	-	90 Orang				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	156 Orang	-	156 Orang				PUSKESMAS NGALIYAN
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	-	48 Orang				PUSKESMAS MANGKANG
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	-	20 Orang				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	13 Orang	-	13 Orang				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29.003 Orang	29.003 Orang	29.003 Orang	191.817.609	192.817.609	3.033.689.644	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	783 Orang	-	783 Orang				PUSKESMAS PONCOL
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	-	10 Orang				PUSKESMAS MIROTO
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29.003 Orang	-	29.003 Orang				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	-	100 Orang				PUSKESMAS BULU LOR
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	891 Orang	-	891 Orang				PUSKESMAS HALMAHERA
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	790 Orang	-	57 Orang				PUSKESMAS BUGANGAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	871 Orang	-	871 Orang				PUSKESMAS KARANGDORO
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	698 Orang	-	698 Orang				PUSKESMAS PANDANARAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	54 Orang	-	54 Orang				PUSKESMAS KARANGAYU
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	791 Orang	-	791 Orang				PUSKESMAS LEBDOSARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48 Orang	-	48 Orang				PUSKESMAS MANYARAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	692 Orang	-	692 Orang				PUSKESMAS KROBOKAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	639 Orang	-	639 Orang				PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	751 Orang	-	751 Orang				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	744 Orang	-	744 Orang				PUSKESMAS CANDILAMA
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	591 Orang	-	591 Orang				PUSKESMAS KAGOK
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.092 Orang	-	1.092 Orang				PUSKESMAS PEGANDAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	793 Orang	-	793 Orang				PUSKESMAS GENUK
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	789 Orang	-	789 Orang				PUSKESMAS BANGETAYU
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	82 Orang	-	82 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.172 Orang	-	769 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.386 Orang	-	1.386 Orang				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29.003 Orang	-	29.003 Orang				PUSKESMAS ROWOSARI
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538 Orang	-	538 Orang				PUSKESMAS NGESREP
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	684 Orang	-	684 Orang				PUSKESMAS PADANGSARI
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	684 Orang	-	10 Orang				PUSKESMAS SRONDOL
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	681 Orang	-	681 Orang				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	761 Orang	-	761 Orang				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang	-	10 Orang				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10.044 Orang	-	10.044 Orang				PUSKESMAS MIJEN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	839 Orang	-	839 Orang				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	-	12 Laporan				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	-	120 Orang				PUSKESMAS NGALIYAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	264 Orang	-	264 Orang				PUSKESMAS MANGKANG
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	289 Orang	-	289 Orang				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	-	20 Orang				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35.699 Orang	35.699 Orang	35.699 Orang	265.687.700	263.817.850	899.826.212	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	-	100 Orang				PUSKESMAS PONCOL
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	845 Orang	-	845 Orang				PUSKESMAS MIROTO
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35.699 Orang	-	35.699 Orang				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	-				PUSKESMAS BULU LOR
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	-	15 Orang				PUSKESMAS HALMAHERA
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	897 Orang	-	420 Orang				PUSKESMAS BUGANGAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	987 Orang	-	987 Orang				PUSKESMAS KARANGDORO
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	953 Orang	-	953 Orang				PUSKESMAS PANDANARAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	564 Orang	-	160 Orang				PUSKESMAS KARANGAYU
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	749 Orang	-	749 Orang				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2 Orang	-	2 Orang				PUSKESMAS MANYARAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.210 Orang	-	121 Orang				PUSKESMAS KROBOKAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	967 Orang	-	967 Orang				PUSKESMAS NGEMLAK SIMONGAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.008 Orang	-	1.008 Orang				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	765 Orang	-	765 Orang				PUSKESMAS CANDILAMA
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	843 Orang	-	843 Orang				PUSKESMAS KAGOK
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	897 Orang	-	780 Orang				PUSKESMAS PEGANDAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.013 Orang	-	1.013 Orang				PUSKESMAS GENUK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.004 Orang	-	1.004 Orang				PUSKESMAS BANGETAYU
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	-	5 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	769 Orang	-	769 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	873 Orang	-	873 Orang				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35.699 Orang	-	35.699 Orang				PUSKESMAS ROWOSARI
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	793 Orang	-	793 Orang				PUSKESMAS NGESREP
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	300 Orang	-	300 Orang				PUSKESMAS PADANGSARI
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	972 Orang	-	20 Orang				PUSKESMAS SRONDOL
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	793 Orang	-	793 Orang				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	74 Orang	-	74 Orang				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	-	5 Orang				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	990 Orang	-	990 Orang				PUSKESMAS MIJEN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	692 Orang	-	692 Orang				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	-	20 Orang				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	900 Orang	-	900 Orang				PUSKESMAS NGALIYAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	492 Orang	-	492 Orang				PUSKESMAS MANGKANG
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	-	100 Orang				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	400 Orang	-	400 Orang				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk kondisi KLB	1,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	15.000.000	12.330.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	2.000.000.000	1.400.000.000	36.820.000	DINAS KESEHATAN
		cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	10 Dokumen	-	10 Dokumen				PUSKESMAS MIROTO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS BANDARHARJO
		cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	2 Dokumen	-	2 Dokumen				PUSKESMAS GAYAMSARI
		cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	10 Dokumen	-	10 Dokumen				PUSKESMAS GENUK
		cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	6 Dokumen	-	6 Dokumen				PUSKESMAS ROWOSARI
		cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	22 Dokumen	-	22 Dokumen				PUSKESMAS KARANGANYAR
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	148 Dokumen	148 Dokumen	148 Dokumen	342.900.000	540.800.000	21.638.471.203	DINAS KESEHATAN
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS PONCOL
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	-	100 Dokumen				PUSKESMAS MIROTO
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	148 Dokumen	-	148 Dokumen				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS BULU LOR
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS HALMAHERA
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	32 Dokumen	-	32 Dokumen				PUSKESMAS BUGANGAN
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS KARANGDORO
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS PANDANARAN
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS KARANGAYU
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS MANYARAN
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25 Dokumen	-	25 Dokumen				PUSKESMAS KROBOKAN
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS NGENEMPLAK SIMONGAN
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS CANDILAMA
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS KAGOK
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8 Dokumen	-	8 Dokumen				PUSKESMAS PEGANDAN
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS GENUK
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS BANGETAYU
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	148 Dokumen	-	148 Unit				PUSKESMAS ROWOSARI
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS NGESREP
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	-	36 Dokumen				PUSKESMAS PADANGSARI
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	180 Dokumen	-	180 Dokumen				PUSKESMAS SRONDOL
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS MIJEN
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS NGALYAN
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS MANGKANG
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Prosentase penanganan stunting	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25 Dokumen	-	25 Dokumen				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	50.000.000	15.000.000	923.402.820	DINAS KESEHATAN
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS PONCOL
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS MIROTO
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37 Dokumen	-	37 Dokumen				PUSKESMAS BANDARHARJO
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS BULU LOR
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS HALMAHERA
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28 Dokumen	-	28 Dokumen				PUSKESMAS BUGANGAN
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS KARANGDORO
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS PANDANARAN
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	-				PUSKESMAS LAMPER TERGAH
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	-	10 Dokumen				PUSKESMAS KARANGAYU
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS LEBDOSARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS MANYARAN
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	45 Dokumen	-	45 Dokumen				PUSKESMAS KROBOKAN
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS GAYAMSARI
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS CANDILAMA
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS KAGOK
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20 Dokumen	-	20 Dokumen				PUSKESMAS PEGANDAN
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS GENUK
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS BANGETAYU
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS KEDUNG MUNDU
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37 Dokumen	-	37 Dokumen				PUSKESMAS ROWOSARI
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS NGESREP
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	-	10 Dokumen				PUSKESMAS PADANGSARI
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS SRONDOL
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KARANGMALANG
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS MIJEN
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	81 Dokumen	-	81 Dokumen				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PURWOYOSO
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	-	6 Dokumen				PUSKESMAS NGALYAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPDEM 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	-	6 Dokumen				PUSKESMAS MANGKANG
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS KARANGANYAR
		prosentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	37,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15 Dokumen	-	15 Dokumen				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	68 fasyankes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	65.000.000	743.259.190	DINAS KESEHATAN
		persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas airnya sesuai standar	45,00 persentase								DINAS KESEHATAN
		persentase tempat fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	65,00 persentase								DINAS KESEHATAN
		persentase tempat pengolahan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	50,00 persentase								DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 dokumen								DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS PONCOL
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS MIROTO
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS BULU LOR
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS HALMAHERA
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22 Dokumen	-	22 Dokumen				PUSKESMAS BUGANGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS KARANGDORO
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS PANDANARAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen	-	10 Dokumen				PUSKESMAS KARANGAYU
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS MANYARAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS KROBOKAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS CANDILAMA
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS KAGOK
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	115 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	115 Dokumen	-	115 Dokumen				PUSKESMAS PEGANDAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS GENUK
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS BANGETAYU
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	45 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	45 Dokumen	-	45 Dokumen				PUSKESMAS ROWOSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS NGESREP
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS PADANGSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	143 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	143 Dokumen	-	143 Dokumen				PUSKESMAS SRONDOL
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS MIJEN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS NGALIYAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS MANGKANG
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	45 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	45 Dokumen	-	45 Dokumen				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	1,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	50.000.000	20.000.000	859.739.897	DINAS KESEHATAN
		jumlah kelurahan yang mengimplemtasikan kebijakan PHBS	90,00 persentase								DINAS KESEHATAN
		jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat	8 tema								DINAS KESEHATAN
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS PONCOL
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	-	2 Dokumen				PUSKESMAS MIROTO
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200 Dokumen	-	200 Dokumen				PUSKESMAS BANDARHARJO
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	-	2 Dokumen				PUSKESMAS BULU LOR
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS HALMAHERA
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20 Dokumen	-	20 Dokumen				PUSKESMAS BUGANGAN
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS KARANGDORO
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	-	2 Dokumen				PUSKESMAS PANDANARAN
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	-	3 Dokumen				PUSKESMAS KARANGAYU
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-				PUSKESMAS LEBDOSARI
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	174 Dokumen	-	174 Dokumen				PUSKESMAS MANYARAN
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	-	6 Dokumen				PUSKESMAS KROBOKAN
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	-	3 Dokumen				PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	-	2 Dokumen				PUSKESMAS GAYAMSARI
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS KAGOK
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	15 Dokumen	-	15 Dokumen				PUSKESMAS PEGANDAN
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS BANGETAYU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	177 Dokumen	-	177 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	-	7 Dokumen				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	99 Dokumen	-	99 Dokumen				PUSKESMAS ROWOSARI
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS NGESREP
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Dokumen	-	8 Dokumen				PUSKESMAS PADANGSARI
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	120 Dokumen	-	120 Dokumen				PUSKESMAS SRONDOL
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen	-	10 Dokumen				PUSKESMAS GUNUNGPATI
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KARANGMALANG
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS MIJEN
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	134 Dokumen	-	134 Dokumen				PUSKESMAS TAMBAKAJI
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PURWOYOSO
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS NGALIAN
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS MANGKANG
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS KARANGANYAR
			-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20 Dokumen	-	20 Dokumen				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	24.750.000	24.750.000	22.275.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	130.000.000	80.000.000	591.002.746	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PONCOL
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS MIROTO
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48 Dokumen	-	48 Dokumen				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS BULU LOR
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS HALMAHERA
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen	-	14 Dokumen				PUSKESMAS BUGANGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KARANGDORO
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PANDANARAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS KARANGAYU
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	-				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS MANYARAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KROBOKAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23 Dokumen	-	23 Dokumen				PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS CANDILAMA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPDEM 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KAGOK
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS PEGANDAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS GENUK
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS BANGETAYU
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KEDUNGUNDU
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS ROWOSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS NGSREP
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PADANGSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS SRONDOL
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS MIJEN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS NGALIAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS MANGKANG
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	-	5 Dokumen				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	10 Orang	-	-	107.747.120	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	235 Orang	235 Orang	235 Orang	75.000.000	45.000.000	111.140.745	DINAS KESEHATAN
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	-	50 Orang				PUSKESMAS MIROTO
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	181 Orang	-	181 Orang				PUSKESMAS BANDARHARJO
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	-				PUSKESMAS BULU LOR
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	108 Orang	-	108 Orang				PUSKESMAS HALMAHERA
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	-	10 Orang				PUSKESMAS BUGANGAN
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	48 Orang	-	48 Orang				PUSKESMAS KARANGDORO
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	600 Orang	-	600 Orang				PUSKESMAS PANDANARAN
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	-	20 Orang				PUSKESMAS KARANGAYU
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	64 Orang	-	64 Orang				PUSKESMAS LEBDOSARI
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60 Orang	-	60 Orang				PUSKESMAS MANYARAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMD 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5 Orang	-	5 Orang				PUSKESMAS KROBOKAN
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14 Orang	-	14 Orang				PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 Orang	-	8 Orang				PUSKESMAS GAYAMSARI
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5 Orang	-	5 Orang				PUSKESMAS CANDILAMA
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	-	100 Orang				PUSKESMAS KAGOK
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	-	22 Orang				PUSKESMAS PEGANDAN
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	108 Orang	-	108 Orang				PUSKESMAS GENUK
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	24 Orang	-	24 Orang				PUSKESMAS BANGETAYU
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	-	20 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	140 Orang	-	140 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	45 Orang	-	45 Orang				PUSKESMAS KEDUNGUNDU
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	660 Orang	-	660 Orang				PUSKESMAS ROWOSARI
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	136 Orang	-	136 Orang				PUSKESMAS NGESREP
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60 Orang	-	60 Orang				PUSKESMAS PADANGSARI
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	200 Orang	-	200 Orang				PUSKESMAS SRONDOL
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	-	26 Orang				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	42 Orang	-	42 Orang				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	32 Orang	-	32 Orang				PUSKESMAS KARANGMALANG
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	164 Orang	-	164 Orang				PUSKESMAS MIJEN
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	60 Orang	-	60 Orang				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	-				PUSKESMAS PURWOYOSO
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	900 Orang	-	900 Orang				PUSKESMAS NGALIYAN
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	48 Orang	-	48 Orang				PUSKESMAS MANGKANG
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	-	2 Orang				PUSKESMAS KARANGANYAR
		cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100,00%	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	-	10 Orang				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	cakupan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	40,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	412.382.623	515.511.688	4.187.481.368	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 dokumen								DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS PONCOL
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS MIROTO
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS BULU LOR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS HALMAHERA
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	56 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	56 Dokumen	-	56 Dokumen				PUSKESMAS BUGANGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS KARANGDORO
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS PANDANARAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	11 Dokumen				PUSKESMAS KARANGAYU
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS MANYARAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS KROBOKAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS CANDILAMA
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS KAGOK
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	769 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	769 Dokumen	-	769 Dokumen				PUSKESMAS PEGANDAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS GENUK
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS BANGETAYU
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80 Dokumen	-	80 Dokumen				PUSKESMAS ROWOSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS NGESREP
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS PADANGSARI
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS SRONDOL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS MIJEN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	371 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	371 Dokumen	-	371 Dokumen				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS NGALIAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	-	12 Dokumen				PUSKESMAS MANGKANG
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	-	40 Dokumen				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	48.028.314.489	48.187.458.828	64.178.066.703	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	36 Paket			12.025.000	PUSKESMAS MIROTO
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	144 Paket				PUSKESMAS BANDARHARJO
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	4 Paket				PUSKESMAS HALMAHERA
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	3 Paket				PUSKESMAS KARANGDORO
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	12 Paket				PUSKESMAS PANDANARAN
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	12 Paket				PUSKESMAS LEBDOSARI
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	12 Paket				PUSKESMAS GAYAMSARI
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	100 Paket				PUSKESMAS KAGOK
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	12 Paket				PUSKESMAS PEGANDAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	4 Paket				PUSKESMAS GENUK
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	2 Paket				PUSKESMAS BANGETAYU
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	25 Paket				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	536 Paket				PUSKESMAS NGESREP
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	7 Paket				PUSKESMAS GUNUNGPATI
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	4 Paket				PUSKESMAS KARANGMALANG
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	18 Paket				PUSKESMAS MANGKANG
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	11 Paket				PUSKESMAS KARANGANYAR
			-	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	5 Paket				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	177 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1.420.136.021	1.420.136.021	955.847.446	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas Poncol	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	2 Dokumen	-	-	3.771.393.000	PUSKESMAS PONCOL
		Operasional Pelayanan Puskesmas Miroto	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	50 Dokumen				PUSKESMAS MIROTO
		Operasional Pelayanan Puskesmas Bandarharjo	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	16 Dokumen				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Operasional Pelayanan Puskesmas Bululor	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-				PUSKESMAS BULU LOR
		Operasional Pelayanan Puskesmas Halmahera	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS HALMAHERA
		Operasional Pelayanan Puskesmas Bugangan	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	10 Dokumen				PUSKESMAS BUGANGAN
		Operasional Pelayanan Puskesmas Karangdoro	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	6 Dokumen				PUSKESMAS KARANGDORO
		Operasional Pelayanan Puskesmas Pandanaran	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	48 Dokumen				PUSKESMAS PANDANARAN
		Operasional Pelayanan Puskesmas Lamper Tengah	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Operasional Pelayanan Puskesmas Karangayu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KARANGAYU
		Operasional Pelayanan Puskesmas lebdosari	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Operasional Pelayanan Puskesmas Manyaran	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	8 Dokumen				PUSKESMAS MANYARAN
		Operasional Pelayanan Puskesmas Krobokan	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	28 Dokumen				PUSKESMAS KROBOKAN
		Operasional Pelayanan Puskesmas Ngemplak simongan	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	8 Dokumen				PUSKESMAS NGENEMPLAK SIMONGAN
		Operasional Pelayanan Puskesmas Gayamsari	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	20 Dokumen				PUSKESMAS GAYAMSARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>candilama</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	15 Dokumen				PUSKESMAS CANDILAMA
		Operasional Pelayanan Puskesmas Kagok	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	100 Dokumen				PUSKESMAS KAGOK
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>Pegandan</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	20 Dokumen				PUSKESMAS PEGANDAN
		Operasional Pelayanan Puskesmas Genuk	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	31 Dokumen				PUSKESMAS GENUK
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>Bnagetayu</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	24 Dokumen				PUSKESMAS BANGETAYU
		Operasional Pelayanan Puskesmas Tlogosari <u>wetan</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	26 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Operasional Pelayanan Puskesmas Tlogosari <u>Kulon</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	10 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>Kedungmundu</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KEDUNGUNDU
		Operasional Pelayanan Puskesmas Rowosari	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	939 Dokumen				PUSKESMAS ROWOSARI
		Operasional Pelayanan Puskesmas Ngesrep	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	59 Dokumen				PUSKESMAS NGESREP
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>Padangsari</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	6 Dokumen				PUSKESMAS PADANGSARI
		Operasional Pelayanan Puskesmas Srandol	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS SRONDOL
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>Pudakpayung</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	1 Dokumen				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>Gunungpati</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	1.100 Dokumen				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>Karangmalang</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	18 Dokumen				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Operasional Pelayanan Puskesmas Mijen	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	17 Dokumen				PUSKESMAS MIJEN
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>Tambakaji</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>Purwoyoso</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Operasional Pelayanan Puskesmas Ngaliyan	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS NGALIYAN
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>Mangkang</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	4 Dokumen				PUSKESMAS MANGKANG
		Operasional Pelayanan Puskesmas <u>Karanganyar</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Operasional Pelayanan Puskesmas Sekaran	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan <u>Lainnya</u>	operasional pelayanan fasilitas kesehatan <u>lainnya</u>	12,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan <u>Lainnya</u>	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.959.514.252	2.931.428.975	2.478.189.583	DINAS KESEHATAN
		operasional pelayanan instalasi farmasi	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan <u>Lainnya</u>	127 Dokumen	127 Dokumen	127 Dokumen				UPTD Instalasi Farmasi
		Operasional pelayanan laboratorium <u>kehatan</u>	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan <u>Lainnya</u>	208 Dokumen	208 Dokumen	208 Dokumen				UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di <u>Kabupaten/Kota</u>	jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	123 puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang <u>Terakreditasi di Kabupaten/Kota</u>	123 Unit	123 Unit	123 Unit	1.227.771.000	1.227.771.000	704.762.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	27.937.500	DINAS KESEHATAN
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	2 Laporan				PUSKESMAS PONCOL
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	20 Laporan				PUSKESMAS MIROTO
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	-	1 Laporan				PUSKESMAS BANDARHARJO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-				PUSKESMAS BULU LOR
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	4 Laporan				PUSKESMAS HALMAHERA
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan				PUSKESMAS BUGANGAN
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	2 Laporan				PUSKESMAS KARANGDORO
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	10 Laporan				PUSKESMAS PANDANARAN
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan				PUSKESMAS KARANGAYU
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	2 Laporan				PUSKESMAS LEBDOSARI
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan				PUSKESMAS MANYARAN
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan				PUSKESMAS KROBOKAN
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	-	1 Laporan				PUSKESMAS GAYAMSARI
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan				PUSKESMAS CANDILAMA
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	100 Laporan				PUSKESMAS KAGOK
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	5 Laporan				PUSKESMAS PEGANDAN
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan				PUSKESMAS GENUK
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	4 Laporan				PUSKESMAS BANGETAYU
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	2 Laporan				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	-	1 Laporan				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	-	1 Laporan				PUSKESMAS ROWOSARI
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	2 Laporan				PUSKESMAS PADANGSARI
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	3 Laporan				PUSKESMAS SRONDOL
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	2 Laporan				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	-	12 Laporan				PUSKESMAS KARANGMALANG
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan				PUSKESMAS MIJEN
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan				PUSKESMAS PURWOYOSO
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	6 Laporan				PUSKESMAS NGALIAN
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	2 Laporan				PUSKESMAS MANGKANG
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1 Laporan				PUSKESMAS KARANGANYAR
		jumlah kejadian KIPI	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	4 Laporan				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	persentase kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah	52,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	365.000.000	248.060.000	192.024.664	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	cakupan pelayanan PSC	1,00 persentase	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	289.865.400	289.865.400	256.210.310	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27.520 Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27.520 orang	27.520 Orang	27.520 Orang	43.900.000	47.182.941	173.185.941	DINAS KESEHATAN
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	608 Orang				PUSKESMAS PONCOL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	30 Orang				PUSKESMAS MIROTO
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	241 Orang				PUSKESMAS BANDARHARJO
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-				PUSKESMAS BULU LOR
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	48 Orang				PUSKESMAS HALMAHERA
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	57 Orang				PUSKESMAS BUGANGAN
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	40 Orang				PUSKESMAS KARANGDORO
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	72 Orang				PUSKESMAS PANDANARAN
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	200 Orang				PUSKESMAS KARANGAYU
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-				PUSKESMAS LEBDOSARI
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	12 Orang				PUSKESMAS MANYARAN
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	40 Orang				PUSKESMAS KROBOKAN
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	45 Orang				PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	1.212 Orang				PUSKESMAS GAYAMSARI
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	6 Orang				PUSKESMAS CANDILAMA
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	100 Orang				PUSKESMAS KAGOK
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	26 Orang				PUSKESMAS PEGANDAN
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	690 Orang				PUSKESMAS GENUK
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	50 Orang				PUSKESMAS BANGETAYU
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	3 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	960 Orang				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	85 Orang				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	48 Orang				PUSKESMAS ROWOSARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	52 Orang				PUSKESMAS NGESREP
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	10 Orang				PUSKESMAS PADANGSARI
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	21 Orang				PUSKESMAS SRONDOL
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	10 Orang				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	20 Orang				PUSKESMAS GUNUNGPATI
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	8 Orang				PUSKESMAS KARANGMALANG
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	28 Orang				PUSKESMAS MIJEN
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	164 Orang				PUSKESMAS TAMBAKAJI
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	12 Orang				PUSKESMAS PURWOYOSO
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	816 Orang				PUSKESMAS NGALIYAN
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	24 Orang				PUSKESMAS MANGKANG
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	17 Orang				PUSKESMAS KARANGANYAR
			-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	30 Orang				PUSKESMAS SEKARAN
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35.699 Orang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35.699 orang	35.699 Orang	35.699 Orang	40.875.000	44.100.000	39.487.500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	58 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	58 orang	58 Orang	58 Orang	41.830.000	34.330.000	62.583.500	DINAS KESEHATAN
			-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	-	2 Orang				PUSKESMAS LEBDOSARI
			-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	-	480 Orang				PUSKESMAS GENUK
			-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	-	15 Orang				PUSKESMAS KEDUNGUNDU
			-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	-	120 Orang				PUSKESMAS ROWOSARI
			-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	-	2 Orang				PUSKESMAS PADANGSARI
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS, Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Persentase faskes (Puskesmas, RS, Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	1.928.045.410	1.671.263.230	2.246.979.986	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas	3,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	238.554.420	238.554.420	550.271.176	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase pembangunan dan pengembangan aplikasi kesehatan	4,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	943.982.110	906.513.380	900.513.380	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	rasio ketersediaan perangkat pendukung SIK dan jaringan	15,00 persentase	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	21 Unit	21 Unit	21 Unit	745.508.880	526.195.430	796.195.430	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100,00 persentase	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	6.657.297.610	7.992.472.010	7.455.818.374	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	rasio sarana kesehatan yang mengajukan ijin operasional	32,00 persentase	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	9.900.000	9.900.000	9.900.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	persentase tingkat kemandirian III keluarga binaan	55,00 persentase	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	37 Unit	37 Unit	37 Unit	4.469.167.410	5.044.962.610	4.650.918.374	DINAS KESEHATAN
		persentase pelayanan ambulan siaga	100,00 persentase								DINAS KESEHATAN
		persentase pelayanan P3K	100,00 persentase								DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	prosentase respon time ambulan hebat kota semarang	83,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.178.230.200	2.937.609.400	2.795.000.000	DINAS KESEHATAN
		jumlah kelurahan tanggap darurat medis	46 jumlah								DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100,00 persen	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	293.921.200	293.921.200	1.485.198.133	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM	100,00 persen	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	167.698.100	167.698.100	455.983.803	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	rasio dokter umum	2 per 1000 penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber DayaManusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.300.000	21.300.000	17.925.000	DINAS KESEHATAN
		rasio perawat	6 per 1000 penduduk								DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 persentase	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	333 Orang	333 Orang	333 Orang	59.671.200	59.671.200	59.671.200	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase pembinaan dan pengawasan SDM untuk puskesmas dan RS	1,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	86.726.900	86.726.900	378.387.603	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100,00 persentase	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	126.223.100	126.223.100	1.029.214.330	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah uji kompetensi tenaga kesehatan	100 kegiatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	126.223.100	126.223.100	1.029.214.330	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96,00 persen	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96,00 persen	96,00 persen	96,00 persen	250.000.000	250.000.000	580.319.892	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100,00 persentase	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	74.141.530	74.141.530	219.373.405	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase produk alkes dan PKRT beredar yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat	4,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	118 Dokumen	118 Dokumen	118 Dokumen	74.141.530	74.141.530	219.373.405	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 Persentase	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	109.139.230	109.139.230	231.207.824	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase industri rumah tangga pangan yang menerapkan CPP PIRT	1,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	360 Dokumen	360 Dokumen	360 Dokumen	109.139.230	109.139.230	231.207.824	DINAS KESEHATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100,00 persentase	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	66.719.240	66.719.240	129.738.663	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	persentase pemeriksaan produk makanan dan minuman rumah tangga	100,00 persentase	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	100 Unit	100 Unit	66.719.240	66.719.240	129.738.663	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00 persen	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	105.650.000	105.450.000	2.925.652.565	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100,00 persen	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	70.650.000	70.450.000	125.679.680	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan sudah diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	156.000 Keluarga	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	70.650.000	70.450.000	125.679.680	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100,00 persen	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	35.000.000	35.000.000	2.799.972.885	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	148 Dokumen	148 Dokumen	148 Dokumen	35.000.000	35.000.000	2.799.972.885	DINAS KESEHATAN
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS PONCOL
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	312 Dokumen				PUSKESMAS MIROTO
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	148 Dokumen				PUSKESMAS BANDARHARJO
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-				PUSKESMAS BULU LOR
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	380 Dokumen				PUSKESMAS HALMAHERA
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	25 Dokumen				PUSKESMAS BUGANGAN
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	4 Dokumen				PUSKESMAS KARANGDORO
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS PANDANARAN
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	-				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	10 Dokumen				PUSKESMAS KARANGAYU
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS LEBDOSARI
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS MANYARAN
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	69 Dokumen				PUSKESMAS KROBOKAN
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	1 Dokumen				PUSKESMAS NGENEMPLAK SIMONGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS GAYAMSARI
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS CANDILAMA
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	100 Dokumen				PUSKESMAS KAGOK
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	98 Dokumen				PUSKESMAS PEGANDAN
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS GENUK
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS BANGETAYU
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KEDUNGMONDU
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	148 Dokumen				PUSKESMAS ROWOSARI
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	36.403 Dokumen				PUSKESMAS NGESREP
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	144 Dokumen				PUSKESMAS PADANGSARI
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	90 Dokumen				PUSKESMAS SRONDOL
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	-	4 Dokumen				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS KARANGMALANG
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	43.621 Dokumen				PUSKESMAS MIJEN
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS PURWOYOSO
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS NGALIAN
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	12 Dokumen				PUSKESMAS MANGKANG
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	100 Dokumen				PUSKESMAS KARANGANYAR
		proporsi strata posyandu	100,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	10 Dokumen				PUSKESMAS SEKARAN
X.XX	NON URUSAN							290.422.072.563	289.271.714.331	291.166.249.644	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100,00 persentase	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	290.422.072.563	289.271.714.331	291.166.249.644	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100,00%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran OPD	100,00%	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran OPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	10 dokumen	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	39.396.080	39.396.080	39.396.080	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Renja rensta, masterplan kesehatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	420 Dokumen	420 Dokumen	6.108.800	6.108.800	6.108.800	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	15 Dokumen	15 Dokumen	8.188.500	8.188.500	8.188.500	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.734.400	8.734.400	8.734.400	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.940.820	2.940.820	2.940.820	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.486.720	3.486.720	3.486.720	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen LKPJ, LKjP, SPM	5 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	9.936.840	9.936.840	9.936.840	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	4 dokumen	jumlah dokumen laporan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	206.051.054.169	204.715.879.769	198.669.728.850	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100,00%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.614 Orang/bulan	1.614 Orang/bulan	1.614 Orang/bulan	205.284.078.169	203.948.903.769	198.120.852.850	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase terpenuhinya honor pengelolaan keuangan OPD	12,00 persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	756.860.000	756.860.000	538.760.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.372.000	3.372.000	3.372.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan Keuangan Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.372.000	3.372.000	3.372.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.372.000	3.372.000	3.372.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 persentase	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	2.539.207.581	2.779.648.725	3.948.579.183	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase tersedianya komponen instalasi listrik	2,00 persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	23.091.000	23.091.000	23.091.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase ketersediaan peralatan rumah tangga	1,00 persentase	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	67.954.800	67.954.800	93.456.770	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	1,00 persentase	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	250.000.000	250.000.000	196.736.940	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,00 persentase	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.630.000	3.630.000	3.630.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase ketersediaan makmin rapat koordinasi dan rapat konsultasi luar/dalam daerah	100,00 persentase	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	115 Laporan	115 Laporan	1.196.000.000	1.196.000.000	1.128.720.363	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sarana pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD SKPD	2 unit	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	998.531.781	1.238.972.925	2.502.944.110	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persentase	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	918.661.869	989.443.028	2.610.405.156	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	10 paket	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	918.661.869	989.443.028	2.610.405.156	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persentase	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	3.821.871.484	3.868.971.484	3.134.564.194	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase keterpenuhinya jasa surat menyurat	1,00 persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	12.100.000	12.100.000	-	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,00 persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.066.674.384	1.066.674.384	795.574.384	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12,00 persentase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.743.097.100	2.790.197.100	2.338.989.810	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100,00 persentase	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	3.874.411.300	3.874.411.300	4.108.133.624	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan dan service kendaraan dinas jabatan	6 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	226.572.720	226.572.720	226.572.720	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	150 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	135 Unit	135 Unit	2.038.703.580	2.038.703.580	2.038.703.580	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase perbaikan peralatan kantor	10,00 persentase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	788 Unit	788 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	740.912.200	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor	10,00 persentase	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10 Unit	10 Unit	500.000.000	500.000.000	1.018.730.124	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor	5,00 persentase	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6 Unit	6 Unit	109.135.000	109.135.000	83.215.000	DINAS KESEHATAN
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	37 unit kerja	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	37 unit kerja	37 unit kerja	87,00 persentase	73.177.470.080	73.003.963.945	78.655.442.557	
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	73.177.470.080	73.003.963.945	78.655.442.557	PUSKESMAS PONCOL
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS MIROTO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS BANDARHARJO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS BULU LOR
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS HALMAHERA
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS BUGANGAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS KARANGDORO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS PANDANARAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS KARANGAYU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS LEBDOSARI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS MANYARAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS KROBOKAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS GAYAMSARI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS CANDILAMA
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS KAGOK
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS PEGANDAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS GENUK
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS BANGETAYU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS ROWOSARI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS NGESREP
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS PADANGSARI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS SRONDOL
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS PUDAK PAYUNG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS KARANGMALANG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS MIJEN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS PURWOYOSO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS NGALIYAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS MANGKANG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS KARANGANYAR
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				PUSKESMAS SEKARAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	1 Unit Kerja				UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD KRMT WONGSONEGORO							425.167.163.028	425.167.163.028	518.847.830.493	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							53.140.945.927	53.140.945.927	128.779.269.259	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100,00%	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100,00%	100,00%	100,00%	53.140.945.927	53.140.945.927	128.779.269.259	
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100,00%	Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100,00%	100,00%	100,00%				
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100,00%	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100,00%	100,00%	100,00%	53.140.945.927	53.140.945.927	128.779.269.259	
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100,00%	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100,00%	100,00%	100,00%				
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Gedung IGD Terpadu Tahap 2	1 Unit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio/Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Gudang Aset	1 unit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.634.449.220	1.634.449.220	1.634.449.220	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Rumah Sakit	100,00 persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	29 Unit	1.506.496.707	1.506.496.707	77.144.820.039	RSUD KRMT WONGSONEGORO
X.XX	NON URUSAN							372.026.217.101	372.026.217.101	390.068.561.234	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100,00%	100,00%	100,00%	372.026.217.101	372.026.217.101	390.068.561.234	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100,00%	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100,00%	100,00%	100,00%	57.986.075.631	57.986.075.631	57.564.735.646	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/bulan	500 Orang/bulan	551 Orang/bulan	57.938.675.631	57.938.675.631	57.517.335.646	RSUD KRMT WONGSONEGORO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor TPHL	1 tahun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	47.400.000	47.400.000	47.400.000	RSUD KRMT WONGSONEGORO
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100,00%	Pelayanan BLUD	100,00%	100,00%	100,00%	314.040.141.470	314.040.141.470	332.503.825.588	
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100,00 persen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	314.040.141.470	314.040.141.470	332.503.825.588	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM							345.163.444.958	369.563.444.958	441.546.609.993	
								0	0	0	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							311.072.282.708	334.222.282.708	403.403.735.127	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97,86%	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97,86%	97,86%	97,86%	28.471.938.141	30.921.938.141	32.158.595.524	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96,17%	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96,17%	96,17%	96,17%	26.071.938.141	28.521.938.141	27.968.964.630	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen Database Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1 dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	545.000.000	545.000.000	614.900.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	10 lokasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	1 kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Stasiun Pompa Banjir yang terpelihara	1 lokasi	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM	1 KM	1 KM	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 kegiatan	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.084.766.388	1.084.766.388	1.084.766.388	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Wilayah I	1 kegiatan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	17.000.000.000	18.450.000.000	17.627.126.489	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Wilayah II	1 kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1 kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1 kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah barat	1 Kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah II	1 Kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah timur	1 Kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah I	1 Kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1 kegiatan	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	942.171.753	1.942.171.753	2.142.171.753	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	83,00%	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	83,00%	83,00%	83,00%	2.400.000.000	2.400.000.000	4.189.630.894	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Database Irigasi	1 dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	75.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik.	80,00 persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	2 KM	2 KM	2.300.000.000	2.300.000.000	4.114.130.894	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65,00%	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65,00%	65,00%	65,00%	68.545.911.137	74.145.911.137	95.507.131.101	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai	99,17%	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai	99,17%	99,17%	99,17%	68.545.911.137	74.145.911.137	95.507.131.101	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 dokumen	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.405.000.000	1.405.000.000	2.335.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyusunan DED (Rechannelling the city)	1 dokumen								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Peningkatan saluran drainase perkotaan	5 lokasi	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	3.829 M	3.829 M	3.829 M	20.500.000.000	22.800.000.000	22.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penghijauan Sempadan Sungai Semarang (Pelaksanaan Fisik)	1 kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat berat) dalam kondisi baik	15 jenis	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	21 Unit	26.328.252.045	26.328.252.045	51.403.148.909	Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem drainase	1 kegiatan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.727 M	2.727 M	2.727 M	20.312.659.092	23.612.659.092	18.968.582.192	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	15 jenis	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.727 M	2.727 M	2.727 M				UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74,50%	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74,50%	74,50%	74,50%	214.054.433.430	229.154.433.430	275.738.008.502	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	87,48%	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	87,48%	87,48%	87,48%	214.054.433.430	229.154.433.430	275.738.008.502	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Database dan Rencana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advise dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.550.000.000	2.650.000.000	3.035.897.533	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli Mrican (Penyusunan AMDAL/UKL-UPL dan LARAP)	1 dokumen								DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang Mijen)	1 kegiatan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	3.000 M ²	3.000 M ²	3.000 M ²	2.000.000.000	2.000.000.000	29.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah (Pengadaan Lahan)	1 kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Sron dol Sekaran (Pengadaan Lahan)	1 kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger jalan	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000	450.000.000	468.200.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	jumlah data survey dan kondisi jalan	2 dokumen	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	575.000.000	575.000.000	911.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 1)	1 kegiatan	Panjang Jalan yang Dibangun	7 KM	7 KM	7 KM	20.000.000.000	20.000.000.000	23.300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah (Pekerjaan Konstruksi)	1 kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 2)	1 kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	-	-	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1 KM	1 KM	1 KM	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan jalan wilayah kota dan pedestrian	10 ruas jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	1 KM	1 KM	49.386.000.000	49.386.000.000	59.678.003.015	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	100 jenis	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	5 KM	5 KM	5 KM	50.948.978.468	54.948.978.468	31.824.146.368	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Operasi Pemeliharaan jalan	167 kilometer	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4 KM	4 KM	4 KM	71.250.000.000	82.250.000.000	110.613.520.653	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah I	250 ruas jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4 KM	4 KM	4 KM				UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah IV	250 ruas jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4 KM	4 KM	4 KM				UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah II	250 ruas jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4 KM	4 KM	4 KM				UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah III	250 ruas jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4 KM	4 KM	4 KM				UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan		-	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	15 M	15 M	15 M	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Operasi Pemeliharaan Jembatan	1 unit	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	5.000 M	5.000 M	5.000 M	1.000.000.000	1.000.000.000	429.706.861	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan	1 jenis	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.894.454.962	1.894.454.962	1.677.134.072	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Alat Pengujian yang terawat	1 jenis								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Alat Pengujian yang terkalibrasi	14 jenis								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah dokumen sertifikasi dan akreditasi serta dokumen pendukungnya	1 dokumen								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Diklat Pegawai Teknis Pendukung Kinerja	1 kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX	NON URUSAN							34.091.162.250	35.341.162.250	38.142.874.866	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU	100,00%	Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU	100,00%	100,00%	100,00%	34.091.162.250	35.341.162.250	38.142.874.866	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	100,00%	Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	42.000.000	42.000.000	42.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan OPD	2 dokumen								DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	4.500.000	4.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	18.287.313.298	18.287.313.298	17.109.575.957	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/bulan	113 Orang/bulan	113 Orang/bulan	18.055.553.298	18.055.553.298	16.868.715.957	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	218.760.000	218.760.000	227.860.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00%	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Skor 1-100	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	2.374.892.492	2.374.892.492	4.121.846.704	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	150.000.000	150.000.000	165.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	25 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	995.461.545	995.461.545	2.588.070.907	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Jenis								DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan pembersih, peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga lainnya yang disediakan	25 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	28 Paket	75.000.000	75.000.000	121.272.600	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah bahan dan cairan pembersih virus dan kuman	3 jenis								DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan	10 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	150.000.000	150.000.000	210.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah bahan cetak dan penggandaan	10 Jenis								DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	125 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	127.000.000	127.000.000	90.646.425	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	372.430.947	372.430.947	267.254.305	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem penunjang kinerja SKPD berbasis elektronik baru yang tersedia	1 aplikasi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	674.602.467	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah sistem penunjang kinerja SKPD berbasis elektronik yang diupgrade dan terpelihara	5 aplikasi								DINAS PEKERJAAN UMUM
		Akselerasi pelaksanaan SPBE	1 kegiatan								DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100.000.000	100.000.000	205.465.279	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel perkantoran yang disediakan	10 jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100.000.000	100.000.000	205.465.279	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	9.941.956.460	11.191.956.460	13.399.289.665	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.431.956.460	4.431.956.460	7.002.063.665	DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.500.000.000	6.750.000.000	6.387.226.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	3.325.000.000	3.325.000.000	3.244.697.261	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan yang disediakan	4 jenis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	100 Unit	100 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel perkantoran yang dipelihara	5 jenis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit	300 Unit	300 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit	200 Unit	150.000.000	150.000.000	269.697.261	DINAS PEKERJAAN UMUM
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 jenis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.125.000.000	1.125.000.000	925.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG							209.865.760.048	224.665.760.048	139.991.982.089	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							161.877.197.330	176.482.726.344	90.675.524.497	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00%	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00%	100,00%	100,00%	144.774.095.314	159.104.870.889	75.639.063.117	
		Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00 persen	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100,00%	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100,00%	100,00%	100,00%	144.774.095.314	159.104.870.889	75.639.063.117	
		Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung	100,00 persen	Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Meningkatnya jumlah peserta Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	125 orang	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4.100.000.000	4.144.647.366	4.429.447.718	DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TABG	10 Dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
		Meningkatnya pemahaman stakeholder terkait SIMBG	100 orang								DINAS PENATAAN RUANG
		Rasio SK IMB/Rekomendasi Teknis IMB	86,36%								DINAS PENATAAN RUANG
		Rasio SK IMB Pertandaan/Rektek Pertandaan	41,18%								DINAS PENATAAN RUANG
		Tersedianya Sistem Implementasi SIMBG	1 aplikasi								DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah Labelisasi SLF	20 bangunan								DINAS PENATAAN RUANG
		Rasio SK Reklame/Rektek Reklame	58,54%								DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah rekomendasi teknis IMB/PBG yang diberikan oleh Pemkot dalam tahun eksisting	2.200 dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TACB	5 dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah bangunan yang mendapatkan SLF	23 dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	28 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	118 Dokumen	118 Dokumen	78 Dokumen	99.561.058.979	105.561.058.979	19.547.365.132	DINAS PENATAAN RUANG
		Terbangunnya Gedung Pemerintah di tahun berjalan	20 Gedung								DINAS PENATAAN RUANG
		Terbangunnya Fasilitas Publik ditahun berjalan	15 bangunan								DINAS PENATAAN RUANG
		Terbangunnya Sport Center di tahun berjalan	10 Lokasi								DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah dokumen supervisi pengawasan pembangunan	45 Dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
		Persentase bangunan gedung yang terbangun Distaru terhadap seluruh aset bangunan gedung milik Pemkot	3,00%								DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Penetapan Perda Retribusi Perijinan tertentu	1 Dokumen	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	550.000.000	596.128.209	469.328.209	DINAS PENATAAN RUANG
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Kota Semarang	1 Dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
		Penetapan Perwal tentang Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan	1 Dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
		Penetapan regulasi terkait Tim Ahli bangunan gedung	1 Dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1 Dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Penetapan regulasi terkait Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	135 Unit	135 Unit	8 Unit	746.000.000	796.000.000	716.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	135 Dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah Kawasan yang diteapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	1 Dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah Label yang terpasang pada bangunan cagar budaya	14 buah								DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pendukung Bantuan Teknis masyarakat pemilik bangunan Gedung Cagar Budaya	10 Dokumen	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	10 Pengelola	10 Pengelola	10 Pengelola	325.000.000	325.000.000	172.336.882	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang mendapatkan kompensasi, Insentif dan Disinsentif	10 Dokumen	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	10 Pengelola	10 Pengelola	10 Pengelola	300.000.000	300.000.000	136.520.438	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Penerbitan Peringatan Pelanggaran Bangunan	482 Dokumen	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2.310 Unit	2.310 Unit	2.310 Unit	496.955.000	546.955.000	446.330.425	DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah pelanggaran yang telah terselesaikan	409 Dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah bangunan gedung yang dilakukan penilikan BG oleh Penilik Bangunan	2.310 bangunan								DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	53 bangunan	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	53 Unit	53 Unit	53 Unit	399.814.000	449.814.000	374.914.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung	11 Dokumen	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	36 Unit	36 Unit	34 Unit	24.802.431.972	32.892.431.972	31.398.684.950	DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah	20 bangunan								DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Fasilitas Publik	2 bangunan								DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Sport Center	3 Lokasi								DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah dokumen supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	25 dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung Pemerintah	25 bangunan	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	80 Unit	80 Unit	80 Unit	13.492.835.363	13.492.835.363	17.948.135.363	DINAS PENATAAN RUANG
		Terpelihara dan terawatnya Sport Center	20 lokasi								DINAS PENATAAN RUANG
		terpelihara dan terawatnya bangunan gedung dan fasilitas Kelurahan dan kecamatan	20 bangunan								DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Terpelihara dan terawatnya Fasilitas Publik	15 bangunan									DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100,00%	Persentase reklame yang berizin	100,00%	100,00%	100,00%	4.900.000.000	4.900.000.000	3.357.808.798		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100,00%	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100,00%	100,00%	100,00%	4.900.000.000	4.900.000.000	3.357.808.798		
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi terkait Titik Reklame yang ditetapkan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000	600.000.000	553.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Tersedianya regulasi terkait pemilihan gedung yang ditetapkan	6 dokumen									DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Videotron terbangun	1 buah	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	3.300.000.000	3.300.000.000	1.951.608.798		DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah Titik Reklame di Tanah Pemkot Semarang	810 buah									DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah reklame non permanen yang berizin	3.087 buah									DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah reklame permanen yang berizin	688 buah									DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah Titik Reklame Non Komersial	5 buah									DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah pembongkaran reklame non permanen tidak berizin	2.655 buah	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	850.000.000	850.000.000	770.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Persentase pembongkaran reklame tidak berizin	100,00%									DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penerbitan SP1 Pengawasan Reklame	176 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000	83.200.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah Penerbitan SP2 Pengawasan Reklame	144 Dokumen									DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah penerbitan SP pembongkaran	482 Dokumen									DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah Permasalahan Reklame	802 Dokumen									DINAS PENATAAN RUANG
		Menurunnya Persentase permasalahan reklame yang terselesaikan	39,90%									DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100,00%	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100,00%	100,00%	100,00%	1.257.746.036	1.357.746.036	2.110.015.912		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	2 kegiatan	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1.257.746.036	1.357.746.036	2.110.015.912		
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Kota Semarang	2 pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang	150 Orang	150 Orang	276.049.765	376.049.765	675.843.056		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat ahli di wilayah Kota Semarang	440 orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	440 Orang	440 Orang	440 Orang	208.675.981	208.675.981	208.675.981		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah penerbitan sertifikat IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan gedung) di Kota Semarang	370 dokumen	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	370 Orang	370 Orang	370 Orang	547.007.198	547.007.198	505.337.265		DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memahami tata cara memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan Konstruksi	100 orang									DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang memahami Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	100 orang									DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Semarang untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	2 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	226.013.092	226.013.092	720.159.610		DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	2 dokumen									DINAS PENATAAN RUANG
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan	2 dokumen									DINAS PENATAAN RUANG
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota Semarang	2 dokumen									DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah pelaku jasa konstruksi	1.700 orang									DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100,00%	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100,00%	100,00%	100,00%	10.945.355.980	11.120.109.419	9.568.636.670		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100,00%	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100,00%	100,00%	100,00%	5.532.211.011	5.581.964.450	5.365.014.938		
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Regulasi (Perda/Perwal) Tata Ruang	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.235.792.837	1.235.792.837	1.235.792.837		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Semarang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	770.914.595	770.914.595	770.914.595		DINAS PENATAAN RUANG
		Dokumen Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	1 Dokumen									DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	% Luas RTH Perkotaan	10,56%	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.234.833.174	3.234.833.174	3.100.383.662		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Meningkatnya Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	400 orang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	290.670.405	340.423.844	257.923.844		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	386.053.986	386.053.986	319.453.986		
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	152 Ha	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	209.236.884	209.236.884	209.236.884		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	6,56%	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	176.817.102	176.817.102	110.217.102		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	2.681.921.143	2.781.921.143	1.771.947.906		
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Forum Penataan Ruang	2 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	821.243.044	921.243.044	211.145.904		DINAS PENATAAN RUANG
		Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	9,19%									DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Aplikasi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.860.678.099	1.860.678.099	1.560.802.002		DINAS PENATAAN RUANG
		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	64,81%									DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100,00%	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	2.345.169.840	2.370.169.840	2.112.219.840		
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	1 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	297.382.873	297.382.873	297.382.873		DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi penertiban dan penegakan hukum bidang Penataan Ruang	1 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	285.605.592	310.605.592	285.605.592		DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi tata ruang OUV (Outstanding Universal Value)	1 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.762.181.375	1.762.181.375	1.529.231.375	DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah rekomendasi Badan Pengelola Kawasan	1 dokumen								DINAS PENATAAN RUANG
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							24.190.801.010	24.315.801.010	24.453.615.101	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00%	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00%	100,00%	100,00%	781.158.501	804.751.409	1.005.043.509	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00%	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00%	100,00%	100,00%	781.158.501	804.751.409	1.005.043.509	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa konflik dan perkara pertanahan yang terinventarisasi	55 dokumen aduan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	322.802.107	322.802.107	422.948.157	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti melalui mediasi	35 dokumen aduan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Berita Acara	35 Berita Acara	35 Berita Acara	458.356.394	481.949.302	582.095.352	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00%	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%	6.637.818.927	6.486.473.136	6.558.241.476	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00%	terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%	6.637.818.927	6.486.473.136	6.558.241.476	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya Surat Walikota penetapan lokasi penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6.637.818.927	6.486.473.136	6.558.241.476	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00%	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00%	100,00%	100,00%	778.617.566	819.831.424	779.477.394	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00%	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00%	100,00%	100,00%	778.617.566	819.831.424	779.477.394	
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	jumlah subjek dan objek redistribusi tanah yang terinventarisasi	3 lokasi	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	587.935.298	587.935.298	547.581.268	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Surat Walikota objek redistribusi tanah yang terinventarisir	3 dokumen	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	190.682.268	190.682.268	190.682.268	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah redistribusi tanah objek Reforma Agraria yang terkoordinir	3 lokasi	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	-	3 Dokumen	3 Dokumen	-	20.606.929	20.606.929	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah penataan akses yang terkoordinasi	3 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	3 Dokumen	3 Dokumen	-	20.606.929	20.606.929	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota	100,00%	ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100,00%	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	
2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota	100,00%	terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100,00%	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100,00%	100,00%	100,00%	15.497.917.035	15.650.947.322	15.654.997.322	
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100,00%	terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100,00%	100,00%	100,00%	205.479.035	230.479.035	234.529.035	
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah	5 kasus	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	205.479.035	230.479.035	234.529.035	DINAS PENATAAN RUANG
		Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah yang terkoordinir	2 lokasi								DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	terinventarisasikannya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	100,00%	terinventarisasikannya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	100,00%	100,00%	100,00%	15.292.438.000	15.420.468.287	15.420.468.287	
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang terinventarisasi	35.000 bidang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.292.438.000	15.420.468.287	15.420.468.287	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100,00%	terkelolanya izin membuka tanah	100,00%	100,00%	100,00%	313.621.984	313.621.984	313.621.984	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	tertibnya izin membuka tanah	100,00%	tertibnya izin membuka tanah	100,00%	100,00%	100,00%	313.621.984	313.621.984	313.621.984	
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terbitnya Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah	5 dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5 Dokumen	-	2 Dokumen	198.575.714	198.575.714	198.575.714	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah pemanfaatan tanah negara yang terkendali	2 dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	115.046.270	115.046.270	115.046.270	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesaikannya penatagunaan tanah	100,00%	terselesaikannya penatagunaan tanah	100,00%	100,00%	100,00%	181.666.997	240.175.735	142.233.416	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100,00%	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100,00%	100,00%	100,00%	181.666.997	240.175.735	142.233.416	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Data perencanaan penggunaan tanah yang terkoordinasi	1 dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	181.666.997	198.961.877	101.019.558	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Data zona nilai tanah yang terpetakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	20.606.929	20.606.929	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah Kota Semarang yang terkonsolidasi untuk rencana pembangunan	2 wilayah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	20.606.929	20.606.929	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX	NON URUSAN							23.797.761.708	23.867.232.694	24.862.842.491	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kualitas SDM	100,00%	Peningkatan kualitas SDM	100,00%	100,00%	100,00%	23.797.761.708	23.867.232.694	24.862.842.491	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	180.178.660	180.178.660	106.850.100	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan Dokumen Renstra)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	97.458.360	97.458.360	11.929.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.492.700	12.492.700	12.492.700	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.167.300	11.167.300	11.167.300	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.608.000	7.608.000	10.144.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA perubahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.167.300	11.167.300	11.167.300	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	16.704.000	16.704.000	24.108.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD	4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	23.581.000	23.581.000	25.841.800	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	15.274.195.503	15.274.195.503	15.281.263.687	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	13.647.539.103	13.647.539.103	13.654.607.287	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Optimal	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen	80 Dokumen	80 Dokumen	1.596.266.400	1.596.266.400	1.596.266.400	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	10.230.000	10.230.000	10.230.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10.080.000	10.080.000	10.080.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00 persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10.080.000	10.080.000	10.080.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100,00%	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	620.711.950	680.711.950	791.029.485	
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	125.045.050	125.045.050	125.045.050	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	495.666.900	555.666.900	665.984.435	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	5.644.031.675	5.653.502.661	6.605.055.300	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	180.267.581	180.267.581	180.267.581	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	474.605.883	480.205.078	700.372.830	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	80 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	80 Paket	80 Paket	161.162.700	161.162.700	169.147.330	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	229.899.624	229.899.624	232.232.622	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	507.900.535	507.900.535	521.281.863	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30 Buah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	23.839.338	23.839.338	23.839.338	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	930.429.620	930.429.620	1.678.373.893	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Penataan Ruang	50 indeks SPBE	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	3.135.926.394	3.139.798.185	3.099.539.843	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	952.307.940	952.307.940	952.307.940	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200 Laporan	1.200 Laporan	1.200 Laporan	9.500.000	9.500.000	9.500.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	315.000.000	315.000.000	315.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpuhny pemeliharaan aset tetap lainnya, Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	627.807.940	627.807.940	627.807.940	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	1.126.335.980	1.126.335.980	1.126.335.979	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan dinas pejabat	54 buah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	DINAS PENATAAN RUANG
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 buah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	54 Unit	54 Unit	666.559.250	666.559.250	666.559.250	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	2 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	423.458.550	423.458.550	423.458.549	DINAS PENATAAN RUANG
1.04.1.03.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							242.274.030.773	296.224.030.773	330.243.407.976	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							120.883.527.501	130.321.027.501	165.749.895.413	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Lavak	69,69%	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Lavak	69,69%	69,69%	69,69%	290.462.481	890.462.481	2.375.762.481	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100,00%	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100,00%	100,00%	100,00%	290.462.481	890.462.481	2.375.762.481	
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pembangunan & Perawatan Sumur	4 Unit	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	4 Titik	4 Titik	7 Titik	290.462.481	890.462.481	2.375.762.481	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100,00%	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	5.928.381.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	50 SR	50 SR	0	0	5.928.381.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAM Jaringan Perpipaan Terbangun	250 SR	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	-	-	1.000 SR	-	-	5.928.381.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90,86%	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	90,86%	90,86%	90,86%	976.028.762	976.028.762	6.036.211.941	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/ kota	100,00%	Terkelolanya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/ kota	100,00%	100,00%	100,00%	976.028.762	976.028.762	6.036.211.941	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100 Unit	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	676.447.485	676.447.485	2.050.750.664	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terbangunnya Sub Sistem Pengolahan Setempat	150 Unit	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	-	-	500 Unit	-	-	3.675.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Tersedianya sarana dan prasarana IPLT	100,00 persen	Kapasitas IPLT Terbangun	75 M ³ /Hari	75 M ³ /Hari	75 M ³ /Hari	299.581.277	299.581.277	310.461.277	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	48,00%	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	48,00%	48,00%	48,00%	112.749.649.507	121.587.149.507	143.262.686.535	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	persentase pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman	100,00%	persentase pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman	100,00%	100,00%	100,00%	112.749.649.507	121.587.149.507	143.262.686.535	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan jalan paving, jalan aspal, dan saluran di lingkungan permukiman	16 Kecamatan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	177 Sistem Jaringan	177 Sistem Jaringan	177 Sistem Jaringan	82.006.181.134	82.243.681.134	82.140.187.255	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman	12 Bulan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	177 Sistem Jaringan	177 Sistem Jaringan	177 Sistem Jaringan	30.743.468.373	39.343.468.373	61.122.499.280	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100,00%	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100,00%	100,00%	100,00%	6.867.386.751	6.867.386.751	8.146.853.456	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100,00%	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100,00%	100,00%	100,00%	6.867.386.751	6.867.386.751	8.146.853.456	
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarpras Rusun Kota Semarang	9 Rumah Susun Sewa	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	35.400.000	35.400.000	35.400.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terpeliharanya bangunan dan Sarpras Rusun	100,00 persen	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	9 Kawasan	9 Kawasan	9 Kawasan	6.831.986.751	6.831.986.751	8.111.453.456	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							74.942.649.748	119.455.149.748	109.801.226.138	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100,00%	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100,00%	100,00%	100,00%	4.260.207.921	4.260.207.921	4.249.185.839	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Cakupan pendataan penyediaan dan rehabilitasi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	100,00%	Cakupan pendataan penyediaan dan rehabilitasi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00%	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00%	100,00%	100,00%	400.000.000	400.000.000	399.625.000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	16 Kecamatan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	400.000.000	400.000.000	399.625.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah susun Umum dan/atau Rumah Khusus terbina dan dikelola dengan baik	100,00%	Rumah susun Umum dan/atau Rumah Khusus terbina dan dikelola dengan baik	100,00%	100,00%	100,00%	3.337.950.075	3.337.950.075	3.340.419.324	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni Rusun	100,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3.337.950.075	3.337.950.075	3.340.419.324	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	100,00%	100,00%	522.257.846	522.257.846	509.141.515	
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	522.257.846	522.257.846	509.141.515	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terlaksananya rekomendasi penerbitan izin pengembangan perumahan bersubsidi bagi MBR	100,00%								DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99,15%	Persentase Rumah Layak Huni	99,15%	99,15%	99,15%	9.624.631.895	11.762.131.895	12.545.495.052	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100,00%	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	9.624.631.895	11.762.131.895	12.545.495.052	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersusunnya DED sarana prasarana jalan dan saluran kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	610.000.000	610.000.000	610.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rehabilitasi RTLH	16 Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730 Unit Rumah	730 Unit Rumah	500 Unit Rumah	9.014.631.895	11.152.131.895	11.935.495.052	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100,00%	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100,00%	100,00%	100,00%	61.057.809.932	103.432.809.932	93.006.545.247	
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,31%	Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,31%	44,31%	44,31%				
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terwujudnya urusan penyelenggaraan PSU yang menunjang fungsi hunian	100,00%	Terwujudnya urusan penyelenggaraan PSU yang menunjang fungsi hunian	100,00%	100,00%	100,00%	61.057.809.932	103.432.809.932	93.006.545.247	
		Persentase Luasan taman yang berfungsi optimal	100,00%	Persentase Luasan taman yang berfungsi optimal	100,00%	100,00%	100,00%				
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Lampu PJU Terpasang	97,50 persen	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	25.393.683.194	28.993.683.194	48.941.143.800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 1	8 Kecamatan								DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 2	8 Kecamatan								DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	18,49 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	34.026.013.762	72.563.513.762	42.211.335.483	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Cakupan perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	100,00 persen									DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terkelolanya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	16 Kecamatan									DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terkelolanya ruang terbuka hijau	16 Kecamatan									DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terpenuhinya sarana prasarana kebun bibit	100,00 persen									DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya kegiatan serah terima PSU	100,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.638.112.976	1.875.612.976	1.854.065.964		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX	NON URUSAN							46.447.853.524	46.447.853.524	54.692.286.425		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100,00%	100,00%	100,00%	46.447.853.524	46.447.853.524	54.692.286.425		
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100,00%	100,00%	100,00%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	66.188.260	66.188.260	64.475.340		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7.870.650	7.870.650	7.680.800		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.378.440	11.378.440	11.239.790		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	13.133.440	13.133.440	12.474.660		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.260.425	17.260.425	16.762.290		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	8.294.925	8.294.925	8.056.360		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi capaian kinerja	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.125.190	4.125.190	4.114.160		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.125.190	4.125.190	4.147.280		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100,00%	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	20.462.427.689	20.453.427.689	20.056.023.056		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 Orang/bulan	164 Orang/bulan	164 Orang/bulan	20.009.707.989	20.009.707.989	19.576.309.126		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertib pelaporan capaian kinerja keuangan ASN	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	418.440.000	409.440.000	446.750.570		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	1.000 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.525.050	7.525.050	6.020.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan akhir tahun	1 Buku	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	8.701.860	8.701.860	8.103.360	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan semesteran realisasi anggaran	18 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	8.831.674	8.831.674	9.946.880	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9.221.116	9.221.116	8.893.120	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100,00%	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	574.874.001	579.874.001	453.453.218	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian pelindung diri tersedia	400 Set	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	355.795.230	355.795.230	355.795.230	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.994.688	7.994.688	7.994.688	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi	1 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	201.329.992	201.329.992	64.442.200	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis	4 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120 Orang	120 Orang	14.754.091	14.754.091	25.221.100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100,00%	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	4.037.416.003	4.338.416.003	5.243.108.345	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	25 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	2.725.655.147	2.725.655.147	3.009.766.659	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	25 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	201.123.586	201.123.586	201.123.586	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	25 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	61.519.431	61.519.431	61.519.431	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	79.768.057	79.768.057	73.477.328	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk fasilitas tamu	100,00 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51.000.000	51.000.000	68.052.400	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	155.286.041	150.286.041	184.768.041	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan dan penertiban arsip dinas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	164 Dokumen	164 Dokumen	164 Dokumen	13.063.741	13.063.741	9.800.900	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya dukungan pelaksanaan SPBE	100,00 persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	1.006.000.000	1.584.600.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00%	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	5.500.835.974	5.500.835.974	12.843.981.206	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	2 unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	26 Unit	1.629.068.751	1.629.068.751	2.818.218.979	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional	1 unit	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5 Unit	2.506.310.280	2.506.310.280	8.706.485.280	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	10 buah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	1.365.456.943	1.365.456.943	1.319.276.947	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	2.803.276.606	2.806.276.606	3.379.144.902	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	699.255.504	699.255.504	764.255.504	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	221.653.902	221.653.902	221.653.902	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.871.367.200	1.874.367.200	2.382.235.496	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	13.002.834.991	12.702.834.991	12.652.100.358	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100,00 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270 Unit	270 Unit	270 Unit	1.644.161.282	1.644.161.282	1.734.246.141	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Belanja Perawatan dan Bahan Bakar Kendaraan Operasional	100,00 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	110 Unit	110 Unit	6.858.229.694	6.858.229.694	7.064.939.935	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	100,00 persen	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	112.342.079	112.342.079	112.342.079	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Mebeleur terpelihara rutin/berkala	100,00 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit	300 Unit	300 Unit	121.078.800	121.078.800	121.078.800	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100,00 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	3.930.529.733	3.630.529.733	3.283.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor terpelihara rutin/berkala	100,00 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200 Unit	200 Unit	200 Unit	336.493.403	336.493.403	336.493.403	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)							35.833.852.469	35.833.852.469	38.245.268.120	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.984.746.537	14.953.925.945	18.146.932.728	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10,00%	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10,00%	10,00%	10,00%	14.984.746.537	14.953.925.945	18.146.932.728	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	12,00%	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	12,00%	12,00%	12,00%	14.326.725.925	14.270.589.833	17.384.191.416	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti	100,00 persen	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	249 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	80.274.100	80.274.100	60.600.657	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
		persentase gangguan pelanggaran dan pengaduan transtibum yang ditangani	100,00 persen								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100,00 persen	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	193 Kasus	96 Kasus	96 Kasus	365.825.166	365.825.166	275.421.744	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	177 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.817.974.360	5.687.002.968	5.616.943.906	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	177 orang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	177 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.396.668.340	7.471.503.640	10.828.129.048	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	3 kali	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	310 Orang	310 Orang	310 Orang	271.651.170	271.651.170	257.746.320	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	2 kali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	308.934.930	308.934.930	262.775.330	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100,00 persen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	77.264.032	77.264.032	74.440.584	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.133.827	8.133.827	8.133.827	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	66,00%	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	66,00%	66,00%	66,00%	544.560.712	560.460.182	639.865.382	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/PelakuUsaha/	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	47.854.755	47.854.755	40.486.005	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase pengendalian trantibum	100,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	241.368.190	241.368.190	181.453.633	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
		persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan	100,00 persen								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda	100,00 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	28 Laporan	28 Laporan	38 Laporan	255.337.767	271.237.237	417.925.744	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	10 Kasus	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	113.459.900	122.875.930	122.875.930	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	12 orang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	11 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	113.459.900	122.875.930	122.875.930	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
		Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan	2 kali								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX	NON URUSAN							20.849.105.932	20.879.926.524	20.098.335.392	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SATpol pp	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SATpol pp	100,00%	100,00%	100,00%	20.849.105.932	20.879.926.524	20.098.335.392	
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SATpol pp	100,00%	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SATpol pp	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase peningkatan kemampuan ASN SATpol PP	100,00%	Persentase peningkatan kemampuan ASN SATpol PP	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	99.897.340	99.897.340	88.347.340	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.662.600	7.662.600	7.662.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Satpol PP	1 Dokumen								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.224.510	10.224.510	8.424.510	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.620.420	8.620.420	4.120.420	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.424.510	5.424.510	3.174.510	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.120.420	7.120.420	4.120.420	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	60.844.880	60.844.880	60.844.880	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	17.653.277.949	17.653.277.949	15.618.570.192	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	130 Orang/bulan	130 Orang/bulan	17.406.051.789	17.406.051.789	15.377.194.032	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	234.330.000	234.330.000	233.880.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.198.720	2.198.720	2.198.720	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.548.720	9.548.720	4.148.720	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.148.720	1.148.720	1.148.720	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100,00%	persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	206.533.755	106.533.755	292.399.201	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 Orang	330 Orang	330 Orang	200.000.000	100.000.000	285.865.446	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek	100,00 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang	7 Orang	6.533.755	6.533.755	6.533.755	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	785.841.615	785.841.615	714.877.527	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	16 Paket	16 Paket	19.428.480	19.428.480	19.428.480	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang yang disediakan	28 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	24 Paket	24 Paket	34.557.540	34.557.540	34.557.540	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	60 Paket	21.894.640	21.894.640	17.363.552	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	105.881 Lembar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	13 Paket	13 Paket	31.682.820	31.682.820	31.682.820	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang berkunjung	600 orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.230.440	62.025.000	46.425.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	322.013.000	334.218.440	283.385.440	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	282.034.695	282.034.695	282.034.695	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	236.800.964	338.821.556	1.487.794.617	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	1 Unit	-	-	1.148.973.061	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang disediakan	6 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	10 Jenis	10 Jenis	236.800.964	338.821.556	338.821.556	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	589.141.080	617.941.080	617.941.080	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	235.141.080	235.141.080	235.141.080	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase honorarium TPHL dan Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	354.000.000	382.800.000	382.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	1.277.613.229	1.277.613.229	1.278.405.435	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	45 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	50 Unit	50 Unit	981.045.210	981.045.210	906.854.330	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaannya	100,00 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	13 Jenis	13 Jenis	95.909.108	95.909.108	115.596.324	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	2 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	151.251.131	151.251.131	206.547.001	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	60 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	180 Unit	180 Unit	13.089.600	13.089.600	13.089.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN							35.778.351.681	36.233.346.681	29.196.443.691	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.224.925.197	14.624.386.781	14.834.741.248	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100 Persentase	pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	14.224.925.197	14.624.386.781	14.834.741.248	
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%				
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100 Persentase	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase				
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100,00%	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%				
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100,00 persentase	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase				
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100,00%	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100,00%	100,00%	100,00%	12.046.176.414	11.683.206.998	11.920.679.444	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100,00%	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%				
		Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%				
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan gambar rencana alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung	200 dokumen	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	50 Dokumen	50 orang	200 orang	50.000.000	47.784.000	47.784.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Dokumen RISPK (Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran, Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran, Rencana Sistem Keselamatan Publik)	1 dokumen								DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemadaman Kebakaran	300 Kejadian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	9.284.659.616	9.284.659.616	9.324.334.382	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Kejadian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	8.284.403	8.284.403	8.284.403	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran di Kota Semarang	10 kejadian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	4.383.416	4.383.416	4.383.416	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.038.938	2.038.938	586.618	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	15 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 Unit	138 buah	138 buah	2.689.766.397	1.917.843.742	2.117.843.742	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan yang Efisien dan Akurat	12 kegiatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	1.243.644	412.412.883	412.412.883	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.800.000	5.800.000	5.050.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100,00%	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100,00%	100,00%	100,00%	718.000.000	710.216.000	739.637.200	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya data Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	350 gedung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	14.464.800	9.679.302	9.679.302	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	260 gedung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	703.535.200	700.536.698	729.957.898	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100,00%	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100,00%	100,00%	100,00%	23.884.403	23.884.403	23.884.403	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	300 Kejadian	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	23.884.403	23.884.403	23.884.403	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100,00%	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	489.868.917	964.763.917	964.763.917	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	180 orang/kelurahan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	40 Orang	1.125 Orang	1.125 Orang	64.548.950	539.443.950	539.443.950	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	360 orang/kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	36 Desa/Kelurahan	36 Desa/Kelurahan	36 Desa/Kelurahan	194.673.775	194.673.775	194.673.775	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi relawan pemadam kebakaran	6 jenis	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	230.646.192	230.646.192	230.646.192	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	100,00%	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	100,00%	100,00%	100,00%	946.995.463	1.242.315.463	1.185.776.284	
		Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100,00%	Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100,00%	100,00%	100,00%				
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	500 kejadian	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	58.184.403	58.184.403	58.184.403	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya standar sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	3 dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15.245.060	15.245.060	15.245.060	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	10 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	146 Unit	146 Unit	146 Unit	833.666.000	1.168.886.000	1.112.346.821	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24 orang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	2 Laporan	-	-	39.900.000	-	-	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX	NON URUSAN							21.553.426.484	21.608.959.900	14.361.702.443	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	21.553.426.484	21.608.959.900	14.361.702.443	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	22.685.540	22.685.540	22.910.540	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.446.040	3.446.040	3.446.040	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.568.720	3.568.720	3.568.720	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.232.630	4.232.630	4.232.630	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.513.680	2.513.680	2.663.680	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA Dinas Pemadam Kebakaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.995.590	2.995.590	3.070.590	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	2 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	896.480	896.480	896.480	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	3 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5.032.400	5.032.400	5.032.400	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	18.224.372.021	18.224.372.021	11.177.087.805	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/bulan	202 Orang/bulan	150 Orang/bulan	17.940.212.871	17.940.212.871	10.886.583.205	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	277.979.000	277.979.000	284.279.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan keuangan terverifikasi	12 Bulan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	746.540	746.540	746.540	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi Dinas Pemadam Kebakaran	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	632.550	632.550	632.550	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemadam Kebakaran	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.319.790	1.319.790	1.319.790	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan tanggapan pemeriksaan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00 persen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.393.830	1.393.830	1.439.280	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Pemadam Kebakaran	12 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.234.560	1.234.560	1.234.560	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	852.880	852.880	852.880	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	1.375.660	1.375.660	1.375.660	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	402.880	402.880	402.880	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan laporan Barang Milik Daerah	12 dokumen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	402.880	402.880	402.880	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	569.900	569.900	569.900	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Jumlah Dokumen Manajemen Aset	1 dokumen								DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	1.400.850	1.400.850	1.400.850	
X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan dan Target Retribusi Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	442.890	442.890	442.890	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	350 surat	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	555.080	555.080	555.080	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	12 dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	402.880	402.880	402.880	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	519.460.171	519.460.171	491.993.431	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100,00 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	3 Paket	518.056.126	518.056.126	490.589.386	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja pegawai Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.404.045	1.404.045	1.404.045	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	334.762.050	315.946.547	297.705.446	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun	100,00 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.692.777	30.692.777	30.692.777	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	35.783.824	35.783.824	58.491.094	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor selama 1 tahun	100,00 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	81.349.739	81.349.739	75.357.959	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	100,00 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	47.534.030	28.718.527	28.718.527	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamu selama 1 tahun	100,00 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	42 Laporan	42 Laporan	14 Laporan	45.450.000	45.450.000	16.200.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan dalam daerah	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.951.680	93.951.680	88.245.089	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	483.352.506	549.613.273	407.681.836	
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100,00 persentase	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase				
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan	1 jenis	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	-	27.285.820	27.285.820	-	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	tersedianya mebel	5 jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	5.103.700	5.103.700	5.103.700	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan mesin dan lainnya	15 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	13 Unit	14 Unit	363.550.902	217.581.017	222.573.220	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5 Jenis	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	3 Unit	3.230.200	3.230.200	3.230.200	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	1 jenis	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	844.260	119.637.820	-	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	11 jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	23 Unit	23 Unit	83.337.624	176.774.716	176.774.716	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	491.269.099	491.447.398	491.447.398	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	334.426.099	334.426.099	334.426.099	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	156.843.000	157.021.299	157.021.299	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	1.474.748.587	1.482.658.440	1.470.099.477	
		Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase				
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	100,00 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	252.722.130	40.313.180	40.313.180	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	43 Unit	41 Unit	921.449.388	1.042.419.273	1.046.741.092	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100,00 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	25 Unit	3 Unit	29.802.211	29.802.211	20.286.525	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	100,00 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	7 Unit	160.617.000	260.662.188	277.640.391	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100,00 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	115 Unit	114 Unit	96 Unit	110.157.858	109.461.588	85.118.289	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							14.919.845.058	15.283.178.058	16.130.347.190	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.987.397.139	6.230.355.080	6.487.670.430	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13,00%	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13,00%	13,00%	13,00%	5.987.397.139	6.230.355.080	6.487.670.430	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang	500 orang	500 orang	703.948.400	623.306.040	607.115.632	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KRB	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	418.000.000	418.000.000	403.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pusat Data Informasi Kebencanaan (PUSDATIN)	12 Dokumen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500 Orang	500 Orang	500 Orang	285.948.400	205.306.040	204.115.632	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 Dokumen	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.866.892.656	2.981.578.057	2.912.760.437	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi lapang kebencanaan	300 orang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	900 Orang	900 Orang	900 Orang	1.073.694.556	1.073.694.556	1.241.344.556	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	400 orang								BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Pengurangan Resiko bencana inklucif disabilitas	200 orang								BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5 jenis	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000	75.000.000	75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Early Warning Sistem	2 titik	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	10 Unit	10 Unit	993.000.000	993.000.000	784.082.380	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	2 Kelurahan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	228.447.560	343.132.961	343.132.961	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Pembentukan Sekolah Maderasah Aman Bencana (SMAB)	2 sekolah								BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pendampingan Bantuan Sosial	12 Dokumen	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	421.750.540	421.750.540	421.750.540	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penanganan Rehab/Rekon Pasca Bencana	100,00 persen								BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	100 orang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	75.000.000	75.000.000	47.450.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 Dokumen	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.875.000.000	1.950.575.100	2.383.498.478	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	12 Dokumen	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1.255 Orang	1.255 Orang	1.255 Orang	1.575.000.000	1.650.575.100	1.778.333.948	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	100,00 persen	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.255 Orang	1.255 Orang	1.255 Orang	300.000.000	300.000.000	605.164.530	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Movev kebencanaan	100 orang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Movev kebencanaan	100 orang	100 orang	100 orang	541.556.083	674.895.883	584.295.883	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan Kebencanaan	100 orang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	376.233.242	509.573.042	509.573.042	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMD 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	12 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	165.322.841	165.322.841	74.722.841	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX	NON URUSAN							8.932.447.919	9.052.822.978	9.642.676.760	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100,00%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100,00%	100,00%	100,00%	8.932.447.919	9.052.822.978	9.642.676.760	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100,00%	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100,00%	Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	3.520.000	3.520.000	3.520.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Renstra	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	880.000	880.000	880.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	2 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	880.000	880.000	880.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	2 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	880.000	880.000	880.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	880.000	880.000	880.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00 persen	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	6.901.312.658	6.901.312.658	6.855.717.735	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.677.792.658	6.677.792.658	6.655.837.735	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	207.240.000	207.240.000	183.600.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	880.000	880.000	880.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.400.000	15.400.000	15.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100,00 persen	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	36.588.000	36.588.000	22.391.000	
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27.588.000	27.588.000	19.391.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya pelatihan dan pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	1 kegiatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	9.000.000	9.000.000	3.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00 persen	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	334.322.917	334.322.917	393.946.734	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	19.927.150	19.927.150	19.927.150	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	32.900.000	32.900.000	54.310.402	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	38.141.000	38.141.000	38.141.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	26.637.767	26.637.767	20.465.146	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1.000 lembar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.000 Paket	1.000 Paket	1.000 Paket	24.000.000	24.000.000	24.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	1.000 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000 Laporan	1.000 Laporan	1.000 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	100 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	157.637.000	157.637.000	157.637.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	20.080.000	20.080.000	64.466.036	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	713.402.000	713.402.000	713.402.000	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000 Laporan	1.000 Laporan	1.000 Laporan	3.927.000	3.927.000	3.927.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	237.575.000	237.575.000	237.575.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	471.900.000	471.900.000	471.900.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00 persen	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	943.302.344	1.063.677.403	1.653.699.291	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	312.420.000	312.420.000	312.420.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	316.920.000	316.920.000	346.861.170	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.908.800	2.908.800	2.908.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	46.705.000	46.705.000	51.331.238	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	1 gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dirhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	264.348.544	384.723.603	940.178.083	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL							30.437.981.436	30.801.314.769	34.912.253.286	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							19.722.771.470	20.004.693.591	24.181.276.722	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78,00%	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78,00%	78,00%	78,00%	7.197.369.600	7.335.838.813	7.358.499.936	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100,00%	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100,00%	100,00%	100,00%	117.666.700	136.000.033	109.637.283	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	117.666.700	136.000.033	109.637.283	DINAS SOSIAL
		Fasilitasi dan pengelolaan CSR	2 Kegiatan								DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	78,00%	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	78,00%	78,00%	78,00%	7.079.702.900	7.199.838.780	7.248.862.653	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan berdayanya PSM	1 Kegiatan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	260 Orang	260 Orang	5.121.772.620	5.121.772.620	5.373.737.338	DINAS SOSIAL
		Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	100 Persentase								DINAS SOSIAL
		Terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat	177 Orang								DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 Kegiatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	16 Orang	341.711.228	381.997.728	363.577.840	DINAS SOSIAL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16 Orang								DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH))	1 Kegiatan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	4 Keluarga	4 Keluarga	303.462.910	262.726.410	210.296.720	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	6 Kegiatan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	452.534.800	573.120.680	380.744.095	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Kegiatan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Sertifikat	9 Sertifikat	9 Sertifikat	860.221.342	860.221.342	920.506.660	DINAS SOSIAL
		Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan	6 Kegiatan								DINAS SOSIAL
		Terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro	1 Kegiatan								DINAS SOSIAL
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3	1 Kegiatan								DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100,00%	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	54.023.060	54.023.060	45.413.532	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100,00%	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	54.023.060	54.023.060	45.413.532	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Titik Debarisasi untuk dipulangkan ke daerah asal	13 Orang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	13 Orang	13 Orang	54.023.060	54.023.060	45.413.532	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	99,81%	99,81%	6.629.844.930	6.706.511.596	9.434.013.628	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00%	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00%	100,00%	100,00%	2.546.166.460	2.546.166.460	2.276.761.460	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	85 Orang hari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	85 Orang	960.700.000	960.700.000	960.700.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	150 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	150 Orang	10.705.000	10.705.000	10.705.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter	20 Buah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	2 Orang	2 Orang	804.100	804.100	804.100	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	77.540.000	77.540.000	33.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	265 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	250 Orang	752.408.140	752.408.140	752.408.140	DINAS SOSIAL
		Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	100 Persentase								DINAS SOSIAL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	7 Kegiatan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	7 Orang	7 Orang	140.547.500	140.547.500	94.422.500	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	50 Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	13.295.000	13.295.000	8.045.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	130 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1.702.720	1.702.720	1.702.720	DINAS SOSIAL
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter	1 Orang								DINAS SOSIAL
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1 Paket								DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	391.424.000	391.424.000	297.974.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	44.000.000	44.000.000	44.000.000	DINAS SOSIAL
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	400 Orang								DINAS SOSIAL
		Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan	100 Persentase								DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	75 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	76.040.000	76.040.000	25.250.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	100 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	20 Orang	77.000.000	77.000.000	47.750.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pant Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pant Sosial	100,00%	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pant Sosial	100,00%	100,00%	100,00%	4.083.678.470	4.160.345.136	7.157.252.168	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pant Sosial	100 Persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	494.340.800	494.340.800	478.890.800	DINAS SOSIAL
		Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pant Sosial	1 Kegiatan								DINAS SOSIAL
		Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pant Sosial	1 Kegiatan								DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pant Sosial yang dijangkau	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50.850.000	50.850.000	78.100.000	DINAS SOSIAL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanaan	5.000 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 Orang	5.000 Orang	5.000 Orang	2.552.309.450	2.552.309.450	5.535.024.450	DINAS SOSIAL
		Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	12 Kegiatan								DINAS SOSIAL
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Permakanaan	265 Orang								DINAS SOSIAL
		Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan bantuan permakanaan panti sosial	2 kegiatan								DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang	48 Orang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	20.315.000	20.315.000	20.315.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 Paket	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	133.284.400	133.284.400	69.816.400	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 Kegiatan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang	135 Orang	135 Orang	155.220.100	155.220.100	147.720.100	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 Kegiatan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	129.851.000	129.851.000	129.851.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 Kegiatan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	52.899.920	52.899.920	48.764.452	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	55.517.000	55.517.000	55.517.000	DINAS SOSIAL
		Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis	2 Orang								DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	16.500.000	16.500.000	5.250.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	16.500.000	16.500.000	5.250.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 Kegiatan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	31.900.000	31.900.000	15.900.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan pemberdayaan Lansia	4 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	374.190.800	450.857.466	566.852.966	DINAS SOSIAL
		Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga (UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA)	1 Kegiatan								DINAS SOSIAL
		Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	30 Orang								DINAS SOSIAL
		Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin	100 Persentase								DINAS SOSIAL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	69,85%	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	69,85%	69,85%	69,85%	4.743.785.480	4.799.530.946	6.337.803.540	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100,00%	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100,00%	100,00%	100,00%	220.809.710	240.809.710	222.292.360	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau	10 Orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	151.912.400	151.912.400	146.682.730	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk	10 Orang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	35.209.210	55.209.210	52.763.770	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	2 Kegiatan	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	33.688.100	33.688.100	22.845.860	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	15,15%	Menurunnya angka DTKS	15,15%	15,15%	15,15%	4.522.975.770	4.558.721.236	6.115.511.180	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang	1 Kegiatan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	180.000 Orang	180.000 Orang	180.000 Orang	499.115.790	499.115.790	449.985.170	DINAS SOSIAL
		Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang	1 Kegiatan								DINAS SOSIAL
		Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	1 Kegiatan								DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	2 Kegiatan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantunan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.500 Keluarga	1.500 Keluarga	1.500 Keluarga	600.053.180	559.131.980	478.173.336	DINAS SOSIAL
		Move Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan								DINAS SOSIAL
		Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan								DINAS SOSIAL
		Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan								DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga?	Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP)	12 Kegiatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	50.000 Keluarga	3.188.446.800	3.188.446.800	4.808.996.430	DINAS SOSIAL
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian	12 Kegiatan								DINAS SOSIAL
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 Kegiatan								DINAS SOSIAL
		Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN	12 Kegiatan								DINAS SOSIAL
		Jumlah Bantuan Santunan Kematian	1.413 Orang								DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan e-warung Kube	12 Kegiatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	235.360.000	312.026.666	378.356.244	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100,00%	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	1.097.748.400	1.108.789.176	1.005.546.086	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100,00%	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100,00%	100,00%	100,00%	612.885.400	624.326.176	591.516.036	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji	373 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 Orang	373 Orang	373 Orang	224.700.000	214.159.660	210.709.660	DINAS SOSIAL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids	373 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 Orang	373 Orang	373 Orang	70.860.000	70.860.000	70.860.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	5 Unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	5 Unit	44.220.000	41.970.000	41.970.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak)	75 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	75 Orang	66.050.000	61.114.450	64.414.450	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	11 Kegiatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang	11 Orang	207.055.400	236.222.066	203.561.926	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100,00%	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100,00%	100,00%	100,00%	484.863.000	484.463.000	414.030.050	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial	1 Kegiatan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	2 Kampung	2 Kampung	247.965.000	247.965.000	225.565.636	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2 Kegiatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Orang	51 Orang	51 Orang	236.898.000	236.498.000	188.464.414	DINAS SOSIAL
X.XX	NON URUSAN							10.715.209.966	10.796.621.178	10.730.976.564	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial	100,00%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial	100,00%	100,00%	100,00%	10.715.209.966	10.796.621.178	10.730.976.564	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Sosial	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	4.257.260	4.257.260	4.257.260	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	487.800	487.800	487.800	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	253.600	253.600	253.600	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	355.890	355.890	355.890	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	253.600	253.600	253.600	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	355.890	355.890	355.890	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.933.200	1.933.200	1.933.200	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	617.280	617.280	617.280	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100,00%	Administrasi keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	8.154.360.956	8.154.298.576	8.230.346.015	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persentase	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	7.825.768.436	7.825.768.436	7.901.815.875	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	324.643.200	324.643.200	324.643.200	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	253.600	253.600	253.600	DINAS SOSIAL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	263.980	263.980	263.980	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.167.760	3.167.760	3.167.760	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	263.980	201.600	201.600	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100,00%	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	628.572.522	710.046.114	558.664.061	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	6.600.000	6.200.000	-	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.000.000	13.000.000	13.000.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	40 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19.727.000	19.727.000	13.339.950	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.369.712	15.369.712	15.369.712	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 eksemplar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	5.760.000	5.760.000	5.040.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat	1.500 dos	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	99.000.000	99.000.000	70.275.000	DINAS SOSIAL
		Jumlah penyediaan minuman dan dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat	2.000 dos								DINAS SOSIAL
		Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat	500 pack								DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80 orang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	252.075.000	333.948.592	224.598.589	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	3 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	215.040.810	215.040.810	215.040.810	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persentase	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	226.286.513	226.286.513	226.286.513	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	4 Jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	197.073.443	197.073.443	197.073.443	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis	30 Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	29.213.070	29.213.070	29.213.070	DINAS SOSIAL
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Among Jiwo	4 Jenis								DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persentase	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	129.782.784	129.782.784	126.292.784	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, telepon, air	3 Rekening	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.782.784	129.782.784	126.292.784	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100 Persentase	Pemeliharaan aset SKPD	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	1.421.131.531	1.421.131.531	1.434.311.531	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.313.180	40.313.180	40.313.180	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	46 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit	46 Unit	610.978.814	610.978.814	579.269.724	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Buah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	3.636.000	3.636.000	3.636.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan yang akan direhabilitasi	1 Jenis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	7 Unit	491.336.000	491.336.000	491.336.000	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	1 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	173.450.000	173.450.000	212.658.822	DINAS SOSIAL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	7 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	101.417.537	101.417.537	107.097.805	DINAS SOSIAL
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan SKPD	100,00%	Dokumen Kelembagaan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	150.818.400	150.818.400	150.818.400	
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Draf SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.818.400	150.818.400	150.818.400	DINAS SOSIAL
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA							17.194.306.543	17.594.306.539	18.068.525.696	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							4.287.440.000	4.687.439.996	5.585.583.421	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	65,00%	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	65,00%	65,00%	65,00%	162.400.000	162.400.000	51.531.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dokumen	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	162.400.000	162.400.000	51.531.000	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	17.025.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Sosialisasi penyusun rencana tenaga kerja mikro pada perusahaan	30 orang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	37.400.000	37.400.000	34.506.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	77,00%	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	77,00%	77,00%	77,00%	2.555.760.000	2.688.760.000	3.950.677.750	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50,00%	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50,00%	50,00%	50,00%	2.171.400.000	2.171.400.000	3.532.596.232	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	100 orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	660 Orang	660 Orang	897 Orang	2.141.400.000	2.141.400.000	3.502.596.232	DINAS TENAGA KERJA
		Jumlah peserta uji kompetensi	60 orang								DINAS TENAGA KERJA
		Jumlah peserta pelatihan (buruh rokok / DBHCHT)	250 orang								DINAS TENAGA KERJA
		Pendataan tenaga kerja kompetensi	1 Kegiatan								DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pemeliharaan peralatan pelatihan	5 jenis	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	4 Paket	4 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	20,00%	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	20,00%	20,00%	20,00%	152.600.000	285.600.000	235.686.598	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan LPK swasta	8 LPK	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	65 Lembaga	65 Lembaga	152.600.000	285.600.000	235.686.598	DINAS TENAGA KERJA
		Pelatihan pemagangan	20 orang								DINAS TENAGA KERJA
		Peningkatan kapasitas instruktur LPK swasta	25 orang								DINAS TENAGA KERJA
		Penyusunan modul pelatihan	1 jenis								DINAS TENAGA KERJA
		Peningkatan Kapasitas Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan	20 perusahaan								DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100,00%	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100,00%	100,00%	100,00%	15.800.000	15.800.000	8.777.500	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Pelayanan rekomendasi, pendaftaran, monitoring LPK swasta	10 LPK	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 Perizinan	15 Perizinan	15 Perizinan	15.800.000	15.800.000	8.777.500	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	10 perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	10 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	48.960.000	48.960.000	33.300.802	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Sosialisasi dan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas kerja pada perusahaan	10 perusahaan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	48.960.000	48.960.000	33.300.802	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	151.227.000 Rp	Tingkat produktivitas tenaga kerja	151.227.000 Rp	151.227.000 Rp	151.227.000 Rp	167.000.000	167.000.000	140.316.618	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sosialisasi pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	3 perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	167.000.000	167.000.000	140.316.618	DINAS TENAGA KERJA
		pengukuran produktivitas tenaga kerja	5.000 orang								DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	66,00%	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	66,00%	66,00%	66,00%	824.980.000	1.091.979.996	919.074.671	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2.000 orang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	396.400.000	530.399.996	393.328.846	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	penempatan calon transmigran	3 Kartu Keluarga	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2.000 Orang	2.000 Orang	2.000 Orang	181.020.000	181.020.000	115.278.060	DINAS TENAGA KERJA
		sosialisasi identifikasi peminat transmigrasi	2 kali								DINAS TENAGA KERJA
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	2.000 orang								DINAS TENAGA KERJA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Jumlah Lowongan	2.500 lowongan									DINAS TENAGA KERJA
		Pelayanan antar kerja	12 kegiatan									DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sosialisasi dan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	1 kali	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	35.680.000	35.680.000	11.542.790		DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	pelayanan disabilitas	30 orang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 Orang	15 Orang	-	15.300.000	15.300.000	-		DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Pelatihan Wirausaha Baru	30 orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60 Orang	60 Orang	40 Orang	164.400.000	298.399.996	266.507.996		DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin LPTKS yang diterbitkan	100,00%	Persentase Izin LPTKS yang diterbitkan	100,00%	100,00%	100,00%	6.220.000	6.220.000	3.478.252		
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Monitoring LPTKS, LPPRT, P3MI, Perusahaan	100 kali	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	6.220.000	6.220.000	3.478.252		DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dan bursa kerja	1.000 orang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dan bursa kerja	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	247.860.000	380.860.000	347.767.573		
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	pelayanan IPK online	12 bulan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2.500 Orang	2.500 Orang	2.500 Orang	120.960.000	253.960.000	220.867.573		DINAS TENAGA KERJA
		penempatan tenaga kerja melalui IPK	220 orang									DINAS TENAGA KERJA
		Jumlah lowongan pekerjaan melalui IPK	425 lowongan									DINAS TENAGA KERJA
		Jumlah pencari kerja terdaftar (AKI)	2.400 orang									DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja	750 orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	750 Orang	750 Orang	750 Orang	126.900.000	126.900.000	126.900.000		DINAS TENAGA KERJA
		pelaksanaan bursa kerja	1 kali									DINAS TENAGA KERJA
		Jumlah Lowongan melalui bursa kerja	3.000 lowongan									DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan PMI (pra dan purna penempatan)	40 orang	Jumlah perlindungan PMI (pra dan purna penempatan)	40 orang	40 orang	40 orang	143.900.000	143.900.000	143.900.000		
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pelatihan CPMI/PMI	20 orang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang	30 Orang	30 Orang	111.000.000	111.000.000	111.000.000		DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	pelatihan wirausaha purna PMI	10 orang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	32.900.000	32.900.000	32.900.000		DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan perpanjangan IMTA	100,00%	Penerbitan perpanjangan IMTA	100,00%	100,00%	100,00%	30.600.000	30.600.000	30.600.000		
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	200 TKA	Jumlah perpanjangan IMTA	200 orang	200 orang	200 orang	30.600.000	30.600.000	30.600.000		DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,30%	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,30%	5,30%	5,30%	744.300.000	744.300.000	664.300.000		
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	758 Perusahaan	Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	758 Perusahaan	758 Perusahaan	758 Perusahaan	392.500.000	392.500.000	312.500.000		
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)	50 orang / Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45 Perusahaan	45 Perusahaan	45 Perusahaan	48.000.000	48.000.000	48.000.000		DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	50 orang / Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	3 Perusahaan	3 Perusahaan	-	48.000.000	48.000.000	-		DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Koordinasi dewan pengupahan	12 Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	296.500.000	296.500.000	264.500.000		DINAS TENAGA KERJA
		Bimtek peraturan perundang-undangan dan jamsos	20 orang / perusahaan									DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	56,00%	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	56,00%	56,00%	56,00%	351.800.000	351.800.000	351.800.000		

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Pencegahan Perseishan Hubungan Industrial	30 orang / perusahaan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	160 Perkara	160 Perkara	160 Perkara	98.676.000	98.676.000	98.676.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / PHK	160 kasus	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Perkara	100 Perkara	100 Perkara	26.324.000	26.324.000	26.324.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	12 PUK	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	43.200.000	43.200.000	43.200.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	12 kegiatan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	183.600.000	183.600.000	183.600.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX	NON URUSAN							12.906.866.543	12.906.866.543	12.482.942.275	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	12.906.866.543	12.906.866.543	12.482.942.275	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100,00%	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100,00%	100,00%	100,00%				
		Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	100,00%	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	9.902.000	10.035.000	10.035.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renja OPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	704.000	542.000	542.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA OPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.659.000	2.954.000	2.954.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA OPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.488.000	2.488.000	2.488.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA OPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.633.000	1.633.000	1.633.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA OPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.244.000	1.244.000	1.244.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	443.000	443.000	443.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	731.000	731.000	731.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	10.575.834.543	10.575.834.543	9.938.510.058	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	10.350.167.543	10.350.167.543	9.726.883.058	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium pengelola keuangan ASN	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	225.000.000	225.000.000	210.960.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan OPD	4 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	667.000	667.000	667.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	537.306.000	373.115.415	419.562.052	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket	80.000.000	35.687.355	69.566.824	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	30 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	40 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	35.000.000	35.000.000	30.364.147	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	27.000.000	27.000.000	27.019.857	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	730 eksemplar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu	300 orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	15.000.000	15.000.000	11.250.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas	100 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	148.456.000	148.323.000	111.262.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tatakelola arsip OPD	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sarpras TIK	5 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	171.850.000	52.105.060	110.099.224	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	175.500.000	43.459.998	42.759.998	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubeler	1 Jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48 Unit	48 Unit	48 Unit	175.500.000	43.459.998	42.759.998	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa urusan penunjang kedinassan	100,00%	Persentase tersedianya jasa urusan penunjang kedinassan	100,00%	100,00%	100,00%	823.054.400	1.119.158.000	1.296.811.580	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium non ASN	23 orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	473.054.400	769.158.000	946.811.580	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100,00%	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100,00%	100,00%	100,00%	785.269.600	785.263.587	775.263.587	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.350.000	40.350.000	40.350.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	24 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	318.150.000	318.150.000	318.150.000	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	15 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103 Unit	103 Unit	103 Unit	126.699.600	126.699.600	116.699.600	DINAS TENAGA KERJA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	3 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	300.070.000	300.063.987	300.063.987	DINAS TENAGA KERJA
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							19.131.456.859	19.040.274.859	22.016.630.822	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							6.953.297.843	7.158.351.555	9.427.553.434	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100,00%	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100,00%	100,00%	100,00%	1.195.240.137	1.255.239.817	1.188.188.288	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	93 Program/Kegiatan	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	93 Program/Kegiatan	93 Program/Kegiatan	93 Program/Kegiatan	201.000.000	201.000.000	156.706.250	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	98.700.000	98.700.000	70.031.250	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000	17.500.000	17.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	68.400.000	68.400.000	56.900.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender(PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	16.400.000	16.400.000	12.275.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	100,00%	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	100,00%	100,00%	100,00%	94.200.000	94.200.000	99.961.720	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9.200.000	9.200.000	5.473.950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	85.000.000	85.000.000	94.487.770	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	30 Lembaga	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	900.040.137	960.039.817	931.520.318	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	460.140.838	460.140.638	450.335.139	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang	50 Orang	376.829.099	376.828.979	376.828.979	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	63.070.200	123.070.200	104.356.200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14 Poin	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14 Poin	14 Poin	14 Poin	2.372.584.298	2.392.849.258	2.130.227.624	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	6 Dokumen	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	412.997.229	474.712.049	346.373.175	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	208.292.719	269.307.539	219.601.429	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	204.704.510	205.404.510	126.771.746	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100,00%	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100,00%	100,00%	100,00%	1.382.384.190	1.340.945.370	1.284.602.330	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	1.382.384.190	1.340.945.370	1.284.602.330	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang terstandarisasi	100,00%	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang terstandarisasi	100,00%	100,00%	100,00%	577.202.879	577.191.839	499.252.119	
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	101.493.199	101.493.199	101.493.199	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1.630 Orang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1.630 Orang	1.630 Orang	1.630 Orang	170.183.350	167.922.310	156.060.590	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3 Orang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3 Orang	3 Orang	3 Orang	25.199.500	25.199.500	25.199.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	280.326.830	282.576.830	216.498.830	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100,00%	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	1.952.860.000	2.046.855.000	1.885.339.165	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	100,00%	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	100,00%	100,00%	100,00%	30.000.000	123.995.000	123.995.000	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	10.000.000	103.995.000	103.995.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100,00%	Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100,00%	100,00%	100,00%	1.827.060.000	1.827.060.000	1.688.594.165	
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1.102.060.000	1.102.060.000	1.067.928.350	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	150 Orang	525.000.000	525.000.000	525.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	200.000.000	95.665.815	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100,00%	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100,00%	100,00%	100,00%	95.800.000	95.800.000	72.750.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	95.800.000	95.800.000	72.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100,00%	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100,00%	100,00%	100,00%	303.613.140	303.613.140	318.495.190	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	303.613.140	303.613.140	318.495.190	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	90.868.300	90.868.300	82.683.220	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	212.744.840	212.744.840	235.811.970	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100,00%	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100,00%	100,00%	100,00%	575.654.060	639.054.060	3.473.094.597	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	8 Jejaring	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	8 Jejaring	8 Jejaring	8 Jejaring	343.134.240	384.034.240	173.040.950	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	7 Organisasi	7 Organisasi	196.779.290	196.779.290	23.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	146.354.950	187.254.950	150.040.950	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7 Lembaga	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	232.519.820	255.019.820	3.300.053.647	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	400 Orang	400 Orang	87.779.740	87.779.740	1.585.152.637	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	67.225.230	89.725.230	89.725.230	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	34.936.970	34.936.970	1.582.597.900	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	42.577.880	42.577.880	42.577.880	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01%	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01%	0,01%	0,01%	553.346.208	520.740.280	432.208.570	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani	100,00%	Prosentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani	100,00%	100,00%	100,00%	55.254.760	51.868.280	47.308.430	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	55.254.760	51.868.280	47.308.430	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100,00%	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100,00%	100,00%	100,00%	208.635.778	202.816.330	123.417.010	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	72 Orang	60 Orang	117.608.210	113.462.330	40.417.740	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	68.600.938	66.927.480	60.572.750	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	22.426.630	22.426.520	22.426.520	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100,00%	Cakupan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100,00%	100,00%	100,00%	289.455.670	266.055.670	261.483.130	
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	156.873.030	133.473.030	124.873.030	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	132.582.640	132.582.640	136.610.100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.171.709.265	1.186.848.175	1.781.406.145	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100,00%	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100,00%	100,00%	100,00%	252.226.040	252.226.040	78.056.220	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	100 Kelurahan	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	100 Kelurahan	100 Kelurahan	100 Kelurahan	252.226.040	252.226.040	78.056.220	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	46.935.990	46.935.990	40.245.700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	205.290.050	205.290.050	37.810.520	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100,00%	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100,00%	100,00%	100,00%	919.483.225	934.622.135	1.703.349.925	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum A	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	919.483.225	934.622.135	1.703.349.925	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	160.145.200	205.284.110	402.671.740	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	4 Lembaga	1 Lembaga	96.895.300	96.895.300	96.895.300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	102.720.620	72.720.620	69.244.010	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	559.722.105	559.722.105	1.134.538.875	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
X.XX	NON URUSAN								11.006.449.751	10.695.075.129	10.807.671.243	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100,00%	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100,00%	100,00%	100,00%	11.006.449.751	10.695.075.129	10.807.671.243		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100,00%	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100,00%	100,00%	100,00%					
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100,00%	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100,00%	100,00%	100,00%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	25 Dokumen	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	25 Dokumen	25 Dokumen	27 Dokumen	6.149.378	6.391.260	8.469.600		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.007.200	1.058.400	1.911.040	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.090.080	1.157.920	1.507.200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.287.520	1.431.830	1.590.480	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	695.200	705.760	602.880	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	695.200	548.230	883.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	700.080	793.920	1.382.080	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	674.098	695.200	592.320	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	7.887.297.459	7.888.268.419	8.237.908.757		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	7.642.078.859	7.642.078.859	7.992.027.837	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	242.189.080	243.149.080	243.149.080	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	793.920	596.480	493.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	560.000	560.000	560.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	1.177.840	1.484.960	1.382.080	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	497.760	399.040	296.160	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100,00%	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	326.691.640	321.738.598	400.096.800		
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	151.691.640	146.738.598	150.096.800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	400 Orang	400 Orang	175.000.000	175.000.000	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00%	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00%	100,00%	100,00%	1.183.812.686	1.187.360.264	859.024.472		

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.996.050	4.996.050	4.996.050	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.781.300	14.781.300	16.634.060	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	61.767.328	62.867.328	62.867.328	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	30.327.458	21.691.466	20.515.430	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	39.500.000	39.500.000	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	661.065.540	678.606.540	349.094.024	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	341.375.010	334.917.580	334.917.580	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	721.895.510	410.713.510	457.631.650	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	180.989.490	180.989.490	180.989.490	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	424.512.260	113.330.260	113.330.260	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	116.393.760	116.393.760	163.311.900	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	314.478.000	314.478.000	311.425.200	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	109.272.000	109.272.000	106.219.200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	205.206.000	205.206.000	205.206.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100,00%	Persentase pemeliharaan aset dinas	100,00%	100,00%	100,00%	566.125.078	566.125.078	533.114.764	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.313.180	40.313.180	40.313.180	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	27 Unit	361.294.699	361.294.699	361.294.699	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	43.059.666	43.059.666	32.817.900	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	94.252.665	94.252.665	94.252.665	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	27.204.868	27.204.868	4.436.320	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN							13.119.150.139	14.852.150.139	16.128.345.325	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							3.776.120.557	5.212.238.511	6.376.817.903	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100,00%	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100,00%	100,00%	100,00%	286.932.432	69.238.860	67.405.877	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 Unit	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	286.932.432	69.238.860	67.405.877	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	jumlah rapat koordinasi kawasan daerah rentan pangan	2 rakor	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	2 Unit	2 Unit	214.591.908	17.269.460	17.269.460	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Rapat Koordinasi untuk Penyediaan infrastruktur logistik	6 Rapat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17.244.164	14.742.130	12.909.147	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Studi kelayakan / DED	2 dokumen	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55.096.360	37.227.270	37.227.270	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3.057 Kkal / Kapita / Tahun	Ketersediaan Energi / Kapita	3.057 Kkal / Kapita / Tahun	3.057 Kkal / Kapita / Tahun	3.057 Kkal / Kapita / Tahun	2.704.743.880	3.172.137.852	4.458.550.527	
		Presentase Cakupan Distribusi	100,00%	Presentase Cakupan Distribusi	100,00%	100,00%	100,00%				
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100,00%	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100,00%	100,00%	100,00%				
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100,00%	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	679.041.520	876.102.606	1.439.752.216	
		Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100,00%	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100,00%	100,00%	100,00%				
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pangan yang Disusun	1 Dokumen	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	24 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	57.888.255	72.939.870	62.091.510	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Dokumen Neraca Bahan Pangan yang Disusun	1 Dokumen								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Dokumen Pronogsa Kebutuhan Pangan yang Disusun	1 Dokumen								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Rakor HBKN	1 Kali								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Rakor Satgas Pangan	6 Kali								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan Teknis pengembangan empon - empon	10 Pelatihan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	15 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	94.462.968	185.770.915	161.536.525	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	5 Pelatihan								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	6 Kegiatan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	9.591.808	9.591.808	8.501.408	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Lokasi Pemantauan Distribusi Pangan	16 Lokasi	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	72 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	218.062.995	221.400.604	213.700.604	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Lokasi Gelar Pangan Murah	6 Lokasi								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Lokasi Pemantauan Harga Pangan	10 Lokasi								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Petugas Enumerator	16 Orang								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Laporan Data Base Distribusi Pangan yang Disusun	16 Laporan								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Laporan perkembangan Harga Pangan	24 Laporan								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (KDPM) yang Disusun	5 Kegiatan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	21 Unit	21 Unit	21 Unit	255.889.372	343.362.639	962.365.399	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Pelatihan Pemasaran Produk Pangan	5 Pelatihan								DINAS KETAHANAN PANGAN
		jumlah lumbung pangan	16 kecamatan								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Lokasi Pengembangan dan Pembinaan Toko Tani Indonesia	21 Lokasi	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	25 Unit	15 Unit	15 Unit	43.146.122	43.036.770	31.556.770	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Lokasi Monitoting dan Evaluasi Toko Tani Indonesia	23 Lokasi								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100,00%	Penguatan Cadangan Pangan	100,00%	100,00%	100,00%	1.063.602.360	1.155.245.246	1.305.334.681	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Cadangan Pangan	4 Kegiatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	11.584.180	103.227.066	77.484.681	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Beras Cadangan Pangan dan Beras ATM	11.000.000 kilogram	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Ton	11 Ton	19.637 Ton	929.500.000	929.500.000	1.104.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras	10 Lokasi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	15 Ton	15 Ton	20 Ton	122.518.180	122.518.180	123.450.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
		jumlah beras cadangan pangan yang terpelihara	15 ton								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	88,00%	Angka Kecukupan Energi	88,00%	88,00%	88,00%	962.100.000	1.140.790.000	1.713.463.630	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Diseminasi Pola Pangan Harapan	2 Kegiatan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	33 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	146.400.000	439.636.220	1.086.556.480	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Apresiasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Anak Usia Dini	2 Event								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Directory Konsumsi Pangan Kota Semarang	1 buku								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kampung Tematik Produktif	8 Kegiatan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	53 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	543.100.000	428.553.780	378.829.900	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Promosi Pangan Lokal	21 Kegiatan								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Pekarangan Pangan Lestari	16 Lokasi								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi	1.263 Anak	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	272.600.000	272.600.000	248.077.250	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Rapat Teknis Pengembangan Pangan Lokal	1 Kegiatan								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Temu Usaha Pangan Lokal	1 Kegiatan								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	4,00%	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	4,00%	4,00%	4,00%	109.195.275	196.732.830	170.902.680	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 Buku	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 Buku	2 Buku	2 Buku	90.490.866	96.040.250	91.870.230	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 Dokumen	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.490.866	96.040.250	91.870.230	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Dokumen Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	1 Dokumen								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	1 Dokumen								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 Kelurahan	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	18.704.409	100.692.580	79.032.450	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan di titik kawasan daerah rentan pangan	10 kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	18.704.409	100.692.580	79.032.450	DINAS KETAHANAN PANGAN
		jumlah rakor kawasan daerah rentan pangan	2 rakor								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	81,50%	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	81,50%	81,50%	81,50%	675.248.970	1.774.128.969	1.679.958.819	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100,00%	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100,00%	100,00%	100,00%	675.248.970	1.774.128.969	1.679.958.819	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kader Keamanan Pangan	12 Kegiatan	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	101.950.000	279.440.000	254.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pembinaan Pelaku Usaha PSAT PDUK	3 Kegiatan								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi OKKPD	2 Kegiatan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	63.300.000	63.300.000	38.050.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Audit dan Inspeksi Perijinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	30 Kegiatan								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Sertifikat PSAT bagi pelaku usaha PSAT PDUK	100 Sertifikat								DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Pelaku Usaha PSAT	1 dokumen	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.710.000	23.710.000	19.800.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Tim Jaerjing Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang	3 Kegiatan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	85.250.000	85.250.000	73.855.300	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pengawasan Keamanan Pangan Pre Market dan Post Market	24 Dokumen								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Sosialisasi Keamanan Pangan	4 Kegiatan								DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	1 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	401.038.970	1.322.428.969	1.294.253.519	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	1 Paket								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Survei Keamanan Pangan	72 Survei								DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah Media Informasi Keamanan Pangan	5 Dokumen								DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX	NON URUSAN							9.343.029.582	9.639.911.628	9.751.527.422	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	9.343.029.582	9.639.911.628	9.751.527.422	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%				
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	12.042.170	14.225.770	14.181.890	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.234.770	2.234.770	1.650.400	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah dokumen RTP	1 dokumen								DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.410	2.016.310	2.773.530	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.410	2.016.310	2.773.530	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.410	2.016.310	1.637.700	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.410	2.016.310	2.773.530	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3.925.760	3.925.760	2.573.200	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Jumlah dokumen LPPD	1 dokumen								DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6.997.096.569	7.010.566.569	7.202.993.337	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	6.768.820.139	6.768.820.139	6.961.246.907	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	223.500.000	236.970.000	236.970.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	924.510	924.510	924.510	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	2.773.530	2.773.530	2.773.530	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.078.390	1.078.390	1.078.390	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100,00%	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	1.127.511.699	1.208.906.382	1.114.211.866	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan SKPD	6 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	6.868.565	6.868.565	6.868.565	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/SKPD yang disediakan	4 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	238.331.655	238.331.655	238.449.232	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SKPD yang disediakan	22 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	57.338.240	57.338.240	57.338.240	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	45 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.227.891	45.227.891	34.745.180	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	44.764.981	44.764.981	44.799.773	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan / Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	3 Jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000	5.700.000	5.700.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat dan Tamu yang berkunjung	350 Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	95.422.370	72.502.370	71.731.400	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rapat Koordianasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	100 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	303.814.000	362.964.000	287.021.360	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	330.043.997	375.208.680	367.558.116	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100,00%	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	708.677.154	708.670.127	722.597.549	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.171.154	127.284.527	141.211.949	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor/SKPD	13 Orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	588.506.000	581.385.600	581.385.600	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00%	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	497.701.990	697.542.780	697.542.780	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SKPD	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional / Lapangan SKPD	22 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	23 Unit	303.945.320	335.654.410	335.654.410	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD	4 Jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	25 Unit	25 Unit	59.558.690	59.558.690	59.558.690	DINAS KETAHANAN PANGAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	100,00 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	97.879.800	266.011.500	266.011.500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.11.1.03.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							131.731.704.358	132.531.704.358	152.935.139.133	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							92.289.845.480	92.734.124.936	104.093.363.190	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	615.559.024	647.559.024	621.333.732	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100,00%	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100,00%	100,00%	100,00%	366.159.024	366.159.024	352.645.122	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	155.282.024	155.282.024	149.542.383	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kuaitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Perwal D3TLH	1 Dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen KLHS	1 dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen DIKPLHD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	210.877.000	210.877.000	203.102.739	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Jumlah dokumen Biomassa	1 Dokumen									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	100 Persen	100 Persen	249.400.000	281.400.000	268.688.610		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		-	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	249.400.000	281.400.000	268.688.610		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	100,00%	100,00%	6.224.340.968	6.065.101.395	7.822.918.808		
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59,00%	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59,00%	59,00%	59,00%					
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87,00%	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87,00%	87,00%	87,00%					
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20 Ha	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20 Ha	20 Ha	20 Ha					
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2,00%	Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2,00%	2,00%	2,00%					
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	100,00%	100,00%	5.478.028.620	5.318.789.047	7.057.807.606		
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan	150 perusahaan	150 perusahaan					
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	65,00%	Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	65,00%	65,00%	65,00%					
		Emisi CO2	7.625.348 Kt CO2e	Emisi CO2	7.625.348 Kt CO2e	7.625.348 Kt CO2e	7.625.348 Kt CO2e					
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Bersih Sehat (LBS)	16 kecamatan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	15 Dokumen	15 Dokumen	16 Dokumen	1.723.493.493	1.364.253.920	3.262.017.865		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Toilet Bersih	16 kecamatan									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah tong komposter yang terbeli untuk kegiatan Adipura	100 buah									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta ekspose hasil penilaian Adipura	350 orang									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Adipura	350 orang									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah IPAL usaha skala kecil yang terbangun	1 unit									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah inventarisasi kegiatan /usaha penghasil limbah cair	1 dokumen									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen IKLH	1 dokumen									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Lomba Bersih Sehat (LBS)	50 orang									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Lomba Toilet Bersih	50 orang									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi koordinasi penilaian kota sehat/adipura	350 orang									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah penyelenggaraan event pendukung car free day di Jl. Pemuda	1 kegiatan									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah titik pantau kualitas udara ambient di lokasi car free day	8 kali									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah titik pantau kegiatan pemanfaatan air tanah	60 titik									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan bintek pemanfaatan SDA bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang	100 industri									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen penyusunan neraca air	1 dokumen									DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah terlaksananya penyelenggaraan car free day di Jl. Pahlawan dan Jl. Pemuda	40 kali								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Sosialisasi Pengelolaan Limbah Cair	1 kali								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	2.700.483.441	2.900.483.441	2.765.241.084	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK)	1 dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah kampung iklim yang terbangun	5 lokasi								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen kajian sponge city	1 dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi mitigasi adaptasi perubahan iklim	50 orang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan proklam	1.000 batang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu air	1.000 meter persegi								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen DED Rainwater harvesting (RWH)	1 dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengadaan Rain Water Harvesting	12 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi Rain Water Harvesting	75 orang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen DED sumur resapan	1 dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembangunan sumur resapan	18 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pelubangan biopori dan pengadaan penutup biopori	2.600 lubang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah alat bor biopori yang terbeli	100 buah								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Alat Bor Mesin yang terbeli	5 Unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium	27 jenis	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.054.051.686	1.054.051.686	1.030.548.657	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM laboratorium	14 orang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah titik pemantauan udara ambien (roadside monitoring)	3 titik								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah monitoring kualitas air sungai	120 titik								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi	1.500 kendaraan								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	2 jenis	2 jenis	278.092.497	278.092.497	300.292.497	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah kegiatan iklan layanan masyarakat bidang lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik	6 kegiatan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	278.092.497	278.092.497	300.292.497	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pembuatan kalender sebagai sarana informasi dan publikasi DLH	500 buah								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah edisi buletin green yang tersusun	6 edisi								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pengelolaan data informasi berbasis web	2 jenis								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi	60 Ha	Luasan Lahan yang terkonservasi	60 Ha	60 Ha	60 Ha	468.219.851	468.219.851	464.818.705	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	1 unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	468.219.851	468.219.851	464.818.705	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Pemeliharaan daerah rehabilitasi	5 lokasi								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pengadaan tanaman konservasi tangkapan air	1.000 batang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah kegiatan konservasi lingkungan yang terselenggara	12 kegiatan								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100,00%	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	866.083.646	866.083.646	854.294.162	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	866.083.646	866.083.646	854.294.162	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	1 dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	390.880.077	390.880.077	379.090.593	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen penyusunan DED pembangunan instalasi air	1 dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pendampingan BRIN	1 Dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah tanaman keanekaragaman hayati yang tersedia	1.000 batang	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Ha	8 Ha	8 Ha	287.476.843	287.476.843	287.476.843	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah frekuensi pemeliharaan taman kehati	5 lokasi								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pembangunan instalasi air	1 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	4 Unit	4 Unit	4 Unit	187.726.726	187.726.726	187.726.726	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pembangunan sarana prasarana taman kehati	1 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati (Kehati)	1 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo	1 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	56,00%	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	56,00%	56,00%	56,00%	363.971.800	399.971.800	380.196.509	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	274.750.784	310.750.784	297.038.076	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah B3	300 orang	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	225.726.384	225.726.384	220.128.789	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembinaan Penyusunan Rincian Teknis B3	55 Dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Limbah B3 Skala Kota Semarang	1 Dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	55 perusahaan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	49.024.400	85.024.400	76.909.287	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 jenis	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 jenis	1 jenis	1 jenis	89.221.016	89.221.016	83.158.433	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah sarana prasarana yang dikelola	1 unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	89.221.016	89.221.016	83.158.433	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,40%	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,40%	85,40%	85,40%	691.927.835	723.917.837	706.029.187	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100,00%	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%				
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	691.927.835	723.917.837	706.029.187	
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100,00%	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100,00%	100,00%	100,00%				
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan	80 buah	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	60 Dokumen	60 dokumen	60 dokumen	398.060.000	430.060.000	412.171.350	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/ bimbingan teknis	100 orang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan konsultan penyusun dokumen lingkungan	40 orang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta yang mengikuti rapat perwal persetujuan lingkungan	40 orang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah kajian evaluasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kota Semarang	1 dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah kajian percepatan penerbitan persetujuan lingkungan	1 Dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi	180 industri	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	293.867.835	293.857.837	293.857.837	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pengambilan sampel air limbah IPAL tahu dan S. Bajak	32 titik								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50,00%	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50,00%	50,00%	50,00%	3.274.815.000	3.524.807.924	3.468.481.920	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	3.274.815.000	3.524.807.924	3.468.481.920	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta sosialisasi dan bintek pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	100 orang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	160 Lembaga	160 Lembaga	160 Lembaga	2.830.752.000	3.080.744.924	3.024.418.920	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta peringatan HPSN	500 orang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi green transportation	100 orang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan lingkungan hidup	200 orang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah peserta sosialisasi pendampingan TTG	200 orang								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemberdayaan bank sampah wilayah	120 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Kendaraan Operasional BSI	1 Unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Alat peraga pilah sampah dari rumah yang terbeli	450 buah	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	444.063.000	444.063.000	444.063.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah penyelenggaraan Perti Saka Kalpataru	4 kali								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup	1 kali								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Pembinaan Pengelolaan Pilah Sampah	6 kali								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Partisipasi dalam Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 sekolah								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyelenggaraan Lomba Bank Sampah	1 kali								DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Jumlah Penyelenggaraan Lomba Video HLH	1 kali									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Penerimaan Anggota Saka Kalpataru	40 orang									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11,50%	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11,50%	11,50%	11,50%	291.129.200	291.129.200	581.176.175		
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	291.129.200	291.129.200	581.176.175		
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang menerapkan sekolah Adiwiyata	50 sekolah	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	60 Entitas	60 Entitas	60 Entitas	291.129.200	291.129.200	581.176.175	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata	150 orang									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah tempat pilah sampah yang tersedia	55 unit									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah bibit tanaman yang terbeli	100 batang									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah pencacah sampah organik yang terbeli	2 unit									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Studi orientasi pelaksanaan Adiwiyata	1 kegiatan									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00%	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	125.108.000	128.807.617	128.807.617		
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	60 kasus	60 kasus	125.108.000	128.807.617	128.807.617		
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	60 kasus	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	95.908.000	102.407.787	102.407.787	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah titik lokasi uji kualitas lingkungan pulbaket (air limbah, air sungai, air sumur, udara)	20 sampel									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah peserta sosialisasi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan	250 orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.200.000	26.399.830	26.399.830	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,00%	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,00%	91,00%	91,00%	79.836.910.007	80.086.746.493	89.530.125.080		
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	27,00%	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	27,00%	27,00%	27,00%					
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	72,00%	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	72,00%	72,00%	72,00%					
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00%	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00%	100,00%	100,00%	79.836.910.007	80.086.746.493	89.530.125.080		
		Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00%	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00%	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00%	100,00%	100,00%					
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Sosialisasi pengisian data jakstrada	200 orang	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	98.800.000	98.800.000	97.482.203	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah dokumen laporan Jakstrada	2 dokumen									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Gerobak pilah yang tersedia	2 unit	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampahdengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	762.360.546	762.360.546	736.189.237	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah motor sampah roda 3 yang tersedia	6 unit									DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah alat pencacah plastik yang tersedia	4 Unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah mesin pencacah organik yang tersedia	2 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah mesin press yang tersedia	2 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah timbangan yang tersedia	2 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Peningkatan kebersihan di wilayah Kota Semarang	16 kecamatan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	363 Ton	363 Ton	363 Ton	55.088.356.212	55.825.178.642	63.933.034.209	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Tingkat pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	16 kecamatan								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta sosialisasi Perda dan Perwal Penanganan Pengelolaan Sampah	1.900 orang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	27 Kelompok	27 Kelompok	27 Kelompok	202.466.400	1.103.498.400	1.039.917.933	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah tong sampah yang tersedia	150 unit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	20 Dokumen	20 Dokumen	22 Dokumen	8.985.248.874	16.364.869.403	16.914.878.028	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah container sampah tertutup yang tersedia	100 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah kendaraan angkut sampah yang terbeli	4 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah alat berat tersedia	1 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah gerobag sampah yang tersedia	10 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	5 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Persentase terlaksananya penarikan retribusi kebersihan melalui rekening PDAM dan sosialisasi intensifikasi PAD	100,00 persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	1.537.350.000	1.537.350.000	1.486.020.446	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kajian lingkungan pengelolaan sampah	2 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	40 Unit	40 Unit	40 Unit	13.162.327.975	4.394.689.502	5.322.603.024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah TPS yang dipelihara	30 lokasi								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemeliharaan TPA	1 kegiatan								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah sarpras pengelolaan persampahan di TPA, TPST dan TPA yang tersedia	7 jenis								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah TPS yang dibangun	10 lokasi								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Peningkatan bangunan TPA Jatibarang	1 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah TPST yang terbangun	4 unit								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX	NON URUSAN							39.441.858.878	39.797.579.422	48.841.775.943	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	39.441.858.878	39.797.579.422	48.841.775.943	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	9 dokumen	17.321.694	17.321.694	17.321.694	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) DLH	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.754.178	2.754.178	2.754.178	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan DLH	1 Dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen RTP DLH	1 Dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD DLH	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.376.206	2.376.206	2.376.206	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD DLH	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.593.666	2.593.666	2.593.666	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD DLH	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.376.206	2.376.206	2.376.206	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD DLH	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.593.666	2.593.666	2.593.666	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaporan kinerja DLH	4 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	4.627.772	4.627.772	4.627.772	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah dokumen SPIP DLH	1 Dokumen								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100,00%	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	16.912.180.020	16.900.643.251	17.738.280.036	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN DLH	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	15.122.896.494	15.122.896.494	16.048.253.279	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas DLH	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	441.500.224	429.963.455	422.163.455	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	100,00 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.341.390.301	1.341.390.301	1.261.470.301	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun DLH	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.727.514	2.727.514	2.727.514	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran DLH	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.982.132	1.982.132	1.982.132	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran DLH	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.683.355	1.683.355	1.683.355	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00%	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00%	100,00%	100,00%	1.300.506.303	1.667.763.616	1.809.906.468	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (DLH)	35 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.650.000	45.650.000	45.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (DLH)	6 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	109.526.000	114.144.000	190.928.605	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (DLH)	9 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	90.471.000	90.471.000	83.000.234	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (DLH)	2 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	42.457.000	42.457.000	42.457.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku ilmu pengetahuan umum yang disediakan (DLH)	9 buku	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.284.000	2.284.000	2.284.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung (DLH)	4.400 orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	134.865.000	134.865.000	93.271.635	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (DLH)	1.000 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	403.035.880	403.035.880	374.463.600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (DLH)	3 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	472.217.423	834.856.736	977.851.394	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	916.240.265	916.240.265	777.411.850	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (DLH)	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	713.200.000	713.200.000	574.371.585	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor (DLH)	44 orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	203.040.265	203.040.265	203.040.265	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00%	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	20.295.610.596	20.295.610.596	28.498.855.895	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DLH)	3 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	160.471.000	160.471.000	158.820.018	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (DLH)	200 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	200 Unit	200 Unit	19.577.046.596	19.577.046.596	27.616.858.063	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel (DLH)	19 buah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	19 Unit	16 Unit	16 Unit	1.293.000	1.293.000	1.293.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (DLH)	214 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214 Unit	214 Unit	214 Unit	250.000.000	250.000.000	314.424.814	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (DLH)	3 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	306.800.000	306.800.000	407.460.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							23.443.105.241	23.443.105.241	25.196.059.463	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							2.852.687.886	3.697.345.166	3.296.682.846	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99,40%	Persentase Perekaman KTP-el	99,40%	99,40%	99,40%	1.824.495.957	2.723.063.237	2.398.197.397	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71,00%	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71,00%	71,00%	71,00%				
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	428.000 Dokumen	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	428.000 Dokumen	428.000 Dokumen	428.000 Dokumen	1.505.754.857	2.562.522.137	2.265.591.297	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	6 penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	9.707.280	9.707.280	5.207.280	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	107.500 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	107.500 Dokumen	107.500 Dokumen	107.500 Dokumen	11.074.560	11.074.560	2.974.560	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	790.498.560	866.122.560	870.618.720	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	320.500 Dokumen	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	320.500 Dokumen	320.500 Dokumen	320.500 Dokumen	694.474.457	1.675.617.737	1.386.790.737	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100,00%	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100,00%	100,00%	100,00%	261.307.800	103.107.800	71.947.800	
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.839.160	11.839.160	11.839.160	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	10 Jenis dokumen/ formulir/ buku	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	249.468.640	91.268.640	60.108.640	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100,00%	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100,00%	100,00%	100,00%	50.181.780	50.181.780	51.456.780	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pendaftaran penduduk	12 Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	17.846.520	17.846.520	22.121.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	4 fasilitasi pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	11.001.520	11.001.520	11.001.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan sosialisasi pendaftaran penduduk	4,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12.957.220	12.957.220	12.957.220	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	8.376.520	8.376.520	5.376.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100,00%	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100,00%	100,00%	100,00%	7.251.520	7.251.520	9.201.520	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan pembinaan dan Pengawasan pendaftaran penduduk	12,00 persen	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.251.520	7.251.520	9.201.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97,20%	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97,20%	97,20%	97,20%	560.206.429	506.296.429	482.224.949	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.425 Dokumen	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.425 Dokumen	45.425 Dokumen	45.425 Dokumen	421.065.804	367.155.804	367.562.364	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	45.425 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.425 Dokumen	45.425 Dokumen	45.425 Dokumen	46.176.620	46.176.620	46.176.620	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	3,00 persen	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	277.405.680	277.405.680	277.812.240	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.261.984	6.261.984	6.261.984	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	2 Jenis dokumen/ formulir/ buku	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	91.221.520	37.311.520	37.311.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00%	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00%	100,00%	100,00%	132.639.105	132.639.105	108.161.065	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 Pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.746.520	9.746.520	5.471.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Cakupan fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	4,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	103.664.545	103.664.545	102.689.545	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Cakupan sosialisasi terkait pencatatan sipil	4,00 persen	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4 Laporan	4 Laporan	-	10.851.520	10.851.520	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Persentase kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan PerguruanTinggi Terkait Pencatatan Sipil	100 Dokumen	100 Dokumen	-	8.376.520	8.376.520	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00%	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00%	100,00%	100,00%	6.501.520	6.501.520	6.501.520	
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.501.520	6.501.520	6.501.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100,00%	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100,00%	100,00%	100,00%	346.827.620	346.827.620	297.352.620	
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%				
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100,00%	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	51.300.310	51.300.310	51.300.310	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	100,00 persen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.876.520	6.876.520	6.876.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Persentase Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	44.423.790	44.423.790	44.423.790	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	6.971.520	6.971.520	6.971.520	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6.971.520	6.971.520	6.971.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	255.756.990	255.756.990	194.281.990	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.017.280	8.017.280	11.917.280	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi / inovasi pelayanan administrasi kependudukan	4 Fasilitasi / inovasi pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	98.140.150	98.140.150	98.140.150	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD dan lembaga pengguna yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	10,00 persen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	11.376.520	11.376.520	9.501.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	6,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	131.251.520	131.251.520	67.751.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10,00 persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	6.971.520	6.971.520	6.971.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	32.798.800	32.798.800	44.798.800	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.707.280	12.707.280	23.207.280	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Cakupan SDM yang mendapatkan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	4,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20.091.520	20.091.520	21.591.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100,00%	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	121.157.880	121.157.880	118.907.880	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100,00%	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	121.157.880	121.157.880	118.907.880	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 Jenis buku	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	121.157.880	121.157.880	118.907.880	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX	NON URUSAN							20.590.417.355	19.745.760.075	21.899.376.617	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	20.590.417.355	19.745.760.075	21.899.376.617	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00%	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100,00%	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	12.971.340	12.971.340	12.971.340	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Rencana Kerja SKPD)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	819.520	819.520	819.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.308.640	1.308.640	1.308.640	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.608.550	1.608.550	1.608.550	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.160	3.720.160	3.720.160	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.315.430	2.315.430	2.315.430	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.287.520	1.287.520	1.287.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.911.520	1.911.520	1.911.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	12.268.557.641	12.268.557.641	11.182.089.013	
		Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	89,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	12.038.492.241	12.038.492.241	10.952.023.613	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	1,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	226.202.840	226.202.840	226.202.840	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	1,00 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	695.200	695.200	695.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	12,00 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.879.840	1.879.840	1.879.840	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.287.520	1.287.520	1.287.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100,00%	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	24.418.640	24.418.640	24.418.640	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	24.418.640	24.418.640	24.418.640	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100,00%	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	3.258.744.691	2.614.146.296	5.960.956.963	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	1,00 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	69.046.350	69.046.350	33.869.320	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	3,00 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	159.558.307	159.558.307	147.675.140	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga perkantoran	3,00 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	121.234.420	121.234.420	113.539.920	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	5,00 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	473.262.145	473.262.145	2.233.246.595	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	3,00 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	182.882.150	181.008.407	252.675.081	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	100,00 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.850.000	14.850.000	16.350.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi, konsultasi dan koordinasi	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	558.129.200	401.826.880	562.387.880	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pengelolaan arsip dinamis	2,00 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	61.960.000	61.960.000	61.960.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100,00 persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.617.822.119	1.131.399.787	2.539.253.027	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	774.709.484	663.910.949	712.016.284	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel perkantoran	50,00 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100 Unit	100 Unit	102.789.500	102.789.500	102.439.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin	36,00 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	36 Unit	36 Unit	671.919.984	561.121.449	609.576.784	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	3.024.910.859	2.949.286.859	2.841.324.637	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	983.898.800	983.898.800	876.286.578	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	12,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.041.012.059	1.965.388.059	1.965.038.059	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100,00%	Pemeliharaan aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	1.226.104.700	1.212.468.350	1.165.599.740	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,00 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	35 Unit	389.990.660	389.990.660	308.617.980	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan mebel	100,00 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit	125 Unit	18.907.200	18.907.200	18.907.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin	100,00 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 Unit	450 Unit	450 Unit	383.702.000	370.065.650	404.569.720	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	18,00 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit	18 Unit	352.566.000	352.566.000	352.566.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	2,00 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	80.938.840	80.938.840	80.938.840	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							19.905.166.724	20.268.499.724	34.075.380.449	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							9.040.571.949	9.579.708.950	23.653.593.428	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50%	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50%	0,50%	0,50%	684.178.460	808.499.460	1.115.571.020	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50%	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50%	0,50%	0,50%	337.550.670	381.450.670	309.244.509	
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39.270.200	47.070.200	24.735.100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	12.735.100	15.235.100	14.900.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Ketersediaan Materi Pendidikan Kependudukan	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	36.310.100	36.310.100	13.904.139	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	198.810.880	225.610.880	198.480.880	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangsa Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	2 Kegiatan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.424.390	57.224.390	57.224.390	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50%	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50%	0,50%	0,50%	346.627.790	427.048.790	806.326.511	
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Workshop penetapan parameter kependudukan	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.758.760	6.758.760	6.758.760	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen dampak kependudukan	1 dokumen	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.468.980	45.468.980	25.908.380	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terimplementasikannya Sistim Informasi data Pengendalian Penduduk	2 Kegiatan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	16 Laporan	-	-	64.200.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	3 Cetak	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	171.606.300	228.194.300	281.282.621	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Transport Kegiatan dalam kota	16 Kecamatan								DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.900.000	22.400.000	211.550.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pelatihan Updating data PK 2021, Sarasehan Tingkat Kota dan Kecamatan, Desiminasi PK 2021	2 Kegiatan								DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	420 Buku	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	86.289.500	104.622.500	197.022.500	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Honor Non ASN	12 Bulan								DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	17.604.250	19.604.250	19.604.250	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2,00%	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2,00%	2,00%	2,00%	7.470.351.779	7.784.853.780	13.280.811.626	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77,14%	Cakupan peserta KB Aktif	77,14%	77,14%	77,14%	404.836.560	435.484.560	1.475.154.760	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	laporan dan Dokumentasi	9 Kegiatan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	4 Organisasi	157.816.750	157.816.750	338.246.750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan dan Dokumentasi	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.850.800	13.850.800	13.850.800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan dan Dokumentasi	8 Kegiatan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	233.169.010	263.817.010	410.257.210	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Kecamatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	-	16 Laporan	-	-	208.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	terwujudnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	16 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	-	16 Laporan	-	-	424.800.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	16 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-	-	16 Laporan	-	-	80.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77,14%	Cakupan peserta KB Aktif	77,14%	77,14%	77,14%	1.264.825.000	1.303.158.000	1.694.523.000	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	16 Organisasi	-	-	60.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	90.175.000	90.175.000	81.445.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kecamatan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.680 Orang	1.680 Orang	1.680 Orang	1.174.650.000	1.212.983.000	1.553.078.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Unmeet need	8,56%	Cakupan PUS Unmeet need	8,56%	8,56%	8,56%	2.922.426.344	3.111.281.345	7.293.354.119	
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11,10%	Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11,10%	11,10%	11,10%				
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersedianya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00 persen	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	-	15 Laporan	-	-	62.100.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100,00 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	830 Orang	830 Orang	830 Orang	138.350.000	138.350.000	4.120.205.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16 Kecamatan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	34.700.000	34.700.000	16.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00 persen	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	16 Unit	16 Unit	16 Unit	2.013.379.494	1.949.870.496	2.321.732.163	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	54.800.000	54.800.000	82.470.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promkes dan Konseling Kespro, serta hak-hak reproduksi di Faskes kelompok Kegiatan	48 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	36 Orang	36 Orang	36 Orang	103.000.000	298.907.000	287.230.202	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB, Kespro dan kualitas pelayanan KBer	48 Kegiatan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang	30 Orang	30 Orang	56.451.690	112.908.689	108.008.689	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terperuhnya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	100,00 persen	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	386.445.160	386.445.160	201.808.065	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	6 Kegiatan	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	75 Orang	75 Orang	75 Orang	135.300.000	135.300.000	93.300.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif	77,14%	Cakupan Peserta KB Aktif	77,14%	77,14%	77,14%	2.878.263.875	2.934.929.875	2.817.779.747	
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		-	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	-	16 Dokumen	-	-	9.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Laporan dan Dokumentasi	16 Kecamatan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	34 Kampung	34 Kampung	34 Kampung	2.878.263.875	2.934.929.875	2.808.779.747	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,12%	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,12%	60,12%	60,12%	886.041.710	986.355.710	9.257.210.782	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,12%	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,12%	60,12%	60,12%	592.451.360	693.517.360	9.012.952.232	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kelompok	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	32 Unit	32 Unit	32 Unit	65.297.040	65.297.040	362.000.880	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kelompok	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	40.050.000	40.050.000	31.155.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Kelompok	162 Kelompok	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	40 Orang	40 Orang	40 Orang	311.099.970	329.199.970	315.351.002	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	16 Kecamatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	-	-	3.479 Orang	-	-	8.055.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kelompok	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	176.004.350	258.970.350	249.445.350	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,12%	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,12%	60,12%	60,12%	293.590.350	292.838.350	244.258.550	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kelompok	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	293.590.350	292.838.350	244.258.550	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX	NON URUSAN							10.864.594.775	10.688.790.774	10.421.787.021	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pealporan kinerja SKPD	100,00%	Persentase perencanaan dan pealporan kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	10.864.594.775	10.688.790.774	10.421.787.021	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase kinerja administrasi dan pealporan keuangan SKPD	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pealporan keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	19.935.720	19.935.720	7.622.560	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.476.400	3.476.400	836.080	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.200	1.775.200	904.320	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.229.060	2.229.060	1.060.320	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.775.200	1.775.200	1.055.040	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.229.060	2.229.060	1.060.320	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8.450.800	8.450.800	2.706.480	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100,00%	Administrasi keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	6.743.228.184	6.686.166.524	6.321.813.428	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.420.740.724	6.420.740.724	6.098.857.678	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.323.400	2.323.400	527.750	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.411.200	1.411.200	1.008.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	100,00 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	316.680.000	259.680.000	221.120.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.072.860	2.011.200	300.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100,00%	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	1.125.847.828	1.199.424.297	1.090.018.450	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	21.580.477	21.580.477	21.580.477	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	56.404.444	56.404.444	49.257.844	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga dan Jasa Kebersihan Kantor	20 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	90.841.369	90.841.369	90.841.369	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	17 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	227.456.276	227.456.276	173.242.222	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	63.425.262	63.425.262	63.425.262	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman untuk Tamu	500 Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78.750.000	78.750.000	108.675.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen Perencanaan dan Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi serta Konsultasi ke Luar/Dalam Daerah yang Dilakukan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	387.390.000	460.966.469	382.996.276	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan SPBE	10 Unit	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	629.406.303	629.406.303	738.760.573	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perengkapan Gedung Kantor	8 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	629.406.303	629.406.303	738.760.573	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	658.359.300	484.604.000	528.864.600	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	145.551.000	145.551.000	145.551.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Administrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	96 Orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	140 Laporan	140 Laporan	140 Laporan	512.808.300	339.053.000	383.313.600	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100,00%	Pemeliharaan aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	1.687.817.440	1.669.253.930	1.734.707.410	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan SKPD	85 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit	92 Unit	92 Unit	611.544.700	592.981.190	592.981.190	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	82 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	202 Unit	202 Unit	202 Unit	110.744.400	110.744.400	109.108.080	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1.822 meter persegi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	929.210.160	929.210.160	996.299.960	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN							310.781.289.003	314.081.289.003	322.247.350.698	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							241.081.881.233	243.004.293.191	247.039.267.003	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	64,22%	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	64,22%	64,22%	64,22%	241.081.881.233	243.004.293.191	247.039.267.003	
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	88,00 persen	Persentase pengelolaan Parkir On the Street	88,00 persen	88,00 persen	88,00 persen				
		Jml trayek BRT	13 trayek	Jml trayek BRT	13 trayek	13 trayek	13 trayek				
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33,00 persen	Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33,00 persen	33,00 persen	33,00 persen				
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7 rasio	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7 rasio	7 rasio	7 rasio				
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLL	100,00%	Pelaksanaan MRLL	100,00%	100,00%	100,00%	1.688.376.270	1.754.926.270	1.754.926.270	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Studi V/C Ratio Kota Semarang	1 paket	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.688.376.270	1.754.926.270	1.754.926.270	DINAS PERHUBUNGAN
		Jml dokumen rekayasa lalu lintas	11 paket								DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100,00%	Tersedianya perlengkapan jalan	100,00%	100,00%	100,00%	8.838.477.743	9.600.890.738	13.870.334.198	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml prasarana jalan	5 Jenis	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	26 Unit	26 Unit	26 Unit	3.744.235.888	3.974.468.637	6.298.726.497	DINAS PERHUBUNGAN
		Depo dan shelter trem	5 unit								DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml perlengkapan jalan	3 jenis	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	575 Unit	575 Unit	575 Unit	1.751.962.883	2.284.143.129	4.229.328.729	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jml pemeliharaan prasarana jalan	1 Jenis	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	118 Unit	118 Unit	118 Unit	2.507.861.890	2.507.861.890	2.507.861.890	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Pemeliharaan Rambu LL (Bahan Rambu)	250 unit	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250 Unit	250 Unit	250 Unit	834.417.082	834.417.082	834.417.082	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jml terminal	3 unit	Jml terminal	3 unit	3 unit	3 unit	1.862.136.784	2.061.786.784	2.061.158.644	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Perawatan terminal	3 unit	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	3 Unit	1.422.046.691	1.422.046.691	1.428.895.789	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jml kegiatan sosialisasi di terminal	4 kegiatan	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23 Orang	23 Orang	23 Orang	440.090.093	639.740.093	632.262.855	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12 bulan	Penyelenggaraan parkir	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.587.490.630	2.787.140.630	2.672.054.230	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan pemungutan parkir	12 kegiatan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800 Dokumen	800 Dokumen	800 Dokumen	732.674.230	732.674.230	772.123.630	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah Kegiatan perijinan parkir	12 kegiatan								DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengawasan	12 kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.854.816.400	2.054.466.400	1.899.930.600	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3.007.514.321	3.007.513.284	2.967.468.220	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jml alat uji	2 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.622.901.474	1.426.318.593	1.426.318.593	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Blue Card	40.000 set	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90.000 Dokumen	90.000 Dokumen	90.000 Dokumen	60.321.063	164.423.523	164.423.523	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Service Alat Uji Kendaraan	35 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	35 Unit	35 Unit	1.324.291.784	1.416.771.168	1.376.726.104	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100,00%	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100,00%	100,00%	100,00%	4.833.660.338	5.328.160.338	5.404.792.198	
		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12 bulan	Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Jml Shelter BRT	1 unit	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	64 Unit	64 Unit	64 Unit	46.176.000	46.176.000	46.176.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Bike rack	4 unit								DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	3 kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	712.800.000	712.800.000	712.800.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian	12 kegiatan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.963.769.684	4.323.769.684	4.373.769.684	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan forum LLAJ	1 kegiatan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	110.914.654	245.414.654	272.046.514	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1 tahun	Pengawasan Andalalin	1 tahun	1 tahun	1 tahun	79.500.000	79.500.000	79.500.000	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Sosialisasi perijinan andalalin	2 kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	66.000.000	66.000.000	66.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pengawasan andalalin	12 kegiatan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12 bulan	Pemantauan angkutan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	516.106.340	516.106.340	516.106.340	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pendataan dan pemantauan angkutan barang	12 kegiatan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	516.106.340	516.106.340	516.106.340	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pendukung pelayanan BRT	100,00 persen	pendukung pelayanan BRT	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	216.853.581.537	216.853.581.537	216.812.312.213	
		Pelayanan angkutan	100,00%	Pelayanan angkutan	100,00%	100,00%	100,00%				
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kertas Thermal E-Tiket	150.000 roll	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	259 Unit	259 Unit	259 Unit	216.715.988.822	216.715.988.822	216.715.988.822	DINAS PERHUBUNGAN
		Operasional BRT	12 Bulan								DINAS PERHUBUNGAN
		Jml Pemeliharaan Mesin E-Tiket	317 unit								DINAS PERHUBUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Mudik Gratis	1 kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	137.592.715	137.592.715	96.323.391	DINAS PERHUBUNGAN
		DED Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1 paket								DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	3 kegiatan	Jml kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	235.064.810	235.064.810	149.980.210	
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi	3 kegiatan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	235.064.810	235.064.810	149.980.210	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	214.716.640	214.716.640	185.728.660	
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	68.346.600	68.346.600	-	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen angkutan / trayek	1 dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	1 Dokumen	146.370.040	146.370.040	185.728.660	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2 kegiatan	Jml kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	146.089.780	345.739.780	345.739.780	
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml Studi	1 dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	62.805.370	62.805.370	62.805.370	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	83.284.410	282.934.410	282.934.410	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2 kegiatan	Jml kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	219.166.040	219.166.040	219.166.040	
2.15.02.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml keg	1 kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	113.144.840	113.144.840	113.144.840	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan koordinasi	12 kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	106.021.200	106.021.200	106.021.200	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX	NON URUSAN							69.699.407.770	71.076.995.812	75.208.083.695	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00 persen	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	69.699.407.770	71.076.995.812	75.208.083.695	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100,00 persen	Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100,00 persen	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00 persen	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	45.537.020	45.537.020	45.537.020	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml dokumen perencanaan	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	13.987.800	13.987.800	13.987.800	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml dokumen RKA	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.424.510	5.424.510	5.424.510	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.620.420	5.620.420	5.620.420	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.424.510	5.424.510	5.424.510	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.620.420	5.620.420	5.620.420	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml dokumen lap realisasi kinerja	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.705.760	4.705.760	4.705.760	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dokumen evaluasi	1 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.753.600	4.753.600	4.753.600	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	14.760.838.259	14.760.838.259	14.176.632.271	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji pegawai	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	111 Orang/bulan	111 Orang/bulan	14.137.949.459	14.137.949.459	13.565.503.471	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor KPA BP, BPP,PPTK ASN	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	551.760.000	551.760.000	540.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml dokumen lap keu akhir tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.709.600	23.709.600	23.709.600	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jml dokumen lap keu semesteran	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	23.709.600	23.709.600	23.709.600	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml dokumen lap prognosis	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.709.600	23.709.600	23.709.600	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	100,00 persen	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	634.434.105	694.348.170	628.134.570	
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Mutu SDM	4 kegiatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	263.400.000	323.400.000	323.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian	300 set	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	300 Paket	300 Paket	226.670.170	226.670.170	226.670.170	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jml Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jml Dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	-	15.971.400	15.971.400	-	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ujian Kompetensi	100,00 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	-	25.600.000	25.600.000	-	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jml kegiatan	2 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	-	24.642.200	24.642.200	-	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Diklat	100,00 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	76.350.335	76.264.400	76.264.400	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100,00%	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	3.234.661.512	3.310.649.686	3.031.892.312	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jml Alat Listrik	25 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	133.736.963	133.736.963	117.022.272	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml peralatan dan perlengkapan kantor	2 set	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	21.242.326	21.242.326	21.242.326	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jml Alat/bahan Kebersihan	15 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	119.120.273	119.120.273	69.500.688	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMD 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml ATK (Alat Tulis Kantor)	20 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	169.832.198	169.832.198	153.553.204	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jml barang cetakan	25 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	299.272.040	299.357.975	243.072.095	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman	17.500 dos	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	197.700.000	137.700.000	137.700.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml kegiatan perjalanan dinas	12 bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.022.015.100	1.022.015.100	899.915.100	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jml keg penatausahaan arsip	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.987.365	24.987.365	7.229.141	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.06.11	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jml jenis peralatan elektronika	11 paket	Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1.246.755.247	1.382.657.486	1.382.657.486	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	3.378.969.080	4.042.378.013	4.080.032.875	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KBM Oprasional/Patrol	10 unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	26 Unit	26 Unit	2.682.380.319	3.179.571.524	3.179.571.524	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jml mebel	7 jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	606.168.571	772.386.299	772.386.299	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml sarpras kantor	7 jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	90.420.190	90.420.190	128.075.052	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	3.962.208.960	3.962.208.960	3.968.064.060	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Materai	6.000 lembar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	39.000.000	39.000.000	39.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik Dan Telepon	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.277.669.760	1.277.669.760	1.283.524.860	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan kantor, tenaga TPHP dan Non ASN	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.645.539.200	2.645.539.200	2.645.539.200	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100,00%	Pemeliharaan aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	5.948.758.834	6.527.035.704	6.652.248.411	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jml kendaraan dinas	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.313.180	40.313.180	40.313.180	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jml kendaraan operasional	75 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	75 Unit	75 Unit	3.744.384.582	3.843.929.982	3.790.056.942	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml KBM Golf dll	4 unit	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	126.836.360	126.836.360	126.836.360	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jml bangunan	3 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.343.099.799	1.624.029.269	1.827.548.919	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml peralatan	5 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	197.802.000	395.604.000	395.604.000	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml jenis pemeliharaan	9 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	9 Unit	496.322.913	496.322.913	471.889.010	DINAS PERHUBUNGAN
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100,00%	Pelayanan BLUD	100,00%	100,00%	100,00%	37.734.000.000	37.734.000.000	42.625.542.176	
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan pelayanan pendukung BRT	12 bulan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	37.734.000.000	37.734.000.000	42.625.542.176	DINAS PERHUBUNGAN
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							53.348.990.388	55.531.590.388	55.675.478.499	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							37.062.662.417	39.621.013.160	39.060.793.864	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100,00%	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	5.604.524.500	5.992.717.012	6.391.580.562	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100,00%	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100,00%	100,00%	100,00%	5.604.524.500	5.992.717.012	6.391.580.562	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah rekomendasi Titik Menara Telekomunikasi	20 rekomendasi	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Dokumen kajian menara telekomunikasi	1 Dokumen								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah kegiatan sosialisasi menara telekomunikasi	5 kegiatan								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Cakupan layanan telekomunikasi	100,00 persen								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah penanganan pengaduan	4.200 pengaduan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.513.218.100	1.513.218.100	1.430.614.180	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		kajian kebijakan pengaduan	1 dokumen								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		monitoring dan evaluasi	8 kegiatan								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	konten informasi publik yang disebarluaskan	875 konten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.541.910.000	2.541.910.000	3.019.109.470	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	8 Dokumen								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	jenis informasi publik yang disediakan	4 jenis informasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	677.796.400	866.202.983	941.202.983	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		permintaan informasi publik	2.184 informasi								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen kajian pengembangan TIK	1 Dokumen	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	810 Orang	810 Orang	810 Orang	471.600.000	471.600.000	303.600.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah Kegiatan workshop dan Pelatihan TIK	10 Kegiatan								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kegiatan Fasilitas FK Metra	12 kegiatan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000	449.785.929	547.053.929	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah Dokumen kajian Co working space	1 dokumen								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100,00%	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100,00%	100,00%	100,00%	31.458.137.917	33.628.296.148	32.669.213.302	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100,00%	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100,00%	100,00%	100,00%	26.265.780.558	26.658.160.558	25.481.757.649	
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra dan internet Pemerintah dan Data Center yang disediakan oleh Dinas kominfo	50 OPD	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	577 Domain	577 Domain	577 Domain	1.924.419.645	2.216.799.645	1.818.917.309	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Tingkat Kemampuan Data Center dalam melayani kebutuhan OPD untuk melayani masyarakat	95,00 persen									DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Tingkat Kemampuan layanan Data Center untuk melayani kinerja pemerintah Kota Semarang	97,00 persen									DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 OPD	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	688.097.282	688.097.282	408.967.299		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet untuk pendukung kegiatan OPD	85,00 persen									DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah Perangkat Daerah yang terlayani jaringan intra	40 OPD	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10 Unit	10 Unit	10 Unit	23.653.263.631	23.753.263.631	23.253.873.041		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah CCTV yang dimiliki oleh Diskominfo	150 unit									DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah ruang publik yang terlayani oleh free wifi Pemkot	190 titik/lokasi									DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100,00%	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100,00%	100,00%	100,00%	5.192.357.359	6.970.135.590	7.187.455.653		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah OPD yang terintegrasi Sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) Kota Semarang	50 OPD	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	40 Unit	40 Unit	40 Unit	2.416.381.410	2.111.561.710	2.062.361.570		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50 OPD									DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi yang terintegrasi layanan-layanan Aplikasi Smart City Kota Semarang (Single Sign On)	20 aplikasi	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	875.649.010	875.649.010	875.649.010		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3 aplikasi									DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan TIK yang disediakan untuk mendukung SPBE	70,00 persen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.708.705.099	3.791.303.030	4.057.823.233		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Terpenuhinya dan terawatnya peralatan TIK untuk mencapai smart city	100,00 persen									DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah kegiatan Monitoring Implementasi sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) dan Smart City Kota Semarang	4 kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	191.621.840	191.621.840	191.621.840		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		jumlah kegiatan monitoring yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	4 kegiatan									DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							626.003.608	626.003.608	578.210.608		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100,00%	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100,00%	100,00%	100,00%	626.003.608	626.003.608	578.210.608		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100,00%	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100,00%	100,00%	100,00%	626.003.608	626.003.608	578.210.608		

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah elemen data yang terpenuhi	5.100 Data	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.173	120.000.000	120.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah kompilasi statistik sektoral	40 Kompilasi								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah survey statistik sektoral	30 jumlah survey								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah publikasi Statistik Sektoral	2 dokumen								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah konversi Data Sektoral ke Dalam Data Spasial	20 jenis								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah OPD yang memiliki SDM pengelola data/statistisi	45 OPD	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30 Orang	30 Orang	30 Orang	75.000.580	80.000.000	80.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan yang dilengkapi metadata	30 kegiatan	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100.000.265	82.000.000	82.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah variabel yang dilengkapi metadata	1.500 variabel								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah OPD yang menyediakan metadata sesuai kaidah statistik	45 OPD								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang menyelenggarakan statistik sektoral	34 OPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	34 Orang	34 Orang	34 Orang	70.000.144	105.000.000	57.207.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah OPD yang mengelola data berdasarkan statistik di Lingkungan Pemkot Semarang	34 OPD								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah OPD yang terintegrasi dengan Portal Semarang Satu Data	20 OPD	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 Unit	5 Unit	5 Unit	175.000.023	163.000.000	163.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Tersedianya ketersediaan data seluruh OPD Kota Semarang	92,00 persen								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Tersedianya SOP Portal Satu Data Kota Semarang	100,00 persen								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data yang terotorisasi	1.500 Data	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	131.002.423	76.003.608	76.003.608	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah usulan kegiatan statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS (survey & kompilasi)	70 kegiatan								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							690.921.720	690.921.720	730.921.720	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100,00%	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%	690.921.720	690.921.720	730.921.720	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100,00%	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100,00%	100,00%	100,00%	690.921.720	690.921.720	730.921.720	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi yang sudah menggunakan keamanan informasi	74 aplikasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	690.921.720	690.921.720	730.921.720	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 laporan								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX	NON URUSAN							14.969.402.643	14.593.651.900	15.305.552.307	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100,00%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100,00%	100,00%	100,00%	14.969.402.643	14.593.651.900	15.305.552.307	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100,00%	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100,00%	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	22.029.693	22.029.693	22.029.693	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.994.159	2.994.159	2.994.159	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Diskominfo	1 Dokumen								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.296.677	4.296.677	4.296.677	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.617	3.750.617	3.750.617	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.296.677	4.296.677	4.296.677	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.177.809	2.177.809	2.177.809	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.513.754	4.513.754	4.513.754	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	11.864.026.211	11.864.026.211	11.643.569.719	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	103 Orang/bulan	11.448.029.388	11.448.029.388	11.226.667.269	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	406.340.000	406.340.000	405.600.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.401.573	3.401.573	3.401.573	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	14 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	3.401.573	3.401.573	5.047.200	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.853.677	2.853.677	2.853.677	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00%	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	252.852.240	272.752.240	322.752.240	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	penyampaian informasi tentang cukai tembakau atau sosialisasi peraturan perundang-undangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	160 Orang	160 Orang	252.852.240	272.752.240	322.752.240	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan	100,00 persen								DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	876.721.963	904.976.096	1.510.945.981	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100,00 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19.707.000	19.707.000	39.105.194	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	42.135.106	42.135.106	258.035.402	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	37.675.842	37.675.842	37.675.842	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100,00 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	53.659.769	53.659.769	53.659.769	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	17.440.487	17.440.487	17.440.487	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 buku	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	21.556.300	21.556.300	4.785.654	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang berkunjung, jumlah peserta rapat dan sosialisasi	100,00 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	152.673.367	142.714.500	142.714.500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	152.750.000	190.963.000	227.984.441	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100,00 persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	379.124.092	379.124.092	729.544.692	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	228.536.726	228.536.726	276.184.618	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang disediakan	100,00 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	140.259.301	140.259.301	137.592.683	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	100,00 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	88.277.425	88.277.425	138.591.935	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	469.009.140	469.004.264	469.690.524	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah kegiatan pengelolaan surat menyurat	2 kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	19.999.000	19.999.000	18.667.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	449.010.140	449.005.264	451.023.524	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00%	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	1.256.226.670	832.326.670	1.060.379.532	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.313.180	40.313.180	40.313.180	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	10 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	462.700.491	462.700.491	462.700.491	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	2 unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	36.504.000	36.504.000	36.504.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel	2 jenis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	7.272.000	7.272.000	7.272.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	130.474.000	130.474.000	130.474.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan taman	1 paket	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.063.000	5.063.000	34.513.862	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	8 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	573.899.999	149.999.999	348.601.999	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO							24.702.036.168	25.435.036.168	31.686.684.236	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							11.990.073.689	12.798.773.019	20.059.073.881	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3 Persen	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3 Persen	3 Persen	3 Persen	214.521.290	214.521.290	214.521.290	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 koperasi	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 koperasi	15 koperasi	15 koperasi	91.666.650	91.666.650	91.666.650	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	80 koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	91.666.650	91.666.650	91.666.650	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 koperasi	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	122.854.640	122.854.640	122.854.640	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	140 koperasi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140 Unit Usaha	140 Unit Usaha	140 Unit Usaha	122.854.640	122.854.640	122.854.640	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50 Persen	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50 Persen	50 Persen	50 Persen	554.915.380	554.915.380	423.919.290	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	490 koperasi	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	490 koperasi	490 koperasi	100 koperasi	554.915.380	554.915.380	423.919.290	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	250 koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Unit Usaha	370 Unit Usaha	370 Unit Usaha	241.871.090	241.871.090	132.027.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	240 koperasi	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	240 Unit Usaha	240 Unit Usaha	240 Unit Usaha	313.044.290	313.044.290	291.892.290	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	31 Persen	Persentase Koperasi sehat	31 Persen	31 Persen	31 Persen	366.205.089	366.205.089	366.205.089	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	60 Persen	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	60 Persen	60 Persen	67 Persen	366.205.089	366.205.089	366.205.089	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	366.205.089	366.205.089	366.205.089	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10 Persen	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10 Persen	10 Persen	10 Persen	335.896.070	378.117.270	569.033.650	
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1 Persen	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1 Persen	1 Persen	1 Persen				
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70 Persen	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70 Persen	70 Persen	72 Persen	335.896.070	378.117.270	569.033.650	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	300 Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	360 Orang	360 Orang	240 Orang	335.896.070	378.117.270	569.033.650	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	26 Persen	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	26 Persen	26 Persen	26 Persen	2.762.566.380	2.932.435.960	2.540.277.614	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50 Persen	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50 Persen	50 Persen	50 Persen	2.762.566.380	2.932.435.960	2.540.277.614	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan Perlindungan Koperasi	80 koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	500 Orang	500 Orang	2.447 Orang	2.762.566.380	2.932.435.960	2.540.277.614	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	60 koperasi								DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	200 Koperasi								DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	480 koperasi								DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Jumlah laporan updating data Koperasi	12 Laporan								DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3,00 persen	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3,00 persen	3,00 persen	3,00 persen	3.792.070.650	4.388.692.350	3.723.800.110	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendaftaran, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	1.050 orang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	1.050 orang	1.050 orang	600 orang	3.792.070.650	4.388.692.350	3.723.800.110	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pendampingan usaha	100 orang	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	522.672.200	325.664.600	274.550.700	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan usaha	100 orang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	200 Unit Usaha	227.454.550	227.454.550	168.579.010	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan kelembagaan dan usahanya	500 orang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	660 Unit Usaha	660 Unit Usaha	410 Unit Usaha	2.080.993.000	2.128.093.000	1.311.148.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan	200 orang	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	500 Orang	500 Orang	605 Orang	515.022.000	467.922.000	447.272.910	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 bu	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	150 Orang	900 Orang	445.928.900	1.239.558.200	1.522.249.490	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20,00%	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20,00%	20,00%	20,00%	3.963.898.830	3.963.885.680	12.221.316.838	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	150 orang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	150 orang	150 orang	100 orang	3.963.898.830	3.963.885.680	12.221.316.838	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/ difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 orang	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	1.300 Unit Usaha	3.963.898.830	3.963.885.680	12.221.316.838	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pengembangan Co Working Space	1 paket								DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX	NON URUSAN							12.711.962.479	12.636.263.149	11.627.610.355	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00 persen	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	12.711.962.479	12.636.263.149	11.627.610.355	
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 Persen	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dokumen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dokumen	10 dokumen	9 dokumen	12.195.580	12.195.580	12.195.580	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	564.080	564.080	564.080	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Jumlah Dokumen RTP SKPD	1 Dokumen								DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.117.280	3.117.280	3.117.280	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.729.190	3.729.190	3.729.190	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.610.080	1.610.080	1.610.080	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.961.990	1.961.990	1.961.990	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.212.960	1.212.960	1.212.960	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	9.215.117.840	9.212.357.840	8.293.676.908	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	8.960.986.160	8.960.986.160	8.070.065.228	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	252.840.000	250.080.000	222.320.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	596.480	596.480	596.480	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	695.200	695.200	695.200	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.241.092.527	1.141.188.772	1.129.052.456	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	15 Paket	231.107.778	241.380.275	259.807.069	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	27.209.000	27.209.000	17.268.890	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	94.077.190	94.077.190	57.076.870	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10 Paket	46.964.379	46.964.379	28.900.059	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.920.000	1.920.000	1.920.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	54.000.000	54.000.000	54.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	537.215.860	537.215.860	530.397.860	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	248.598.320	138.422.068	179.681.708	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	95.362.120	95.362.120	668.189.134	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	3 jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	14 Unit	44.837.384	44.837.384	617.664.398	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	50.524.736	50.524.736	50.524.736	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	116.640.000	116.640.000	116.640.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	116.640.000	116.640.000	116.640.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.031.554.412	2.058.518.837	1.407.856.277	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	26 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	316.345.380	348.054.470	348.054.470	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	63 Unit	50.476.070	50.476.070	47.299.720	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100,00 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.628.414.782	1.623.670.117	976.183.907	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							27.449.125.396	25.887.865.756	23.710.676.542	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							9.519.646.777	8.280.344.640	8.209.543.347	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3.691 Penanam Modal	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3.691 Penanam Modal	3.691 Penanam Modal	3.691 Penanam Modal	1.899.328.702	1.677.125.085	1.665.446.626	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	4 Buah	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	4 Buah	4 Buah	4 Buah	1.100.000.048	877.796.431	903.961.203	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Analisa Perizinan Dalam Rangka Penataan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	599.999.972	499.318.314	573.158.271	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		SOP Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 Dokumen								DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terselenggaranya Sertifikasi ISO 9001:2015	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3.691 Kegiatan Usaha	3.691 Kegiatan Usaha	3.691 Kegiatan Usaha	500.000.076	378.478.117	330.802.932	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	1 Dokumen								DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	799.328.654	799.328.654	761.485.423	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RUPMD Kota Semarang	1 dokumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.022.000	100.022.000	88.429.505	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen Potensi Investasi Di Kota Semarang	1 Dokumen	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	699.306.654	699.306.654	673.055.918	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492 Investor	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492 Investor	492 Investor	492 Investor	2.547.128.842	1.972.815.361	1.830.917.151	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	8 Kegiatan	Jumlah Promosi Investasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	6 Kegiatan	2.547.128.842	1.972.815.361	1.830.917.151	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	298.558.968	298.558.968	283.964.853	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Seminar Bisnis Forum	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.248.569.874	1.674.256.393	1.546.952.298	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,00%	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,00%	95,00%	95,00%	3.732.587.965	3.375.109.445	3.300.692.269	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100,00%	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100,00%	100,00%	100,00%	3.732.587.965	3.375.109.445	3.300.692.269	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Kesra dan Lingkungan, Perekonomian dan Pembangunan sesuai SP	100,00 persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.400 Pelaku Usaha	2.400 Pelaku Usaha	2.400 Pelaku Usaha	1.340.912.963	1.163.649.883	1.144.592.003	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1.500 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	750 Kegiatan Usaha	750 Kegiatan Usaha	750 Kegiatan Usaha	1.286.698.137	1.191.482.697	1.191.482.697	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	700 Orang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	800 Orang	800 Orang	800 Orang	170.000.138	170.000.138	164.989.625	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6.000 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6.000 Kegiatan Usaha	6.000 Kegiatan Usaha	6.000 Kegiatan Usaha	934.976.727	849.976.727	799.627.944	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 nilai	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 nilai	2 nilai	2 nilai	380.076.270	294.769.751	561.960.573	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7,00%	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7,00%	7,00%	7,00%	380.076.270	294.769.751	561.960.573	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Pembinaan Penanaman Modal	1 Dokumen		-	-	120 Pelaku Usaha	-	-	217.100.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dokumen	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	21 Kegiatan Usaha	21 Kegiatan Usaha	21 Kegiatan Usaha	380.076.270	294.769.751	344.860.573	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	23 Perusahaan								DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96,00%	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96,00%	96,00%	96,00%	960.524.998	960.524.998	850.526.728	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100,00%	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100,00%	100,00%	100,00%	960.524.998	960.524.998	850.526.728	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Elektronik	100,00 persen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	960.524.998	960.524.998	850.526.728	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX	NON URUSAN							17.929.478.619	17.607.521.116	15.501.133.195	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	17.929.478.619	17.607.521.116	15.501.133.195	
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00%	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 Dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 Dokumen	11 Dokumen	9 Dokumen	13.618.180	13.618.180	13.618.180	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja(Renja SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.204.440	1.204.440	1.204.440	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.610.080	1.610.080	1.610.080	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.961.990	1.961.990	1.961.990	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.363.680	2.363.680	2.363.680	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.961.990	1.961.990	1.961.990	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.090.080	1.090.080	1.090.080	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3.425.920	3.425.920	3.425.920	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100,00%	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100,00%	100,00%	100,00%	8.977.389.514	8.977.389.514	8.128.490.517	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN Yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	44 Orang/bulan	8.686.371.834	8.686.371.834	7.837.042.837	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN Yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	287.550.000	287.550.000	287.980.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.090.080	1.090.080	1.090.080	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	1.287.520	1.287.520	1.287.520	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.090.080	1.090.080	1.090.080	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	100,00%	Administrasi Kepegawaian Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	126.543.150	126.543.150	62.952.000	
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	110 stel	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 Unit	200 Unit	200 Unit	126.543.150	126.543.150	62.952.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	5.148.570.197	5.360.831.392	5.051.090.748	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.111.389.874	1.793.390.139	1.888.586.834	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	10 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	188.857.180	204.083.952	79.486.308	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	174 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	129.374.420	129.615.306	18.350.273	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung	5.000 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	41.617.200	41.617.200	24.964.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	2.000 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	740.175.060	752.675.060	799.688.060	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	2.937.156.463	2.439.449.735	2.240.014.373	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	2.584.046.688	1.895.319.800	1.555.298.240	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	731.968.000	861.507.800	623.130.240	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pembayaran Honor TPHL	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.852.078.688	1.033.812.000	932.168.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	1.079.310.890	1.233.819.080	689.683.510	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas perorangan dan jabatan	19 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	410.454.300	403.272.500	403.272.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	pemeliharaan mebeleur	100,00 persen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit	5 Unit	29.362.860	18.180.000	363.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100,00 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	554 Unit	554 Unit	125 Unit	603.175.550	776.048.400	249.729.230	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							53.729.871.113	54.693.204.446	78.250.372.463	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							38.009.710.851	39.033.248.524	62.696.285.983	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	35 Organisasi Kpemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	35 Organisasi Kpemudaan	35 Organisasi Kpemudaan	35 Organisasi Kpemudaan	2.074.999.392	2.438.332.545	3.002.514.973	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10 kegiatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	1.299.999.792	1.660.621.652	2.089.316.820	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pelatihan Kewirausahaan	5 Kegiatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300 Orang	300 Orang	300 Orang	250.000.000	356.500.000	934.434.702	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	3 Kegiatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400 Orang	400 Orang	400 Orang	175.000.022	175.000.022	106.280.022	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Seleksi Kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	274.999.770	464.121.630	418.751.570	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	PASKIBRAKA	1 Kegiatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	-	350 Orang	350 Orang	600.000.000	665.000.000	629.850.526	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	1.400 Orang	Jumlah Anggota Aktif OKP	1.400 Orang	1.400 Orang	1.400 Orang	774.999.600	777.710.893	913.198.153	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	kordinasi kemitraan Kepemudaan	10 Kegiatan	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	224.649.980	270.114.170	510.255.430	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kepemudaan	5 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	550.349.620	507.596.723	402.942.723	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	1.197 jumlah	jumlah Atlet prestasi	1.197 jumlah	1.197 jumlah	1.197 jumlah	33.934.711.459	34.594.915.979	57.693.771.010	
		Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5 Lapangan	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5 Lapangan	5 Lapangan	5 Lapangan				
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6 jumlah	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6 jumlah	6 jumlah	6 jumlah	4.440.099.338	4.500.099.338	4.698.735.793	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	126.401.200	186.401.200	186.401.200	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	12 Bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	4.313.698.138	4.313.698.138	4.512.334.593	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	6 kegiatan	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	1.648.395.661	1.998.600.001	25.054.478.941	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Multi Event Tingkat daerah	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	950.000.001	950.000.001	23.805.900.001	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya atlet dalam mengembangkan prestasi	3 Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	48.600.000	48.600.000	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga	10 Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	250 Orang	250 Orang	250 Orang	649.795.660	1.000.000.000	1.248.578.940	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	1.297 Orang	Jumlah Atlet yang dibina	1.297 Orang	1.297 Orang	1.297 Orang	27.350.000.000	27.350.000.000	27.369.507.000	
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	64 Orang	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7 Pelatda	7 Pelatda	7 Pelatda	1.450.000.000	1.450.000.000	1.404.050.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	KONI	1 kegiatan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	25.900.000.000	25.900.000.000	25.965.457.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan	63 Organisasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan	63 Organisasi	63 Organisasi	63 Organisasi	49.600.000	49.600.000	0	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan organisasi olahraga	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1 Organisasi	-	49.600.000	49.600.000	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Medali Kejuaraan olahraga Rekreasi	5 jumlah	Jumlah Medali Kejuaraan olahraga Rekreasi	5 jumlah	5 jumlah	5 jumlah	446.616.460	696.616.640	571.049.276	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	3 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival danOlahraga Rekreasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	83.126.730	333.126.910	248.628.066	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggaraan pengembangan Olahraga Rekreasi	2 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	97.686.650	97.686.650	97.686.650	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	5 jenis	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	10 Unit	10 Unit	10 Unit	239.280.000	239.280.000	224.734.560	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pengembangan Olahraga Tradisional	2 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-	-	-	26.523.080	26.523.080	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	47 Kegiatan	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	47 Kegiatan	47 Kegiatan	47 Kegiatan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah keikutsertaan perlombaan Kepramukaan tingkat Daerah dan Nasional	47 Kegiatan	Jumlah keikutsertaan perlombaan Kepramukaan tingkat Daerah dan Nasional	47 Kegiatan	47 Kegiatan	47 Kegiatan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah Pramuka	1 kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX	NON URUSAN							15.720.160.262	15.659.955.922	15.554.086.480	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100,00%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100,00%	100,00%	100,00%	15.720.160.262	15.659.955.922	15.554.086.480	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	40.238.172	40.238.172	40.238.172	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.265.332	7.265.332	7.265.332	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.365.330	5.365.330	5.365.330	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.651.120	4.651.120	4.651.120	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.371.830	4.371.830	4.371.830	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.314.240	4.314.240	4.314.240	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.198.920	4.198.920	4.198.920	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	10.071.400	10.071.400	10.071.400	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	100,00%	Tersedianya Dokumen Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	10.028.149.812	10.028.149.812	9.005.312.169	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	9.662.307.712	9.662.307.712	8.633.810.069	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan OPD	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	348.450.000	348.450.000	354.110.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Keuangan yang di verifikasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.008.640	4.008.640	4.008.640	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.418.760	2.418.760	2.418.760	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.183.600	2.183.600	2.183.600	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan Pemeriksaan Keuangan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.142.200	4.142.200	4.142.200	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.313.500	3.313.500	3.313.500	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Prognosis	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.325.400	1.325.400	1.325.400	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100,00 persen	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	95.904.240	75.904.240	75.904.240	
X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	95.904.240	75.904.240	75.904.240	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100,00 persen	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	194.532.673	194.328.333	109.391.759	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	80 Orang	80 Orang	194.532.673	194.328.333	109.391.759	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 Persen	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.472.029.876	1.296.029.876	1.099.927.536	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	1 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	24.994.560	24.994.560	24.994.560	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 buah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	152.475.290	152.475.290	152.475.290	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	58.576.330	58.576.330	58.576.330	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Logistik Kantor	12 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	53.169.820	53.169.820	53.169.820	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	45.021.726	45.021.726	35.501.726	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	2 Jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.940.000	8.940.000	8.940.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Rapat	12 Bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	59.850.000	59.850.000	45.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi luar dan dalam Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	839.002.150	703.002.150	531.269.810	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Pendukung SPBE	4 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	230.000.000	190.000.000	190.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9 Jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	1.907.212.698	1.972.212.698	1.999.090.698	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	310.732.000	310.732.000	310.732.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubel	3 Jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	81.453.190	81.453.190	81.453.190	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Olahraga	6 Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.515.027.508	1.580.027.508	1.606.905.508	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	740.893.731	776.893.731	796.576.151	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan Listrik dan Internet	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	279.358.400	279.358.400	258.031.200	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.067.820	75.067.820	75.067.820	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Non ASN,Kebersihan dan Keamanan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	386.467.511	422.467.511	463.477.131	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.241.199.060	1.276.199.060	2.427.645.755	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	21 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	22 Unit	366.408.880	401.408.880	401.408.880	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	3 jenis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	7.272.000	7.272.000	7.272.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Ruang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	831.200.000	831.200.000	1.982.646.695	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							55.351.247.450	55.634.508.043	62.410.690.961	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							19.098.448.810	19.474.603.290	20.413.593.290	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20,00%	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	10.463.354.290	11.802.538.770	12.493.445.020	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	20,00%	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	2.511.018.230	2.687.172.710	2.678.078.960	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Atraksi Budaya	5 event	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	10 Objek	10 Objek	2.511.018.230	2.687.172.710	2.678.078.960	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Drama Tari Tradisional	2 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Drama Tradisional	2 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Dalang	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pagelaran Musik Tradisi	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	10 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	2 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12 bulan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Wayang Orang	5 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelaras Gamelan	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20,00%	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	6.453.900.000	6.653.900.000	7.353.900.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	72 event	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	7 Objek	7 Objek	6.453.900.000	6.653.900.000	7.353.900.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Film Semarang	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Goa Kreo	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Keroncong	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Semarang	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Festival Seni dan Budaya	35 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Semarang Jelajah Musik	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Semarang Night Carnival	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Sesaji Rewanda	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Semarang Bienalle	1 Kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	20,00%	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	1.498.436.060	2.461.466.060	2.461.466.060	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dugder	1 event	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 Orang	2.600 Orang	2.600 Orang	1.498.436.060	2.461.466.060	2.461.466.060	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Gebyuran Bustaman	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 bulan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Wayang 1 Muharam	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Sarasehan Penghayat	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20,00%	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20,00%	20,00%	20,00%	4.277.064.520	4.277.064.520	4.670.839.520	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	20,00%	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	4.277.064.520	4.277.064.520	4.670.839.520	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Fasilitasi HAKI	12 bulan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 Sertifikat	629 Sertifikat	629 Sertifikat	2.914.880.000	2.914.880.000	3.308.655.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	50 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kreativitas Seni Film	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Lomba Seni	3 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Parade Seni	1 event								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelatihan Seni	12 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)	12 bulan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Workshop Seni	30 kegiatan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	36 kegiatan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 Lembaga	124 Lembaga	124 Lembaga	1.362.184.520	1.362.184.520	1.362.184.520		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	26 kegiatan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Hiburan Hari Besar	1 kegiatan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Pentas Seni	48 kegiatan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional	2 kegiatan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)	12 bulan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77,85%	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77,85%	77,85%	77,85%	3.395.000.000	3.395.000.000	3.249.308.750		
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	77,85%	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	77,85%	77,85%	77,85%	3.395.000.000	3.395.000.000	3.249.308.750		
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	1 kegiatan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	461 Objek	461 Objek	461 Objek	3.395.000.000	3.395.000.000	3.249.308.750		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	1 dokumen									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	1 tahun									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kajian Kebudayaan	1 dokumen									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum yang sesuai standar	100,00%	Pengelolaan Museum yang sesuai standar	100,00%	100,00%	0	963.030.000	0	0		
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Museum yang terpenuhi dan terpelihara	100,00%	Sarana dan Prasarana Museum yang terpenuhi dan terpelihara	100,00%	100,00%	0	963.030.000	0	0		
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	100,00 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	100 Unit	-	-	963.030.000	-	-		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							17.909.344.331	17.988.523.304	22.834.786.154		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100,00%	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100,00%	100,00%	100,00%	13.500.000.000	13.500.000.000	17.557.409.883		
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	78 buah	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	78 buah	78 buah	78 buah	329.265.280	56.522.890	56.522.890		
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kajian Pariwisata	5 dokumen	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	79 Lokasi	79 Lokasi	329.265.280	56.522.890	56.522.890		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	100,00 persen									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DED Pengembangan Wisata Pantai Mangunharjo	1 dokumen									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.293.191 orang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.293.191 orang	1.293.191 orang	1.293.191 orang	12.500.720.960	12.500.720.960	12.642.130.680		
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	6 Unit	12.500.720.960	12.500.720.960	12.642.130.680		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)	336 orang bulan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100,00 persen									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100,00%	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100,00%	100,00%	100,00%	315.587.400	588.329.790	4.531.944.953		
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	79 Lokasi	79 Lokasi	57.505.200	330.247.590	310.699.645		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100,00 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	200.577.000	200.577.000	3.898.957.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Pariwisata	2 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	1 Laporan	57.505.200	57.505.200	322.288.308		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100,00%	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100,00%	100,00%	85,00%	354.426.360	354.426.360	326.811.360		
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	1.500 orang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	-	6 Laporan	6 Laporan	354.426.360	354.426.360	326.811.360		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Terlaksananya Administrasi Perizinan di Mall Pelayanan Publik	12 Bulan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kajian Usaha Pariwisata	5 Dokumen									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	100,00%	100,00%	3.498.424.331	3.394.269.971	3.551.914.696		
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	100,00%	100,00%	3.498.424.331	3.394.269.971	3.551.914.696		
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	FGD	3 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	1.128.527.550	1.208.527.550	1.397.150.150		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kajian	3 dokumen									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembuatan Calendar of Events	100 buku									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembuatan Guide Book	100 buku									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembuatan Souvenir	3 jenis									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	12 bulan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengelolaan Media Sosial	12 bulan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Branding Pemasaran Pariwisata Kota Semarang	4 Kegiatan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Duta Wisata	1 kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.299.905.391	1.299.905.391	1.268.927.516		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pameran	3 kegiatan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Sales Mission	1 Kegiatan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Roadshow Pariwisata ke Luar Daerah	1 Kegiatan									DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.069.991.390	885.837.030	885.837.030	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Parade Duta Seni	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 Bulan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	70,00%	SDM Pariwisata	70,00%	70,00%	70,00%	910.920.000	1.094.253.333	1.725.461.575	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,00%	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,00%	70,00%	70,00%	910.920.000	1.094.253.333	1.725.461.575	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bintek Citytour Guide Untuk Pemandu Wisata	1 kegiatan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	120 Orang	120 Orang	120 Orang	393.682.000	577.015.333	524.267.833	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Bintek Pelayanan Prima Untuk Pelaku Wisata	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Bintek Penata Usahaan Kelembagaan Untuk Pokdarwis	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Bintek Sadar Wisata Untuk Ojek Online	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner Di Destinasi Pariwisata	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelatihan Pemandu Geowisata	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (Cagar Budaya : Museum, Keraton dan Candi)	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelatihan Digitalisasi : Branding, Pemasaran dan Penjualan Pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir dan Fotografi	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan	200 orang								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Apresiasi Pokdarwis Jawa Tengah	1 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	940 Orang	940 Orang	940 Orang	517.238.000	517.238.000	1.201.193.742	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Gelar Desa Wisata Jawa Tengah	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Lomba Pokdarwis	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Tenaga Non ASN (1 orang)	12 bulan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Workshop Assesment Desa Wisata	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Peningkatan Aplikasi	1 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Forum Komunikasi Desa Wisata dan Pokdarwis	2 kegiatan								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX	NON URUSAN							18.343.454.309	18.171.381.449	19.162.311.517	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	18.343.454.309	18.171.381.449	19.162.311.517	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100,00%	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100,00%	100,00%	100,00%				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPDEM 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100,00%	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100,00%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	8 dokumen	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1.014.600	1.829.020	1.603.026		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	201.600	325.200	273.760	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Rencana Tindak Lanjut (RTP)	1 dokumen								DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	253.600	227.880	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	371.510	322.813	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	253.600	227.880	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	371.510	322.813	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	162.600	253.600	227.880	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100,00%	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	12.326.941.989	12.229.648.989	12.478.837.919		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 Orang/bulan	936 Orang/bulan	936 Orang/bulan	11.798.370.989	11.798.370.989	12.047.637.079	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	528.083.200	430.673.200	430.673.200	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	162.600	201.600	175.880	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	162.600	201.600	175.880	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	201.600	175.880	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100,00%	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100,00%	100,00%	100,00%	332.527.240	451.927.240	407.902.240		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethoprak	3 event	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597 Orang	597 Orang	597 Orang	175.000.000	175.000.000	250.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	78 Orang	78 Orang	157.527.240	276.927.240	157.902.240	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100,00%	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	2.113.257.099	2.128.791.919	2.223.034.662		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	14 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	215.204.500	215.204.500	312.312.200	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan	15 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	13 Paket	13 Paket	90.320.980	90.320.980	299.492.760	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket	47 Paket	47 Paket	136.459.470	136.459.470	106.049.802	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	47.817.577	47.396.037	47.408.976	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	51.500 orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	600 Laporan	600 Laporan	600 Laporan	700.000.000	700.000.000	525.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-589 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	493.386.792	493.386.792	370.040.094	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Untuk Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	10 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	430.067.780	446.024.140	562.730.830	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	100,00%	100,00%	462.062.830	289.990.090	956.514.359	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional	3 jenis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	-	1 Unit	172.072.740	-	279.938.739	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	87 Buah	87 Buah	289.990.090	289.990.090	676.575.620	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	1.800.544.450	1.800.544.450	1.823.878.870	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	850.090.000	850.090.000	745.570.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	950.454.450	950.454.450	1.078.308.870	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	100,00%	100,00%	1.307.106.101	1.268.649.741	1.270.540.441	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	20 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	29 Unit	30 Unit	272.890.800	318.481.640	350.190.730	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	824.984.598	740.937.398	740.937.398	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	15 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	209.230.703	209.230.703	179.412.313	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH							14.584.496.882	15.447.829.882	15.515.267.339	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							1.396.337.870	1.758.360.125	1.964.979.120	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 rasio	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 rasio	1 rasio	1 rasio	1.307.921.937	1.653.644.405	1.725.868.020	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100,00%	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100,00%	100,00%	100,00%	920.419.860	1.052.469.760	1.130.741.540	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah koleksi e-book	11.000 e book	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	260.973.780	260.973.780	272.707.870	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Jumlah e-library	102 lokasi								DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan jumlah buku yang dipinjam masyarakat baik melalui manual maupun virtual	11.000 buku	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	64.875.810	64.875.810	64.875.810	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi bahan pustaka khas daerah/ unik	100 keping/buku	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	94.584.010	95.522.650	100.775.440	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Sekolah	25 lokasi	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	29.369.690	29.364.160	29.364.160	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	pembinaan perpustakaan khusus	60 lokasi	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.441.100	20.436.940	20.436.940	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis tenaga perpustakaan/ pustakawan	2 kali	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	60 Orang	22.516.820	42.516.820	42.516.820	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rehabilitasi perpustakaan kelurahan	2 lokasi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	12.159.930	12.159.930	12.159.930	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan	200 eksemplar	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	306.573.300	381.027.650	381.027.650	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan terpelihara	1.500 eksemplar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	37.243.480	73.910.080	65.872.700	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya data informasi dan statistik perpustakaan kota	2 kali/tahun	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	71.681.940	71.681.940	141.004.220	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100,00%	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	387.502.077	601.174.645	595.126.480	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4 kegiatan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	15 Lokus	15 Lokus	101.554.070	278.560.038	175.516.543	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	40,00 persen	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	85.175.527	85.175.527	182.170.857	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang menerima penghargaan perpustakaan	175 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	131.410.220	131.410.220	131.410.220	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	35,00 persen	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	34.025.680	70.692.280	70.692.280	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpilihnya duta baca Kota Semarang untuk mewakili di Tingkat Provinsi	3 orang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	35.336.580	35.336.580	35.336.580	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100,00%	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100,00%	100,00%	100,00%	88.415.933	104.715.720	239.111.100	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%	42.437.370	44.437.000	36.247.000	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Sosialisasi/Bintek tentang naskah kuno	2 kali/tahun	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	5 Orang	5 Orang	38.916.150	40.915.980	34.785.980	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno dialih aksarakan dan dialih bahasa	200 buah	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	3.521.220	3.521.020	1.461.020	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100,00%	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100,00%	100,00%	100,00%	45.978.563	60.278.720	202.864.100	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terseleksinya koleksi budaya etnis nusantara	150 buah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	15.254.920	35.254.920	177.840.300	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	150 buah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	30.723.643	25.023.800	25.023.800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							916.464.790	1.131.764.515	1.130.668.875	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100,00%	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100,00%	100,00%	100,00%	576.490.990	647.457.417	655.140.167	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100,00%	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	216.919.010	214.552.237	187.746.917	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif telah dibuatkan daftar arsip	100,00 persen	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1.000 Berkas	1.000 Berkas	1.000 Berkas	65.000.000	65.000.000	36.826.680	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100,00 persen	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5.000 Berkas	5.000 Berkas	5.000 Berkas	44.200.000	39.833.227	39.833.227	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan pengelolaan arsip OPD	60 OPD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	107.719.010	109.719.010	111.087.010	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100,00%	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100,00%	100,00%	100,00%	137.994.300	156.327.600	174.453.130	
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah arsip terjaga yang terkumpul	105 berkas/roll/keping	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	44.074.300	44.074.300	68.406.230	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang diakuisisi	60 OPD	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	93.920.000	112.253.300	106.046.900	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100,00%	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100,00%	100,00%	100,00%	221.577.680	276.577.580	292.940.120	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	20,00 persen	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	100 Pengguna	100 Pengguna	5.891.030	5.891.030	77.916.570	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	100,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	215.686.650	270.686.550	215.023.550	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100,00%	persentase jumlah arsip musnah	100,00%	100,00%	100,00%	311.108.160	433.441.458	446.413.068	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100,00%	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100,00%	100,00%	100,00%	55.809.690	55.809.690	39.734.300	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip telah dinilai dan ditetapkan akan dimusnahkan berdasarkan NSPK	100,00 persen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5.000 Arsip	5.000 Arsip	5.000 Arsip	34.200.000	34.200.000	30.600.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase arsip yang akan / sudah dimusnahkan	100,00 persen	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2.500 Berkas	2.500 Berkas	2.500 Berkas	21.609.690	21.609.690	9.134.300	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100,00%	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100,00%	100,00%	100,00%	31.598.740	51.932.040	104.354.340	
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip akibat bencana yang teridentifikasi dan terevakuasi	200 berkas	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	16.597.120	36.930.420	69.526.720	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Presentase arsip akibat bencana yang terselamatkan	50,00 persen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	15.001.620	15.001.620	34.827.620	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	70,00%	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	70,00%	70,00%	70,00%	36.076.540	136.076.540	133.676.540	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Penggabungan OPD Kota	70,00 persen	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	7 Daftar	7 Daftar	7.778.500	7.778.500	7.778.500	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Pembubaran OPD Kota	70,00 persen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	7 Arsip	7 Arsip	9.500.000	9.500.000	9.500.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah arsip kecamatan pemekaran yang diselamatkan	5 kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	7.580.720	27.580.720	25.180.720	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah arsip kelurahan pemekaran yang diselamatkan	5 kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	11.217.320	91.217.320	91.217.320	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	70,00%	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	70,00%	70,00%	70,00%	129.123.220	131.123.218	124.223.218	
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1.000 berkas	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	51.545.390	51.545.390	51.545.390	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media berdasarkan NSPK	1.000 berkas	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	376 Arsip	376 Arsip	77.577.830	79.577.828	72.677.828	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	70,00%	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	70,00%	70,00%	70,00%	58.499.970	58.499.970	44.424.670	
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1.000 berkas	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	19.100.000	19.100.000	19.100.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip alih media yang hilang	500 berkas	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	19.999.980	19.999.980	14.174.880	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah arsip yang diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1.000 berkas	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	19.399.990	19.399.990	11.149.790	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60,00%	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60,00%	60,00%	60,00%	28.865.640	50.865.640	29.115.640	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	60,00%	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	60,00%	60,00%	60,00%	28.865.640	50.865.640	29.115.640	
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	5 SOP	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	5 SOP	5 SOP	17.287.870	37.287.870	24.237.870	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup berdasarkan NSPK	30 SK	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	11.577.770	13.577.770	4.877.770	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX	NON URUSAN							12.271.694.222	12.557.705.242	12.419.619.344	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	12.271.694.222	12.557.705.242	12.419.619.344	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	7.892.580	7.921.320	7.921.320	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Renja OPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4.878.000	4.878.000	4.878.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA OPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.440	1.429.180	1.429.180	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	908.380	908.380	908.380	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LKPJ dan LKJ IP OPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	705.760	705.760	705.760	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Terlaksanakannya Survey/Kajian Kinerja/IKK OPD	5 Dokumen								DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100,00%	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100,00%	100,00%	100,00%	9.330.323.562	9.332.019.562	9.085.993.954	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	9.128.481.882	9.128.481.882	8.885.981.274	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	199.360.000	201.056.000	198.656.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.170.160	1.170.160	795.160	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.311.520	1.311.520	561.520	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	901.360.569	1.042.069.070	1.012.754.652	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	25.659.959	25.659.959	12.822.109	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	11 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	18.482.067	18.482.067	18.482.067	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	34 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	22.084.831	22.084.831	23.305.831	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	7 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	18.981.626	18.981.626	18.981.626	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan (Surat Kabar)	15 Jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	14.400.000	14.400.000	14.400.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	70 orang bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.300.000	8.775.000	15.900.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat/koordinasi/ konsultasi yang terselenggara	25 Kali/bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	205.615.240	227.065.240	149.613.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang/jasa yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD/OPD	10 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	571.836.846	706.620.347	759.250.019	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	54.212.044	231.627.803	322.091.811	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	5 Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	54.212.044	231.627.803	322.091.811	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	728.782.112	698.644.112	697.712.112	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	257.332.112	257.332.112	256.400.112	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan Kantor dan Jasa Non ASN	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	471.450.000	441.312.000	441.312.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	1.249.123.355	1.245.423.375	1.293.145.495	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	2 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	27 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	490.608.960	490.608.960	490.608.960	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan mesin dan alat Lainnya	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	116.306.140	112.606.160	101.548.080	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung arsip/perpustakaan	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	605.890.075	605.890.075	664.670.275	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN							14.361.104.449	14.487.151.049	13.981.906.090	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							6.278.940.000	6.826.940.000	6.606.330.663	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3.056 Ton	Produksi perikanan tangkap	3.056 Ton	3.056 Ton	3.056 Ton	1.643.400.000	1.933.400.000	1.861.238.900	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan	250.000 ekor	Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan	250.000 ekor	250.000 ekor	175.000 ekor	650.000.000	700.000.000	700.000.000	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang mengikuti pendampingan konversi BBG	100 Orang	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 Unit	2 Jenis	2 Jenis	650.000.000	700.000.000	700.000.000	DINAS PERIKANAN
		Jumlah kajian jasa konsultasi	1 Dokumen								DINAS PERIKANAN
		Restocking	250.000 ekor								DINAS PERIKANAN
		Honorarium Non ASN	1 Orang								DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	120 Orang	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	120 Orang	120 Orang	240 Orang	445.400.000	610.400.000	538.238.900	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)	60 Orang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	120 Orang	200 Orang	200 Orang	445.400.000	610.400.000	538.238.900	DINAS PERIKANAN
		Forum KUB nelayan	105 Orang								DINAS PERIKANAN
		Sosialisasi nelayan	120 Orang								DINAS PERIKANAN
		Pelatihan nelayan	120 Orang								DINAS PERIKANAN
		Penanaman mangrove	15.000 Batang								DINAS PERIKANAN
		Lomba perahu dayung	1 Kegiatan								DINAS PERIKANAN
		Kajian Pengelolaan Mangrove di Kota Semarang	1 Kegiatan								DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	100 Orang	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	100 Orang	100 Orang	30 Orang	548.000.000	623.000.000	623.000.000	
3.25.03.2.03.02	Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI	100 Orang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	548.000.000	623.000.000	623.000.000	DINAS PERIKANAN
		Sarpras pengelolaan TPI	22 Jenis								DINAS PERIKANAN
		Sosialisasi optimalisasi TPI	100 Orang								DINAS PERIKANAN
		Honorarium Non ASN	4 Orang								DINAS PERIKANAN
		Monev TPI	12 Kali								DINAS PERIKANAN
		Pemeliharaan TPI	1 Unit/tahun								DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3.846 Ton	Produksi perikanan budidaya	3.846 Ton	3.846 Ton	3.846 Ton	2.956.852.885	3.206.852.885	3.134.691.285	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	340 Orang	Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	340 Orang	340 Orang	200 Orang	688.400.000	888.400.000	749.988.400	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Budidaya Ikan dan Sayuran Dalam Ember (BUDIKDAMBER)	200 Orang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	688.400.000	888.400.000	749.988.400	DINAS PERIKANAN
		Honorarium Non ASN	4 Orang								DINAS PERIKANAN
		Pelatihan teknologi pakan ikan	20 Orang								DINAS PERIKANAN
		Panen raya ikan	100 Orang								DINAS PERIKANAN
		Sosialisasi hama dan penyakit ikan	20 Orang								DINAS PERIKANAN
		Pelatihan budidaya ikan di kolam terpal	100 Orang								DINAS PERIKANAN
		Demplot budidaya udang di tambak	1 Kegiatan								DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan/sosialisasi	60 Orang	Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan/sosialisasi	60 Orang	60 Orang	40 Orang	2.268.452.885	2.318.452.885	2.384.702.885	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya induk ikan	4 Jenis	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	5 unit	1 Unit	1.415.452.885	1.465.452.885	1.531.702.885	DINAS PERIKANAN
		Honor Non ASN	12 Orang								DINAS PERIKANAN
		Rehab pemeliharaan gedung BBI	4 Jenis								DINAS PERIKANAN
		Pembinaan UPR	3 Orang								DINAS PERIKANAN
		Rehab kolam dan saluran BBI	2 Jenis								DINAS PERIKANAN
		Tersedianya pakan ikan	3.535 kilogram								DINAS PERIKANAN
		Tersedianya obat-obatan ikan	5 Jenis								DINAS PERIKANAN
		Lomba mancing	1 Kegiatan								DINAS PERIKANAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		-	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1 Orang	20 Orang	10 Orang	853.000.000	853.000.000	853.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	4 Kasus	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	4 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	283.192.355	333.192.355	333.192.355	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelatihan POKMASWAS	50 Orang	Pelatihan POKMASWAS	50 Orang	50 Orang	40 Orang	283.192.355	333.192.355	333.192.355	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	FGD Ijin Usaha Perikanan	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	283.192.355	333.192.355	333.192.355	DINAS PERIKANAN
		Pembinaan Pokmaswas	50 Orang								DINAS PERIKANAN
		Temu usaha perikanan	100 Orang								DINAS PERIKANAN
		Uji mutu hasil perikanan	1 Kegiatan								DINAS PERIKANAN
		Jasa konsultasi	1 Dokumen								DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi ikan olahan	17.557 Ton	Produksi ikan olahan	17.557 Ton	17.557 Ton	17.557 Ton	1.395.494.760	1.353.494.760	1.277.208.123	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	30 Orang	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	30 Orang	30 Orang	20 Orang	207.134.760	293.134.760	293.134.760	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bintek/magang	30 Orang	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	207.134.760	293.134.760	293.134.760	DINAS PERIKANAN
		Money pedagang ikan hias	12 Kali								DINAS PERIKANAN
		Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	130 Orang								DINAS PERIKANAN
		Honorarium Non ASN	1 Orang								DINAS PERIKANAN
		Jasa konsultasi	1 dokumen								DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	150 Orang	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	150 Orang	150 Orang	100 Orang	213.360.000	486.680.000	410.393.363	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pembinaan pengolah ikan	40 Orang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	213.360.000	486.680.000	410.393.363	DINAS PERIKANAN
		Jumlah peserta sosialisasi Gemarikan dan FMT anak sekolah	200 Orang								DINAS PERIKANAN
		Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	150 Orang								DINAS PERIKANAN
		Pemberian makanan tambahan penderita gizi buruk	300 Orang								DINAS PERIKANAN
		Jumlah peserta kegiatan Lomba masak ikan tingkat kota dan provinsi	38 Orang								DINAS PERIKANAN
		Jumlah peserta kampanye gemar ikan TP PKK	50 Orang								DINAS PERIKANAN
		Cooking class	50 Orang								DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	4 Orang /Pengelola	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	4 Orang /Pengelola	4 Orang /Pengelola	40 Orang	975.000.000	573.680.000	573.680.000	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sarana pasar ikan higienis Mina Rejomulyo	2 Jenis	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.000 Ton	17.000 Ton	17.000 Ton	975.000.000	573.680.000	573.680.000	DINAS PERIKANAN
		Honorarium Non ASN	4 Orang								DINAS PERIKANAN
		Jumlah pembangunan/perawatan gedung	3 Paket								DINAS PERIKANAN
X.XX	NON URUSAN							8.082.164.449	7.660.211.049	7.375.575.427	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan	100,00%	Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan	100,00%	100,00%	100,00%	8.082.164.449	7.660.211.049	7.375.575.427	
		Peningkatan Kapasitas SDM	30 Orang	Peningkatan Kapasitas SDM	30 Orang	30 Orang	30 Orang				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	DINAS PERIKANAN
		Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1 dokumen								DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan RKA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perubahan DPA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	500.000	500.000	500.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100,00%	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100,00%	100,00%	100,00%	5.697.029.449	5.697.029.449	5.539.482.370	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.464.569.449	5.464.569.449	5.307.022.370	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honor pengelola keuangan	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	231.860.000	231.860.000	231.860.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan keuangan dan kinerja akhir tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200.000	200.000	200.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaporan keuangan semesteran	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	200.000	200.000	200.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan prognosis keuangan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	200.000	200.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	2 Kegiatan	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	43.400.000	43.400.000	43.400.000	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	45 Orang	45 Orang	33.400.000	33.400.000	33.400.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100,00%	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100,00%	100,00%	100,00%	769.794.963	771.794.963	644.706.420	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga dan perabot kantor	10 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor	35 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	35 Paket	76.462.399	76.462.399	50.065.457	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	51.252.450	53.252.450	53.252.450	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan makan minum rapat	700 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	40.000.000	40.000.000	30.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas luar daerah	36 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	299.956.520	299.956.520	209.264.919	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan kantor elektronik	3 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	267.123.594	267.123.594	267.123.594	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	507.418.462	83.465.062	83.465.062	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	-	423.953.400	-	-	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras pendukung gedung kantor	3 Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	83.465.062	83.465.062	83.465.062	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	547.157.216	547.157.216	547.157.216	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perlengkapan kantor	2 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	74.964.816	74.964.816	74.964.816	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	5 Orang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	272.192.400	272.192.400	272.192.400	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100,00%	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100,00%	100,00%	100,00%	513.364.359	513.364.359	513.364.359	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.313.180	40.313.180	40.313.180	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	28 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	369.266.497	369.266.497	369.266.497	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit	48 Unit	39.454.200	39.454.200	39.454.200	DINAS PERIKANAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	2 Jenis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	64.330.482	64.330.482	64.330.482	DINAS PERIKANAN
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN							32.198.237.245	32.948.237.245	41.341.021.445	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							12.531.493.402	13.281.493.402	22.467.255.535	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	produksi hasil peternakan	35.922 ton	produksi hasil peternakan	35.922 ton	35.922 ton	35.922 ton	5.918.669.202	6.418.669.202	8.211.623.526	
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50.648 ton	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50.648 ton	50.648 ton	50.648 ton				
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	40 kelompok	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	40 kelompok	40 kelompok	25 kelompok	2.901.177.602	3.151.177.602	5.298.457.117	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	19 ha	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	15 Laporan	17 Laporan	688.192.200	788.192.200	2.401.837.581	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	4 kelompok								DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	5 kelompok								DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	2 kelompok								DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16 paket	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	30 Laporan	34 Laporan	35 Laporan	2.212.985.402	2.362.985.402	2.896.619.536	DINAS PERTANIAN
		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	6 kelompok								DINAS PERTANIAN
		jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	8 kelompok								DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	22.750 batang								DINAS PERTANIAN
		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3 kegiatan								DINAS PERTANIAN
		Jumlah pengembangan tanaman sukun	110 batang								DINAS PERTANIAN
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12 kali								DINAS PERTANIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	62,50 persen	Persentase kebun dinas yang produktif	62,50 persen	62,50 persen	62,50 persen	2.258.438.400	2.383.438.400	2.383.438.400	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2.258.438.400	2.383.438.400	2.383.438.400	DINAS PERTANIAN
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	1.500 batang								DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	45,00 persen	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	45,00 persen	45,00 persen	45,00 persen	595.720.000	719.720.000	224.490.118	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12 laporan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	595.720.000	719.720.000	224.490.118	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	2 kelompok								DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebar untuk pengembangan populasi ternak	70 ekor	Jumlah ternak yang disebar untuk pengembangan populasi ternak	70 ekor	70 ekor	70 ekor	163.333.200	164.333.200	305.237.891	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang diadakan	70 ekor	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	60 Ekor	60 Ekor	200 Ekor	163.333.200	164.333.200	305.237.891	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan								DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6 ton/ha	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6 ton/ha	6 ton/ha	6 ton/ha	5.181.664.800	5.256.664.800	8.205.305.740	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terwujudnya rencana pengembangan pertanian di Kota Semarang	2 dokumen	Terwujudnya rencana pengembangan pertanian di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	197.280.000	247.280.000	245.480.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yang disusun	1 dokumen	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	97.680.000	98.680.000	96.880.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang disusun	1 dokumen	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99.600.000	148.600.000	148.600.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	34 unit	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	34 unit	34 unit	4 unit	4.984.384.800	5.009.384.800	7.959.825.740	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun/direhab	3 unit	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2 Unit	1 Unit	12 Unit	349.400.000	225.983.581	2.289.883.581	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan pertanian yg dibangun/direhab	2 unit	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	3 Unit	199.800.000	199.800.000	628.200.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yg dibangun/ direhab	3 unit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	1 Unit	1 Unit	274.400.000	167.816.419	167.816.419	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yg dibangun/direhab	25 unit	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	23 Unit	24 Unit	31 Unit	4.160.784.800	4.415.784.800	4.873.925.740	DINAS PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5,00%	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5,00%	-5,00%	-5,00%	494.652.000	494.652.000	774.177.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14 kelurahan	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14 kelurahan	14 kelurahan	14 kelurahan	402.352.000	402.352.000	392.002.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	25 kali	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	402.352.000	402.352.000	392.002.000	DINAS PERTANIAN
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas	3.500 ekor								DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya layanan medik veteriner di Puskesmas	2 unit	Terkelolanya layanan medik veteriner di Puskesmas	2 unit	2 unit	2 unit	0	0	301.150.000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		-	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	-	12 Laporan	-	-	301.150.000	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	92,00 persen	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	92.300.000	92.300.000	81.025.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100,00 persen	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	92.300.000	92.300.000	81.025.000	DINAS PERTANIAN
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100,00 persen								DINAS PERTANIAN
		Jumlah pendampingan & fasilitasi perijinan usaha pengolahan hasil peternakan	4 laporan								DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75,00%	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75,00%	75,00%	75,00%	187.400.000	237.400.000	236.350.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	17 kelompok	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	17 kelompok	17 kelompok	5 kelompok	187.400.000	237.400.000	236.350.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	10 kelompok	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	100 Ha	100 Ha	125.780.000	176.780.000	175.730.000	DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	7 kelompok	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunanyang Ditangani	40 Ha	40 Ha	40 Ha	61.620.000	60.620.000	60.620.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	28 kelompok	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	28 kelompok	28 kelompok	28 kelompok	749.107.400	874.107.400	5.039.799.269	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	40,00 persen	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen	749.107.400	874.107.400	5.039.799.269	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	5 kegiatan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	148.200.000	173.200.000	224.894.000	DINAS PERTANIAN
		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	5 lembaga								DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	5 kelompok	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Unit	40 Unit	41 Unit	546.986.200	646.986.200	2.396.934.069	DINAS PERTANIAN
		Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	840 orang								DINAS PERTANIAN
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	5 kegiatan								DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100,00 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4 Unit	4 Unit	28 Unit	53.921.200	53.921.200	2.417.971.200	DINAS PERTANIAN
X.XX	NON URUSAN							19.666.743.843	19.666.743.843	18.873.765.910	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	19.666.743.843	19.666.743.843	18.873.765.910	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	31 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	31 dokumen	31 dokumen	26 dokumen	11.439.366	11.439.366	11.439.366	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	5 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5.952.265	5.952.265	5.952.265	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan & evaluasi kinerja	21 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	5.487.101	5.487.101	5.487.101	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	7 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	7 dokumen	7 dokumen	4 dokumen	14.051.723.863	14.051.723.863	12.953.773.381	
		Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	13.825.874.245	13.825.874.245	12.727.923.763	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	222.100.000	222.100.000	222.100.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.292.978	1.292.978	1.292.978	DINAS PERTANIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	4 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.637.760	1.637.760	1.637.760	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	818.880	818.880	818.880	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.481.592.614	1.434.693.824	1.425.237.890	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	68.832.000	68.832.000	60.716.937	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	355.910.614	356.111.824	306.987.787	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	10 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	40.000.000	40.000.000	23.887.347	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 Jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.080.000	10.080.000	10.080.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100,00 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	36.000.000	36.000.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	284.823.000	284.823.000	284.823.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	5 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	685.947.000	638.847.000	702.742.819	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	703.630.000	616.237.635	809.710.916	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	1 unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	2 Unit	-	-	241.217.350	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	13 jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	80 Unit	80 Unit	604.016.000	549.934.580	513.991.697	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	6 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	21 Unit	19 Unit	99.614.000	66.303.055	54.501.869	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.344.137.000	1.562.509.000	1.506.740.480	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	206.773.000	378.045.000	322.276.480	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.137.364.000	1.184.464.000	1.184.464.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100,00 persen	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	2.074.221.000	1.990.140.155	2.166.863.877	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.314.000	40.314.000	40.314.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	66 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	66 Unit	66 Unit	540.161.000	540.161.000	540.161.000	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	7 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	210 Unit	210 Unit	193.746.000	226.855.735	256.308.837	DINAS PERTANIAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	11 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.300.000.000	1.182.809.420	1.330.080.040	DINAS PERTANIAN
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN							68.644.999.286	73.415.499.286	65.261.365.983	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							30.861.165.000	36.272.109.500	30.316.626.985	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100,00%	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	126.338.000	259.908.200	185.470.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100,00%	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100,00%	100,00%	100,00%	126.338.000	259.908.200	185.470.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	penerbitan surat jnin tempat dasaran pedagang pasar dan PKL	1.800 surat izin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.800 Dokumen	1.800 Dokumen	1.800 Dokumen	126.338.000	259.908.200	185.470.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	22 pasar	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	22 pasar	22 pasar	22 pasar	28.444.442.000	30.235.456.800	24.516.651.885	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	2 pasar	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	2 pasar	2 pasar	2 pasar	22.483.601.000	23.790.322.900	17.803.972.157	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	2 pasar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	52 Unit	52 Unit	52 Unit	14.341.461.000	15.377.597.100	9.032.518.357	DINAS PERDAGANGAN
		Pasar Barito Karya Mandiri di Sawah besar	1 pasar								DINAS PERDAGANGAN
		Revitalisasi Pasar Waru Klithikan	1 pasar								DINAS PERDAGANGAN
		Revitalisasi Pasar Bangetayu	1 pasar								DINAS PERDAGANGAN
		Sewa Lahan MAJT untuk Pasar Barito Baru	1 lokasi								DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang terfasilitasi sarana prasarananya (kebersihan; operasional genset, hydrant, pompa)	52 pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	52 Unit	52 Unit	52 Unit	8.142.140.000	8.412.725.800	8.771.453.800	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar	52 pasar	52 pasar	5.960.841.000	6.445.133.900	6.712.679.728	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	keamanan dan ketertiban pasar dan PKL	52 pasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.688.161.000	3.886.059.100	3.951.728.082	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	optimalisasi pendapatan retribusi pasar dan PKL	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.272.680.000	2.559.074.800	2.760.951.646	DINAS PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,99%	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,99%	3,99%	3,99%	187.709.000	3.191.351.100	3.061.600.000	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100,00%	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100,00%	100,00%	100,00%	37.143.000	0	0	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan harga harian melalui sistem informasi harga	12 laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	-	-	37.143.000	-	-	DINAS PERDAGANGAN
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100,00%	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100,00%	100,00%	100,00%	150.566.000	3.191.351.100	3.061.600.000	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan harga harian melalui sistem informasi harga	12 laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.566.000	3.191.351.100	3.061.600.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1.615.736.908 US\$	Nilai ekspor non migas	1.615.736.908 US\$	1.615.736.908 US\$	1.615.736.908 US\$	590.552.000	631.145.000	710.727.000	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	18,00%	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	18,00%	18,00%	18,00%	590.552.000	631.145.000	710.727.000	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	30 orang	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	-	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	-	37.143.000	36.562.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	3 kegiatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	590.552.000	594.002.000	674.165.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76,00%	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76,00%	76,00%	76,00%	804.852.000	1.127.846.200	1.082.495.900	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	76,00%	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	76,00%	76,00%	76,00%	804.852.000	1.127.846.200	1.082.495.900	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	91.960 unit	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	91.960 Unit	91.960 Unit	91.960 Unit	552.044.000	552.044.000	523.296.100	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	64,00 persen	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300 Orang	300 Orang	300 Orang	252.808.000	575.802.200	559.199.800	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30,00%	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30,00%	30,00%	30,00%	707.272.000	826.402.200	759.682.200	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang	100 orang	100 orang	707.272.000	826.402.200	759.682.200	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempromosikan produk lokal (Semargres, Dugderan, Festival Angkringan)	3 kegiatan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	180 UMKM	180 UMKM	180 UMKM	575.000.000	575.000.000	530.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk lokal	3 kegiatan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	360 UMKM	360 UMKM	360 UMKM	132.272.000	251.402.200	229.682.200	DINAS PERDAGANGAN
X.XX	NON URUSAN							37.783.834.286	37.143.389.786	34.944.738.998	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	37.783.834.286	37.143.389.786	34.944.738.998	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100,00%	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	5.010.680	5.010.680	5.010.680	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.879.440	1.879.440	1.879.440	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA, DPA, R-DPPA, DPPA	4 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.789.280	1.789.280	1.789.280	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKPJ, LKJIP, LPPD	3 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.341.960	1.341.960	1.341.960	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100,00%	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	26.371.280.969	26.318.120.969	24.184.172.718	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	214 orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	214 Orang/bulan	214 Orang/bulan	214 Orang/bulan	25.960.951.529	25.960.951.529	23.827.003.278	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	408.000.000	354.840.000	354.840.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	776.480	776.480	776.480	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semester I	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	776.480	776.480	776.480	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	776.480	776.480	776.480	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100,00%	Persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100,00%	100,00%	100,00%	997.597.600	997.747.600	1.217.372.870	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	10.000.000	10.000.000	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	22 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan	70 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	151.974.204	152.944.204	182.919.474	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	26 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	350.000.000	349.580.000	449.580.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang berkunjung	4.092 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	177.750.000	177.350.000	212.000.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	726 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	277.873.396	277.873.396	327.873.396	DINAS PERDAGANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	148.424.316	118.862.741	630.775.578	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	148.424.316	118.862.741	630.775.578	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100,00%	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	9.081.080.721	8.523.207.796	6.524.180.122	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ketersediaan listrik, air, jaringan	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.840.419.721	7.422.610.996	5.423.583.322	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kelancaran operasional kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.240.661.000	1.100.596.800	1.100.596.800	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100,00%	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100,00%	100,00%	100,00%	1.180.440.000	1.180.440.000	2.383.227.030	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar, suku cadang, perawatan, biaya perizinan	50 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	50 Unit	623.272.430	623.272.430	623.272.430	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan mebel kantor	10 jenis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	14.544.000	14.544.000	14.544.000	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan/mesin yang dipelihara	13 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	13 Unit	311.603.570	311.603.570	443.388.600	DINAS PERDAGANGAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/perbaikan gedung kantor	1 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	231.020.000	231.020.000	1.302.022.000	DINAS PERDAGANGAN
3.31.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN							14.917.740.261	15.450.740.261	24.833.805.989	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							5.217.319.490	5.551.969.610	15.818.624.385	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	88,00%	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	88,00%	88,00%	88,00%	4.652.019.490	4.986.669.610	15.309.238.898	
		Persentase Pertambahan IKM	0,50%	Persentase Pertambahan IKM	0,50%	0,50%	0,50%				
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 IKM	Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 IKM	1 IKM	1 IKM	4.652.019.490	4.986.669.610	15.309.238.898	
		Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM	Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM				
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Document RPIK - PERDA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Penguatan Sentra IKM	4 Sentra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	264.500.000	797.500.000	701.309.205	DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra								DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah Temu Usaha Industri	1 Kegiatan								DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Workshop/Sosialisasi/Pelatihan Industri kreatif/start up atau pelaku usaha/ link and match/ Semarang online sale	750 IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	959.200.000	959.200.000	832.803.525	DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah Partisipasi Promosi / Pameran IKM.	1 Kegiatan								DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah IKM yang terfasilitasi HKI	90 IKM								DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang Terfasilitasi SNI	90 IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.739.059.490	503.080.000	355.239.850	DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah IKM yang terfasilitasi P-IRT / BPOM / HALAL	270 IKM								DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah Mesin pelinting yang terdata	10 mesin								DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Pengembangan sentra IKM	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	1.420.000.000	2.457.629.610	13.150.626.318	DINAS PERINDUSTRIAN
		Persentase Operasional Gedung Sentra IKM	100,00 persen								DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah Dokumen FS dan DED Creative Maker Space	1 Dokumen								DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah sosialisasi peningkatan SDM	3 Kegiatan								DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Terlaksananya Monev Industri	2 Kegiatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	169.260.000	169.260.000	169.260.000	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4,00%	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4,00%	4,00%	4,00%	176.460.000	176.460.000	176.460.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	15 IKM	15 IKM	176.460.000	176.460.000	176.460.000	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI	34 izin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	133.060.000	133.060.000	133.060.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI, UIPI, UIKI, IPKI	42 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	43.400.000	43.400.000	43.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0,50%	Tersedianya Data Informasi Industri	0,50%	0,50%	0,50%	388.840.000	388.840.000	332.925.487	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4,00%	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4,00%	4,00%	4,00%	388.840.000	388.840.000	332.925.487	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM dan perusahaan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	20 IKM	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	265.000.000	265.000.000	265.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Diseminasi/ sosialisasi data informasi dan analisa industri	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	99.000.000	99.000.000	43.085.487	DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah Profil Sentra IKM dan Kawasan Industri	2 Buku								DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang patuh dalam Penyampaian Data	20 IKM	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.840.000	24.840.000	24.840.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX	NON URUSAN							9.700.420.771	9.898.770.651	9.015.181.604	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100,00%	100,00%	100,00%	9.700.420.771	9.898.770.651	9.015.181.604	
		Persentase tersedianya Sarana Dam Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100,00%	Persentase tersedianya Sarana Dam Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100,00%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100,00%	Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	9 Dokumen	Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	16.714.980	16.699.940	16.699.940	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokument Renja ,Renja Perubahan dan Restra Dinas Perindustrian	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.439.000	1.921.080	1.921.080	DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah dokumen RTP	1 Dokumen								DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.536.000	2.363.680	2.363.680	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Document Perubahan RKA -Dinas Perindustrian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.715.100	2.845.590	2.845.590	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Document DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.028.800	2.363.680	2.363.680	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Document DPA Perubahan Dinas Perindustrian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.972.080	2.845.590	2.845.590	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Document LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3.024.000	4.360.320	4.360.320	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor	100,00%	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	6.634.178.260	6.634.193.300	6.109.257.948	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6.359.459.355	6.359.459.355	5.834.524.003	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	261.960.000	261.989.760	261.989.760	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.558.905	8.558.905	8.558.905	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.008.000	1.090.080	1.090.080	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Dinas Perindustrian	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	792.000	695.200	695.200	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100,00%	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%	95.000.000	95.000.000	95.000.000	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70 Orang	70 Orang	95.000.000	95.000.000	95.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	711.146.621	697.049.832	752.049.832	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	17 Paket	27.300.000	27.300.000	27.300.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	25 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	40 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket	52 Paket	52 Paket	69.489.621	97.524.621	117.524.621	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	14 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	55.000.000	55.000.000	55.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	600 Orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	140 Laporan	140 Laporan	63.000.000	34.965.000	54.965.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	200 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	257.507.000	257.507.000	272.507.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	9 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	198.850.000	184.753.211	184.753.211	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	26.100.000	117.367.894	117.367.894	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	40 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	8 Unit	8 Unit	26.000.000	117.267.894	117.267.894	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000	50.000	50.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	50.000	50.000	50.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	1.897.026.510	2.018.205.285	1.604.551.590	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	964.020.510	800.250.885	386.597.190	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	54.000.000	54.000.000	54.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	879.006.000	1.163.954.400	1.163.954.400	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100,00%	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100,00%	100,00%	100,00%	320.254.400	320.254.400	320.254.400	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.400.000	36.400.000	36.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	20 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	19 Unit	265.100.000	265.100.000	265.100.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	27 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120 Unit	120 Unit	120 Unit	8.726.400	8.726.400	8.726.400	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	28.000	28.000	28.000	DINAS PERINDUSTRIAN
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH							198.962.303.560	207.282.104.340	216.609.460.588	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							51.641.901.377	59.245.288.517	65.149.420.679	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	118,00 persen	Indek Pelayanan Publik	118,00 persen	118,00 persen	118,00 persen	47.104.561.945	53.617.072.945	58.335.546.500	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100,00 persen	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9 Kegiatan	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan				
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	40,00 persen	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen				
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16 Kecamatan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	1.243.070.919	2.564.932.919	2.884.932.919	
		Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	40,00 persen	Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen				
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tertib Administrasi Pemerintahan di Wilayah	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	459.116.266	630.166.266	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Semarang	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	582.116.466	635.666.466	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Umum di Wilayah	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	593.070.919	1.523.700.187	1.619.100.187	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Monitoring Kegiatan Otonomi Daerah	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen				BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9 kegiatan	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	33.648.595.679	35.440.053.679	44.062.795.046	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya kegiatan ibadah haji, kegiatan keagamaan, pendidikan keagamaan non formal, kegiatan MTQ dan Pesparawi di Kota Semarang	3 Kegiatan		-	-	-	27.308.446.907	28.309.315.138	36.383.637.470	SEKRETARIAT DAERAH
		Pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, fasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan MTQ & Pesparawi dan pembinaan tenaga pendidik keagamaan formal & non formal dan a pendidikan	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen				BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan kegiatan pembinaan modin perawat jenazah, petugas kemakmuran tempat ibadah dan pemberian hibah sarpras tempat ibadah serta pemberian honor bagi modin perawat jenazah dan petugas kemakmuran tempat ibadah di Kota Semarang	3 Kegiatan		-	-	-	5.594.949.562	6.031.207.793	6.855.453.478	SEKRETARIAT DAERAH
		Pelaksanaan kegiatan perawat jenazah dan pemberian sarana dan prasarana tempat ibadah dan pemberian honor kegiatan untuk petugas kemakmuran masjid	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen				BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan pembinaan UKS, sosialisasi bahaya narkoba dan aids serta pelaksanaan donor darah dan sunatan massal di Kota Semarang	3 Kegiatan		-	-	-	745.199.210	1.099.530.748	823.704.098	SEKRETARIAT DAERAH
		Pelaksanaan kegiatan pembinaan UKS, sosial kemasyarakatan dan penyuluhan bahaya narkoba dan aids bagi pelajar	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen				BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	118,00 persen	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	118,00 persen	118,00 persen	118,00 persen	2.572.584.100	4.972.382.100	4.984.382.100	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya : Raperda 9 Perda, Raperwal 36 Perwal, SK Walikota 400 SK Walikota, Surat Perjanjian 120 Surat Perjanjian dan Pembaharuan Aplikasi Eling	100 Persen	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 Dokumen	565 Dokumen	565 Dokumen	515.389.690	663.313.770	675.313.770	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terselesaikannya Penanganan Perkara Hukum litigasi di Lembaga Peradilan 20 Perkara, Bantuan Hukum Warga Miskin 35 Perkara, Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum dan Penanganan perkara, Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan KADARKUM serta RANHAM	118 Persen	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 Kasus	55 Kasus	55 Kasus	1.526.396.830	1.903.334.330	1.903.334.330	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksanakannya Sosialisasi Produk Hukum, Terdokumentasikannya Produk hukum (Perda dan Perwal) dan Pengelolaan JDIH, terpenuhinya Perbaikan sarana dan prasarana Ruangan JDIH	100 Persen	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	530.797.580	2.405.734.000	2.405.734.000	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	40,00 persen	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen	9.640.311.247	10.639.704.247	6.403.436.435	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kesepakatan Pemerintah Kota dengan Stakeholder Dalam Negeri	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	1.105.200.523	1.345.408.523	1.343.410.523	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Laporan Sister City dengan Luar Negeri	5 Dokumen/ tahun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	8.535.110.724	9.294.295.724	5.060.025.912	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100,00 persen	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	4.537.339.432	5.628.215.572	6.813.874.179	
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100,00 persen	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100,00 persen	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	11.174.169.030 dokumen	jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	11.174.169.030 dokumen	11.174.169.030 dokumen	40 dokumen	1.300.838.200	2.212.143.200	3.034.243.200	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi PerekonomianKoordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pengendalian dan distribusi perekonomian	12 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	318.188.798	719.168.798	719.168.798	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Koordinasi perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	602.629.125	1.072.919.125	1.895.019.125	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	380.020.277	420.055.277	420.055.277	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100,00 persen	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	683.498.400	879.788.400	880.980.000	
		Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	165.797.200	169.397.200	180.837.200	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Dokumen standarisasi harga	1 dokumen		-	-	-				BAGIAN PERLENGKAPAN
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	387.821.560	551.561.560	523.430.130	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.879.640	158.829.640	176.712.670	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100,00 persen	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	2.353.002.832	2.336.283.972	2.252.265.309	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang	150 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	230 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	1.221.062.000	1.376.393.140	1.326.670.140	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Fasilitasi Sistem Pelelangan/Pengadaan secara Elektronik, Sosialisasi dan Pelatihan LPSE & Rencana Umum Pengadaan	12 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Kegiatan	12 Dokumen	568.850.832	396.800.832	367.400.832	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan / sosialisasi terhadap pelaku pengadaan barang jasa, Sosialisasi peningkatan kematangan UKPBJ	10 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	10 kegiatan	10 Kegiatan	563.090.000	563.090.000	558.194.337	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	10 dokumen	jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	200.000.000	200.000.000	646.385.670	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	jumlah dokumen penyaluran BLT, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai legal	100 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000	200.000.000	646.385.670	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
X.XX	NON URUSAN							147.320.402.183	148.036.815.823	151.460.039.909	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00 persen	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	147.320.402.183	148.036.815.823	151.460.039.909	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100,00 persen	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	41 OPD	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	41 OPD	41 OPD	51 OPD				
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100,00 persen	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100,00 persen	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100,00 persen	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		peningkatan kemampuan ASN Bagian TU	100,00 persen	peningkatan kemampuan ASN Bagian TU	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 persen	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	40,00 persen	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00 persen	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	17.424.780	18.624.780	17.433.180	
		Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100,00 persen	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.041.600	6.241.600	5.050.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Jumlah Dokumen RTP Perangkat Daerah	1 Dokumen								BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	100,00 persen		-	-	-				BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.268.000	3.268.000	3.268.000	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.905.910	3.905.910	3.905.910	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.363.680	2.363.680	2.363.680	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.845.590	2.845.590	2.845.590	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Setda yang lebih baik	100,00 persen	Administrasi keuangan Setda yang lebih baik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	37.410.568.199	37.410.568.199	31.275.158.161	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tambahan Penghasilan PNS Setda Kota Semarang	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234 Orang/bulan	234 Orang/bulan	234 Orang/bulan	36.526.053.799	36.526.053.799	30.390.643.761	BAGIAN KEUANGAN
		Gaji dan Tunjangan PNS Setda Kota Semarang	100,00 persen								BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja PA,KPA,PPK,PPTK dan Bendahara Setda Kota Semarang lebih baik	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	881.400.000	881.400.000	881.400.000	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Setda Kota Semarang	100,00 persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	695.200	695.200	695.200	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Setda Kota Semarang	100,00 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.419.200	2.419.200	2.419.200	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1.429.031.720	1.878.333.720	1.629.353.152	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan BMD	2 dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.712.034	49.912.034	44.814.152	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Pengelolaan BMD	3 dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.383.319.686	1.828.421.686	1.584.539.000	BAGIAN KEUANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100,00 persen	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	3.288.695.351	3.654.267.745	3.452.412.746	
		Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00 persen	Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4 jenis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	6 Paket	3.241.295.351	3.345.916.745	3.319.612.746	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	47.400.000	308.351.000	132.800.000	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100,00 persen	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	43.532.182.354	33.390.777.995	31.600.005.275	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100,00 persen	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi/komponen listrik / penerangan bangunan	5 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	322.146.827	-	-	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	12 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	8 Paket	10 Paket	3.222.967.256	1.093.512.956	888.228.795	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor	6 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	837.239.512	841.922.512	952.528.533	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	4 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	504.931.999	507.931.999	556.533.457	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bacaan Koran dan Majalah	100,00 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	268 Dokumen	268 Dokumen	12 Dokumen	338.040.000	338.040.000	327.480.000	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jamuan Makanan dan Minuman bagi tamu Pemerintah Kota Semarang	100,00 persen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	10.086.609.600	9.961.119.600	9.961.119.600	BAGIAN TATA USAHA
		Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan di Lingkungan Setda Kota Semarang	100,00 persen								BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kota Semarang	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	25.160.188.976	18.766.783.715	16.239.639.369	BAGIAN TATA USAHA
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100,00 persen								BAGIAN TATA USAHA
		Perjalanan Dinas bagi KDH dan WKDH Kota Semarang untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100,00 persen								BAGIAN TATA USAHA
		Perjalanan Dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100,00 persen								BAGIAN TATA USAHA
		Kegiatan Peringatan HUT RI	100,00 persen								BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan dan perlengkapan kantor berbasis Teknologi informasi	2 paket	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.060.058.184	1.881.467.213	2.674.475.521	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100,00 persen	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	8.730.483.416	11.216.898.025	16.416.359.848	
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas jabatan	3 unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	3 Unit	1.900.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional/lapangan	21 unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	33 Unit	208 Unit	4.527.080.692	6.658.848.472	11.224.542.171	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebelair	66 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 Unit	56 Unit	68 Unit	271.535.833	271.535.833	329.166.057	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor dan mesin lainnya	11 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	57 Unit	812 Unit	1.276.981.147	1.298.496.976	1.879.186.876	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor	1 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	754.885.744	788.016.744	783.464.744	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00 persen	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	10.153.130.772	10.180.474.333	13.273.389.593	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Surat Menyurat	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	163.006.000	163.006.000	163.006.000	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air bersih dan listrik	3 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	6.403.219.632	6.403.219.632	9.640.302.132	BAGIAN RUMAH TANGGA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	1.672.656.439	1.700.000.000	1.555.832.760	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Iuran Forsesdasi	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	1.914.248.701	1.914.248.701	1.914.248.701	BAGIAN TATA USAHA
		Honor TPHL Setda Kota Semarang	100,00 persen								BAGIAN TATA USAHA
		Dokumen kepegawaian PNS di Lingkungan Setda Kota Semarang	100,00 persen								BAGIAN TATA USAHA
		terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	2 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan				BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	20.235.876.858	24.308.024.593	24.407.974.743	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	4 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	169.123.596	169.123.596	169.123.596	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	200 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	221 Unit	221 Unit	3.248.791.512	3.311.041.512	3.311.041.512	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	1.500 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.500 Unit	1.500 Unit	1.500 Unit	121.078.800	121.078.800	121.078.800	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	17 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	14 Unit	14 Unit	12.702.266.022	16.370.582.324	16.600.525.643	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	650 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	650 Unit	740 Unit	740 Unit	2.779.788.694	3.068.570.127	2.964.960.427	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang sesuai dengan kebutuhan	725 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	725 Unit	910 Unit	910 Unit	1.214.828.234	1.267.628.234	1.241.244.765	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100,00 persen	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	4.132.488.432	4.132.488.432	4.761.945.398	
		Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00 persen	Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	182.400.632	182.400.632	92.621.598	BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH	24 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	850.336.800	850.336.800	850.336.800	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Penunjang Operasional KDH dan KDH	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	3.099.751.000	3.099.751.000	3.818.987.000	BAGIAN TATA USAHA
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100,00 persen	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	3.955.000.000	3.955.000.000	3.955.000.000	
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga KDH	12 paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.575.000.000	2.575.000.000	2.575.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	12 paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 indeks	88 indeks	88 indeks	849.666.396	3.528.450.096	3.553.099.908	
		Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	40,00 persen	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen				
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	114.667.937	370.142.887	383.923.287	BAGIAN ORGANISASI
		Pelaksanaan Koordinasi Kelembagaan	1 Dokumen								BAGIAN ORGANISASI
		Pembinaan Pengendalian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen								BAGIAN ORGANISASI
		Dokumen Pendayagunaan Aparatur dan Analisa Jabatan	1 Dokumen								BAGIAN ORGANISASI
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pengelolaan Proses Bisnis	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	367.211.980	2.317.672.300	2.317.672.300	BAGIAN ORGANISASI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Terselenggaranya Inovasi Pelayanan Publik	25 OPD								BAGIAN ORGANISASI
		Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	25 OPD								BAGIAN ORGANISASI
		Pelaksanaan Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik	25 OPD								BAGIAN ORGANISASI
		Pembinaan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen								BAGIAN ORGANISASI
		Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen								BAGIAN ORGANISASI
		Pelaksanaan koordinasi ketatalaksanaan	1 dokumen								BAGIAN ORGANISASI
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	146.581.690	545.397.120	531.616.720	BAGIAN ORGANISASI
X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Kinerja Pemerintah	20 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	221.204.789	295.237.789	319.887.601	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100,00 persen	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	13.585.853.905	14.362.907.905	17.117.907.905	
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.126.880.000	1.274.884.286	1.322.059.286	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.885.460.385	9.183.106.385	11.823.106.385	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.573.513.520	3.904.917.234	3.972.742.234	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD							129.984.475.359	111.905.273.587	112.634.147.228	
4.02	SEKRETARIAT DPRD							63.142.144.720	43.749.684.428	43.749.684.428	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	16 dokumen	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	63.142.144.720	43.749.684.428	43.749.684.428	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	16 dokumen	Jumlah Raperda yang diusulkan	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	19.162.791.094	9.929.408.134	9.929.408.134	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	14 buah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	19.162.791.094	9.929.408.134	9.929.408.134	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100,00%	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100,00%	100,00%	100,00%	13.089.905.484	11.943.794.195	11.943.794.195	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Laporan Penyebarluasan informasi Raperda 300 titik	100,00 persen	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	785.600.000	785.600.000	872.560.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Kajian	100,00 persen	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11 Orang	11 Orang	11 Orang	9.858.730.184	8.712.618.895	8.712.618.895	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tersampainya Informasi melalui Baliho yang terpasang, Penerbitan Majalah Media dialog interaktif TV dan Radio	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.445.575.300	2.445.575.300	2.358.615.300	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	150 dokumen	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	6.063.055.494	7.056.512.974	7.056.512.974	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Reses 150	150 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	6.063.055.494	7.056.512.974	7.056.512.974	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100,00%	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100,00%	100,00%	100,00%	24.826.392.648	14.819.969.125	14.819.969.125	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.276.888.649	12.270.465.126	12.270.465.126	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat dan konsultasi publik Rapat Paripurna	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.549.503.999	2.549.503.999	2.549.503.999	SEKRETARIAT DPRD
X.XX	NON URUSAN							66.842.330.639	68.155.589.159	68.884.462.800	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100,00%	100,00%	100,00%	66.842.330.639	68.155.589.159	68.884.462.800	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100,00%	100,00%	100,00%				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100,00%	persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	9 dokumen	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	33.012.494	33.012.494	33.012.494	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja & Renstra tersusun	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.128.674	10.128.674	10.128.674	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA tersusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.117.280	3.117.280	3.117.280	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.199.030	3.199.030	3.199.030	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA tersusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.392.480	8.392.480	8.392.480	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA tersusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.199.030	3.199.030	3.199.030	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.064.480	3.064.480	3.064.480	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun	1 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.911.520	1.911.520	1.911.520	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100,00%	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100,00%	100,00%	100,00%	7.513.194.569	7.505.994.569	7.300.194.296	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	7.140.519.359	7.140.519.359	6.934.719.086	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	362.871.050	362.871.050	362.871.050	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.708.000	1.008.000	1.008.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6.096.160	1.596.160	1.596.160	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terlindungi	5 buah	Jumlah barang milik daerah yang terlindungi	5 buah	5 buah	5 buah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81 orang	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81 orang	81 orang	81 orang	520.410.000	520.410.000	520.410.000	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek 81 orang	81 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	47 Orang	47 Orang	520.410.000	520.410.000	520.410.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100,00%	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	5.297.189.645	5.999.469.123	5.999.469.123	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik yang digunakan	100,00 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpakai	100,00 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	417.627.845	417.627.845	417.627.845	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	100,00 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	473.413.980	473.413.980	473.413.980	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	100,00 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	323.617.400	323.617.400	323.617.400	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bhn Bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD terbayar	100,00 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	339.944.180	339.944.180	339.944.180	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Jamuan Makan & Minum yang tersedia	100,00 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.151.180.240	2.584.980.240	2.584.980.240	SEKRETARIAT DPRD

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	1 Laporan	1.541.406.000	1.809.885.478	1.809.885.478	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100,00%	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	3.063.167.270	2.941.532.270	2.941.532.270	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100,00 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.929.154.315	1.807.519.315	1.567.182.552	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100,00 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	50 Unit	878.332.835	878.332.835	1.101.782.028	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Ged Ktr/Bangunan Lainnya	100,00 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	25 Unit	255.680.120	255.680.120	272.567.690	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.504.332.256	2.544.332.256	2.544.332.256	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang terpakai	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air dan TV Kabel terbayar	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	167.162.256	167.162.256	167.162.256	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium tenaga kebersihan, pengemudi dan pantry terbayar	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.317.170.000	2.357.170.000	2.357.170.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100,00%	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	2.144.272.760	2.081.407.760	2.081.407.760	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	100,00 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	47 Unit	47 Unit	938.500.000	938.500.000	938.500.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Gedung kantor yang terawat	100,00 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 Unit	248 Unit	248 Unit	340.014.560	340.014.560	340.014.560	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Ketua DPRD terpelihara	100,00 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	561.044.000	561.044.000	561.044.000	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terawat	100,00 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	150 Unit	150 Unit	304.714.200	241.849.200	241.849.200	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	50 orang/bulan	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	50 orang/bulan	50 orang/bulan	50 orang/bulan	44.516.751.645	44.590.930.687	45.525.604.601	
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Laporan Keuangan DPRD	12 bulan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	43.508.088.950	43.515.288.950	44.449.962.864	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	100 bulan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	1.008.662.695	1.075.641.737	1.075.641.737	SEKRETARIAT DPRD
X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tertib Pelayanan Administrasi DPRD	100,00 persen	Tertib Pelayanan Administrasi DPRD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.200.000.000	1.888.500.000	1.888.500.000	
X.XX.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100,00 persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	1.200.000.000	1.888.500.000	1.888.500.000	SEKRETARIAT DPRD
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							27.003.436.010	27.003.436.010	25.318.001.033	
5.01	PERENCANAAN							10.111.857.500	10.262.140.000	11.123.735.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100,00%	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100,00%	100,00%	100,00%	2.317.020.000	2.331.830.000	2.631.830.000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100,00%	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	1.726.030.000	1.708.180.000	1.748.160.000	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	1 Kegiatan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	133.300.000	133.300.000	133.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1 Kegiatan								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	1 Kegiatan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	94.250.000	94.250.000	3.575.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	1 Kegiatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	317.450.000	317.450.000	182.700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	800 Usulan	800 Usulan	132.180.000	132.180.000	38.142.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kel dan Kec	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.048.850.000	1.031.000.000	1.390.443.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJPD	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah dokumen Kajian Perencanaan	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	181.950.000	181.950.000	196.950.000	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	1 Dokumen	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	1 Masukan	1 Masukan	88.000.000	88.000.000	103.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	93.950.000	93.950.000	93.950.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100,00%	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100,00%	100,00%	100,00%	409.040.000	441.700.000	686.720.000	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	147.200.000	147.200.000	429.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	261.840.000	294.500.000	257.720.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	4 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00%	100,00%	7.794.837.500	7.930.310.000	8.491.905.000	
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100,00%	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00%	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00%	100,00%	100,00%				
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00%	100,00%	2.044.350.000	2.099.010.000	2.022.905.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	383.460.000	407.100.000	272.375.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 aplikasi								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.910.000	38.910.000	87.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	846.580.000	912.500.000	974.400.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Renum TMMD	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Penguatan Peran CSR dalam program pemberdayaan masyarakat dan perempuan	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan digitalisasi Arsip Pemerintahan	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Kajian Peningkatan Kampung Tematik menuju Destinasi Wisata	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Ramah Lanjut Usia (2023-2028)	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Perencanaan Kegiatan TOT / Bintek PPRG	1 Kegiatan								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah LP2KD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	773.400.000	740.500.000	688.830.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Kinerja TKPKD	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2019, 2020, 2021	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00%	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00%	100,00%	100,00%	1.880.800.000	1.770.800.000	2.079.500.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	7 Dokumen	11 Dokumen	1.121.000.000	951.000.000	1.000.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kota Semarang	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Pengembangan Sentra Industri di Kota Semarang	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Wisata Berbasis Potensi Lokal	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	302.300.000	362.300.000	329.500.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	279.500.000	442.500.000	634.400.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	178.000.000	15.000.000	115.600.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Fasilitas Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00%	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00%	100,00%	100,00%	3.869.687.500	4.060.500.000	4.389.500.000		
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	2.180.000.000	2.245.000.000	2.254.400.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen RISPK	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Jakstrada SPAM	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Masterplan Sumber Daya Air	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Reviu RAD AMPL	1 Dokumen									BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	4 Laporan	7 Laporan	585.187.500	651.000.000	981.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Fasilitas Pokja PKP dan Forum PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi SPALTD	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	594.500.000	624.000.000	482.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Kajian Sosial dan Ekonomi Semarang Lama	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	2 Perangkat Daerah	2 Laporan	3 Laporan	510.000.000	540.500.000	672.100.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Fasilitas Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							2.047.450.000	2.047.450.000	2.246.290.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelibangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100,00%	Persentase inovasi dan hasil kelibangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	100,00%	2.047.450.000	2.047.450.000	2.246.290.000	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100,00%	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100,00%	100,00%	100,00%	93.500.000	93.500.000	93.500.000	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	93.500.000	93.500.000	93.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100,00%	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	471.400.000	471.400.000	482.170.000	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	471.400.000	471.400.000	482.170.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100,00%	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%	840.800.000	840.800.000	1.050.370.000	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	6 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	420.400.000	420.400.000	397.770.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	420.400.000	420.400.000	652.600.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100,00%	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100,00%	100,00%	100,00%	641.750.000	641.750.000	620.250.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi Lomba Krenova	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000	255.000.000	243.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Money Inventor Krenova	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi	1 Kegiatan								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan lomba krenova	1 Kegiatan								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDA	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	106.250.000	106.250.000	106.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	2 Edisi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	255.000.000	255.000.000	245.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Monev Smart City dan SPBE	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	2 Kegiatan								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.500.000	25.500.000	25.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX	NON URUSAN							14.844.128.510	14.693.846.010	11.947.976.033	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100,00%	100,00%	100,00%	14.844.128.510	14.693.846.010	11.947.976.033	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100,00%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100,00%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	8 Dokumen	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	14.991.560	14.991.560	14.991.560	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	537.480	537.480	537.480	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen RTP Bappeda	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.014.400	3.014.400	3.014.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.534.400	3.534.400	3.534.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.014.400	3.014.400	3.014.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.534.400	3.534.400	3.534.400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.356.480	1.356.480	1.356.480	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda	1 Dokumen								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100,00%	Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100,00%	100,00%	100,00%	12.465.738.490	12.466.429.530	10.014.318.308	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	66 Orang/bulan	61 Orang/bulan	12.101.850.010	12.101.850.010	9.678.914.948	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	363.000.000	363.000.000	334.120.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	296.160	296.160	296.160	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	296.160	987.200	789.760	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	296.160	296.160	197.440	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	92.990.680	92.990.680	21.800.000	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan BinteK / Sosialisasi	6 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang	66 Orang	66 Orang	92.990.680	92.990.680	21.800.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	1.473.365.488	1.289.272.640	1.165.275.165	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	150.194.597	72.880.000	52.480.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	51.180.000	58.130.000	31.075.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	30 Paket	30 Paket	67.456.039	74.960.000	37.600.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	47.113.098	40.602.640	16.120.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	6.000 Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	63.900.000	63.900.000	35.250.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	210 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	489.420.000	486.400.000	316.400.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	8 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	604.101.754	492.400.000	676.350.165	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	154.920.692	188.040.000	92.775.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.440.000	10.440.000	4.440.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	144.480.692	177.600.000	88.335.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100,00%	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100,00%	100,00%	100,00%	642.121.600	642.121.600	638.816.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.313.180	40.313.180	40.313.180	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	29 Unit	368.502.820	368.502.820	368.502.820	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	233.305.600	233.305.600	230.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							167.934.451.827	182.974.364.917	149.331.961.363	
5.02	KEUANGAN							67.635.963.961	82.675.877.051	41.509.244.882	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,22%	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,22%	1,22%	1,22%	63.203.258.455	78.193.171.545	36.972.635.980	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00%	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00%	100,00%	100,00%	3.253.359.150	3.303.359.150	2.946.956.190	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 dokumen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	139.117.766	139.117.766	94.536.716	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	153.317.950	133.317.950	107.667.460	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 persen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	74.575.433	34.575.433	8.208.553	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase RKA perubahan terverifikasi	100,00 persen	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	62.835.410	47.835.410	7.035.410	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase DPA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 persen	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	51 Dokumen	32.112.600	32.112.600	30.257.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk tiap Semester	100,00 persen								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase DPA Perubahan SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00 persen	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	50 Dokumen	51 Dokumen	14.174.910	14.174.910	10.624.910	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD	100,00 persen								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	2 dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	570.935.347	530.935.347	497.705.027	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	435.153.667	415.153.667	399.363.617	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan, buku perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB	3 dokumen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	242.919.203	427.919.203	476.174.203	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.125.029.012	1.125.029.012	986.979.012	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Anggaran Belanja Daerah	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	130.122.042	130.122.042	106.120.042	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase Perencanaan Penganggaran Pembiayaan	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.698.860	110.698.860	59.916.690	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	2 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	200 Orang	162.366.950	162.366.950	162.366.950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100,00%	Persentase Penyerapan Anggaran	100,00%	100,00%	100,00%	2.357.850.765	2.407.850.765	1.953.202.300	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi	22 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	522 Dokumen	522 Dokumen	522 Dokumen	550.562.013	550.562.013	542.336.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Laporan Harian Kasda	6.300 lembar								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penempatan Uang Daerah sebagai Manajemen Kas	12 bulan								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Laporan Pendapatan Transfer	52 dokumen								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Bendel SPD	2 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	215.636.850	215.636.850	206.796.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran	100,00 persen								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	100,00 persen								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	169.669.850	169.669.850	70.275.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Monitoring Penggunaan Silpa dan Penyertaan Modal	100,00 persen								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah kegiatan asistensi, koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	3 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	162.392.310	187.392.310	210.341.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semarang	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	146.409.500	146.409.500	111.071.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Laporan Progres Transaksi Non Tunai	2 dokumen								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai	1 dokumen								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah SP2D di selesaikan	17.222 dokumen	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	137.014.480	162.014.480	154.733.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang di kirim ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan	2 dokumen								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah dan usaha pengembalian kerugian	12 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	312.148.240	312.148.240	64.578.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D denganInstansi Terkait	1.571 Dokumen	1.571 Dokumen	1.571 Dokumen	147.051.075	147.051.075	94.839.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Terealisasinya belanja BPJS dan JKKJKM dan THT	1.456 dokumen								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	6 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	765 Orang	765 Orang	765 Orang	516.966.447	516.966.447	498.232.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00%	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	2.565.029.200	2.615.029.200	1.752.838.500	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51.242.500	51.242.500	31.017.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase hasil rekon dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja pembiayaan, dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	135.215.500	135.215.500	118.995.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulanan/Semesteran tersusun	12 dokumen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	370.929.500	370.929.500	258.986.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD, BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	100,00 persen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	463.096.500	463.096.500	384.831.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	335.491.500	335.491.500	298.117.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	100,00 persen	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.693.500	28.693.500	6.538.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	127.665.500	127.665.500	119.794.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah data yang dikelola	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.957.200	75.957.200	42.022.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia	1 dokumen	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	259.189.000	279.589.000	215.821.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sisdur Keuangan Daerah terkelola	1 dokumen	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	341.596.000	341.596.000	91.439.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	1 dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	350 Orang	180.771.500	210.371.500	121.988.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 kegiatan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	40 Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga	195.181.000	195.181.000	63.286.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	100,00%	100,00%	55.027.019.340	69.866.932.430	30.319.638.990	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Monitoring dan evaluasi SKPD penerima bantuan provinsi	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	27.019.340	27.019.340	27.019.340	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000.000	69.839.913.090	30.292.619.650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	80,48%	Persentase Legalitas Aset	80,48%	80,48%	80,48%	4.432.705.506	4.482.705.506	4.536.608.902	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	100,00%	Persentase Managemen Aset	100,00%	100,00%	100,00%	4.432.705.506	4.482.705.506	4.536.608.902	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 dokumen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	277.830.000	277.830.000	277.830.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	128.000.000	128.000.000	100.667.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	3 dokumen	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	168.000.000	168.000.000	168.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan aset daerah	100,00 persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	372.216.600	372.216.600	397.617.498	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD baru yang diinventarisir	100,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	94.520.000	94.520.000	94.520.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang telah bersertifikat	20.615 sertifikat	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.436.344.097	1.436.344.097	1.424.783.894	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang dinilai	100,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.036.612.190	1.036.612.190	1.139.481.851	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	157.563.608	207.563.608	144.658.608	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	625.394.011	625.394.011	660.009.051	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	102 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	200 Orang	136.225.000	136.225.000	129.041.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX	NON URUSAN							100.298.487.866	100.298.487.866	107.822.716.481	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100.298.487.866	100.298.487.866	107.822.716.481	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100,00%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100,00%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	35.824.480	35.824.480	17.814.380	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6.486.400	6.486.400	2.408.880	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.383.510	6.383.510	4.172.320	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.619.420	7.619.420	4.966.230	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.745.810	4.745.810	3.268.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.619.420	7.619.420	1.608.550	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJP dan dokumen LKPJ	2 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.969.920	2.969.920	1.390.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100,00%	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	12.643.976.046	12.643.976.046	12.376.885.576	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	12.189.075.406	12.189.075.406	11.904.754.936	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	454.300.000	454.300.000	471.530.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.320	300.320	300.320	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.320	300.320	300.320	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100,00%	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	126.213.309	126.213.309	109.595.029	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang	150 Orang	126.213.309	126.213.309	109.595.029	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	1.936.892.444	1.936.892.444	2.459.796.246	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	15.418.188	15.418.188	15.418.188	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	8 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	102.740.854	102.740.854	301.478.314	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	32.731.556	32.731.556	34.648.324	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	170.248.333	170.248.333	170.320.461	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia	8 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.737.600	6.737.600	6.737.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25 jumlah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5.820.180	5.820.180	5.820.180	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	5.500 orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	149 Laporan	149 Laporan	149 Laporan	179.725.000	179.725.000	179.725.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1.693 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	1.000.831.000	1.000.831.000	764.715.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jasa pelayanan kearsipan terpenuhi	100,00 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.898 Dokumen	2.898 Dokumen	2.898 Dokumen	5.998.860	5.998.860	5.998.860	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	416.640.873	416.640.873	974.933.519	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	67.044.200	67.044.200	435.217.320	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeur gedung kantor yang tersedia	80 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	67.044.200	67.044.200	435.217.320	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	84.800.006.400	84.800.006.400	91.528.575.143	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	200.000	200.000	200.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	84.139.506.400	84.139.506.400	90.868.075.143	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	660.300.000	660.300.000	660.300.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100,00%	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	688.530.987	688.530.987	894.832.787	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.326.170	35.326.170	35.326.170	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit	46 Unit	433.041.441	433.041.441	433.041.441	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	250 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	4.035.960	4.035.960	4.035.960	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	pemeliharaan tanaman-tanaman	20 unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	24 Unit	49.480.137	49.480.137	49.480.137	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung	1 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	64.871.000	64.871.000	271.172.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128 Unit	128 Unit	128 Unit	101.776.279	101.776.279	101.776.279	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH							97.046.778.157	97.215.778.157	93.563.253.045	
5.02	KEUANGAN							28.334.173.757	28.210.542.562	26.060.123.789	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10,00%	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10,00%	10,00%	10,00%	28.334.173.757	28.210.542.562	26.060.123.789	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10,00%	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10,00%	10,00%	10,00%	28.334.173.757	28.210.542.562	26.060.123.789	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kajian dan Peraturan Pajak Daerah.	8 kajian/NA	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	22 Dokumen	707.122.891	694.172.891	1.683.374.693	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	1.500 wajib pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4.008.229.871	4.375.579.447	2.665.595.322	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi pendapatan nasional	2 kegiatan								BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada Wajib Pajak Daerah berprestasi	1 kegiatan								BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada WP dan Petugas PBB berprestasi	3 kegiatan								BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah	4 kegiatan								BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah validasi data pajak daerah	1.050 NPWPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	3.859.903.422	3.824.345.227	4.240.988.950	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan pendapatan	12 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.693.658.080	4.693.658.080	3.365.442.780	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Informasi kegiatan dan data pendapatan daerah	2 jenis								BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pengembangan SDM dan sistem informasi	2 jenis								BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah laporan supervisi tentang sistem informasi pendapatan daerah secara elektronik	12 dokumen								BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	1.020 wajib pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86.000 Obyek Pajak	86.000 Obyek Pajak	86.000 Obyek Pajak	260.636.731	260.636.731	196.003.354	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembavaran BPHTB	18.150 wajib pajak								BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	15.750 SKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.180.148.377	3.230.148.377	3.160.413.098	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	589.600 SPPT								BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah dokumen SPPT PBB yang tersampaikan ke wajib pajak	589.600 SPPT								BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	12 kegiatan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	4.004.481.685	3.712.134.109	3.511.358.029	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	7.875 SKPD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1.042.276.590	889.376.590	864.021.670	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan penatausahaan pendapatan daerah	1 kegiatan								BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	1.050 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.190.147.420	5.177.622.420	5.000.932.340	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah konfirmasi tunggakan PBB di 16 kecamatan dan 177 kelurahan	109.140 SPPT								BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB	400.000 lembar								BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan penerimaan pembayaran pada operasi bakti dan operasi sisir PBB	5 kegiatan								BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	150 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.020	25.500.020	25.500.020	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	165 SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	939.665.250	909.465.250	882.549.590	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan peningkatan kepatuhan para wajib pajak	19 kegiatan								BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan pengawasan, pemungutan dan penungguan pajak daerah	9 kegiatan								BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	1 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	417.903.420	417.903.420	463.943.943	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah kegiatan evaluasi pendapatan dan penerapan pendapatan daerah	2 kegiatan								BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX	NON URUSAN							68.712.604.400	69.005.235.595	67.503.129.256	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100,00%	100,00%	100,00%	68.712.604.400	69.005.235.595	67.503.129.256	
		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100,00%	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100,00%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100,00%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	55.411.980	55.411.980	55.411.980	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	13.821.000	13.821.000	13.821.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Dokumen RTP Bapenda	1 Dokumen								BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.145.180	9.145.180	9.145.180	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.093.800	9.093.800	9.093.800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.313.800	8.313.800	8.313.800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.430.200	7.430.200	7.430.200	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.608.000	7.608.000	7.608.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	57.451.142.743	57.451.142.743	55.442.728.234	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/bulan	116 Orang/bulan	116 Orang/bulan	56.349.563.143	56.349.563.143	54.413.398.754	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 Dokumen	76 Dokumen	76 Dokumen	1.097.346.000	1.097.346.000	1.026.280.520	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.411.200	1.411.200	226.560	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.411.200	1.411.200	1.411.200	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.411.200	1.411.200	1.411.200	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100,00%	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	87.042.170	237.042.170	237.551.152	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEMPM 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.620.280	200.620.280	213.527.416	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	1 Dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	36.421.890	36.421.890	24.023.736	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100,00%	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100,00%	100,00%	100,00%	260.073.005	411.564.335	397.444.235	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	1 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	102.925.505	102.925.505	138.197.905	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, Bintek dan Workshop	48 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	46 Orang	86 Orang	157.147.500	308.638.830	259.246.330	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00%	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00%	100,00%	100,00%	3.504.900.784	3.144.964.328	2.832.048.095	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	70.046.760	70.046.760	70.046.760	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45 jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	45 Paket	89.878.109	89.878.109	130.878.109	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	69 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	95 Paket	184.168.209	184.168.209	170.769.655	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	852.351.307	511.414.851	495.157.351	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase langganan Surat Kabar	100,00 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	10.719.999	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2.535 orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	52.650.000	52.650.000	42.862.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	1.051.281.000	1.032.281.000	855.742.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip	1 kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.137.960	37.137.960	82.331.796	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	6 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	1.152.387.439	1.152.387.439	973.539.925	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	1.669.500.259	1.889.623.609	2.908.021.924	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1 jenis		-	-	1 Unit	-	-	451.182.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor tersedia	3 jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	15 Unit	631.974.810	662.519.428	600.249.576	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	24 Unit	1.031.705.269	1.221.284.001	1.850.770.168	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	7 buku	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.820.180	5.820.180	5.820.180	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	100,00%	100,00%	2.480.912.647	2.509.799.490	2.499.080.239	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat kedinasan	19.360 dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	144.000.000	144.000.000	45.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	632.623.440	632.623.440	671.623.120	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 Laporan	168 Laporan	168 Laporan	63.586.457	92.473.300	62.200.669	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.640.702.750	1.640.702.750	1.720.256.450	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	3.203.620.812	3.305.686.940	3.130.843.397	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	131 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 Unit	131 Unit	131 Unit	1.064.380.710	972.235.330	932.126.420	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	135 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	150 Unit	13.318.668	13.318.668	13.318.668	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 Unit	520 Unit	520 Unit	564.089.510	591.209.829	498.562.714	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5 jenis	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	42 Unit	7.294.444	11.330.759	11.330.759	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.518.219.300	1.681.274.174	1.639.186.656	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							35.300.055.466	35.300.055.466	36.552.037.009	
5.03	KEPEGAWAIAN							9.674.001.291	9.749.001.291	9.759.225.292	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239 Persen	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239 Persen	239 Persen	239 Persen	9.674.001.291	9.749.001.291	9.759.225.292	
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100 Persen	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99 Persen	Prosentase akurasi data kepegawaian	99 Persen	99 Persen	99 Persen				
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99 Persen	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99 Persen	99 Persen	99 Persen				
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81 Persen	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81 Persen	81 Persen	81 Persen				
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19 Persen	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19 Persen	19 Persen	19 Persen				
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 Persen	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	2.235.951.478	2.174.968.398	3.130.513.671	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta kegiatan	300 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	51.405.520	51.405.520	31.181.497	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3 Buku								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi CASN	12.000 Orang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.517.957.100	1.344.274.020	1.917.866.001	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	753 Dokumen	753 Dokumen	753 Dokumen	417.997.381	530.697.381	411.112.435	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 Surat Keputusan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	125.026.429	125.026.429	117.278.222	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9.000 Dokumen	9.000 Dokumen	9.000 Dokumen	123.565.048	123.565.048	653.075.516	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Layanan pengurusan kartu istri	1.000 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Layanan pengurusan kartu suami	1.000 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1.000 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Layanan update data pegawai	10.000 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan arsip pegawai	10.000 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Layanan kartu pegawai	300 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Layanan cetak id card	1.150 buah									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3.147.966.060	3.147.966.060	2.652.899.600		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1 Kali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	578.084.000	578.084.000	525.919.000		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Mutasi Intern PNS	12 Bulan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Perubahan Jabatan ASN	12 Bulan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Tes Mutasi Masuk PNS	3 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2 Kali	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.300 Dokumen	1.300 Dokumen	1.300 Dokumen	465.387.770	465.387.770	465.387.770		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4 Bulan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4 Bulan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12 Bulan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	2.104.494.290	2.104.494.290	1.661.592.830		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	1 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penilaian mandiri sistem merit	1 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Tim Penilai kinerja PNS	12 Bulan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Uji kompetensi JPT Pratama	1 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelantikan struktural	3 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Uji Kompetensi Administrasi	4 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.794.495.753	2.844.495.753	2.604.091.058		
		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300 Orang	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	500 Orang	500 Orang	500 Orang	1.175.733.813	1.225.733.813	1.308.559.820		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah peserta motivasi/ achievement/capacity building	100 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1 Buku								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1 Buku								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penyelesaian ijin belajar	12 Bulan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	1.242.565.450	1.242.565.450	994.565.450	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelesaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12 Bulan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelaksanaan UKPPI	1 Kegiatan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelaksanaan ujian dinas	1 Kegiatan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karir PNS	1 Kegiatan	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	100 Orang	100 Orang	266.577.960	266.577.960	191.347.258	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Kenaikan jabatan fungsional	3 Kegiatan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pembekalan jabatan fungsional	2 Kegiatan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Update data jabatan fungsional	3 Kegiatan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20 Orang	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 Orang	300 Orang	300 Orang	109.618.530	109.618.530	109.618.530	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1.000 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.495.588.000	1.581.571.080	1.371.720.963	
		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	285.220.276	285.220.276	196.614.026	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12 Bulan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Monev penilaian kinerja ASN	1 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pelaksanaan konseling	12 Bulan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	771.598.685	832.581.765	758.315.945		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelaksanaan senam pegawai	22 Kali									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1 Buku									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20 Orang									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30 Orang									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200 Piagam									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40 berkas									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9 Orang									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Sosialisasi TPP	2 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Verifikasi e-cuti	250 berkas									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50 berkas									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80 Kegiatan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	900 Orang	900 Orang	900 Orang	350.864.210	375.864.210	337.214.957		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelepasan haji	1 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Bimbingan mental	10 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pembekalan disiplin	2 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Sosialisasi LHKASN	2 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Sosialisasi LHKPN	1 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemrosesan penghadapan PNS yang diminta keterangan oleh APH	65 Orang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	71.111.430	71.111.430	67.132.636		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2 Kasus									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Inspeksi Mendadak (Sidak)	12 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1 Kegiatan									BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24 Dokumen								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Memperosesan ijin perceraian	28 Kasus	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	16.793.399	16.793.399	12.443.399	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							8.605.345.000	8.605.345.000	7.785.134.560	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40 Persen	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40 Persen	40 Persen	40 Persen	8.605.345.000	8.605.345.000	7.785.134.560	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.694.660.000	1.694.660.000	1.988.586.560	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1 Kegiatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	68.573.020	68.573.020	37.949.080	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1 Kegiatan	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	289.336.880	289.336.880	283.593.650	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1 Kegiatan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621 Orang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	306 Orang	306 Orang	306 Orang	1.197.480.000	1.197.480.000	1.549.943.830	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Evaluasi Pasca Diklat	1 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	139.270.100	139.270.100	117.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.910.685.000	6.910.685.000	5.796.548.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1.000 Orang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	6.910.685.000	6.910.685.000	5.796.548.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35 Orang								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX	NON URUSAN							17.020.709.175	16.945.709.175	19.007.677.157	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	17.020.709.175	16.945.709.175	19.007.677.157	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100 Persen	Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
		Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	31.176.800	31.366.537	31.366.537	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.040.380	1.314.914	1.314.914	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah Dokumen RTP	1 Dokumen								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.717.290	6.324.765	6.324.765	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.717.290	5.834.367	5.834.367	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.805.030	7.388.206	7.388.206	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1 Dokumen								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.717.290	6.324.765	6.324.765	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.179.520	4.179.520	4.179.520	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	12.031.789.226	12.031.789.226	11.802.428.950	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji, tunjangan dan TPP ASN	12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	11.672.312.466	11.672.312.466	11.470.647.190	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	357.095.000	357.095.000	329.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	596.480	596.480	596.480	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	695.200	695.200	695.200	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.090.080	1.090.080	1.090.080	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	137.585.991	155.349.606	155.349.606	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek internal	115 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120 Orang	120 Orang	137.585.991	155.349.606	155.349.606	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.674.090.466	1.759.609.426	2.876.572.634	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	55.585.170	55.585.170	90.982.810	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	268.844.200	268.844.200	385.334.428	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	99.229.200	99.229.200	99.229.200	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan barang cetak dan Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	101.144.550	101.144.550	101.144.550	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.940.060	1.940.060	1.940.060	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.732.500	120.750.000	120.750.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	377.229.692	443.024.577	411.612.577	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	669.385.094	669.091.669	1.665.579.009	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	106.837.850	108.303.552	1.153.373.790	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	106.837.850	108.303.552	1.153.373.790	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3 Kegiatan	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.894.145.407	1.739.207.393	1.666.744.165	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	459.402.759	459.402.759	386.939.531	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	329.057.848	327.695.834	327.695.834	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan								BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.105.684.800	952.108.800	952.108.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.145.083.435	1.120.083.435	1.321.841.475	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.313.180	40.313.180	40.313.180	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	33 Unit	509.651.239	509.651.239	509.651.239	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit	300 Unit	300 Unit	73.696.630	73.696.630	73.696.630	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	521.422.386	496.422.386	698.180.426	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT							27.889.644.124	27.889.644.124	26.994.738.434	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								7.975.348.523	7.971.889.103	7.381.823.463	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 leveling	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 leveling	3 leveling	3 leveling	2.949.636.853	2.949.036.853	2.712.407.863		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggarakannya pengawasan internal	100 Persentase	Persentase Terselenggarakannya pengawasan internal	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	2.494.124.703	2.493.524.703	2.256.975.394		
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	87 Persentase	Persentase Tindak Lanjut Temuan	87 Persentase	87 Persentase	87 Persentase					
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	50 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	236.374.169	236.374.169	180.754.000	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	100 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	498.715.364	498.715.364	484.847.440	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja Kota Semarang	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	307.628.600	307.628.600	183.028.600	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan Kota Semarang	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.040.000	59.440.000	105.456.000	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	jumlah kegiatan kerjasama pengawasan internal (RIKMA BPKP, Saber Pungli dan Rakorwastas)	15 Kegiatan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	15 Kesepakatan	15 Kesepakatan	15 Kesepakatan	1.142.515.135	1.142.515.135	1.075.315.135	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kegiatan TL LHP, Rakorwas dan Larwasda	15 Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dokumen	15 Kegiatan	15 Kegiatan	248.851.435	248.851.435	227.574.219	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100,00 persentase	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	455.512.150	455.512.150	455.432.469		
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	2 laporan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	107.029.950	107.029.950	107.020.690	INSPEKTORAT	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pemeriksaan khusus, kasus dan aduan yang ditangani	100 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	348.482.200	348.482.200	348.411.779	INSPEKTORAT	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3 nilai	Nilai Maturitas SPIP	3 nilai	3 nilai	3 nilai	5.025.711.670	5.022.852.250	4.669.415.600		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	100,00 persentase	Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	100,00 persentase	100,00 persentase	100,00 persentase	363.834.420	361.323.800	272.105.400		
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang pengawasan yang berhasil disusun (Program kerja berbasis resiko, Peta audit RR dan RTP Inspektorat)	3 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	68.421.400	68.421.400	50.285.400	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang berhasil disusun (SPIP, monitoring RR dan RTP Tk. Kota, WBS / benturan Kepentingan)	3 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	295.413.020	292.902.400	221.820.000	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Indeks penerapan manajemen risiko	2 Indeks	Indeks penerapan manajemen risiko	2 Indeks	2 Indeks	2 Indeks	4.661.877.250	4.661.528.450	4.397.310.200		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan konsultasi ke OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Pendampingan DPRD	51 kegiatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	696.330.000	696.330.000	612.930.000	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi PMPRB dan ZI	4 Kegiatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	485.151.100	484.802.300	276.262.300	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi (SPAK, Laporan Gratifikasi, Korsupgah, LHKASN, UPG)	5 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	3.344.596.750	3.344.596.750	3.372.905.000	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan Survey Penilaian Integritas	1 Kegiatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	64 perangkat daerah	64 perangkat daerah	64 perangkat daerah	135.799.400	135.799.400	135.212.900	INSPEKTORAT	
X.XX	NON URUSAN							19.914.295.601	19.917.755.021	19.612.914.971		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	19.914.295.601	19.917.755.021	19.612.914.971		
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat	100,00%	100,00%	100,00%					
		persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat	100,00%	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat	100,00%	100,00%	100,00%					

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100,00%	Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	15 dokumen	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	32.174.500	36.670.758	36.670.758	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Renstra, RKT, IKU, PK (Murni dan Perubahan)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	13.544.580	13.544.580	13.544.580	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Murni	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.414.580	5.292.161	5.292.161	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.414.580	5.409.019	5.409.019	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Murni	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.707.290	4.629.799	4.629.799	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.707.290	5.409.019	5.409.019	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.386.180	2.386.180	2.386.180	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD 100%	100,00%	Persentase administrasi keuangan SKPD 100%	100,00%	100,00%	100,00%	12.746.237.804	12.745.200.964	13.104.368.858	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	12.451.857.124	12.451.857.124	12.811.105.018	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	288.040.000	288.040.000	287.960.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.617.280	3.617.280	3.617.280	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2.209.000	1.090.080	1.090.080	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	514.400	596.480	596.480	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100,00%	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100,00%	100,00%	100,00%	1.844.767.600	1.844.767.600	1.702.914.840	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase APIP yang mnngikuti Diklat berdasarkan tugas dan fungsi	100,00 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	225 Orang	225 Orang	225 Orang	1.160.777.600	1.160.777.600	1.037.524.840	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase APIP yang mengikuti Bimtek dibidang peraturan perundang-undangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	225 Orang	225 Orang	225 Orang	683.990.000	683.990.000	665.390.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00%	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00%	100,00%	100,00%	2.806.354.980	2.806.354.982	2.478.350.052	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	27 Paket	184.136.639	184.136.639	107.879.459	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 Paket	75 Paket	75 Paket	89.008.516	89.008.516	88.847.017	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	17 Paket	210.257.745	210.257.745	152.193.645	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	10 Buku	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.982.068	5.982.068	1.724.560	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1.200 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	245.700.000	245.700.000	85.050.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	876.938.000	876.938.002	668.726.002	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	350 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	323.220.904	323.220.904	280.556.208	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung SPBE pada SKPD	3 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	871.111.108	871.111.108	1.093.373.161	INSPEKTORAT

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	1.832.255.527	1.832.255.527	1.649.625.273	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	5 unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.326.386.217	1.326.386.217	1.326.386.217	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan sarana prasarana mebeleur	3 Jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	30 Unit	137.815.443	137.815.443	51.587.557	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras pendukung gedung kantor	3 Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	70 Unit	70 Unit	70 Unit	368.053.867	368.053.867	271.651.499	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	18.780.000	18.780.000	7.260.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.780.000	18.780.000	7.260.000	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00%	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	633.725.190	633.725.190	633.725.190	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas jabatan	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.668.180	36.668.180	36.668.180	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	36 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	36 Unit	348.386.120	348.386.120	348.386.120	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeleur	3 jenis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	250 Unit	250 Unit	250 Unit	10.530.800	10.530.800	10.530.800	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	3 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	120 Unit	120 Unit	157.470.605	157.470.605	157.470.605	INSPEKTORAT
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	70 Unit	70 Unit	80.669.485	80.669.485	80.669.485	INSPEKTORAT
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN							38.419.238.041	38.937.363.041	38.821.782.141	
7.01	KECAMATAN							26.551.798.100	27.103.200.700	25.750.368.407	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	2.543.940.100	2.700.142.700	2.671.187.770	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	95.446.800	76.346.800	60.477.550	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	95.446.800	76.346.800	60.477.550	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.538.850.000	1.666.920.400	1.653.834.720	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.538.850.000	1.666.920.400	1.653.834.720	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	12 kegiatan								KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulustalan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BULUSTALAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Barusari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BARUSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randusari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN RANDUSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mugassari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN MUGASSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pleburan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PLEBURAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonodri	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN WONODRI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Peterongan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PETERONGAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper lor	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN LAMPER LOR
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Kidul	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Tengah	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	909.643.300	956.875.500	956.875.500	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4 kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	909.643.300	956.875.500	956.875.500	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 persen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 persen	98,00 persen	98,00 persen	23.836.928.000	24.232.128.000	22.908.250.637	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	13.222.800.000	13.628.200.000	12.562.923.527	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	363 kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga	100.950.000	106.350.000	97.350.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10.912.850.000	10.912.850.000	10.869.528.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	13 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	14 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	9 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN WONODRI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN LAMPER KIDUL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	16 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit				KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2.209.000.000	2.609.000.000	1.596.045.527	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	26 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	30 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	27 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	27 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	27 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	30 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN WONODRI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	30 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	31 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	29 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	27 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	8 dokumen	6 dokumen	10.614.128.000	10.603.928.000	10.345.327.110	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga	10.564.550.000	10.564.550.000	10.305.949.110	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BULUSTALAN
		-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BARUSARI
		-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN RANDUSARI
		-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN MUGASSARI
		-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PLEBURAN
		-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN WONODRI
		-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PETERONGAN
		-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN LAMPER LOR
		-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN LAMPER KIDUL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan					KELURAHAN LAMPER TENGAH
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	49.578.000	39.378.000	39.378.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2 kegiatan									KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen	87.930.000	87.930.000	87.930.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52 angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52 angka	52 angka	52 angka	87.930.000	87.930.000	87.930.000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	87.930.000	87.930.000	87.930.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	83.000.000	83.000.000	83.000.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	83.000.000	83.000.000	83.000.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	60 Orang	83.000.000	83.000.000	83.000.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX	NON URUSAN							11.867.439.941	11.834.162.341	13.071.413.734		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	11.867.439.941	11.834.162.341	13.071.413.734		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100,00%	100,00%	100,00%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	18.999.200	12.267.660	12.267.660		
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.222.600	1.242.600	1.242.600		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Dokumen RTP	1 dokumen									KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000	2.004.510	2.004.510		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.760.700	2.200.420	2.200.420		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000	2.004.510	2.004.510		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.320.700	2.200.420	2.200.420		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.121.600	1.281.600	1.281.600		KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.173.600	1.333.600	1.333.600	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	10.664.562.841	10.661.622.841	11.836.564.145	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	10.346.738.041	10.346.738.041	11.521.679.345	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	311.040.000	311.040.000	311.040.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.261.600	1.281.600	1.281.600	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	2.261.600	1.281.600	1.281.600	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.261.600	1.281.600	1.281.600	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100 Persen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	375.442.400	408.837.040	446.530.029	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.811.900	11.811.900	11.811.900	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.900.000	49.333.000	53.700.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.637.900	40.669.300	42.847.150	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	39.746.600	45.363.240	32.216.210	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2.833 orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	61.800.000	78.677.600	75.077.600	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	250 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78.946.000	86.914.000	72.396.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	1 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	96.600.000	96.068.000	158.481.169	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	31.500.000	10.492.000	46.200.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	31.500.000	10.492.000	46.200.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	224.280.000	229.238.500	218.147.600	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	109.500.000	118.500.000	118.500.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	114.780.000	110.738.500	99.647.600	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00 persen	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	552.655.500	511.704.300	511.704.300	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	40 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	36 Unit	235.900.000	235.900.000	235.900.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	1 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	11 Unit	74.700.000	88.149.800	88.149.800	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.965.500	13.564.500	13.564.500	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	1 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	209.090.000	174.090.000	174.090.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SEMARANG UTARA							42.868.026.091	43.386.151.091	42.710.841.869	
7.01	KECAMATAN							31.015.855.660	31.517.223.314	30.300.846.710	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	3.066.793.880	3.236.179.394	3.243.093.735	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 Kegiatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	65 Kegiatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.063.793.880	3.233.179.394	3.240.093.735	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	3.063.793.880	3.233.179.394	3.240.093.735	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100 Persen								KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100 Persen								KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PLOMBOKAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BULU LOR
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan				KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KUNINGAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Kidul	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan				KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BANDARHARJO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TANJUNG MAS
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Dadapsari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN DADAPSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 Persen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 Persen	98 Persen	98 Persen	27.873.761.780	28.180.922.492	26.942.631.547	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321 Kegiatan	321 Kegiatan	321 Kegiatan	12.651.561.780	12.901.579.636	12.147.045.783	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	105 Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	53.561.780	53.561.780	53.561.780	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	10.948.000.000	10.948.000.000	10.902.740.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	16 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit				KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit				KELURAHAN BULU LOR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN TANJUNG MAS
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN DADAPSARI
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.650.000.000	1.900.017.856	1.190.744.003	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TANJUNG MAS
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN DADAPSARI
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50 Dokumen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	15.222.200.000	15.279.342.856	14.795.585.764	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	14.422.200.000	14.479.342.856	13.991.147.764	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	6 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	6 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	6 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	6 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Pangung Lor	6 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Pangung Kidul	6 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	6 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	6 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TANJUNG MAS
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	6 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN DADAPSARI
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	800.000.000	800.000.000	804.438.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	15 Persen	15 Persen	5.550.000	5.550.000	20.550.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	40 kegiatan	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	40 kegiatan	40 kegiatan	40 kegiatan	5.550.000	5.550.000	20.550.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.550.000	5.550.000	20.550.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	92 Persen	92 Persen	69.750.000	94.571.428	94.571.428	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10 Angka	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10 Angka	10 Angka	10 Angka	69.750.000	94.571.428	94.571.428	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Orang	480 Orang	480 Orang	69.750.000	94.571.428	94.571.428	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX	NON URUSAN							11.852.170.431	11.868.927.777	12.409.995.159	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	11.852.170.431	11.868.927.777	12.409.995.159	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100,00%	Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100,00%	100,00%	100,00%				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	12.156.060	12.156.060	12.156.060	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.562.600	5.562.600	5.562.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang utara	1 Dokumen								KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.049.510	2.049.510	2.049.510	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.120.420	1.120.420	1.120.420	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.049.510	2.049.510	2.049.510	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.120.420	1.120.420	1.120.420	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	253.600	253.600	253.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.372.987.491	11.372.987.491	11.744.853.384	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	10.830.605.091	10.830.605.091	11.202.470.984	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63 Dokumen	63 Dokumen	63 Dokumen	539.560.000	539.560.000	539.560.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 Persen								KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	201.600	201.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.419.200	2.419.200	2.419.200	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	201.600	201.600	201.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	162.808.850	135.005.680	284.560.079	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	17 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	17 Paket	4.186.200	4.186.200	53.182.920	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	13 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	16 Paket	82.758.880	43.207.580	134.976.939	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	48 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	48 Paket	48 Paket	14.846.770	26.594.900	26.594.900	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	2.517.000	2.517.000	4.695.150	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	65 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	41.400.000	41.400.000	44.325.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat yang terselenggara	70 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	17.100.000	17.100.000	20.785.170	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	177.000.000	177.000.000	180.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	177.000.000	177.000.000	180.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	127.218.030	171.778.546	188.425.636	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Angka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	99.327.180	99.327.180	99.327.180	KECAMATAN SEMARANG UTARA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	14 Jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	20.000.000	28.233.280	43.085.800	KECAMATAN SEMARANG UTARA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit	26 Unit	7.890.850	44.218.086	46.012.656	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SEMARANG BARAT							61.368.563.101	61.886.688.101	62.606.119.168	
7.01	KECAMATAN							43.894.762.920	44.538.577.091	43.432.204.583	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	92 Persen	92 Persen	4.079.931.398	4.198.056.398	4.200.423.998	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2 Angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2 Angka	2 Angka	2 Angka	2.850.778.023	2.850.778.023	2.850.778.023	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.850.778.023	2.850.778.023	2.850.778.023	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.210.128.452	1.328.253.452	1.330.621.052	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.210.128.452	1.328.253.452	1.330.621.052	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	4 Kegiatan								KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngemplak Simongan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN NGENEMPLAK SIMONGAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Manyaran	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN MANYARAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Krapyak	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KRAPYAK
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakharjo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalibanteng Kulon	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalibanteng Kidul	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gisikdrono	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN GISIKDRONO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bong Sari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BONGSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bojongsalaman	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Salamnmloyo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cabean	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN CABEAN
			-								KELURAHAN CABEAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangayu	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KARANGAYU
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Krobokan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KROBOKAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawang Sari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TAWANGSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawangmas	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TAWANGMAS

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembangarum	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	19.024.923	19.024.923	19.024.923	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang Dilimpahkan di Kecamatan	5 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.024.923	19.024.923	19.024.923	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98 Persen	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98 Persen	98 Persen	98 Persen	39.716.555.539	40.242.244.710	39.133.504.602	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	20.111.134.978	20.629.959.138	19.749.237.568	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	76.280.480	76.280.480	70.205.480	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	16 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16.943.000.000	16.943.000.000	16.943.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Nsemplak Simongan	16 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit				KELURAHAN NSEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Manyaran	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN MANYARAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krapyak	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit				KELURAHAN KRAPYAK
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tambakharjo	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kulon	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kidul	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Gisikdrono	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN GISIKDRONO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bongsari	16 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit				KELURAHAN BONGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bojongsalaman	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Salamanmlovo	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Cabean	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit				KELURAHAN CABEAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Karangayu	13 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN KARANGAYU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krobokan	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN KROBOKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawangsari	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN TAWANGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawangmas	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit				KELURAHAN TAWANGMAS
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kembangarum	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN KEMBANGARUM

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	107 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107 Pokmas / Ormas	107 Pokmas / Ormas	107 Pokmas / Ormas	3.091.854.498	3.610.678.658	2.736.032.088	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngeplak Simongan	10 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				KELURAHAN NGEPLAK SIMONGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manyaran	6 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				KELURAHAN MANYARAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krapyak	7 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KRAPYAK
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakharjo	10 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kulon	7 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kidul	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gisikdrono	4 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN GISIKDRONO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bongsari	8 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BONGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bojongsalaman	6 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Salamanmloyo	8 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cabean	6 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				KELURAHAN CABEAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangayu	7 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KARANGAYU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krobokan	4 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KROBOKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawang Sari	7 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TAWANGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangmas	4 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TAWANGMAS
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembangarum	5 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17 Dokumen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	19.605.420.561	19.612.285.572	19.384.267.034	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	17 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	19.595.900.472	19.595.900.472	19.373.636.234	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Ngeplak Simongan	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN NGEPLAK SIMONGAN
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Manyaran	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN MANYARAN
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Krapyak	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KRAPYAK
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Tambakharjo	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Kalibanteng Kulon	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Kalibanteng Kidul	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Gisikdrono	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN GISIKDRONO
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bongsari	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BONGSARI
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bojongsalaman	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Salamamlowo	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Cabean	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN CABEAN
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Karangayu	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KARANGAYU
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Krobokan	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KROBOKAN
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Tawang Sari	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TAWANGSARI
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Tawangmas	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TAWANGMAS
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Kembangarum	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KEMBANGARUM
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	16 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	9.520.089	16.385.100	10.630.800	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan								KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	15 Persen	15 Persen	14.232.061	14.232.061	14.232.061	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 Angka	20 Angka	20 Angka	14.232.061	14.232.061	14.232.061	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	14.232.061	14.232.061	14.232.061	KECAMATAN SEMARANG BARAT

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	92 Persen	92 Persen	84.043.922	84.043.922	84.043.922	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5 Angka	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5 Angka	5 Angka	5 Angka	84.043.922	84.043.922	84.043.922	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	84.043.922	84.043.922	84.043.922	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX	NON URUSAN							17.473.800.181	17.348.111.010	19.173.914.585	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	17.473.800.181	17.348.111.010	19.173.914.585	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	11.291.637	11.291.637	11.291.637	
		Dokumen pelaporan	2 Dokumen	Dokumen pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.566.286	1.566.286	1.566.286	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang Barat	1 Dokumen								KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.735.291	1.735.291	1.735.291	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.114.331	2.114.331	2.114.331	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.091.788	2.091.788	2.091.788	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.895.173	1.895.173	1.895.173	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.151.290	1.151.290	1.151.290	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	737.478	737.478	737.478	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.585.787.196	15.585.787.196	17.386.962.950	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	14.725.508.393	14.725.508.393	16.633.044.147	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	857.000.000	857.000.000	750.640.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan akhir tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.262.093	1.262.093	1.262.093	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.008.355	1.008.355	1.008.355	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.008.355	1.008.355	1.008.355	KECAMATAN SEMARANG BARAT

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	390.545.824	509.315.767	577.241.799	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	68.270.200	120.779.000	80.229.940	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	50.850.465	66.279.743	34.521.932	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	45.250.104	54.613.789	81.630.429	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	28.777.404	33.692.240	35.663.514	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.651.616	57.521.960	92.821.500	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.650.000	107.333.000	113.708.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	69.096.035	69.096.035	138.666.484	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	508.840.275	249.889.741	256.971.580	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	337.565.687	241.629.875	228.497.580	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	171.274.588	8.259.866	28.474.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	201.300.616	216.674.869	216.674.869	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	163.887.840	180.966.979	180.966.979	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	37.412.776	35.707.890	35.707.890	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	776.034.633	775.151.800	724.771.750	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	58 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	58 Unit	58 Unit	587.051.950	587.051.950	587.051.950	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	2 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	130.570.585	130.524.550	80.144.500	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	36.194.038	35.357.240	35.357.240	KECAMATAN SEMARANG BARAT
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	22.218.060	22.218.060	22.218.060	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR							41.634.104.531	41.752.229.531	41.411.257.190	
7.01	KECAMATAN							28.588.753.499	28.704.520.699	27.745.373.877	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	3.080.253.499	3.196.020.699	3.096.047.599	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	1 angka	1 angka	70.607.920	68.250.120	45.503.120	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	70.607.920	68.250.120	45.503.120	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	2.005.048.104	2.123.173.104	2.055.952.304	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.005.048.104	2.123.173.104	2.055.952.304	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	4 kegiatan								KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemijen	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KEMIJEN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejomulyo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN REJOMULYO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatibaru	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN MLATIBARU
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatiharjo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN MLATIHARJO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebonaung	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KEBONAGUNG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bugangan	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BUGANGAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sarirejo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SARIREJO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN REJOSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangturi	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KARANGTURI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangtempel	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.004.597.475	1.004.597.475	994.592.175	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.004.597.475	1.004.597.475	994.592.175	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98,00 persen	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98,00 persen	98,00 persen	98,00 persen	25.385.200.000	25.385.200.000	24.496.026.278	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	391 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	391 kegiatan	391 kegiatan	327 kegiatan	13.422.000.000	13.422.000.000	12.763.609.856	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	391 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94 Lembaga Kemasyarakatan	94 Lembaga	94 Lembaga	65.000.000	65.000.000	65.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	11.167.000.000	11.167.000.000	11.172.800.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kemijen	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Rejomulyo	13 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mlatibaru	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mlatiharjo	8 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit				KELURAHAN MLATIHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kebonaung	8 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit				KELURAHAN KEBONAGUNG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Bugangan	9 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sarirejo	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN SARIREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Rejosari	14 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karangturi	17 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit				KELURAHAN KARANGTURI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karangtempel	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	2.190.000.000	2.190.000.000	1.525.809.856	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemijen	21 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas				KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	24 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas				KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	22 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas				KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatiharjo	19 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas				KELURAHAN MLATIHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebonagung	26 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas				KELURAHAN KEBONAGUNG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugangan	23 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas				KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	22 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas				KELURAHAN SARIREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejosari	23 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas				KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangturi	27 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas				KELURAHAN KARANGTURI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangtempel	28 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	94 dokumen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	94 dokumen	94 dokumen	8 dokumen	11.963.200.000	11.963.200.000	11.732.416.422	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang dilaporkan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	11.913.200.000	11.913.200.000	11.682.416.422	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan Kelurahan Kemijen	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan kelurahan Rejomulyo	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan kelurahan Mlatibaru	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan kelurahan Mlatiharjo	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN MLATIHARJO
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan kelurahan Kebonagung	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KEBONAGUNG
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan kelurahan Bugangan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan kelurahan Sarirejo	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN SARIREJO
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan kelurahan Rejosari	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan kelurahan Karangturi	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KARANGTURI
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan kelurahan Karangtempel	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KARANGTEMPEL
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 kelurahan								KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen	35.000.000	35.000.000	65.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	35 angka	35 angka	35.000.000	35.000.000	65.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 angka	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	35.000.000	35.000.000	65.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	88.300.000	88.300.000	88.300.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	88.300.000	88.300.000	88.300.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	88.300.000	88.300.000	88.300.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX	NON URUSAN							13.045.351.032	13.047.708.832	13.665.883.313	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	13.045.351.032	13.047.708.832	13.665.883.313	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPDEM 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan	10 dokumen	Jumlah Dokumen pelaporan	10 dokumen	10 dokumen	2 dokumen	25.058.043	23.354.720	14.034.720	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4.141.123	2.437.800	487.800	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Dokumen RTP	1 Dokumen								KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.702.950	4.702.950	3.202.950	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.261.150	4.261.150	2.761.150	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumrn	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.702.950	4.702.950	3.182.950	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.261.150	4.261.150	2.741.150	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.079.360	1.079.360	699.360	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.909.360	1.909.360	959.360	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	10.877.152.083	10.877.152.083	11.900.402.210	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	64 Orang/bulan	10.343.477.531	10.343.477.531	11.368.083.810	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	528.560.000	528.560.000	528.560.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.157.760	3.157.760	3.157.760	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.060.320	1.060.320	300.320	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	896.472	896.472	300.320	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	851.408.680	850.035.798	785.029.287	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.000.000	8.000.000	10.141.540	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	5 Paket	301.500.395	274.459.685	209.431.420	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	48.080.755	49.268.755	41.793.649	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	12.966.770	14.136.570	19.066.084	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2.040 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	118.609.958	120.313.281	96.109.958	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	182.930.474	182.930.474	130.831.874	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	179.320.328	200.927.033	277.654.762	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	37.467.640	37.467.640	37.467.640	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	3 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	28 Unit	28 Unit	37.467.640	37.467.640	37.467.640	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	635.546.316	537.980.321	212.831.186	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	269.599.756	269.599.756	169.599.756	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	365.946.560	268.380.565	43.231.430	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100,00 persen	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	618.718.270	721.718.270	716.118.270	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	26 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	26 Unit	177.717.970	177.717.970	177.717.970	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	122.032.710	122.032.710	116.432.710	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	220.898.860	323.898.860	323.898.860	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	98.068.730	98.068.730	98.068.730	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH							51.222.538.734	51.740.663.734	53.265.746.578	
7.01	KECAMATAN							33.272.941.727	33.774.488.517	32.364.542.040	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	3.597.428.550	3.697.342.300	3.694.902.300	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	24.620.000	24.620.000	24.620.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	24.620.000	24.620.000	24.620.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	2.462.923.381	2.562.837.131	2.562.837.131	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.462.923.381	2.562.837.131	2.562.837.131	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 Kegiatan								KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN MIROTO
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN JAGALAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN KRANGGAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN GABAHAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN KEMBANGSARI
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekayu	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN SEKAYU
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN PANDANSARI
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN BANGUNHARJO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN KAUMAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN PURWODINATAN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN KARANGKIDUL
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN PEKUNDEN
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.109.885.169	1.109.885.169	1.107.445.169	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	2 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.109.885.169	1.109.885.169	1.107.445.169	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	92 Persen	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	92 Persen	92 Persen	92 Persen	29.570.558.177	29.972.191.217	28.564.684.740	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827 kegiatan	827 kegiatan	827 kegiatan	29.394.982.756	29.796.615.796	28.405.313.792	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	220 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	57.900.000	57.900.000	16.558.050	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	9 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	15.400.000.000	15.400.000.000	15.210.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	13 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN MIROTO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	13 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	17 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit				KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN KEMBANGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN PANDANSARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	18 Unit	18 Unit				KELURAHAN PURWODINATAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN PEKUNDEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	13 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Lor	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	13.937.082.756	14.338.715.796	13.178.755.742	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	67 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN MIROTO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	67 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	57 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	66 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	61 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	71 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KEMBANGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	68 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	64 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PANDANSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	57 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BANGUNHARJO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	57 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	64 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PURWODINATAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	73 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	64 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PEKUNDEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	63 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	62 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PENDRIKAN LOR
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	175.575.421	175.575.421	159.370.948	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	15 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 lembaga	4 lembaga	135.549.538	135.549.538	128.813.348	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.025.883	40.025.883	30.557.600	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan								KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Persen	12 Persen	12 Persen	22.500.000	22.500.000	22.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	34 angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	34 angka	34 angka	34 angka	22.500.000	22.500.000	22.500.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	22.500.000	22.500.000	22.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30,00 persen	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30,00 persen	30,00 persen	30,00 persen	82.455.000	82.455.000	82.455.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	82.455.000	82.455.000	82.455.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	45 Orang	45 Orang	82.455.000	82.455.000	82.455.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX	NON URUSAN							17.949.597.007	17.966.175.217	20.901.204.538	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	17.949.597.007	17.966.175.217	20.901.204.538	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPDEM 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20 dokumen	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	43.740.000	43.740.000	43.740.000	
		Jumlah Dokumen pelaporan	14 dokumen	Jumlah Dokumen pelaporan	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.380.000	6.380.000	6.380.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	1 dokumen								KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000	5.400.000	5.400.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000	5.400.000	5.400.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.580.000	3.580.000	3.580.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.580.000	3.580.000	3.580.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 berkas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.160.000	16.160.000	16.160.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.240.000	3.240.000	3.240.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	8 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	16.602.419.734	16.636.019.734	18.558.463.888	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	15.892.729.734	15.892.729.734	17.815.173.888	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	700.020.000	733.620.000	733.620.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.660.000	3.660.000	3.660.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan Semester	6 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	4.540.000	4.540.000	4.540.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.000	1.470.000	1.470.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 persen	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	311.660.798	318.272.358	815.414.707	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.500.000	7.500.000	15.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	19.777.020	19.777.020	381.277.979	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	45 Paket	30.000.000	30.000.000	34.588.300	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	12.500.000	12.500.000	14.926.780	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2.500 orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	110.000.000	110.000.000	125.675.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	43.500.000	43.500.000	43.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	88.383.778	94.995.338	200.446.648	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	9.421.458	9.421.458	6.650.276	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.421.458	9.421.458	6.650.276	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	205.000.000	205.000.000	246.421.770	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000	140.000.000	170.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	9 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000	65.000.000	76.421.770	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00 persen	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	777.355.017	753.721.667	1.230.513.897	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	50 Unit	332.390.820	332.390.820	332.390.820	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	209.972.602	200.600.000	640.996.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	2 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	89.991.595	89.991.595	89.991.595	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	145.000.000	130.739.252	167.135.482	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNGPATI							54.152.779.933	54.870.904.933	55.234.116.097	
7.01	KECAMATAN							36.137.938.438	36.867.804.738	35.264.387.982	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	3.753.773.720	4.271.112.220	4.283.018.616	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	2 Angka	2 Angka	55.750.000	454.750.000	444.250.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.750.000	454.750.000	444.250.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.014.000.000	2.132.338.500	2.161.944.896	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.014.000.000	2.132.338.500	2.161.944.896	KECAMATAN GUNUNGPATI
		Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2 kegiatan								KECAMATAN GUNUNGPATI
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SUKOREJO
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SADENG
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KANDRI
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SEKARAN
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PONGANGAN
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KALISEGORO
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN JATIREJO
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN NGIJO
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PATEMON

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN CEPOKO
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN GUNUNGPATI
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN MANGUNSARI
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PAKINTELAN
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PLALANGAN
		Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurejo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SUMURREJO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.684.023.720	1.684.023.720	1.676.823.720	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.684.023.720	1.684.023.720	1.676.823.720	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98 Persen	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98 Persen	98 Persen	98 Persen	32.259.967.518	32.259.967.518	30.651.844.366	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	19.772.167.518	19.772.167.518	18.460.378.066	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	200 Kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga	6 Lembaga	171.300.000	171.300.000	171.300.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	21 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	7 Unit	8 Unit	16.559.530.000	16.559.530.000	16.559.530.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
		jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukorejo	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN SUKOREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sadeng	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN SADENG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kandri	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	12 Unit				KELURAHAN KANDRI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekaran	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	16 Unit				KELURAHAN SEKARAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pongangan	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	18 Unit				KELURAHAN PONGANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan kalisegoro	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN KALISEGORO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatirejo	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN JATIREJO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngjo	8 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	9 Unit				KELURAHAN NGLJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Patemon	19 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	19 Unit	10 Unit				KELURAHAN PATEMON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Nongkosawit	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	15 Unit				KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cepoko	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN CEPOKO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunungpati	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	18 Unit	12 Unit				KELURAHAN GUNUNGPATI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunsari	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	13 Unit				KELURAHAN MANGUNSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pakintelan	18 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	18 Unit	19 Unit				KELURAHAN PAKINTELAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plalangan	15 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN PLALANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurejo	17 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	18 Unit				KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	50 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / Ormas	17 Pokmas	14 Pokmas	3.041.337.518	3.041.337.518	1.729.548.066	KECAMATAN GUNUNGPATI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukorejo	26 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26 Pokmas / Ormas	26 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SUKOREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sadeng	18 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SADENG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kandri	15 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KANDRI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekaran	20 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SEKARAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pongangan	26 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PONGANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan kalisegoro	21 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KALISEGORO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatirejo	24 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas				KELURAHAN JATIREJO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngijo	23 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas				KELURAHAN NGLJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Patemon	18 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PATEMON
		jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	29 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29 Pokmas / Ormas	29 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas				KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cepoko	18 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN CEPOKO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunungpati	22 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN GUNUNGPATI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunsari	27 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas				KELURAHAN MANGUNSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pakintelan	13 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PAKINTELAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plalangan	16 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PLALANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurejo	19 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	148 dokumen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	148 dokumen	148 dokumen	6 dokumen	12.487.800.000	12.487.800.000	12.191.466.300	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	12.237.800.000	12.237.800.000	11.941.466.300	KECAMATAN GUNUNGPATI
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN SUKOREJO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN SADENG
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KANDRI
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN SEKARAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN PONGANGAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KALISEGORO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN JATIREJO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN NGLJO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN PATEMON
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN CEPOKO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN GUNUNGPATI
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN MANGUNSARI
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN PAKINTELAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN PLALANGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan kelurahan	1 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
		Jumlah Kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan								KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen	48.522.200	48.975.000	48.975.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 Angka	2 Angka	2 Angka	48.522.200	48.975.000	48.975.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	48.522.200	48.975.000	48.975.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	92 Persen	92 Persen	75.675.000	287.750.000	280.550.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	75.675.000	287.750.000	280.550.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	75.675.000	287.750.000	280.550.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX	NON URUSAN							18.014.841.495	18.003.100.195	19.969.728.115	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	18.014.841.495	18.003.100.195	19.969.728.115	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00 persen	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	11.011.860	10.017.440	9.872.000	
		Dokumen pelaporan	2 Dokumen	Dokumen pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	487.800	846.120	846.120	KECAMATAN GUNUNGPATI
		Jumlah Dokumen RTP	1 Dokumen								KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.108.110	2.845.590	2.845.590	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.020	3.313.590	3.313.590	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.410	1.078.390	1.078.390	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.770.320	1.234.390	1.234.390	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	300.320	300.320	KECAMATAN GUNUNGPATI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	253.600	399.040	253.600	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminsitras keuangan SKPD	100 Persen	Adminsitras keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	16.579.435.733	16.573.915.733	18.485.715.348	KECAMATAN GUNUNGPATI
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	117 Orang/bulan	105 Orang/bulan	15.764.630.933	15.764.630.933	17.676.430.548	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	814.200.000	808.680.000	808.680.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	201.600	201.600	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan semesteran	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	201.600	201.600	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	201.600	201.600	201.600	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminsitras umum	12 bulan	Waktu pelaksanaan adminsitras umum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	602.072.379	623.845.499	680.690.730	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	3 Paket	190.935.119	207.983.487	207.983.487	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2.500 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7 Paket	7 Paket	52.000.000	64.913.597	58.648.562	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	20.809.842	19.695.997	19.643.094	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3.300 orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.925.000	8.925.000	8.925.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	84.167.000	77.092.000	77.842.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	225.235.418	225.235.418	287.648.587	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	76.091.788	76.091.788	123.281.917	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	2 Unit	76.091.788	76.091.788	123.281.917	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	144.132.000	144.132.000	134.359.350	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	96.232.000	96.232.000	96.232.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	47.900.000	47.900.000	38.127.350	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100 persen	Tersedianya pemeliharaanBarang Milik daerah	100 persen	100 persen	100 persen	602.097.735	575.097.735	535.808.770	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	38 Unit	38 Unit	245.097.735	245.097.735	220.808.770	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	4 Unit	225.000.000	210.000.000	210.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	2 Unit	62.000.000	50.000.000	35.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	3 Unit	70.000.000	70.000.000	70.000.000	KECAMATAN GUNUNGPATI
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TUGU							26.580.288.045	26.942.513.931	26.717.438.418	
7.01	KECAMATAN							16.824.024.976	17.179.913.783	16.249.388.312	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	2.087.256.917	2.205.381.917	2.129.075.020	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 angka	4 angka	4 angka	26.037.510	26.037.510	10.315.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	26.037.510	26.037.510	10.315.000	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.428.105.036	1.546.230.036	1.546.230.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.428.105.036	1.546.230.036	1.546.230.000	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	6 Kegiatan								KECAMATAN TUGU
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jerakah	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN JERAKAH
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TUGUREJO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KARANGANYAR
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randugarut	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN RANDUGARUT
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TUGU
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	633.114.371	633.114.371	572.530.020	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.302 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	633.114.371	633.114.371	572.530.020	KECAMATAN TUGU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 persen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 persen	98,00 persen	98,00 persen	14.641.600.509	14.879.364.316	14.025.145.742	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 kegiatan	297 kegiatan	297 kegiatan	9.928.120.910	10.165.884.717	9.449.679.250	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120 Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga	6 Lembaga	58.125.000	58.125.000	58.125.000	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	8.150.000.000	8.150.000.000	7.839.000.000	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tugurejo	17 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit				KELURAHAN TUGUREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN KARANGANYAR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	6 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit				KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TUGU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon	13 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	55 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.719.995.910	1.957.759.717	1.552.554.250	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	18 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas				KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tugurejo	16 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TUGUREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	22 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KARANGANYAR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	17 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas				KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	23 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas				KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	26 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26 Pokmas / Ormas	26 Pokmas / Ormas	26 Pokmas / Ormas				KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TUGU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon	20 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas				KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 dokumen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	4.713.479.599	4.713.479.599	4.575.466.492	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	24 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4.681.409.599	4.681.409.599	4.555.740.092	KECAMATAN TUGU
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan Kelurahan Jerakah	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan Kelurahan Tugurejo	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TUGUREJO
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan Kelurahan Karanganyar	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KARANGANYAR
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan Kelurahan Randugarut	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan Kelurahan Mangkang Wetan	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan Kelurahan Mangunharjo	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TUGU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-589 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan Kelurahan Mangkang Kulon	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN MANGKANG KULON
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	32.070.000	32.070.000	19.726.400	KECAMATAN TUGU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen	22.500.000	22.500.000	22.500.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 angka	2 angka	2 angka	22.500.000	22.500.000	22.500.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	22.500.000	22.500.000	22.500.000	KECAMATAN TUGU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	72.667.550	72.667.550	72.667.550	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	72.667.550	72.667.550	72.667.550	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	2 Orang	2 Orang	72.667.550	72.667.550	72.667.550	KECAMATAN TUGU
X.XX	NON URUSAN							9.756.263.069	9.762.600.148	10.468.050.106	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	9.756.263.069	9.762.600.148	10.468.050.106	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	5.689.660	5.689.660	5.689.660	
		Jumlah Dokumen Pelaporan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	487.800	487.800	487.800	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Dokumen RTP	1 Dokumen								KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	924.510	924.510	924.510	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.120.420	1.120.420	1.120.420	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	924.510	924.510	924.510	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.120.420	1.120.420	1.120.420	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	604.800	604.800	604.800	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	507.200	507.200	507.200	KECAMATAN TUGU

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	8.707.601.845	8.707.601.845	9.197.897.576	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	8.352.937.045	8.352.937.045	8.843.232.776	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	354.060.000	354.060.000	354.060.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	201.600	201.600	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	201.600	201.600	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	201.600	201.600	201.600	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	509.837.584	516.179.984	666.284.070	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	9.800.000	9.800.000	9.800.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	124.776.916	124.776.916	124.776.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	79.824.100	86.166.500	86.166.500	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	15.001.230	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	150 Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.163.200	33.163.200	56.267.340	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	6 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	37.249.200	37.249.200	37.232.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	210.024.168	210.024.168	337.041.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	48.883.430	48.878.109	76.860.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	3 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	48.883.430	48.878.109	76.860.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	163.375.550	163.375.550	211.102.800	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	115.494.000	115.494.000	140.494.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	47.881.550	47.881.550	70.608.800	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 persen	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	320.875.000	320.875.000	310.216.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	18 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	120.875.000	120.875.000	120.875.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung	1 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	89.341.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN TUGU
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN TUGU
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MIJEN							53.460.064.934	53.578.189.934	52.702.380.499	
7.01	KECAMATAN							32.849.078.200	32.967.203.200	31.577.817.166	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	92 Persen	92 Persen	3.542.321.200	3.660.446.200	3.617.107.640	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	172.400.000	172.400.000	121.748.040	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	172.400.000	172.400.000	121.748.040	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.072.421.200	2.190.546.200	2.204.975.480	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.072.421.200	2.190.546.200	2.204.975.480	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3 Kegiatan								KECAMATAN MIJEN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN CANGKIRAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BUBAKAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KARANGMALANG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Polaman	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN POLAMAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN MIJEN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambangan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TAMBANGAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN WONOLOPO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN MIJEN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN JATIBARANG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KEDUNGPAANE
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN NGADIRGO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonoplumbon	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN WONOPLUMBON
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatisari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN JATISARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PESANTREN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.297.500.000	1.297.500.000	1.290.384.120	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.297.500.000	1.297.500.000	1.290.384.120	KECAMATAN MIJEN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 Persen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 Persen	98 Persen	98 Persen	29.165.235.000	29.165.235.000	27.819.187.526	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	498 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	498 Kegiatan	498 Kegiatan	502 Kegiatan	17.424.435.000	17.424.435.000	16.524.211.361	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	498 Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	49.435.000	49.435.000	47.136.620	KECAMATAN MIJEN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14.650.000.000	14.650.000.000	14.650.000.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	16 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit				KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	10 Unit				KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN MIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN KEDUNGPAANE
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN NGADIRGO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN WONOPLUMBON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	30 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.725.000.000	2.725.000.000	1.827.074.741	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	25 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN CANGKIRAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	23 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	24 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	19 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	20 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	26 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	23 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	21 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN MIJEN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	23 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	20 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KEDUNGPAANE
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	14 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN NGADIRGO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	19 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN WONOPLUMBON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	23 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	20 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	130 Dokumen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	130 Dokumen	130 Dokumen	18 Dokumen	11.740.800.000	11.740.800.000	11.294.976.165	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	11.490.800.000	11.490.800.000	11.044.976.165	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Cangkiran	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bubakan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Karangmalang	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Polaman	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN POLAMAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN MIJEN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tambangan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Wonolopo	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Mijen	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN MIJEN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Jatibarang	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kedungpane	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KEDUNGPAANE
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Ngadirgo	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN NGADIRGO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Wonoplumbon	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN WONOPLUMBON
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Jatisari	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN JATISARI
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Pesantren	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN PESANTREN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan								KECAMATAN MIJEN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	15 Persen	15 Persen	50.830.000	50.830.000	50.830.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	84 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	84 Angka	84 Angka	84 Angka	50.830.000	50.830.000	50.830.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	50.830.000	50.830.000	50.830.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	92 Persen	92 Persen	90.692.000	90.692.000	90.692.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	90.692.000	90.692.000	90.692.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	90.692.000	90.692.000	90.692.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX	NON URUSAN							20.610.986.734	20.610.986.734	21.124.563.333	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	20.610.986.734	20.610.986.734	21.124.563.333	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00%	100,00%	100,00%				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	17.663.000	17.663.000	13.913.000	
		Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) yang disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.330.000	2.330.000	1.205.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Mijen	1 Dokumen								KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.884.000	3.884.000	3.509.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.469.000	4.469.000	4.094.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.675.000	1.675.000	1.300.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.870.000	1.870.000	1.495.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	972.000	972.000	597.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.463.000	2.463.000	1.713.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	17.397.539.642	17.347.139.642	17.822.044.027	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	106 Orang/bulan	16.573.379.642	16.573.379.642	17.049.784.027	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	821.160.000	770.760.000	770.760.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	775.000	775.000	400.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.549.000	1.549.000	799.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	676.000	676.000	301.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.277.661.848	1.302.661.848	1.366.081.002	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6.753.000	6.753.000	6.753.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	454.085.848	479.085.848	479.085.848	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	41.870.000	41.870.000	41.870.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	11 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.000.000	17.000.000	16.654.455	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2.000 Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	32.175.000	32.175.000	18.675.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	50 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	127.248.000	127.248.000	111.374.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	598.530.000	598.530.000	691.668.699	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.250.000	11.250.000	8.041.060	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	2 Unit	11.250.000	11.250.000	8.041.060	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	221.157.244	246.557.244	228.769.244	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	167.045.244	184.445.244	166.657.244	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	54.112.000	62.112.000	62.112.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.685.715.000	1.685.715.000	1.685.715.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	32 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	32 Unit	171.150.000	171.150.000	171.150.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung	3 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	66.565.000	66.565.000	66.565.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.078.000.000	1.078.000.000	1.078.000.000	KECAMATAN MIJEN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	370.000.000	370.000.000	370.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN GENUK							53.551.718.618	54.669.843.618	54.410.751.210	
7.01	KECAMATAN							36.353.010.533	37.439.467.833	35.763.251.301	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	3.292.260.490	4.394.540.790	4.275.592.867	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	156.772.240	1.158.522.240	1.125.002.540	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	156.772.240	1.158.522.240	1.125.002.540	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	2.108.016.280	2.211.225.340	2.150.772.117	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Genuk	6 kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.108.016.280	2.211.225.340	2.150.772.117	KECAMATAN GENUK
		Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100,00 persen								KECAMATAN GENUK
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sembungharjo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kudu	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KUDU
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangroto	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KARANGROTO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Genuksari	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN GENUKSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banjardowo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BANJARDOWO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gebangsari	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN GEBANGSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Trimulyo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TRIMULYO
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Penggaron Lor	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PENGGARON LOR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Lor	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Kulon	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TERBOYO KULON
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Wetan	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.027.471.970	1.024.793.210	999.818.210	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.027.471.970	1.024.793.210	999.818.210	KECAMATAN GENUK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98,00 persen	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98,00 persen	98,00 persen	98,00 persen	32.883.632.793	32.867.809.793	31.315.041.184	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279 kegiatan	279 kegiatan	279 kegiatan	17.422.334.583	17.406.511.583	16.109.800.570	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	240 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga	8 Lembaga	111.064.635	111.064.635	111.064.635	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	14.275.000.000	14.275.000.000	13.931.000.000	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sembungharjo	15 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	15 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit				KELURAHAN KUDU
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN KARANGROTO
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN GENUKSARI
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banajrdowo	14 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN BANJARDOWO
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN GEBANGSARI
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit				KELURAHAN TRIMULYO
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN PENGGARON LOR
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN MUKTIHARJO LOR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Kulon	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit				KELURAHAN TERBOYO KULON
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan terboyo Wetan	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit				KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	38 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	3.036.269.948	3.020.446.948	2.067.735.935	KECAMATAN GENUK
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembungharjo	12 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	13 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KUDU
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karaneroto	15 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KARANGROTO
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	11 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN GENUKSARI
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo	17 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BANJARDOWO
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	12 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN GEBANGSARI
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	12 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TRIMULYO
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	11 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PENGGARON LOR
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktharjo Lor	11 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN MUKTHARJO LOR
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	12 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	12 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan terboyo Kulon	12 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TERBOYO KULON

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-589 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Terboyo Wetan	12 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11 angka	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11 angka	11 angka	11 angka	15.461.298.210	15.461.298.210	15.205.240.614	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	15.411.620.160	15.411.620.160	15.160.812.564	KECAMATAN GENUK
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Sembungharjo	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Kudu	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN KUDU
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Karangroto	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN KARANGROTO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Genuksari	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN GENUKSARI
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Banjardowo	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN BANJARDOWO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Gebangsari	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN GEBANGSARI
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Trimulvo	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN TRIMULYO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Penggaron Lor	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN PENGGARON LOR
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Muktiharjo Lor	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Bangetayu Kulon	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Bangetayu Wetan	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Terbovo Kulon	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN TERBOYO KULON
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Terbovo Wetan	6 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga	12 Lembaga				KELURAHAN TERBOYO WETAN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	3 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	49.678.050	49.678.050	44.428.050	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Kampung Keluarga Berkwalitas di Kecamatan Genuk	1 kelurahan								KECAMATAN GENUK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen	68.535.710	68.535.710	64.035.710	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27,00 persen	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	27,00 persen	27,00 persen	27,00 persen	68.535.710	68.535.710	64.035.710	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 angka	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	68.535.710	68.535.710	64.035.710	KECAMATAN GENUK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	108.581.540	108.581.540	108.581.540	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 angka	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 angka	6 angka	6 angka	108.581.540	108.581.540	108.581.540	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 angka	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	300 Orang	300 Orang	108.581.540	108.581.540	108.581.540	KECAMATAN GENUK
X.XX	NON URUSAN							17.198.708.085	17.230.375.785	18.647.499.909	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00 persen	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	17.198.708.085	17.230.375.785	18.647.499.909	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 persen	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00 persen	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD	2 dokumen	Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	24.593.140	24.593.140	24.593.140	
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.096.120	3.096.120	3.096.120	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Dokumen RTP	1 Dokumen								KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.158.110	4.158.110	4.158.110	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.069.290	3.069.290	3.069.290	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.558.290	4.558.290	4.558.290	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.558.290	4.558.290	4.558.290	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.242.960	2.242.960	2.242.960	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.910.080	2.910.080	2.910.080	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	15.288.399.218	15.288.399.218	16.754.169.676	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	6 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	14.693.408.618	14.693.408.618	16.168.329.076	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	589.830.000	589.830.000	580.680.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.075.320	3.075.320	3.075.320	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.583.680	1.583.680	1.583.680	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	501.600	501.600	501.600	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 persen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	761.678.807	793.346.507	724.822.833	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	13.744.810	50.099.120	50.099.120	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	442.908.500	427.744.690	327.212.830	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	48.741.400	48.741.400	48.741.400	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	22.597.837	22.597.837	22.972.014	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1.900 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	54.750.000	65.227.200	70.627.200	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	114.895.500	114.895.500	114.895.500	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	64.040.760	64.040.760	90.274.769	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	304.769.220	304.769.220	304.769.220	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	304.769.220	304.769.220	304.769.220	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	267.667.030	267.667.030	267.667.030	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	149.329.440	149.329.440	149.329.440	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	9 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	118.337.590	118.337.590	118.337.590	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100,00 persen	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	551.600.670	551.600.670	571.478.010	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	47 Unit	47 Unit	286.362.040	286.362.040	286.362.040	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	182.144.000	182.144.000	182.144.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	9 Unit	35.272.000	35.272.000	35.272.000	KECAMATAN GENUK
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	47.822.630	47.822.630	67.699.970	KECAMATAN GENUK
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR							33.350.181.442	33.468.306.442	33.747.443.234	
7.01	KECAMATAN							21.332.965.000	21.383.165.000	20.327.832.209	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94,00%	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94,00%	94,00%	94,00%	2.741.415.000	2.928.290.000	2.892.185.303	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	62.020.000	40.250.000	40.250.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	62.020.000	40.250.000	40.250.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.495.855.000	1.704.500.000	1.671.269.570	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.495.855.000	1.704.500.000	1.671.269.570	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3 Kegiatan								KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Benda Duwur	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Benda Ngisor	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BENDAN NGISOR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KARANGREJO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lemponsari	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN LEMPONGSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PETOMPON
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SAMPANGAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.183.540.000	1.183.540.000	1.180.665.733	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	15 Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.183.540.000	1.183.540.000	1.180.665.733	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97,00%	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97,00%	97,00%	97,00%	18.434.750.000	18.294.950.000	17.275.721.906	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	324 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	324 Kegiatan	324 Kegiatan	272 Kegiatan	10.816.250.000	10.672.750.000	9.930.560.091	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	352 Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	175.500.000	162.500.000	139.580.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	10 Unit	10 Unit	8.875.000.000	8.744.500.000	8.697.227.871	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	17 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit				KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Ngisor	13 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	13 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	12 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN KARANGREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lemponsari	13 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN LEMPONGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	10 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN PETOMPON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	16 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit				KELURAHAN SAMPANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	13 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN BENDUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	30 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.765.750.000	1.765.750.000	1.093.752.220	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	25 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngisor	25 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	23 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	20 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KARANGREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari	29 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN LEMPONGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	31 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PETOMPON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	25 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SAMPANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	26 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	78 Dokumen	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	78 Dokumen	78 Dokumen	9 Dokumen	7.618.500.000	7.622.200.000	7.345.161.815	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	4 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	7.572.200.000	7.572.200.000	7.295.161.815	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bendan Duwur	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bendan Ngisor	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Gajahmungkur	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Karangrejo	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KARANGREJO
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Lempongsari	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN LEMPONGSARI
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Petompon	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN PETOMPON
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Sampangan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN SAMPANGAN
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bendungan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN BENDUNGAN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	46.300.000	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan								KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00%	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00%	15,00%	15,00%	79.800.000	80.650.000	80.650.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 Angka	35 Angka	35 Angka	79.800.000	80.650.000	80.650.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79.800.000	80.650.000	80.650.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85,00%	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85,00%	85,00%	85,00%	77.000.000	79.275.000	79.275.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	77.000.000	79.275.000	79.275.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	80 Orang	80 Orang	77.000.000	79.275.000	79.275.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX	NON URUSAN							12.017.216.442	12.085.141.442	13.419.611.025	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	12.017.216.442	12.085.141.442	13.419.611.025	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec. Gajahmungkur	6 Dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec. Gajahmungkur	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	28.696.000	28.696.000	28.696.000	
		Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	6.295.000	6.295.000	6.295.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Gajahmungkur	1 Dokumen								KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.390.000	4.390.000	4.390.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.898.000	4.898.000	4.898.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.050.000	3.050.000	3.050.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.307.000	3.307.000	3.307.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.176.000	2.176.000	2.176.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.580.000	4.580.000	4.580.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec. Gajahmungkur	100 Persen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec. Gajahmungkur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.735.399.442	10.735.399.442	11.914.628.486	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen				

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	10.332.283.442	10.299.083.442	11.481.012.486	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	396.381.000	429.581.000	426.881.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.375.000	2.375.000	2.375.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.180.000	2.180.000	2.180.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.180.000	2.180.000	2.180.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100 Persen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	584.822.000	592.147.000	653.428.539	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9 Paket	9 Paket	5.925.000	5.925.000	5.925.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	5 Paket	106.250.000	99.075.000	104.146.124	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	71.000.000	60.500.000	60.500.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	10 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	14.936.000	14.936.000	14.567.390	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	1.000 Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.925.000	20.925.000	20.925.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	77 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	128.879.000	128.879.000	139.951.806	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen	236.907.000	261.907.000	307.413.219	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	71.298.000	137.113.000	172.301.100	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57 Unit	9 Unit	13 Unit	71.298.000	137.113.000	172.301.100	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	198.926.000	211.926.000	270.696.900	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	124.500.000	124.500.000	174.180.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	15 Jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.426.000	87.426.000	96.516.900	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	398.075.000	379.860.000	379.860.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	156.250.000	156.250.000	156.250.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	149.325.000	131.110.000	131.110.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	20 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	42.000.000	42.000.000	42.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.500.000	50.500.000	50.500.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG							59.760.618.417	60.678.743.417	59.562.460.397	
7.01	KECAMATAN							44.697.340.000	45.682.358.000	43.599.052.570	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91,00 persen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91,00 persen	91,00 persen	91,00 persen	2.931.990.000	3.901.808.000	3.901.565.892	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	1 angka	1 angka	63.500.000	916.325.000	924.937.870	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	63.500.000	916.325.000	924.937.870	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.888.140.000	2.005.133.000	1.996.278.022	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.888.140.000	2.005.133.000	1.996.278.022	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan								KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN METESEH
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TANDANG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SENDANGGUWO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN JANGLI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KEDUNGMONDU
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TEMBALANG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SENDANGMULYO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BULUSAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KRAMAS
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN ROWOSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	980.350.000	980.350.000	980.350.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	980.350.000	980.350.000	980.350.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98,00 persen	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98,00 persen	98,00 persen	98,00 persen	41.619.350.000	41.638.550.000	39.555.486.678	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415 kegiatan	415 kegiatan	415 kegiatan	17.841.150.000	17.841.150.000	16.502.097.417	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	415 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga	6 Lembaga	82.150.000	82.150.000	82.150.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	18 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	15.466.000.000	15.466.000.000	15.466.000.000	KECAMATAN TEMBALANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meteseh	23 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	23 Unit	23 Unit				KELURAHAN METESEH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tandang	17 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit				KELURAHAN TANDANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangguwo	16 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit				KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	15 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN JANGLI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	14 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN KEDUNGMONDU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN TEMBALANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	22 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	22 Unit				KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	15 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	16 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit				KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	21 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.293.000.000	2.293.000.000	953.947.417	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Meteseh	17 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN METESEH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	23 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tandang	21 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TANDANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangguwo	24 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SENDANGGUWO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jangli	16 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN JANGLI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungmundu	26 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembalang	24 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TEMBALANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sendangmulyo	22 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulusan	19 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramas	20 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rowosari	21 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambiroto	22 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	112 dokumen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	112 dokumen	112 dokumen	35 dokumen	23.778.200.000	23.797.400.000	23.053.389.261	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	23.148.200.000	23.167.400.000	22.475.866.713	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Meteseh	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN METESEH
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Mangunharjo	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN MANGUNHARJO KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tandang	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN TANDANG
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Sendangguwo	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Jangli	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN JANGLI
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kedungmundu	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tembalang	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN TEMBALANG
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Sendangmulyo	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulusan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kramas	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Rowosari	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN ROWOSARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Sambiroto	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga					KELURAHAN SAMBIROTO
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	3 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	630.000.000	630.000.000	577.522.548		KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 kelurahan									KECAMATAN TEMBALANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen	50.000.000	49.000.000	49.000.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	35 angka	35 angka	50.000.000	49.000.000	49.000.000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	49.000.000	49.000.000		KECAMATAN TEMBALANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70,00 persen	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70,00 persen	70,00 persen	70,00 persen	96.000.000	93.000.000	93.000.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	96.000.000	93.000.000	93.000.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	150 Orang	150 Orang	96.000.000	93.000.000	93.000.000		KECAMATAN TEMBALANG
X.XX	NON URUSAN							15.063.278.417	14.996.385.417	15.963.407.827		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	15.063.278.417	14.996.385.417	15.963.407.827		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	8.090.000	8.090.000	8.090.000		
		Jumlah Dokumen pelaporan	3 dokumen	Jumlah Dokumen pelaporan	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000	300.000	300.000		KECAMATAN TEMBALANG
		Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Tembalang	1 Dokumen									KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.730.000	1.730.000	1.730.000		KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.030.000	2.030.000	2.030.000		KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.440.000	1.440.000	1.440.000		KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000	1.750.000	1.750.000		KECAMATAN TEMBALANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	440.000	440.000	440.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	400.000	400.000	400.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	14.040.888.417	14.035.368.417	15.012.713.528	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	13.420.308.417	13.420.308.417	14.434.853.528	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	619.590.000	614.070.000	576.870.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	330.000	330.000	330.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	330.000	330.000	330.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	330.000	330.000	330.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	579.300.000	517.927.000	507.604.299	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	108.150.000	87.400.000	32.385.600	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	40 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	22.700.000	22.700.000	22.700.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	4.950.000	4.950.000	5.241.530	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2.700 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	102.300.000	102.300.000	109.485.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	267.600.000	226.977.000	201.779.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	53.600.000	53.600.000	116.013.169	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	195.000.000	195.000.000	195.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	120.000.000	120.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00 persen	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	235.000.000	235.000.000	235.000.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	110.000.000	110.000.000	110.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	3 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	90.000.000	90.000.000	90.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Jenis	2 Jenis	25.000.000	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN TEMBALANG

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN CANDISARI							33.204.494.580	33.322.619.580	33.000.668.767	
7.01	KECAMATAN							22.468.336.126	22.620.076.707	21.749.413.357	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	92 Persen	92 Persen	2.698.777.036	2.840.602.557	2.785.920.643	
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 angka	2 angka	2 angka				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 Angka	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 Angka	1 Angka	1 Angka	187.244.950	187.244.950	160.010.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	187.244.950	187.244.950	160.010.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100,00 persen	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.709.226.826	1.841.357.107	1.828.217.952	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart paten	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.709.226.826	1.841.357.107	1.828.217.952	KECAMATAN CANDISARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatingaleh	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN JATINGALEH
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonotingal	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN WONOTINGAL
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tegalsari	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TEGALSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaliwiru	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KALIWIRU
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar Gunung	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Candi	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN CANDI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jomblang	100 Persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN JOMBLANG
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	802.305.260	812.000.500	797.692.691	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	802.305.260	812.000.500	797.692.691	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100,00 persen	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	19.614.220.590	19.624.135.650	18.847.011.560	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 kegiatan	80 kegiatan	80 kegiatan	10.029.620.590	10.039.535.650	9.471.421.122	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	276 kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	51.395.590	51.395.590	27.017.280	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Candisari	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	8.511.125.000	8.511.250.000	8.511.250.000	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jatingaleh	14 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN JATINGALEH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Wonotingal	14 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN WONOTINGAL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tegalsari	17 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit				KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kaliwiru	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN KALIWIRU
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Candi	13 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN CANDI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jomblang	22 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	22 Unit				KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	17 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.467.100.000	1.476.890.060	933.153.842	KECAMATAN CANDISARI
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatingaleh	19 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN JATINGALEH
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Wonotingal	25 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN WONOTINGAL
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tegalsari	21 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TEGALSARI
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kaliwiru	36 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KALIWIRU
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Karanganyar gunung	24 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan candi	20 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN CANDI
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jomblang	19 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	67 kegiatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	67 kegiatan	67 kegiatan	6 kegiatan	9.584.600.000	9.584.600.000	9.375.590.438	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	9.539.600.000	9.539.600.000	9.364.469.838	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN JATINGALEH
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN WONOTINGAL
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KALIWIRU
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN CANDI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Masyarakat yang Dilaporkan	9 Dokumen	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	9 Lembaga Masyarakat	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN JOMBLANG
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	45.000.000	45.000.000	11.120.600	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan								KECAMATAN CANDISARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen	80.000.000	80.000.000	41.681.154	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52 angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52 angka	52 angka	52 angka	80.000.000	80.000.000	41.681.154	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	80.000.000	80.000.000	41.681.154	KECAMATAN CANDISARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 angka	Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 angka	5 angka	5 angka	75.338.500	75.338.500	74.800.000	
		Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00%	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00%	92,00%	92,00%				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	75.338.500	75.338.500	74.800.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	75.338.500	75.338.500	74.800.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX	NON URUSAN							10.736.158.454	10.702.542.873	11.251.255.410	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00%	Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	10.736.158.454	10.702.542.873	11.251.255.410	
		Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%				
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	28.100.640	28.100.640	28.100.640	
		Presentase Dokumen pelaporan	100,00 persen	Presentase Dokumen pelaporan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.887.800	2.887.800	2.887.800	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Candisari	1 Dokumen								KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.088.870	4.088.870	4.088.870	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.141.150	5.141.150	5.141.150	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.582.950	5.582.950	5.582.950	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.141.150	5.141.150	5.141.150	KECAMATAN CANDISARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPDEM 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.099.360	3.099.360	3.099.360	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.159.360	2.159.360	2.159.360	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	8.674.106.540	8.674.731.540	9.309.576.281	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	52 Orang/bulan	8.263.615.580	8.263.615.580	8.944.337.761	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	402.390.000	403.015.000	359.735.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.700.320	2.700.320	2.700.320	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.700.320	2.700.320	2.700.320	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.320	2.700.320	102.880	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.024.065.702	886.741.298	865.828.937	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	20.148.080	20.158.470	14.304.710	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	325.822.781	257.065.509	257.065.509	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	80.447.860	76.179.700	47.881.780	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	17.517.297	24.407.073	21.169.223	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1.000 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	97.875.000	134.375.000	125.375.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	111.700.000	131.200.000	93.834.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	10 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	370.554.684	243.355.546	306.198.715	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	109.819.117	179.438.737	179.438.737	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	100 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	27 Unit	27 Unit	109.819.117	179.438.737	179.438.737	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	191.837.150	215.721.018	206.719.300	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	166.701.000	193.903.018	184.901.300	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.136.150	21.818.000	21.818.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	708.229.305	717.809.640	661.591.515	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	29 Unit	305.150.685	297.421.375	273.021.395	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	2 Unit	300.000.000	299.250.000	299.250.000	KECAMATAN CANDISARI
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	3 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	20.306.170	25.571.490	25.571.490	KECAMATAN CANDISARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100,00 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	113 Unit	65 Unit	65 Unit	82.772.450	95.566.775	63.748.630	KECAMATAN CANDISARI
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK							50.326.189.483	50.644.314.483	50.727.711.432	
7.01	KECAMATAN							34.945.030.334	35.289.252.516	33.654.967.931	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	2.782.930.570	2.921.752.746	2.892.181.466	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	67.454.624	60.388.400	52.888.400	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	67.454.624	60.388.400	52.888.400	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.647.976.036	1.793.864.436	1.771.793.156	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.647.976.036	1.793.864.436	1.771.793.156	KECAMATAN BANYUMANIK
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100,00 persen								KECAMATAN BANYUMANIK
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BANYUMANIK
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gedawang	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN GEDAWANG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jabungan	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN JABUNGAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngesrep	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN NGESREP
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Padangsari	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PADANGSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedalangan	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PEDALANGAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pudahkayung	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srandol Kulon	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SRONDOL KULON
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srandol Wetan	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurboto	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SUMURBOTO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tinjomoyo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.067.499.910	1.067.499.910	1.067.499.910	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10 kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.067.499.910	1.067.499.910	1.067.499.910	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98,00 persen	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98,00 persen	98,00 persen	98,00 persen	32.075.320.000	32.175.320.003	30.580.586.462	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	450 kegiatan	450 kegiatan	14.644.300.000	14.744.300.003	13.514.263.762	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	170 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	66.300.000	66.300.000	22.152.950	KECAMATAN BANYUMANIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit	6 Unit	6 Unit	12.183.000.000	12.183.000.000	12.183.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Banyumanik	17 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit				KELURAHAN BANYUMANIK
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Gedawang	15 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN GEDAWANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Jabungan	15 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN JABUNGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Ngesrep	14 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN NGESREP
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Padangsari	18 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN PADANGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedalangan	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN PEDALANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pudahkayung	16 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit				KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Srandol Kulon	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN SRONDOL KULON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Srandol Wetan	17 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sumurboto	15 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN SUMURBOTO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tinjomoyo	19 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngesrep	18 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	2.395.000.000	2.495.000.003	1.309.110.812	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	48 kegiatan								KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banyumanik	18 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BANYUMANIK
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gedawang	21 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN GEDAWANG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jabungan	24 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN JABUNGAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngesrep	18 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN NGESREP
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Padangsari	20 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PADANGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedalangan	28 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PEDALANGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudukpayung	20 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srandol Kulon	19 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SRONDOL KULON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srandol Wetan	21 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurboto	23 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SUMURBOTO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tinjomoyo	25 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	17.431.020.000	17.431.020.000	17.066.322.700	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	17.374.200.000	17.374.200.000	17.065.428.850	KECAMATAN BANYUMANIK
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BANYUMANIK
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN GEDAWANG
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN JABUNGAN
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN NGESREP
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PADANGSARI
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PEDALANGAN
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PUDAKPAYUNG
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN SRONDOL KULON
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN SRONDOL WETAN
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN SUMURBOTO
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	56.820.000	56.820.000	893.850	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan								KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen	16.200.000	21.600.000	16.200.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	32 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	32 Angka	32 Angka	32 Angka	16.200.000	21.600.000	16.200.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.200.000	21.600.000	16.200.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	70.579.764	170.579.767	166.000.003	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	70.579.764	170.579.767	166.000.003	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	70.579.764	170.579.767	166.000.003	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX	NON URUSAN							15.381.159.149	15.355.061.967	17.072.743.501	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	15.381.159.149	15.355.061.967	17.072.743.501	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	500.000	500.000	500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTP)	1 Dokumen								KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	500.000	500.000	500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	13.849.845.483	13.852.485.483	15.515.487.592	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	13.277.265.483	13.277.265.483	14.940.267.592	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	571.080.000	573.720.000	573.720.000	KECAMATAN BANYUMANIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	500.000	500.000	500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	756.452.202	776.211.020	828.096.402	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	415.934.379	415.993.197	366.151.921	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	60.000.000	60.000.000	60.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	22.764.955	22.764.955	22.439.671	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2.500 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	89.100.000	89.100.000	89.100.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	105.373.000	119.073.000	164.546.716	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	48.279.868	54.279.868	110.858.094	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	16.129.654	16.479.654	16.479.654	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	16.129.654	16.479.654	16.479.654	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	330.441.150	281.595.150	301.572.914	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	116.235.600	130.235.600	144.705.264	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	126.363.150	81.817.650	81.817.650	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.842.400	69.541.900	75.050.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 persen	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	423.790.660	423.790.660	406.606.939	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	223.790.660	223.790.660	223.790.660	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	20.000.000	20.000.000	2.816.279	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALİYAN							49.668.402.192	51.530.628.078	51.046.613.719	
7.01	KECAMATAN							35.597.410.000	37.035.883.886	35.213.143.052	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	92 Persen	92 Persen	2.686.896.000	2.841.269.000	2.845.301.691	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 Angka	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	62.492.000	186.992.000	176.096.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	62.492.000	186.992.000	176.096.000	KECAMATAN NGALİYAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.353.804.000	1.383.677.000	1.412.867.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.353.804.000	1.383.677.000	1.412.867.000	KECAMATAN NGALIAN
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3 kegiatan								KECAMATAN NGALIAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalipancur	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KALIPANCUR
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bambankerep	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BAMBANKEREP
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngaliyan	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN NGALIAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wates	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN WATES
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakaji	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TAMBAKAJI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonosari	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN WONOSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Podorejo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PODOREJO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwoyoso	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PURWOYOSO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bringin	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN BRINGIN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gondoriyo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN GONDORIYO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.270.600.000	1.270.600.000	1.256.338.691	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.270.600.000	1.270.600.000	1.256.338.691	KECAMATAN NGALIAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 persen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 persen	98,00 persen	98,00 persen	32.754.762.000	34.038.862.886	32.221.989.361	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279 kegiatan	279 kegiatan	279 kegiatan	14.169.489.000	15.453.589.886	13.886.234.503	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	109 Angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	50.374.000	50.374.000	40.236.250	KECAMATAN NGALIAN
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	14 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	12.053.000.000	13.053.000.000	12.903.000.000	KECAMATAN NGALIAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN NGALIAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	5 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit				KELURAHAN WATES
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bringin	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN BRINGIN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN GONDORIYO
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	43 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2.066.115.000	2.350.215.886	942.998.253	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	23 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep	24 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	22 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	21 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				KELURAHAN WATES
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	22 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	19 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	21 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	34 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bringin	23 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				KELURAHAN BRINGIN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	27 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas				KELURAHAN GONDORIYO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	18.585.273.000	18.585.273.000	18.335.754.858	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.374.000.000	18.374.000.000	18.102.386.165	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kalipancur	7 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bambankerep	7 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Ngaliyan	7 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Wates	7 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN WATES
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tambakaji	7 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Wonosari	7 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Podorejo	7 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwoyoso	7 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bringin	7 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN BRINGIN
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Gondoriyo	7 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN GONDORIYO
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	211.273.000	211.273.000	233.368.693	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan								KECAMATAN NGALIYAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen	63.283.000	63.283.000	59.683.000	
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 Angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 Angka	35 Angka	35 Angka	63.283.000	63.283.000	59.683.000	
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 angka	35 angka	35 angka				
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	63.283.000	63.283.000	59.683.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	92.469.000	92.469.000	86.169.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	92.469.000	92.469.000	86.169.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	92.469.000	92.469.000	86.169.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX	NON URUSAN							14.070.992.192	14.494.744.192	15.833.470.667	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	14.070.992.192	14.494.744.192	15.833.470.667	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	18.516.000	16.041.000	15.141.000	
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.098.000	2.098.000	1.198.000	KECAMATAN NGALİYAN
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Ngaliyān	1 dokumen								KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.530.000	4.180.000	4.180.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.855.000	3.730.000	3.730.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.925.000	1.925.000	1.925.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.159.000	2.159.000	2.159.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.093.000	1.093.000	1.093.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	856.000	856.000	856.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	12.795.614.192	12.795.614.192	13.956.583.993	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	12.306.355.192	12.306.355.192	13.467.744.993	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	486.035.000	486.035.000	486.035.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.333.000	1.333.000	913.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	896.000	896.000	896.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	995.000	995.000	995.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	365.081.000	420.091.000	469.358.974	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000	12.000.000	12.000.000	KECAMATAN NGALİYAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	132.763.000	154.298.000	132.763.000	KECAMATAN NGALİYAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.000.000	57.475.000	57.475.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.111.000	9.111.000	10.970.805	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2.000 orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.892.000	8.892.000	11.692.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	70.956.000	70.956.000	74.686.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	107.359.000	107.359.000	169.772.169	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	59.912.000	59.912.000	59.912.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	1 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	59.912.000	59.912.000	59.912.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	221.714.000	232.773.000	227.102.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	121.348.000	121.348.000	123.360.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.366.000	111.425.000	103.742.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00 persen	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	610.155.000	970.313.000	1.105.372.700	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	34 Unit	158.100.000	158.100.000	158.100.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	271.400.000	750.600.000	900.600.000	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	3 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.125.000	31.013.000	16.072.700	KECAMATAN NGALIYAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	175.530.000	30.600.000	30.600.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN GAYAMSARI							32.213.546.228	32.531.671.228	33.030.785.476	
7.01	KECAMATAN							21.150.976.074	21.519.486.976	20.677.637.024	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	2.028.424.226	2.166.176.896	2.154.086.066	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	1 angka	8 angka	2.250.000	2.250.000	4.500.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000	2.250.000	4.500.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persentase	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	1.338.854.786	1.476.607.456	1.460.361.836	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100 Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.338.854.786	1.476.607.456	1.460.361.836	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	1 angka								KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakrejo	100 Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN TAMBAKREJO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaligawe	100 Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN KALIGAWA
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sawah Besar	100 Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SAWAH BESAR
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Siwalan	100 Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SIWALAN

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambirejo	100 Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN SAMBIREJO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandean Lamper	100 Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gayamsari	100 Persentase	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persentase	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	687.319.440	687.319.440	689.224.230	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	600 angka	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	687.319.440	687.319.440	689.224.230	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98 Persentase	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98 Persentase	98 Persentase	98 Persentase	19.026.951.848	19.257.710.080	18.421.296.318	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 angka	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 angka	80 angka	80 angka	9.676.696.938	9.918.334.370	9.242.179.795	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga	5 Lembaga	36.289.350	34.696.710	34.696.710	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	9 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	7.963.000.000	7.963.000.000	7.947.820.050	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	11 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN TAMBAKREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	13 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN KALIGAWA
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	9 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit				KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	12 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN SIWALAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	10 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN SAMBIREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	10 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	12 angka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	32 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.677.407.588	1.920.637.660	1.259.663.035	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	17 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TAMBAKREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	17 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KALIGAWA

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	17 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	18 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SIWALAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	15 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				KELURAHAN SAMBIREJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	17 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	21 angka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas				KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	768 angka	768 angka	9.350.254.910	9.339.375.710	9.179.116.523	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	768 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	9.290.000.000	9.290.000.000	9.139.840.813	KECAMATAN GAYAMSARI
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN TAMBAKREJO
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN KALIGAWA
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN SAWAH BESAR
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN SIWALAN
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN SAMBIREJO
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN PANDEAN LAMPER
			-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga				KELURAHAN GAYAMSARI
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.254.910	49.375.710	39.275.710	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan Gayamsari	1 Angka								KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	15 Persen	15 Persen	18.850.000	18.850.000	25.504.640	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24 angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24 angka	24 angka	20 angka	18.850.000	18.850.000	25.504.640	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.850.000	18.850.000	25.504.640	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	76.750.000	76.750.000	76.750.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 kegiatan	6 kegiatan	5 kegiatan	76.750.000	76.750.000	76.750.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	120 Orang	120 Orang	76.750.000	76.750.000	76.750.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX	NON URUSAN							11.062.570.154	11.012.184.252	12.353.148.452	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.062.570.154	11.012.184.252	12.353.148.452	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
		Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	3.182.830	3.182.830	3.182.830	
		Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	454.690	454.690	454.690	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Dokumen RTP	1 Dokumen								KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454.690	454.690	454.690	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454.690	454.690	454.690	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454.690	454.690	454.690	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454.690	454.690	454.690	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	454.690	454.690	454.690	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	454.690	454.690	454.690	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	9.585.143.005	9.585.143.005	10.735.742.074	
		Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	9.200.848.935	9.200.848.935	10.355.948.004	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	382.930.000	382.930.000	378.430.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	454.690	454.690	454.690	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	454.690	454.690	454.690	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454.690	454.690	454.690	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	699.029.848	680.176.357	840.633.028	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.157.110	10.157.110	14.970.780	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	343.834.579	343.834.579	357.728.997	KECAMATAN GAYAMSARI

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.912.290	41.495.930	46.926.270	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.664.472	10.445.730	10.855.662	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	120 Orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.250.000	11.250.000	12.375.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	133.974.000	132.724.000	121.586.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	6 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	149.237.397	130.269.008	276.190.319	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	38.606.022	25.601.240	35.591.240	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya	1 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	38.606.022	25.601.240	35.591.240	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	136.145.280	136.120.440	154.068.010	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	114.000.000	118.993.300	131.786.360	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.145.280	17.127.140	22.281.650	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00 persen	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	600.463.169	581.960.380	583.931.270	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	30 Unit	42 Unit	114.239.069	95.736.280	95.736.280	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	400.000.000	400.000.000	400.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	1 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	56.224.100	56.224.100	58.194.990	KECAMATAN GAYAMSARI
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan prasarana pendukung gedung kantor	1 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN							60.651.145.810	61.569.270.810	62.112.338.205	
7.01	KECAMATAN							43.412.891.200	44.359.938.876	43.012.951.624	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	2.959.987.338	3.922.205.594	3.818.190.840	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	Jumlah Inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	112.970.400	914.120.384	817.427.500	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	112.970.400	914.120.384	817.427.500	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.754.570.948	1.910.935.678	1.950.145.258	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.754.570.948	1.910.935.678	1.950.145.258	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan Yang Memenuhi Standar PATEN	100,00 persen								KECAMATAN PEDURUNGAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Wetan	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogomulyo	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN TLOGOMULYO

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalicari	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN KALICARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plamongansari	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Tengah	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Lor	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gemah	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN GEMAH
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Palebon	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN PALEBON
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Penggaron Kidul	100,00 persen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100 Laporan	100 Laporan				KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.092.445.990	1.097.149.532	1.050.618.082	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.092.445.990	1.097.149.532	1.050.618.082	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 persen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 persen	98,00 persen	98,00 persen	40.337.923.512	40.338.273.512	39.159.943.364	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407 kegiatan	407 kegiatan	407 kegiatan	16.548.234.172	16.548.584.172	15.609.704.174	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	147 angka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	50.350.000	50.350.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pedurungan	13 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13.983.982.992	13.983.982.992	13.983.982.992	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Kidul	17 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit				KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon	14 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit				KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Wetan	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogomulyo	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN TLOGOMULYO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalicari	8 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit				KELURAHAN KALICARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plamongansari	13 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit				KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Tengah	14 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Lor	13 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gemah	14 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit				KELURAHAN GEMAH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Palebon	11 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit				KELURAHAN PALEBON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Kidul	12 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit				KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Jumlah Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Kidul	8 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit				KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pedurungan	38 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	2.514.251.180	2.514.251.180	1.575.371.182	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Kidul	20 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas	27 Pokmas / Ormas				KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon	24 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Wetan	28 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogomulyo	24 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas				KELURAHAN TLOGOMULYO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalicari	26 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN KALICARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plamongsari	29 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PLAMONGSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Tengah	27 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Lor	32 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gemah	29 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas				KELURAHAN GEMAH
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Palebon	28 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PALEBON
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Kidul	19 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Kidul	21 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas				KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 jenis	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 jenis	8 jenis	8 jenis	23.789.689.340	23.789.689.340	23.550.239.190	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 jenis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.731.984.580	23.731.984.580	23.545.589.190	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Muktiharjo Kidul	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Tlogosari Kulon	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Tlogosari Wetan	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Tlogomulyo	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN TLOGOMULYO
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Kalicari	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN KALICARI
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Plamongan Sari	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Pedurungan Tengah	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Pedurungan Lor	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Gemah	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN GEMAH
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Palebon	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PALEBON
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Pedurungan Kidul	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Jumlah laporan lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan Penggaron Kidul	9 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan				KELURAHAN PENGGARON KIDUL
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	6 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	57.704.760	57.704.760	4.650.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di kecamatan	1 kelurahan								KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen	64.000.000	48.479.420	18.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	35 angka	35 angka	64.000.000	48.479.420	18.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	64.000.000	48.479.420	18.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	50.980.350	50.980.350	16.817.420	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi organisasi kemasyarakatan , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	Jumlah Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi organisasi kemasyarakatan , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	50.980.350	50.980.350	16.817.420	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	2 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150 Orang	150 Orang	150 Orang	50.980.350	50.980.350	16.817.420	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX	NON URUSAN							17.238.254.610	17.209.331.934	19.099.386.581	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	80,00%	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	80,00%	80,00%	80,00%	17.238.254.610	17.209.331.934	19.099.386.581	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	7 dokumen	5 dokumen	24.779.770	24.779.770	22.655.270	
		Jumlah Dokumen pelaporan	3 dokumen	Jumlah Dokumen pelaporan	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.704.440	2.704.440	2.704.440	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Pedurungan	1 dokumen								KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.449.180	4.449.180	4.449.180	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.617.790	5.617.790	4.468.290	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.988.590	3.988.590	3.988.590	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.394.290	2.394.290	2.394.290	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan koordinasidan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.187.520	2.187.520	2.187.520	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumla Dokumen Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.437.960	3.437.960	2.462.960	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD 100%	100,00 persen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD 100%	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	15.015.100.690	14.981.020.690	16.877.663.409	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	14.419.764.810	14.419.764.810	16.304.364.831	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	587.821.720	553.741.720	565.784.418	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	947.760	947.760	947.760	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.369.920	5.369.920	5.369.920	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.196.480	1.196.480	1.196.480	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 persen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	648.044.792	636.693.595	653.464.159	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik yang tersedia	5 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	214.738.932	230.370.605	238.283.318	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	25 jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	54.777.600	51.842.640	51.842.640	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	6 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	30.000.000	21.426.550	12.541.396	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	3.350 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	69.709.560	90.141.000	85.341.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	106.956.000	106.956.000	54.327.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	8 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	146.862.700	110.956.800	186.128.805	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100%	100,00 persen	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100%	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	395.818.108	392.413.448	345.978.672	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	395.818.108	392.413.448	345.978.672	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100%	100,00 persen	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100%	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	437.629.130	437.629.130	423.141.770	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	260.312.160	260.312.160	245.824.800	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	177.316.970	177.316.970	177.316.970	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00 persen	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	716.882.120	736.795.301	776.483.301	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	29 Unit	192.081.570	192.081.570	192.081.570	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan / Rehab Gedung kantor dan bangunan lainnya	3 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	25.200.550	20.087.140	20.087.140	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	349.600.000	374.626.591	374.626.591	KECAMATAN PEDURUNGAN
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	3 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	150.000.000	150.000.000	189.688.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							51.131.882.876	52.867.882.876	59.705.402.920	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							44.937.816.000	46.780.789.000	53.824.588.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2 Indeks	Indeks Pengamalan Pancasila	2 Indeks	2 Indeks	2 Indeks	1.091.118.000	1.523.554.000	1.450.131.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kejadian	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kejadian	2 Kejadian	2 Kejadian	1.091.118.000	1.523.554.000	1.450.131.000	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	900 orang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	27 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	614.802.000	889.474.000	860.032.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	120 Orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	50 Orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	50 Orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023		RKPD PERUBAHAN 2023
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	120 Orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	70 orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	120 Orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Hibah yang disalurkan	1 organisasi								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	5 kali	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	113.000	113.000	59.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	6 Kali								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kampung Tematik Pancasila	3 Lokasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	540 Orang	900 Orang	900 Orang	405.158.000	544.922.000	489.795.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 Orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	5 Forum	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	520 Orang	195 Orang	165 Orang	51.879.000	69.879.000	57.627.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	180 Orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumih Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 kali	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	19.166.000	19.166.000	42.618.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	3 Dokumen								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 kali								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	64 angka indeks	Indeks Kebebasan Sipil	64 angka indeks	64 angka indeks	64 angka indeks	36.517.196.000	36.895.513.000	44.063.237.000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemil	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6.000 laporan dan usulan	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6.000 laporan dan usulan	6.000 laporan dan usulan	6.000 laporan dan usulan	36.517.196.000	36.895.513.000	44.063.237.000	
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	5 konten	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	26 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	227.165.000	317.690.000	288.310.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10 konten								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	600 orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	20 paket								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	4 kali								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	70 orang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	35.733.853.000	35.733.853.000	43.002.178.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100,00 persen								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100,00 persen								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Pelaksanaan Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	50 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	85 Orang	100 Orang	25.997.000	25.997.000	32.330.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	10 event	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.281 Orang	1.410 Orang	1.410 Orang	323.090.000	610.882.000	489.546.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta bimtek pengeloan bantuan keuangan kepada partai politik	45 orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	36 orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monitoring Fasilitas Pemilu/Pemilukada	60 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	220 Laporan	100 Laporan	120 Laporan	207.091.000	207.091.000	250.873.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	12 dokumen								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	120 dokumen								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	27 dokumen								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	57 indeks	Indeks Kinerja Ormas	57 indeks	57 indeks	57 indeks	1.673.762.000	1.717.684.000	1.769.410.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	34,00%	Persentase Ormas Aktif	34,00%	34,00%	34,00%	1.673.762.000	1.717.684.000	1.769.410.000	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	6 organisasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	808.282.000	852.204.000	859.155.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	2 organisasi								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah peserta ormas expo	30 organisasi								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH	
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU				
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	10 organisasi									BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	40 orang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	500.000.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	90 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90 Orang	90 Orang	90 Orang	205.500.000	205.500.000	205.500.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	120 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	159.980.000	159.980.000	204.755.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	15 ormas									BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	71 indeks	indeks kerukunan umat beragama	71 indeks	71 indeks	71 indeks	3.143.816.000	3.674.620.000	3.520.747.000		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 kejadian	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	3.143.816.000	3.674.620.000	3.520.747.000		
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	6 konten	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	72.750.000	280.191.000	261.227.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	3 konten									BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	200 orang									BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	150 orang									BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	200 orang									BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadah	12 dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	165 Orang	100 Orang	100 Orang	114.980.000	114.980.000	79.275.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	200 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350 Orang	800 Orang	700 Orang	2.956.086.000	3.279.449.000	3.180.245.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	9 kali									BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	4 organisasi									BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	82 prosentase	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	82 prosentase	82 prosentase	82 prosentase	2.511.924.000	2.969.418.000	3.021.063.000		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	24 kejadian	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	24 kejadian	24 kejadian	24 kejadian	2.511.924.000	2.969.418.000	3.021.063.000		

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	75 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	660 Orang	1.800 Orang	1.800 Orang	350.229.000	807.723.000	778.203.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Peserta Pelatihan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	75 Orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100,00 persen								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Fasilitas Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	18 Kali								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	24 Kali	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.070 Orang	480 Orang	260 Orang	383.532.000	383.532.000	353.705.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	1 Kelompok								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	475 Orang								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	3 Konten								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377 Laporan	365 Laporan	365 Laporan	173.565.000	173.565.000	171.727.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	12 Kali								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	12 Kali	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.604.598.000	1.604.598.000	1.717.428.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX	NON URUSAN							6.194.066.876	6.087.093.876	5.880.814.920	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	6.194.066.876	6.087.093.876	5.880.814.920	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100,00%	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 dokumen	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	11 dokumen	11 dokumen	8 dokumen	12.103.000	12.103.000	7.635.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	847.000	847.000	180.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah dokumen RTP	1 dokumen								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.269.000	3.269.000	2.713.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPDEM 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.219.000	3.219.000	2.651.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.611.000	1.611.000	603.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.962.000	1.962.000	1.238.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinsai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	639.000	639.000	99.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	556.000	556.000	151.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	5.094.162.876	5.094.162.876	4.879.762.333	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.824.045.876	4.824.045.876	4.609.694.333	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	267.320.000	267.320.000	268.290.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	815.000	815.000	494.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.582.000	1.582.000	1.086.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	400.000	198.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100,00%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100,00%	100,00%	100,00%	26.075.000	26.075.000	21.802.000	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	55 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	55 Orang	55 Orang	26.075.000	26.075.000	21.802.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	444.320.000	454.147.000	480.373.587	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.015.000	10.015.000	6.120.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	14.984.000	14.984.000	14.984.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	55.053.000	55.053.000	43.558.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.554.000	10.554.000	10.553.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	100 Buku	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	-	432.000	432.000	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1.000 orang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	65.005.000	74.832.000	85.040.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	214.005.000	214.005.000	245.846.587	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	74.272.000	74.272.000	74.272.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	24.523.000	24.523.000	24.523.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	3 Jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	1 Unit	19.523.000	19.523.000	19.523.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							PERANGKAT DAERAH
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	272.903.000	156.103.000	148.253.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	37.103.000	14.503.000	14.503.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	235.800.000	141.600.000	133.750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	319.980.000	319.980.000	318.466.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.319.000	36.319.000	36.319.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	22 Unit	251.300.000	251.300.000	251.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel k	10 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	6.750.000	6.750.000	5.236.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	100 Unit	25.611.000	25.611.000	25.611.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH								4.856.150.468.912	4.983.821.482.002	5.656.685.360.839	

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun untuk mengakomodasi perkembangan dan ketidaksesuaian antara kondisi saat ini dengan asumsi kerangka keuangan daerah yang telah ditetapkan. Kondisi pasca COVID-19, ketegangan akibat konflik geopolitik berkepanjangan Rusia-Ukraina, serta dinamika perekonomian yang terjadi pada level nasional maupun regional mempengaruhi struktur keuangan pada APBD Tahun 2023. Di samping itu, kebutuhan untuk penyelesaian permasalahan aktual Kota Semarang, serta percepatan penyelesaian prioritas, terutama yang terkait dengan penuntasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan serta pengendalian banjir dan rob, menjadi alasan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap rencana program dan kegiatan di tahun 2023, dengan tetap memperhitungkan sisa waktu penyelesaian program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2023.

Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan hasil penyesuaian pada tahun berjalan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2023 yang ukuran kinerja dan penjabarannya berpangkal dari Perubahan RKPD Tahun 2023. Lebih lanjut, Perubahan RKPD Tahun 2023 juga disusun sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Semarang (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001